

# DAYA SAING INVESTASI KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA, 2005

## Persepsi Dunia Usaha

Peringkat 169 Kabupaten dan 59 Kota di Indonesia,  
Metodologi dan Temuan Utama



Kantor Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



The Asia Foundation



**KADIN INDONESIA**



**LPEM - FEUI**



**PRASETIYA MULYA**  
*business school*

**The Jakarta Post**

**Bisnis Indonesia**

**SUARA PEMBARUAN**

## Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

KPPOD didirikan oleh tiga unsur pendiri yakni Pelaku Usaha (KADIN-Indonesia), Lembaga Penelitian (LPEM-FEUI, CSIS, dan Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya), serta Media Masa (Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, dan Suara Pembaharuan) pada tanggal 1 Maret 2001. Bentuk hukum KPPOD sebagai Yayasan diperoleh pada tanggal 25 Mei 2001 dan dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Juli 2001.

Visi KPPOD adalah ikut mewujudkan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat dengan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif di seluruh Nusantara. Visi tersebut dijabarkan dalam pernyataan Misi KPPOD yaitu; menganalisa, menilai dan memberikan masukan bagi kebijakan dan praktek Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah bagi pembangunan ekonomi bangsa.

Dalam melaksanakan misi tersebut, KPPOD melakukan tiga kategori aktivitas yaitu Penelitian, Sosialisasi/Advokasi, dan peningkatan kapasitas Pemda dalam hal Otonomi Daerah. Untuk kegiatan Penelitian terdapat tiga jenis kegiatan:

- 1) Kajian lebih dari 1.500 Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah yang diterbitkan oleh lebih dari 200 Kabupaten/Kota;
- 2) Penelitian tahunan "Peningkatan Daya Saing Investasi di lebih dari 200 Kabupaten/Kota di Indonesia;

Untuk kegiatan Sosialisasi/Advokasi masalah Otonomi Daerah, terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan KPPOD. Aktivitas tersebut diantaranya:

- 1) Menerbitkan Newsletter dua bulanan yang didistribusikan ke kalangan pemerintahan baik pusat maupun daerah, lembaga-lembaga usaha, dan jejaring KPPOD di seluruh Indonesia.
- 2) Sosialisasi hasil penelitian "Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota" melalui konferensi pers, talk show radio dan televisi yang dipancarluaskan secara nasional, pemberian "KPPOD Investment Award" yang diserahkan oleh Menteri dan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Bupati/Walikota peraih peringkat terbaik dalam hal daya tarik investasi, dan penyelenggaraan lokakarya di lebih dari 30 Kabupaten/Kota di Indonesia.
- 3) Merekomendasikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pembatalan/revisi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang berpotensi berdampak negatif terhadap perekonomian daerah maupun nasional.
- 4) Melakukan konsultasi dengan sejumlah Kepala Daerah mengenai kebijakan perekonomian.
- 5) Pelayanan perpustakaan bagi semua pihak yang memerlukan hasil penelitian/kajian KPPOD.

Sedangkan untuk kegiatan peningkatan kapasitas Pemda, KPPOD melakukan pelatihan "Manajemen dan Promosi Investasi Daerah" untuk para pejabat pemerintah di lebih dari 15 daerah otonom di Indonesia.

Plaza Great River, 15<sup>th</sup> floor,  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 1, Jakarta 12950.  
Tel. : +62 (021) 522 6018, Fax. : +62 (021) 522 6027,  
<http://www.kppod.org>

# Tim Peneliti

---

## Koordinator Peneliti

P. Agung Pambudhi, MM

## Nara Sumber

Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro

Dr. Hadi Soesastro

Dr. Djisman Simanjuntak

## Anggota Peneliti

Sigit Murwito, S.Sos

Robert Endi Jaweng S.IP

Sri Mulyono, MSs

Firman Bakri Anom, SH

## Peneliti Lapangan

Daniel Collyn Damanik, S.E., MM.; Fernandus Sitepu, S.E.; Rela Ginting, S.Pt.;

Femmy, S.Sos; Herman Boedoyo, S.E.; Zamzami Abdul Karim, SE, MA; Yustinus Vena H, SS.;

Hendri Benyamin, SIP; Zufriady, SE., MM.; Nursia Sinaga, S.Sos; Yusep Hendarsyah, SIP;

Syamsul Ariefin, SE; Wasi Gede Puraka, S.Sos; Unang Atmaja, M.Sc; Dyah Ayu Sitoresmi;

A.Syafi'i M.Si; Muhammad Safi'l, M.Si; MG.Westrie Kekalih, M.Sc; Teguh Yuliano, ST;

Sunaryo Hadi Wibowo, S.Sos; Sukasmanto, M.Si; Aan Eko Widiarto, SH.,M.Hum;

Dr. Rafael Purtomo Samaji; Teguh Hadi Priyono, Se. M.Si; Dhoni Andhi Purwadi,S.Sos;

Taufik Hidayat SP.; Ira Verolina; Eddy Ratno Susanto, ST; Guna S.Lubin, S.Hut;

Purwadi, SE.; Mukati, SE.; Siti Amalia, SE, M.Si; Dr. Grevo Gerung;

Drs. Budiman Jaya A.A. Msi.; Halim, S.E., MS.; Drs.H.Bernard, MS.;

Ir. Andi Sukaena, M.Si; Drs. Jalaludi Mulbar, MS.; Dr. Arifin Bakti; Drs. Martinus Metboki;

Zet Ena. SE.; Ir. Achmad Rochani, MS.; Ir. Irman Amri

## Asisten Peneliti

Regina Retno Budiastuti, SH

F. Sundoko

Kurniawaty Septiany Musdar, SE

# Kata pengantar - KPPOD

---

Tahun 2005 ini untuk kelima kalinya KPPOD melakukan studi tahunan "Pemeringkatan Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia". Sejak sosialisasi pertama kalinya yang intensif dari hasil studi tahun 2001, respon masyarakat terhadap pemeringkatan tersebut cukup luas. Dunia usaha menunjukkan apresiasinya dengan menggunakan hasil studi sebagai salah satu sumber kebijakan investasinya; para akademisi memberikan berbagai masukan seputar pendekatan metodologis studi; bahkan berbagai institusi yang bereputasi internasional menggunakan berbagai temuan studi sebagai referensi mereka. Singkatnya dalam wacana iklim investasi daerah, hasil studi pemeringkatan tahunan tersebut menjadi salah satu referensi utama.

Bagi KPPOD, yang amat penting untuk diperhatikan adalah tanggapan Pemerintah Daerah (Pemda), sebagai pihak yang diharapkan merespon hasil studi dengan memperbaiki daya saing investasi daerahnya untuk berkompetisi dengan daerah-daerah lainnya, sebagaimana tujuan utama studi. Permintaan daerah untuk sosialisasi hasil studi di daerahnya, pembentukan tim peningkatan iklim investasi di beberapa daerah, konsultasi Pemda dengan KPPOD untuk membahas kebijakan perekonomian daerah, permintaan daerah-daerah yang belum diperingkat untuk dimasukkan dalam sampel penelitian,

memberikan dorongan bagi KPPOD untuk terus melaksanakan kegiatan tersebut. Selain berbagai tanggapan positif tersebut, harus diakui ada berbagai kritik terhadap metodologi studi, utamanya menyangkut penentuan *benchmark* untuk perbandingan antar daerah. *Input-input* tersebut menghasilkan perubahan pilihan indikator, rumusan kuesioner, jumlah responden, dan cara penghitungan indeks peringkat daerah dalam studi tahun 2005 ini.

KPPOD tidak bermaksud menyatakan bahwa pemeringkatan tersebut telah berhasil mendorong perbaikan iklim investasi daerah. Namun KPPOD mencatat bahwa dalam lima tahun pelaksanaan otonomi daerah (otda), beberapa daerah telah mengupayakan perbaikan iklim investasi daerahnya secara cukup progresif. Implementasi OSS (*One Stop Service*) untuk menjamin kepastian pelayanan perijinan usaha; forum *stakeholder* di beberapa daerah sebagai awal terlembaganya *public private partnership* yang tidak saja untuk kepentingan penyusunan perencanaan strategis, namun juga sebagai *action oriented forum* untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait pembangunan ekonomi daerah; efisiensi penggunaan APBD yang menghemat anggaran daerah sehingga dapat dialokasikan untuk memperluas program pengembangan ekonomi daerah, merupakan beberapa contoh *best practice* daerah. Dalam

pandangan KPPOD, berbagai hal positif tersebut merupakan hasil dari upaya berbagai pihak untuk penciptaan iklim investasi daerah yang kondusif.

Selain hal-hal positif yang telah dilakukan Pemda, KPPOD juga mencatat berbagai hal distorsif terhadap iklim investasi daerah. Studi ini menemukan bahwa masih terdapat kebijakan resmi Pemda tentang berbagai pungutan daerah yang tidak relevan, pungutan pungutan ilegal, dan gangguan keamanan sebagai contoh negatif iklim investasi daerah. Studi ini juga mendapatkan penegasan tentang pentingnya peran Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dalam menciptakan iklim investasi yang baik di daerah.

Selain temuan-temuan spesifik tersebut, studi ini menunjukkan adanya pergeseran derajat penting tidaknya indikator-indikator pemeringkatan terhadap daya saing investasi daerah. Pergeseran tersebut mengindikasikan adanya perubahan iklim investasi daerah, yang dapat diinterpretasikan positif maupun negatif. Secara detail, hal hal tersebut dapat disimak dalam laporan ini.

Sebagai bagian dari upaya besar untuk perbaikan iklim investasi daerah, studi ini merupakan suatu proses yang harus selalu disesuaikan dengan dinamika ekonomi Kabupaten/Kota yang menjadi obyek

penelitian ini. Kelangsungan dari studi ini akan sangat tergantung pada manfaat yang didapat dari hasil studi: bagi Pemerintah, Pemda, Dunia Usaha, yang ujungnya bagi kepentingan dinamika aktivitas perekonomian daerah dan nasional.

Studi tahunan yang secara konsisten sudah berlangsung selama lima tahun ini hanya mungkin terlaksana dengan adanya dukungan berbagai pihak. Para Peneliti dan *Research Associates* KPPOD, para Enumerator, dan para Responden penelitian adalah pihak pihak yang amat berjasa dalam penyusunan desain penelitian dan pelaksanaan survei lapangan. KPPOD juga amat menghargai peran Kadin Indonesia, mitra KPPOD untuk mengenali realitas dunia usaha.

Ucapan terimakasih juga kepada The Asia Foundation dan USAID yang terus menerus mendukung aktivitas studi ini baik dalam hal dana maupun pemikiran-pemikirannya. Demikian juga ucapan terimakasih kami kepada pemerintah pusat, khususnya Departemen Dalam Negeri dan Pemda Pemda yang bersedia mendukung kelangsungan kegiatan ini. KPPOD tidak akan mampu melaksanakan tugas besar ini tanpa dukungan para pihak tersebut, yang meyakini manfaat kegiatan ini.

Koordinator Penelitian

**P. Agung Pambudhi**

# Kata pengantar - *The Asia Foundation*

---

Otonomi daerah dimaksudkan untuk mewujudkan reformasi pemerintahan yang sekaligus ditujukan untuk mendukung proses pertumbuhan ekonomi daerah. Meski demikian, dalam 5 tahun pelaksanaannya, proses desentralisasi ini banyak mengalami kendala yang besar. Banyak pemerintah daerah yang tidak konsisten, antara tujuan pembangunan daerah dengan realitas kebijakan serta pelaksanaannya di tingkat lapangan.

Hal ini terbukti dengan adanya keluhan para pelaku usaha mengenai peningkatan jumlah dan besarnya pungutan, berbagai kasus korupsi, dan munculnya berbagai peraturan daerah yang menghambat dunia usaha. Tentu saja hal ini bertentangan dengan semangat memangkas proses birokrasi yang harus ditempuh ketika pelaku usaha ingin berhubungan langsung dengan pemerintah daerah ketika mereka membuka usaha baru. Persoalan ini masih ditambah lagi dengan adanya masalah kurangnya fasilitasi infrastruktur dan dinamika sosial, politik, budaya yang seringkali justru mematikan keinginan investor untuk berusaha.

Memang tidak dipungkiri pula beberapa pemerintah daerah yang aktif merespon tujuan di atas dengan menciptakan banyak inovasi, dan memberikan berbagai fasilitasi untuk merangsang pelaku usaha menanamkan investasi di daerah mereka. Seperti yang

ditunjukkan oleh Pemda Kabupaten Gianyar yang merupakan salah satu kabupaten pertama di Indonesia yang mendirikan Pusat Layanan Perijinan Terpadu. Inisiatif ini juga diikuti oleh usaha-usaha lain untuk meningkatkan citra pemerintah yang mengedepankan keamanan dan inovasi daerah, seperti halnya Pemerintah Kota Solo yang memberikan fasilitas perijinan yang gratis kepada pelaku usaha skala kecil yang baru memulai usahanya.

Berbagai respon inilah yang ingin dilihat dari Studi Peningkatan Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPPOD setiap tahun, yang bertujuan untuk melihat daya tarik investasi tiap-tiap daerah di Indonesia. Studi ini tidak hanya melihat aspek peraturan ataupun informasi ekonomi daerah. KPPOD juga melibatkan partisipasi pelaku usaha melalui persepsi mereka untuk menilai lima faktor utama daya tarik investasi, yakni Kelembagaan; Tenaga Kerja; Keamanan, Sosial dan Budaya; Ekonomi Daerah; dan Infrastruktur Fisik.

Survey ini ditujukan untuk mendorong kompetisi antar pemerintah daerah untuk meningkatkan usaha-usaha mereka dalam menciptakan lingkungan untuk investasi, penciptaan lapangan kerja dan pemberantasan korupsi. Untuk tujuan ini pula, KPPOD membagi informasi yang mereka dapatkan kepada pelaku usaha sebagai bahan

dasar untuk memutuskan dimana mereka akan berusaha.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Asia Foundation untuk mendukung perbaikan iklim usaha di Indonesia. Sejak tahun 1996, Asia Foundation telah bekerjasama dengan pengusaha dan pemerintah daerah untuk mengurangi hambatan perdagangan dan investasi. Beberapa program yang Asia Foundation laksanakan diantaranya: peningkatan kualitas layanan perijinan usaha, memfasilitasi pembuatan peraturan dengan partisipasi masyarakat, dan mendukung asosiasi usaha kecil dan menengah untuk melakukan advokasi kebijakan usaha yang lebih baik.

Asia Foundation menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada KPPOD Indonesia, secara khusus kepada Bpk P. Agung Pambudhi dan Tim Peneliti Studi Pemingkatan Daya Saing Investasi Kabupaten/ Kota 2005 yang telah mendedikasikan waktu dan pikirannya selama lima tahun berturut-

turut untuk menghasilkan studi pemingkatan ini. Asia Foundation juga menyampaikan terima kasih kepada Para Pelaku Usaha didaerah yang menjadi subjek pemingkatan ini, serta terima kasih secara khusus pada *U.S. Agency for Internasional Development (USAID)* atas dukungan dana untuk program ini.

Bagian yang terpenting dalam survei pemingkatan ini adalah memberikan penghargaan khusus kepada pemda yang melakukan yang inovasi, memberikan catatan kepada pemda yang tidak sejalan dengan tujuan diatas, dan akhirnya membagikan seluruh informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan dasar untuk mengambil kebijakan dan strategi berikutnya. Kami berharap melalui kerja-kerja KPPOD Indonesia, Indonesia menjadi semakin terpacu untuk menjadikan negara ini sebagai negara yang menarik bagi investor dan meningkatkan kemakmuran.

*Director for Economic Programs*  
The Asia Foundation

**Liesbet Steer**

# Daftar Isi

---

<b>Tim Peneliti</b>	iii
<b>Kata Pengantar - KPPOD</b>	v
<b>Kata Pengantar - The Asia Foundation</b>	vii
<b>Daftar Isi</b>	ix
<b>Daftar Box</b>	x
<b>Daftar Gambar</b>	xi
<b>Daftar Tabel</b>	xii
<b>Daftar Lampiran</b>	xiii
<b>Bab I. Pendahuluan</b>	1
A. PENDAHULUAN	1
B. TUJUAN PENELITIAN	2
C. SIGNIFIKANSI PENELITIAN	3
<b>Bab II. Dasar Pemikiran</b>	3
<b>Bab III. Rangkuman Hasil Penelitian</b>	5
A. FAKTOR; VARIABEL; INDIKATOR PEMERINGKATAN	5
B. BOBOT FAKTOR, VARIABEL DAN INDIKATOR PEMERINGKATAN	6
C. HASIL STUDI PEMERINGKATAN DAYA SAING INVESTASI 228 KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2205	9
1. Peringkat Umum	9
2. Peringkat Faktor Kelembagaan	12
3. Peringkat Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya	21
4. Peringkat Faktor Ekonomi Daerah	24
5. Peringkat Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas	28
6. Peringkat Faktor Infrastruktur Fisik	32
<b>Bab IV. Penutup</b>	37
A. TEMUAN	37
B. SARAN-SARAN	41
<b>Lampiran</b>	43



# Daftar Box

---

Kepemimpinan Kepala Daerah	14
Peraturan Daerah	15
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Kebijakan	16
Perizinan Usaha	17
Penyimpangan Dalam Perizinan Usaha	18
Pungutan Tidak Resmi	20
Kondisi Keamanan Daerah-daerah di Indonesia	23
Hubungan Eksekutif - Legislatif	23
Informasi Potensi Investasi Daerah	27
Peta Masalah Ketenaga-kerjaan di Era Otonomi	31
Kondisi Ketenaga-listrikan	35

# Daftar Gambar

---

Diagram 1	: Hirarki Faktor dan Variabel Pemeringkatan	5
Diagram 2	: Bobot Faktor Pemeringkatan	6
Diagram 3	: Faktor Kelembagaan	7
Diagram 4	: Bobot Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya	7
Diagram 5	: Bobot Faktor Ekonomi Daerah	8
Diagram 6	: Bobot Faktor Tenaga Kerja	8
Diagram 7	: Bobot Faktor Infrastruktur Fisik	9
Grafik 1.	: Nilai Rata-rata Daya Saing Investasi Kabupaten/kota	10
Grafik 2.1	: Kelompok Peringkat Kota dan Kabupaten Berdasarkan Seluruh Faktor (Umum)	10
Grafik 2.2	: Nilai Rata-rata Kategori Peringkat Umum	10
Grafik 3.1	: Kelompok Peringkat Kota dan Kabupaten Berdasarkan Faktor Kelembagaan	12
Grafik 3.2	: Nilai Rata-rata Berdasarkan Faktor Kelembagaan	12
Grafik 4.1	: Kelompok Peringkat Kota dan Kabupaten Berdasarkan Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya	21
Grafik 4.2	: Nilai Rata-rata Berdasarkan Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya	21
Grafik 5.1	: Kelompok Peringkat Kota dan Kabupaten Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah	24
Grafik 5.2	: Nilai Rata-rata Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah	24
Grafik 6.1	: Kelompok Peringkat Kota dan Kabupaten Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja	28
Grafik 6.2	: Nilai Rata-rata Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja	28
Grafik 7.1	: Kelompok Peringkat Kota dan Kabupaten Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik	32
Grafik 7.2	: Nilai Rata-rata Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik	32

# Daftar Tabel

---

Tabel 1.1 : Peringkat "A" Berdasarkan Seluruh Faktor (Umum)	11
Tabel 1.2 : Peringkat "E" Berdasarkan Seluruh Faktor (Umum)	12
Tabel 2.1 : Peringkat "A" Berdasarkan Faktor Kelembagaan	13
Tabel 2.2 : Peringkat "E" Berdasarkan Faktor Kelembagaan	14
Tabel 3.1 : Peringkat "A" Berdasarkan Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya	21
Tabel 3.2 : Peringkat "E" Berdasarkan Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya	22
Tabel 4.1 : Peringkat "A" Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah	25
Tabel 4.2 : Peringkat "E" Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah	26
Tabel 5.1 : Peringkat "A" Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja	29
Tabel 5.2 : Peringkat "E" Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja	30
Tabel 6.1 : Peringkat "A" Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik	33
Tabel 6.2 : Peringkat "E" Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik	34

# Daftar Lampiran

---

## **PERINGKAT DAERAH**

Lampiran 1.1: Peringkat 59 Kota Berdasarkan Seluruh Faktor (Umum)	43
Lampiran 1.2: Peringkat 169 Kabupaten Berdasarkan Seluruh Faktor (Umum)	44
Lampiran 2.1: Peringkat 59 Kota Berdasarkan Faktor Kelembagaan	46
Lampiran 2.2: Peringkat 169 Kabupaten Berdasarkan Faktor Kelembagaan	47
Lampiran 3.1: Peringkat 59 Kota Berdasarkan Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya	49
Lampiran 3.2: Peringkat 169 Kabupaten Berdasarkan Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya	50
Lampiran 4.1: Peringkat 59 Kota Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah	52
Lampiran 4.2: Peringkat 169 Kabupaten Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah	53
Lampiran 5.1: Peringkat 59 Kota Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja	55
Lampiran 5.2: Peringkat 169 Kabupaten Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja	56
Lampiran 6.1: Peringkat 59 Kota Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik	58
Lampiran 6.2: Peringkat 169 Kabupaten Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik	59

## **PROFIL DAERAH**

Lampiran 7 : Profil Daya Saing Investasi 59 Kota dan 169 Kabupaten di Indonesia	61
---	----

## **BOBOT PEMERINGKAT**

Lampiran 8 : Bobot Faktor - Variabel - Indikator Pemeringkatan Daya Saing Investasi Daerah Tahun 2005	119
Lampiran 9 : Perbandingan Bobot Faktor - Variabel - Indikator Pemeringkatan Tahun 2002 - 2005	120
Lampiran 10 : Perubahan Bobot Faktor - Variabel - Indikator Pemeringkatan Tahun 2002 - 2005	121
Lampiran 11 : Metodologi	123
Lampiran 12 : Formula Penghitungan Bobot	136

# I. Pendahuluan

---

## A. PENDAHULUAN

Iklim investasi yang baik akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, yakni melalui investasi yang didukung oleh produktivitas yang tinggi. Investasi akan memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Oleh karenanya, memperbaiki iklim investasi merupakan suatu tugas yang penting bagi setiap pemerintah, terutama negara-negara yang memiliki daya saing investasi yang rendah seperti Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi iklim investasi di Indonesia dinilai masih memprihatinkan. Beberapa hasil survei lembaga internasional, memperlihatkan bahwa posisi peringkat daya saing investasi Indonesia masih berada pada kelompok peringkat bawah dan selalu berada di bawah negara-negara di sekitar kita, seperti Thailand dan Malaysia. Peringkat ini juga cenderung mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini menunjukkan seriusnya persoalan iklim investasi di Indonesia yang harus segera disikapi.

Perbaikan iklim investasi bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat, namun seluruh lapisan pemerintahan dan masyarakat secara umum, agar perekonomian Indonesia segera pulih dari krisis yang berkepanjangan. Kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2001 telah mengamanatkan kepada

pemerintah daerah untuk turut berperan besar dalam upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif di daerahnya. Dengan kewenangan di-bidang pemerintahan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah, telah memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih leluasa dalam menciptakan iklim investasi di daerahnya masing-masing. Proses pengambilan kebijakan pembangunan yang sebelumnya lebih banyak dikendalikan oleh pemerintah pusat, selanjutnya menjadi lebih dekat pada masyarakat di daerah. Kesiapan dan kemampuan daerah dalam berkreasi, merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan di daerah termasuk dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Untuk turut berperan dalam upaya menciptakan dan memperbaiki iklim investasi yang kondusif dan mendorong berbagai daerah untuk bersaing dalam memperbaiki iklim investasi, KPPOD melakukan Pemeringkatan Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun sejak tahun 2001. Pada tahun 2005, KPPOD kembali melakukan kegiatan ini. Selama lima tahun pelaksanaannya, sejumlah temuan telah dihasilkan dalam studi ini. Hasil studi ini banyak digunakan oleh para pihak dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan daya saing investasi, terutama dalam menentukan lokasi investasi. Adalah tantangan bagi KPPOD untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil

penelitian ini. Untuk itu tim peneliti KPPOD terus berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan hasil penelitian setiap tahunnya. Perbaikan yang dilakukan mencakup kualitas data input, penambahan jumlah daerah yang diperingkat, dan perbaikan indikator maupun penambahan indikator serta hal-hal lainnya terkait dengan instrumen dan mekanisme penelitian. Pada tahun 2005 ini, sejumlah perbaikan mencakup pembobotan faktor, variabel, dan indikator, serta penambahan sejumlah indikator baru. Demikian juga halnya dengan daerah yang diperingkat juga mengalami penambahan.

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Ada dua hal yang hendak dicapai dari kegiatan pemeringkatan ini. Capaian pertama adalah untuk mendorong kompetisi antar daerah dalam meningkatkan daya saing investasinya. Capaian kedua adalah memberikan referensi bagi dunia usaha dalam keputusan berinvestasi. Hasil studi ini

diharapkan dapat membantu daerah-daerah dalam melihat daya saingnya terhadap investasi ditinjau dari berbagai aspek berdasarkan persepsi dunia usaha. Adapun hasil utama dari studi ini adalah:

1. Peringkat daya saing investasi daerah terhadap investasi berdasarkan persepsi dunia usaha;
2. Peta persoalan terkait dengan iklim investasi di berbagai daerah dan faktor-faktor yang menyebabkannya.

## **C. SIGNIFIKANSI PENELITIAN**

1. Dapat membantu daerah-daerah dalam melihat daya tariknya terhadap investasi ditinjau dari berbagai aspek;
2. Sebagai suatu panduan bagi kalangan dunia usaha atau investor dalam membuat keputusan berinvestasi;
3. Mendorong kompetisi antar daerah kabupaten/kota dalam meningkatkan daya saing investasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

## II. Dasar Pemikiran

---

Daya saing investasi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN dan dunia, pada tahun-tahun terakhir selalu berada pada posisi di bawah. Berdasarkan *World Economic Forum* (WEF), peringkat daya saing Indonesia pada tahun 2004 berada pada posisi ke 69 dari 104 negara. Posisi tersebut memang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2003 yang berada di urutan ke 72, tetapi masih tetap jauh lebih rendah dibanding Malaysia dan Thailand yang berada pada posisi 31 dan 34. Sementara hasil survei *International Institute for Management Development* (IMD), tentang peringkat daya saing global, memperlihatkan peringkat Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berturut-turut sejak tahun 2001-2004, Indonesia berada pada urutan 46, 47, 57 dan 58. Pada tahun 2005, peringkat ini turun ke peringkat 59 dari 60 negara di dunia yang diteliti, satu peringkat lebih baik dibandingkan Venezuela yang berada di peringkat 60. Peringkat tersebut masih jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia yang berada di urutan 28, dan Thailand 27.

Survei yang berbeda yang dilakukan oleh lembaga survei internasional lainnya, Indonesia pada tahun 2005 berada pada peringkat 60, jauh lebih rendah dari Malaysia (26) dan Thailand (31). Indikator-indikator yang digunakan dalam survei tersebut adalah makro ekonomi, korupsi, penegakan hukum, dan pajak. Selain faktor-faktor tersebut,

masalah buruh, infrastruktur, perijinan, kepabeanaan, dan keamanan dinilai masih terus membebani investasi di Indonesia. Dilihat dari *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR), yang menunjukkan besarnya investasi yang diperlukan untuk memperoleh satu persen pertumbuhan PDB, ICOR Indonesia masih berkisar 4-5%, sementara ICOR negara-negara tetangga hanya 2-3%. Hal ini memperlihatkan bahwa daya saing investasi Indonesia masih lemah dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Sejalan dengan kondisi iklim investasi nasional yang memburuk, otonomi daerah diterapkan mulai tahun 2001. Selama 5 tahun pelaksanaan otonomi daerah telah terjadi beberapa perubahan dalam tata pemerintahan di tingkat lokal. Banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk pembenahan, mulai dari tata kelembagaan pemerintahan, perencanaan perekonomian daerah dan kemasyarakatan serta lain sebagainya. Di sisi lain, dengan berbagai alasan tidak sedikit justru dijumpai praktik-praktik negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang justru mengurangi daya saing investasi daerah. Keterbatasan pemda dalam melakukan pembiayaan pembangunan perekonomian daerah, sering dijadikan alasan mengeluarkan kebijakan yang justru kontraproduktif terhadap penciptaan daya saing investasi. Padahal dalam konteks pembangunan regional, investasi memegang

peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemda harus berupaya keras mendorong agar sebanyak mungkin investasi dapat masuk ke daerahnya. Yang menjadi persoalan adalah investasi tidak selalu datang ke setiap daerah. Hanya daerah-daerah yang memiliki daya saing investasi yang baik yang akan mendapatkan peluang investasi yang lebih besar. Di era otonomi daerah, daerah-daerah harus bersaing dengan daerah lainnya untuk menarik investasi.

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Pelaku utama investasi adalah kalangan dunia usaha. Dengan demikian untuk mengetahui faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi daya saing investasi suatu daerah, penelitian ini mempertimbangkan persepsi dunia usaha dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi di suatu daerah. Persepsi ini juga perlu dipahami oleh pemda. Sama halnya ketika pemda perlu mengetahui bagaimana kerangka berpikir investor dalam menentukan pilihan lokasi untuk investasinya.

Dari berbagai literatur dan pendapat para pelaku usaha, faktor ekonomi, infrastruktur, politik dan kelembagaan, sosial, dan budaya diyakini merupakan beberapa faktor pembentuk daya saing investasi suatu negara atau daerah. Secara umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN)

maupun penanaman modal asing (PMA) membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal. Iklim investasi daerah juga dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi daerah yang bersangkutan.

Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya saing terhadap investasi salah satunya bergantung kepada kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha, serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal yang juga penting untuk diperhatikan dalam upaya menarik investor, selain makroekonomi yang kondusif, juga adanya pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam artian luas. Kondisi inilah yang mampu menggerakkan sektor swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda ekonomi.

Bagi investor, informasi mengenai potensi investasi dan iklim investasi daerah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan lokasi untuk investasi. Tetapi hal ini tidak cukup sampai sebatas ketersediaan informasi saja. Diperlukan rangkaian upaya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai iklim investasi di berbagai daerah, untuk membantu para investor dalam membuat keputusan lokasi investasinya. Pemeringkatan daya saing investasi daerah yang dilakukan oleh KPPOD salah satunya adalah untuk menjawab permasalahan di atas, disamping juga untuk membantu pemerintah daerah dalam melihat daya saingnya terhadap investasi dibandingkan dengan daerah lainnya



### III. Rangkuman Hasil Penelitian

#### A. FAKTOR; VARIABEL; INDIKATOR PEMERINGKATAN.

Untuk tujuan memperbaiki hasil penelitian ini, pada Pemerinkatan tahun 2005, KPPOD melakukan sejumlah revisi terhadap variabel dan indikator yang digunakan untuk menilai daya saing investasi suatu daerah. Revisi yang dilakukan termasuk penambahan sejumlah indikator, penyempurnaan pengelompokan indikator ke dalam variabel-variabel-nya, serta menghilangkan sejumlah indikator yang dinilai kurang berpengaruh terhadap daya saing investasi suatu daerah, atau karena tumpang tindih dengan indikator lainnya. Penyempurnaan dan revisi variabel dan indikator pemerinkatan melibatkan sejumlah narasumber dalam suatu forum *Focused Group Discusi3n (FGD)*. Peserta *FGD* terdiri dari kalangan pelaku usaha berbagai sektor (a.l. Perdagangan Jasa, Manufaktur, Perkebunan,

Pertambangan, dan sebagainya), dan sejumlah akademisi/pakar ekonomi. Selanjutnya indikator-indikator yang digunakan untuk pemerinkatan diputuskan oleh tim peneliti KPPOD.

Berdasarkan identifikasi tingkat dan elemen-elemen untuk tujuan pemerinkatan daya saing daerah Kabupaten/Kota terhadap investasi, dari pemahaman studi literatur, opini para pelaku usaha, masukan para ahli dan hasil pemerinkatan yang dilakukan KPPOD sebelumnya; variabel-variabel yang mempengaruhi daya saing investasi daerah dikelompokkan sama seperti tahun-tahun sebelumnya yakni kedalam 5 (lima) faktor, sebagai berikut: (1). Kelembagaan, (2). Keamanan Politik dan Sosial Budaya, (3). Ekonomi Daerah, (4). Tenaga Kerja, dan (5). Infrastruktur Fisik, seperti terlihat pada diagram 1: "Hirarki Faktor dan Variabel Pemerinkatan".

**Diagram 1**  
**Hirarki Faktor dan Variabel Pemerinkatan**



Masing-masing faktor dijabarkan dalam variabel-variabel yang secara keseluruhan berjumlah sama dengan jumlah variabel tahun sebelumnya, yakni sebanyak 14 variabel. Selanjutnya, setiap variabel dijabarkan lagi dalam indikator-indikator yang secara keseluruhan berjumlah 47 indikator (tahun sebelumnya 42 indikator). Perubahan variabel dan indikator tahun 2005 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada lampiran 10.

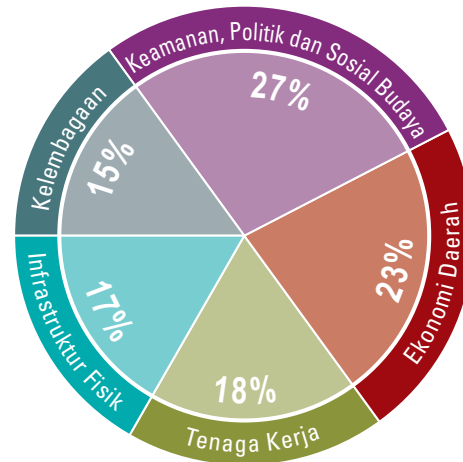
## B. BOBOT FAKTOR, VARIABEL DAN INDIKATOR PEMERINGKATAN

Konsekuensi dari perubahan variabel dan indikator yang digunakan untuk pemeringkatan adalah harus dilakukan pembobotan ulang terhadap faktor, variabel dan indikator-indikatornya. Pembobotan faktor, variabel dan indikator tetap menggunakan pendekatan *The Analytical Hierarchy Process* (AHP). Untuk tahun 2005 pembobotan faktor, variabel dan indikator seluruhnya dilakukan oleh narasumber dari daerah, yang merupakan para pelaku usaha. Hasil pembobotan faktor, variabel, indikator pemeringkatan adalah sebagai berikut:

### 1. Bobot Faktor Pemeringkatan

Pada pemeringkatan tahun 2005, jumlah faktor pemeringkatan sama seperti tahun sebelumnya yaitu sebanyak 5 faktor. Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya memiliki bobot terbesar dalam mempengaruhi daya saing investasi suatu daerah, yakni sebesar 27%. Kemudian disusul oleh Faktor Ekonomi Daerah dengan bobot sebesar 23%. Bobot Faktor Ekonomi Daerah ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 17%. Faktor Kelembagaan yang pada tahun 2002-2004 memiliki bobot terbesar (31%) untuk pemeringkatan tahun 2005 justru memiliki bobot terkecil dibandingkan dengan keempat faktor lainnya, yakni turun menjadi sebesar 15%. Hal ini tidak serta merta menunjukkan kondisi kelembagaan daerah-daerah di Indonesia setelah 5 tahun pelaksanaan otonomi daerah sudah mulai

**Diagram 2**  
**Bobot Faktor Pemeringkat**

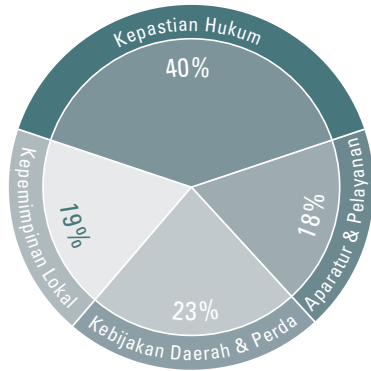


membalik, sehingga tidak lagi dipandang sebagai faktor yang terlalu penting dalam mempengaruhi daya saing investasi daerah. Hal ini bisa terjadi karena diluar dunia usaha sudah mulai apatis dengan kondisi kelembagaan pemerintah daerah yang hingga 5 tahun pelaksanaan otonomi daerah belum juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Selanjutnya perhatian dunia usaha beralih pada faktor-faktor yang lebih terukur, yakni ekonomi daerah, ketenagakerjaan, dan infrastruktur fisik. Pertimbangan lain juga disebabkan ketiga faktor ini memiliki bobot lebih besar dibandingkan dengan faktor kelembagaan. Yang menarik, bahwa sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan otonomi daerah Faktor Keamanan Politik Sosial Budaya masih menjadi perhatian utama bagi para pelaku usaha dan memiliki bobot pengaruh yang terbesar dibandingkan dengan ke-4 faktor lainnya.

### 2. Bobot Variabel dan Indikator untuk Faktor Kelembagaan

Faktor Kelembagaan memiliki bobot 15% dalam mempengaruhi daya saing investasi daerah. Dilihat dari bobot variabel-variabel yang tergabung dalam Faktor Kelembagaan, Variabel Kepastian Hukum masih memiliki bobot terbesar dalam membentuk daya saing investasi daerah, yakni dengan bobot sebesar 0.396 terhadap keseluruhan Faktor

**Diagram 3**  
**Faktor Kelembagaan**



**Kepastian Hukum**

- Konsistensi Peraturan
- Penegakan Keputusan Peradilan
- Kecepatan Aparat Keamanan
- Pungutan Liar di Luar Birokrasi

**Kebijakan Daerah dan Perda**

- Kejelasan Tarif
- Kejelasan Prosedur
- Proses Perumusan Perda
- Kebijakan Ketenagakerjaan

**Kepemimpinan Lokal**

- Kepemimpinan Kepala Daerah
- Inisiatif Kepala Daerah
- Hubungan Kepala Daerah dengan Pengusaha

**Aparatur dan Pelayanan**

- Respon pemda terhadap Permasalahan Dunia Usaha
- Birokrasi Pelayanan Dunia Usaha
- Informasi Potensi Ekonomi Daerah
- Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparat

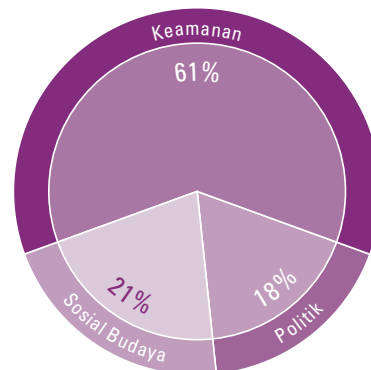
Kelembagaan (bobot lokal), atau sebesar 5.9% terhadap daya saing investasi daerah secara keseluruhan (bobot global). Variabel Kebijakan Daerah dan Peraturan Daerah (Perda) menduduki urutan kedua, yakni sebesar 23% (bobot lokal) dan terhadap daya saing investasi sebesar 3.4% (bobot global). Pada pemeringkatan tahun 2005 ini dimasukkan variabel baru, yakni Variabel Kepemimpinan Lokal. Variabel Kepemimpinan Lokal memiliki bobot yang cukup signifikan yakni sebesar 19% secara lokal, dan secara global sebesar 2.8%.

Dilihat dari bobot indikator-indikator dalam Faktor Kelembagaan, indikator yang paling besar mempengaruhi daya saing investasi adalah Indikator Konsistensi Peraturan (2.1%), disusul Indikator Pungutan Liar di Luar Birokrasi (1.8%) yang keduanya tergabung dalam Variabel Kepastian Hukum. Dari Variabel Kepemimpinan Lokal, Indikator Inisiatif Kepala Daerah memiliki bobot terbesar, yakni sebesar 1.3%.

**3. Bobot Variabel dan Indikator untuk Faktor Keamanan Politik Sosial Budaya**

Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya, merupakan faktor yang memiliki bobot terbesar dalam membentuk daya saing investasi daerah, yakni sebesar 27.4%. Pada faktor ini, Variabel Keamanan memiliki bobot terbesar yakni sebesar 61.2% bobot lokal (16.8% bobot global), disusul Variabel Sosial Budaya sebesar 21.2%, dan selanjutnya Variabel Politik sebesar 17.6%. Demikian juga indikator-indikator yang tergabung dalam Variabel Keamanan juga memiliki bobot terbesar, yakni indikator Kemanan Usaha memiliki bobot 8.2%, disusul indikator Keamanan Masyarakat sebesar 5.9%. Dalam Variabel Politik, Indikator Hubungan Eksekutif Legislatif memiliki bobot terbesar yakni sebesar 62.8% secara lokal dan 3% secara global.

**Diagram 4**  
**Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya**



**Keamanan**

- Kemanan Usaha
- Keamanan Masyarakat
- Dampak Unjuk Rasa

**Politik**

- Hubungan Eksekutif-Legislatif
- Hubungan Antar Partai Politik

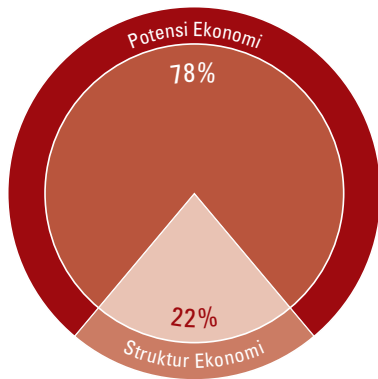
**Sosial Budaya**

- Keterbukaan Masyarakat terhadap Dunia Usaha
- Keterbukaan Masyarakat terhadap Tenaga Kerja dari Luar Daerah
- Etos Kerja Masyarakat
- Kemudahan Memperoleh Hak Penguasaan Tanah
- Potensi Konflik di Masyarakat

**4. Bobot Variabel dan Indikator untuk Faktor Ekonomi Daerah**

Hasil pembobotan Faktor Ekonomi Daerah, dalam pemeringkatan tahun 2005 adalah sebesar 22.6%. Variabel Potensi Ekonomi

**Diagram 5**  
**Faktor Ekonomi Daerah**



- **Patensi Ekonomi**
  - PDRB Perkapita
  - Pertumbuhan Ekonomi
  - Indeks Kemahalan Konstruksi
- **Struktur Ekonomi**
  - Pertumbuhan Sektor Primer
  - Pertumbuhan Sektor Sekunder
  - Pertumbuhan Sektor Tersier

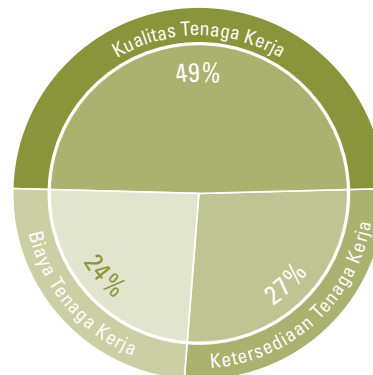
merupakan variabel yang memiliki bobot terbesar dibandingkan seluruh variabel (14 variabel) pemeringkatan, yakni sebesar 17.5% secara global, dan dibandingkan dengan Variabel Struktur Ekonomi dalam Faktor Ekonomi jauh lebih besar yakni sebesar 77.5%. Indikator PDRB Perkapita, merupakan indikator yang memiliki bobot terbesar secara global yakni sebesar 8.4%, lebih tinggi dibandingkan dengan Indikator Keamanan Usaha (8.2% secara global) dan Indikator Keamanan Masyarakat (5.9%) yang keduanya berada di Faktor Keamanan Politik Sosial Budaya. Sementara Indikator Pertumbuhan Ekonomi secara global memiliki bobot terbesar ketiga secara global yakni sebesar 6%. Besarnya bobot indikator-indikator ekonomi daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2005, para pelaku usaha menaruh perhatian yang besar pada indikator-indikator ekonomi dibandingkan dengan indikator-indikator yang tergabung dalam *policy variabel* (Kelembagaan).

### 5. Bobot Variabel dan Indikator untuk Faktor Tenaga Kerja

Dalam pemeringkatan tahun 2005, Faktor Tenaga Kerja juga mendapat perhatian yang besar dari kalangan investor, dengan bobot

sebesar 18.3% dalam membentuk daya saing investasi daerah. Faktor ini terdiri dari 3 Variabel, yakni Ketersediaan Tenaga Kerja, Kualitas Tenaga Kerja, dan Biaya Tenaga Kerja. Yang cukup menarik adalah bahwa Variabel Biaya Tenaga Kerja, yang selama ini banyak dikeluhkan oleh para pelaku usaha, justru memiliki bobot terkecil dibandingkan dengan dua variabel lainnya, yakni hanya sebesar 24.1%. Sementara Variabel Kualitas Tenaga Kerja, khususnya Indikator Produktivitas Tenaga Kerja memperoleh bobot yang cukup besar yakni sebesar 5.9% secara global. Terlihat bahwa perhatian utama para pelaku usaha terletak pada kualitas tenaga kerja, dalam hal ini produktivitas tenaga kerja dibandingkan dengan biaya tenaga kerja. Para pelaku usaha rela membayar lebih besar biaya tenaga kerja, jika tenaga kerja memiliki kualitas dan produktivitas yang baik.

**Diagram 6**  
**Faktor Tenaga Kerja**



- **Ketersediaan Tenaga Kerja**
  - Tenaga Kerja Usia Produktif
  - Tenaga Kerja Pencari Kerja
- **Kualitas Tenaga Kerja**
  - Produktivitas Tenaga Kerja
  - Pendidikan Tenaga Kerja
- **Biaya Tenaga Kerja**
  - Biaya Tenaga Kerja Formal
  - Biaya Tenaga Kerja Aktual

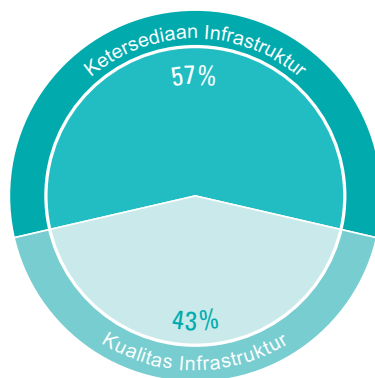
### 6. Bobot Variabel dan Indikator untuk Faktor Infrastruktur Fisik

Bobot Faktor Infrastruktur Fisik, yang terdiri dari dua variabel (Ketersediaan Infrastruktur Fisik dan Kualitas Infrastruktur Fisik), dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan dari 13% pada tahun 2002-

2004, menjadi sebesar 16.7% pada tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi pada infrastruktur fisik di Indonesia mendapat perhatian yang cukup serius bagi kalangan investor. Tampaknya masalah krisis listrik yang dialami oleh Indonesia dalam tahun belakangan ini, juga dirasakan cukup mengganggu kalangan dunia usaha. Hal ini terlihat dari Indikator Ketersediaan Listrik yang mendapat bobot terbesar yakni 2.9% secara global, disusul dengan Indikator Ketersediaan Jalan Darat atau alternatifnya yakni sebesar 2.5% secara global. Indikator Kualitas Jalan Darat dan Kualitas Tegangan Listrik juga mendapat bobot yang cukup besar yakni masing-masing sebesar 2.1% secara global.

Perubahan indikator yang digunakan untuk pemeringkatan tahun 2005 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya beserta bobotnya, dapat dilihat pada bagian lampiran laporan ini.

**Diagram 7**  
**Faktor Infrastruktur Fisik**



- |  |   |
|--|---|
| <p><b>■ Ketersediaan Infrastruktur Fisik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ketersediaan Jalan Darat</li> <li>● Ketersediaan Pelabuhan Laut</li> <li>● Ketersediaan Pelabuhan Udara</li> <li>● Ketersediaan Sambungan Telp.</li> <li>● Ketersediaan Pasokan Listrik</li> </ul> | <p><b>■ Kualitas Infrastruktur Fisik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kualitas Jalan Darat</li> <li>● Kualitas Pelabuhan Laut</li> <li>● Kualitas Pelabuhan Udara</li> <li>● Kualitas Sambungan Telp.</li> <li>● Kualitas Tegangan Listrik</li> </ul> |
|--|---|

### C. HASIL STUDI PEMERINGKATAN DAYA SAING INVESTASI 228 KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2005

Dari pemeringkatan tahun 2001 hingga tahun 2004, jumlah daerah yang diperingkatkan terus bertambah, dari 90

daerah (68 kabupaten dan 22 kota), 134 daerah (97 Kabupaten dan 37 Kota), 200 daerah (156 Kabupaten dan 44 Kota) dan 214 daerah (161 kabupaten dan 53 kota). Untuk tahun 2005, jumlah ini bertambah menjadi 228 daerah (169 kabupaten dan 59 kota). Perubahan ini juga diikuti dengan perubahan metodologis pada indikator-indikator yang digunakan untuk menilai daya saing investasi dan bobot yang diberikan kepada setiap faktor, variabel, dan indikator. Karena alasan ini, hasil pemeringkatan tahun 2005 tidak dapat dibandingkan dengan hasil pemeringkatan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2005, hasil pemeringkatan dipaparkan secara terpisah antara daerah kabupaten dan daerah kota. Pemisahan hasil pemeringkatan antara daerah kota dan kabupaten semata-mata untuk mempermudah analisis perbedaan hasil yang dicapai oleh kedua kelompok daerah ini. Karenanya, pemisahan ini tidak mempengaruhi asumsi-asumsi dasar dalam menilai daya saing investasi antara kabupaten dan kota.

Peringkat Daya Saing Investasi kabupaten dan kota, secara umum maupun berdasarkan tiap faktor, dikelompokkan menjadi 5 kategori. Secara berurutan peringkat tertinggi adalah kategori A, dan berurutan B, C, D, hingga terendah kategori E. Cara pengelompokkan peringkat dapat dilihat pada lampiran 1.

#### 1. Peringkat Umum

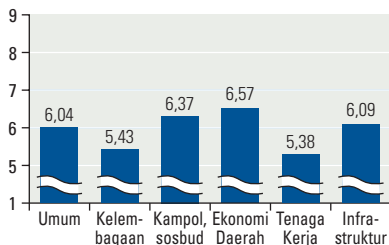
Peringkat Umum, atau total index daya saing investasi, diperoleh dari penjumlahan seluruh skor indikator (47 indikator) yang digunakan untuk menilai daya saing investasi daerah merupakan tersebar ke dalam 14 variabel dan 5 faktor. Daerah-daerah yang memperoleh skor tinggi secara umum adalah daerah-daerah yang memperoleh skor tertinggi untuk indikator-indikator yang memiliki bobot yang besar. Skor setiap variabel, faktor dan skor umum (total) dibuat dalam skala 1, untuk skor terendah, sampai dengan 9, untuk skor tertinggi yang bisa diberikan kepada suatu daerah.

Hasil studi memperlihatkan perolehan skor rata-rata baik untuk kabupaten maupun kota

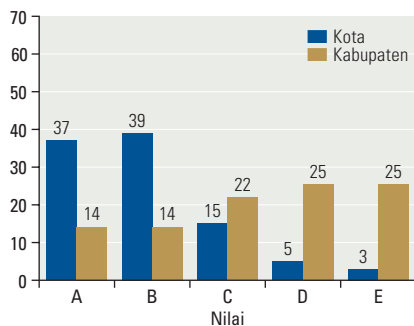
masih jauh dari nilai sempurna yakni sebesar 6.06 dan untuk rata-rata nilai terendah dan tertinggi (A dan E) berada dalam rentang antara 6.71 sampai dengan 5.32. Hasil ini menunjukkan bahwa indeks daya saing investasi kabupaten dan kota pada tahun 2005 ini masih cukup jauh dari nilai sempurna 9. Hal ini dapat diartikan bahwa secara keseluruhan daya tarik iklim investasi daerah-daerah di Indonesia masih tergolong sedang saja.

Rata-rata indeks daya saing investasi daerah kota sebesar 6.39, lebih tinggi dibandingkan indeks daya saing investasi daerah kabupaten (5.92). Hal ini menunjukkan bahwa persaingan diantara kelompok daerah kota lebih ketat dibandingkan dengan kelompok daerah kabupaten. Kecenderungan bahwa daerah perkotaan dan daerah yang berdekatan dengan kota, memiliki indeks daya saing investasi yang lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan (daerah kabupaten), menunjukkan terjadinya aglomerasi atau

**Grafik 1**  
**Nilai Rata-rata**  
**Daya Saing Investasi**  
**Kabupaten/kota**



**Grafik 2.1**  
**Kelompok Peringkat Kota**  
**dan Kabupaten Berdsarkan**  
**Seluruh Faktor (Umum)**  
**(dalam %)**

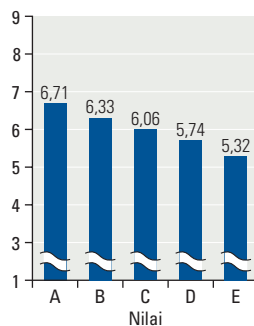


klustering daya saing investasi. Kota sebagai pusat kegiatan ekonomi dan kelengkapan infrastruktur pendukung, menjadi lebih menarik dibandingkan daerah

kabupaten, sebagaimana terlihat dari **Grafik 2.1** Dari 59 Kota yang diperingkat, 37% berhasil memperoleh peringkat A dan 39% berada pada peringkat B. Berbeda dari kota, dari 169 yang diperingkat, hanya 14% yang mendapat peringkat A dan 16% mendapat peringkat B. Sebaliknya, kota-kota yang memperoleh peringkat D dan E masing-masing hanya sebanyak 5% dan 3%. Sementara ada 25% dan 5% berturut-turut daerah kabupaten yang memperoleh peringkat D dan E. Hasil ini menunjukkan keunggulan daerah kota dan sekitar kota dalam hal daya saing terhadap investasi.

Secara teoritis, daerah dengan kombinasi faktor-faktor daya saing investasi yang baiklah yang berhasil berada dalam peringkat atas. Secara umum, studi ini memperlihatkan ada dua karakteristik dari daerah-daerah yang memiliki daya saing investasi yang tinggi. Pertama adalah, daerah-daerah dengan kondisi perekonomian yang baik, dan kedua adalah daerah-daerah dengan kondisi keamanan, politik, sosial dan budaya yang kondusif. Kondisi perekonomian daerah yang baik dan ditunjang oleh kondisi keamanan, politik, sosial budaya dan birokrasi yang ramah terhadap kegiatan usaha, akan menciptakan daya saing investasi daerah. Kondisi yang baik pada faktor-faktor tersebut akan semakin mempengaruhi daya saing investasi daerah jika didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang cukup dengan kualitas yang baik dan infrastruktur fisik pendukung kegiatan usaha yang memadai. Hal inilah yang diperlihatkan

**Grafik 2.2**  
**Nilai Rata-rata**  
**Kategori Peringkat**  
**Umum**



oleh daerah-daerah yang termasuk dalam peringkat A secara umum, dimana mereka memiliki rata-rata skor yang tinggi untuk masing-masing faktor, terutama untuk faktor yang memiliki bobot besar.

Karena Faktor Ekonomi Daerah memiliki bobot pengaruh yang besar (setelah Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya), wajar jika kemudian peringkat kota-kota lebih baik dibandingkan dengan kabupaten. Meski demikian, kelebihan kota secara umum juga terlihat dari Faktor Tenaga Kerja dan Infrastruktur Fisik yang

memiliki bobot yang lebih kecil. Dilihat dari Faktor Ekonomi, daerah kota dan daerah sekitar perkotaan cenderung memiliki basis ekonomi yang lebih baik jika dibandingkan dengan daerah kabupaten yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi. Penduduk perkotaan memiliki daya beli yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Hal ini dapat diukur dengan tingginya PDRB Perkapitanya. Daerah perkotaan juga memiliki sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha yang lebih baik dibandingkan daerah kabupaten. Ketersediaan sarana jalan, listrik dan telekomunikasi, akan memperlancar kegiatan usaha. Daerah kota juga mampu menyediakan tenaga kerja yang lebih berkualitas dibandingkan daerah kabupaten. Karena disamping sebagai pusat kegiatan ekonomi produktif, kota juga merupakan pusat kegiatan pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas tenaga kerjanya. Hal-hal tersebut merupakan faktor utama mengapa

daya saing investasi kota menjadi lebih baik dibandingkan dengan daerah kabupaten.

Sebagian besar daerah-daerah yang berada di peringkat A memiliki karakteristik sebagai daerah yang memiliki basis ekonomi yang kuat. Ada dua jenis basis ekonomi dari daerah-daerah yang berada pada peringkat A, yaitu daerah-daerah dengan basis ekonomi sumber daya bentukan dan ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam. Perekonomian daerah yang berbasis sumber daya bentukan berkembang karena adanya kegiatan ekonomi produktif yakni pada sektor sekunder (industrialisasi) dan sektor tersier. Untuk daerah kota, hal ini diperlihatkan oleh Kota Batam, Cilegon, Padang, Balikpapan, Denpasar, Tangerang dan lainnya. Sementara untuk kabupaten, basis ekonomi sumber daya bentukan diperlihatkan oleh Kab. Gianyar dengan industri pariwisatanya, Kab. Sidoarjo, Purwakarta, dan Karawang dengan kegiatan industri manufaktur. Semuanya mampu mendorong perekonomian daerah-daerah tersebut. Ekonomi berbasis sumber daya alam terbentuk oleh anugerah kekayaan alam yang dimilikinya daerah yang bersangkutan. Eksplorasi dan eksploitasi potensi sumber daya alam, seperti pertambangan, kehutanan, perikanan, dan sebagainya, mampu mendorong perekonomian daerah. Daerah-daerah dengan basis ekonomi sumber daya alam (sektor primer), diperlihatkan oleh Kab. Musi Banyuasin, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Sawahlunto Sijunjung, dan sebagainya.

Tabel 1.1 memperlihatkan daerah-daerah yang berhasil memperoleh peringkat kategori A (teratas). Terlihat bahwa skor tertinggi daerah kota sebesar 7.16 yang diperoleh Kota Batam lebih tinggi dibandingkan dengan skor Kab. Gianyar (6.93) yang merupakan peringkat pertama pada kelompok kabupaten. Peringkat pertama yang disandang Kota Batam untuk tahun 2005 ini sama dengan peringkat yang diperoleh tahun 2003. Kota Batam mendapat skor tertinggi karena empat dari lima faktor penentu daya saing investasi memiliki skor tertinggi dan masuk dalam kategori A. Sementara untuk Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya mendapat kategori B. Di urutan kedua dengan skor 7.09 diduduki oleh Kota

**Tabel 1.1**  
**Peringkat "A"**  
**Berdasarkan Seluruh Faktor (Umum)**

Kota	Skor	Kota	Skor
Batam	7,16	Surakarta	6,74
Cilegon	7,09	Surabaya	6,65
Padang	7,09	Tanjung Pinang	6,64
Balikpapan	7,08	Medan	6,58
Denpasar	7,07	Kediri	6,57
Tangerang	6,99	Bandung	6,56
Bandar Lampung	6,89	Yogyakarta	6,56
Sibolga	6,85	Manado	6,55
Sawahlunto	6,82	Pekanbaru	6,55
Cirebon	6,80	Semarang	6,54
Makasar	6,78		

Kabupaten	Skor	Kabupaten	Skor
Gianyar	6,93	Bangli	6,65
Klungkung	6,92	Maros	6,64
Musi Banyuasin	6,91	Indragiri Hilir	6,64
Kolaka	6,81	Jembrana	6,61
Kutai Kertanegara	6,77	Kutai Timur	6,58
Sawahlunto Sijunjung	6,75	Pelalawan	6,58
Pasir	6,74	Tabanan	6,58
Sidoarjo	6,70	Kudus	6,56
Bulungan	6,68	Pangkajene Kepulauan	6,55
Purwakarta	6,68	Konawe Selatan	6,54
Solok	6,66	Kerinci	6,54
Tabalong	6,65	Karawang	6,53

**Tabel 1.2**  
**Peringkat "E"**  
**Berdasarkan Seluruh Faktor (Umum)**

Kota	Skor	Kota	Skor
Tanjung Balai	5,46	Sorong	5,45
Kabupaten	Skor	Kabupaten	Skor
Tapanuli Utara	5,61	Indramayu	5,35
Sanggau	5,60	Sika	5,33
Natuna	5,60	Timor Tengah Utara	5,32
Kebumen	5,58	Ngada	5,32
Sangihe Talaut	5,56	Jember	5,30
Bengkulu Utara	5,55	Lampung Timur	5,29
Timor Tengah Selatan	5,54	Bengkulu Selatan	5,27
Pemalang	5,53	Lombok Timur	5,26
Jeneponto	5,52	Manggarai	5,25
Fakfak	5,50	Pasuruhan	5,24
Badung	5,49	Ponorogo	5,23
Tulungagung	5,48	Tanjung Jabung Timur	5,23
Buleleng	5,48	Lamongan	5,15
Situbondo	5,45	Muna	5,13
Hulu Sungai Utara	5,45	Wonosobo	5,12
Bangka	5,44	Rokan Hulu	5,11
Bima	5,44	Bondowoso	4,97
Luwu Utara	5,43	Pamekasan	4,95
Mimika	5,42	Sumba Barat	4,81
Sorong	5,40	Jayawijaya	4,81
Poso	5,37	Buton	4,05
Barito Selatan	5,36		

Cilegon dan Kota Padang. Kesamaan skor ini hanyalah akibat pembulatan dengan 2 digit di belakang koma. Sesungguhnya skor Kota Cilegon sedikit lebih baik dibandingkan dengan Kota Padang. Skor Kota Padang lebih lemah karena Faktor Kelembagaan-nya masuk dalam kategori C. Sementara untuk Kota Cilegon, kelima faktornya masuk dalam kategori A.

Dari kelompok daerah kabupaten, Kab. Gianyar menduduki peringkat pertama dengan skor 6.93, dan diikuti oleh Kab. Klungkung dengan skor 6.92. Walaupun Kab. Gianyar memiliki skor yang lebih tinggi dari Kab. Klungkung, tetapi berdasarkan peringkat untuk kelima faktornya, Kab. Klungkung lebih merata. Kab. Klungkung kelima faktor penentu daya saing investasi lebih merata kedalam kategori A dan B. Kab. Gianyar mendapatkan kategori C hanya untuk Faktor Tenaga Kerja. Perolehan

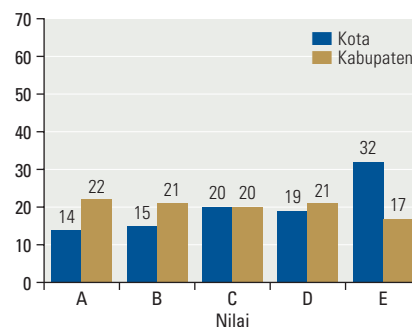
total skor Kab. Gianyar lebih tinggi daripada Kab. Klungkung disebabkan oleh Faktor Infrastruktur Fisik mendapat skor tinggi dan masuk dalam kategori A padahal faktor ini memiliki bobot besar yakni 16.7%, lebih baik dibandingkan dengan Kab. Klungkung yang masuk kategori B untuk faktor yang sama. Di lain sisi, Kab. Klungkung lebih baik untuk Faktor Kelembagaan, yakni masuk dalam kategori A. Sementara, Kab. Gianyar masuk dalam kategori B untuk kategori yang sama, namun faktor ini memiliki bobot paling kecil dibandingkan keempat faktor lainnya (15%).

## 2. Peringkat Faktor Kelembagaan

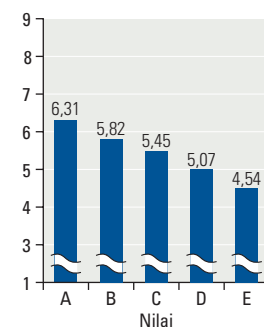
Indikator-indikator yang tergabung dalam faktor kelembagaan merupakan indikator-indikator yang dibawah kendali pemerintah daerah. Baik buruknya skor yang diperoleh daerah untuk setiap indikator dalam Faktor Kelembagaan lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Skor Faktor Kelembagaan merupakan hasil penjumlahan 15 indikator yang dikelompokkan dalam 4 variabel, yakni Variabel Kepastian Hukum, Aparatur dan Pelayanan, Kebijakan Daerah dan Peraturan Daerah, serta Kepemimpinan Lokal. Suatu daerah akan memperoleh skor Faktor Kelembagaan yang tinggi jika indikator-indikator pembentuknya, yang juga memiliki bobot tinggi, memperoleh skor tinggi pula.

Kondisi kelembagaan daerah-daerah di

**Grafik 3.1**  
**Kelompok Peringkat Kota dan Kabupaten Berdasarkan Faktor Kelembagaan (dalam %)**



**Grafik 3.2**  
**Nilai Rata-rata Berdasarkan Faktor Kelembagaan**





Indonesia sampai dengan tahun ke lima pelaksanaan otonomi daerah masih belum cukup menggembirakan, terutama untuk daerah kota. Dari skala 1 – 9 untuk index daya saing investasi, rata-rata skor daya saing investasi daerah berdasarkan Faktor Kelembagaan masih jauh dari kondisi sempurna yakni hanya sebesar 5.43. Perbedaan rata-rata skor untuk daerah kabupaten dan kota juga tidak terlalu besar yakni 5.26 untuk kota dan 5.48 untuk kabupaten. Hanya saja, terlihat bawah masih ada 32% daerah Kota berada pada peringkat E. Skor rendah yang diperoleh daerah-daerah untuk Faktor Kelembagaan ini memperlihatkan bahwa persoalan-persoalan yang terkait dengan aspek kelembagaan masih banyak dijumpai di daerah-daerah di Indonesia. Persoalan-persoalan seperti pungutan liar, birokrasi perizinan, kepastian hukum, peraturan daerah dan sebagainya, masih banyak dijumpai oleh dunia usaha sebagai kendala dalam menjalankan kegiatan usaha mereka. Namun

demikian dalam pembobotan faktor yang mempengaruhi daya saing investasi daerah, ternyata Faktor Kelembagaan justru mendapat bobot yang paling kecil dibanding keempat faktor lainnya. Hal ini bisa terjadi karena diduga dunia usaha sudah mulai menyesuaikan dan berkompromi dengan kondisi kelembagaan di daerah yang masih kurang baik setelah 5 tahun pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya perhatian dunia usaha beralih pada faktor-faktor yang terukur, yakni ekonomi daerah, ketenagakerjaan, dan infrastruktur fisik. Secara metodologis, ketiga faktor ini memiliki bobot lebih besar dibandingkan dengan Faktor Kelembagaan.

Pada Tabel 2.1, terlihat bahwa, peringkat pertama untuk Faktor Kelembagaan diduduki oleh Kota Sawahlunto Sijunjung dengan skor 6.50, diikuti oleh Kota Batam dan Kota Kupang pada posisi kedua dan ketiga. Sementara untuk kelompok daerah kabupaten, Kab Barru berada pada peringkat pertama dengan skor 7.65 dengan seluruh empat variabel pembentuknya mencapai kategori tertinggi yakni A. Peringkat kedua diduduki oleh Kab. Solok, diikuti oleh Kab. Lebak dan Kab. Jembrana.

Daerah-daerah yang menduduki peringkat A baik kabupaten maupun kota ini, dinilai oleh sebagian besar pelaku usaha di daerah tersebut berhasil memperbaiki kinerja kelembagaannya. Adanya perbaikan disisi kepastian hukum, pelayanan birokrasi yang baik, peraturan daerah yang kondusif, serta kepemimpinan kepala daerah yang baik. Perbaikan dalam aspek pelayanan birokrasi, walau belum bisa dikatakan sempurna ditunjukkan dengan mulai diterapkan sistem birokrasi perizinan usaha secara terpadu. Kota Sawahlunto, Kota Tangerang, Batam, Kab. Jembrana, Gianyar, Purbalingga, merupakan contoh beberapa daerah yang telah menerapkan sistem pelayanan perizinan usaha secara terpadu. Perbaikan juga diperlihatkan dalam hal restrukturisasi birokrasi pemerintahan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kab. Jembrana. Restrukturisasi Organisasi Pemerintah Kab. Jembrana menyebabkan pengurangan jumlah dinas, badan dan kantor dari yang semula 21 menjadi 9. Namun,

**Tabel 2.1**  
**Peringkat "A"**  
**Berdasarkan Faktor Kelembagaan**

Kota	Skor	Kota	Skor
Sawahlunto	6.50	Cilegon	6.27
Batam	6.43	Denpasar	6.21
Kupang	6.38	Tangerang	6.14
Sukabumi	6.35	Gorontalo	6.07

Kabupaten	Skor	Kabupaten	Skor
Barru	7.06	Kuningan	6.23
Solok	6.81	Bulungan	6.22
Lebak	6.65	Cianjur	6.22
Jembrana	6.59	Tabanan	6.2
Belitung	6.57	Pesisir Selatan	6.19
Hulu Sungai Tengah	6.56	Bangka Selatan	6.18
Hulu Sungai Selatan	6.54	Sukabumi	6.14
Tabalong	6.52	Lahat	6.13
Kolaka	6.51	Karangasem	6.12
Purbalingga	6.46	Lampung Barat	6.12
Gianyar	6.46	Boyolali	6.1
Klungkung	6.44	Bangka Barat	6.09
Bangli	6.39	Jepara	6.08
Sawahlunto Sijunjung	6.35	Gunungkidul	6.07
Tanah Laut	6.34	Pekalongan	6.05
Lembata	6.34	Bogor	6.05
Indragiri Hilir	6.33	Maros	6.04
Kerinci	6.32	Karimun	6.02
Musi Banyuasin	6.25		

restrukturisasi organisasi itu juga telah mendorong efisiensi dan penghematan anggaran APBN. Dengan restrukturisasi organisasi itu, diperkirakan biaya rutin dapat dihemat sebesar Rp. 3 milyar setiap tahun. Restrukturisasi organisasi pemerintahan juga diikuti oleh pemusatan kantor-kantor dinas dalam satu kawasan perkantoran - yang memungkinkan pemerintah kabupaten melakukan efisiensi dan penghematan dalam memberikan pelayanan kepada publik,

**Tabel 2.1**  
**Peringkat "E"**  
**Berdasarkan Faktor Kelembagaan**

Kota	Skor	Kota	Skor
Pontianak	4.87	Binjai	4.62
Bontang	4.82	Manado	4.58
Kediri	4.78	Medan	4.55
Surabaya	4.77	Sorong	4.46
Pekalongan	4.77	Palu	4.45
Palembang	4.76	Madiun	4.44
Kendari	4.7	Samarinda	4.35
Palangkaraya	4.68	Pematang Siantar	4.06
Probolinggo	4.65	Tanjung Balai	3.11
Mojokerto	4.62		

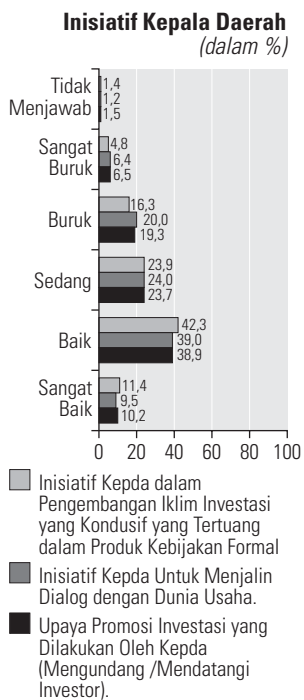
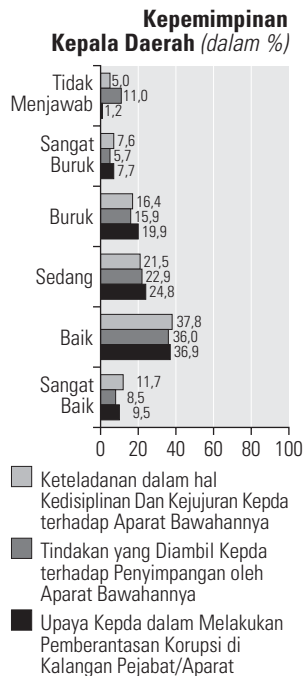
Kabupaten	Skor	Kabupaten	Skor
Kapuas Hulu	4.89	Situbondo	4.62
Kuansing	4.88	Klaten	4.62
Lombok Timur	4.87	Lampung Timur	4.62
Mimika	4.86	Natuna	4.56
Tapanuli Utara	4.83	Deliserdang	4.47
Lampung Selatan	4.82	Bondowoso	4.43
Kendal	4.82	Sorong	4.36
Karo	4.82	Sukoharjo	4.34
Bandung	4.80	Pasuruhan	4.28
Karawang	4.77	Bengkulu Selatan	4.20
Mojokerto	4.77	Ponorogo	4.15
Tulungagung	4.73	Barito Selatan	3.89
Ciamis	4.72	Rokan Hulu	3.79
Magetan	4.63	Tanjung Jabung Timur	3.65

kepemimpinan kepala daerah yang kuat, merupakan salah satu faktor diyakini oleh para pelaku usaha akan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah. Banyak kebijakan-kebijakan daerah yang lahir dari inisiatif kepala daerah. Adanya transparansi dan akuntabilitas dari kebijakan pembangunan daerah juga banyak lahir dari inisiatif kepala daerah dalam menjalin hubungan yang baik dengan kalangan pelaku usaha yang ada di wilayahnya.

Kab. Tanjung Timur merupakan daerah kabupaten yang berada pada peringkat paling bawah dengan skor 3.65. Sementara untuk kelompok daerah kota, peringkat terbawah diduduki oleh Kota Tanjung Balai dengan skor 3.11, karena untuk seluruh variabel yang tergabung dalam Faktor Kelembagaan mendapat kategori E. Peringkat buruk yang diperoleh daerah-daerah yang berada pada peringkat E mencerminkan kondisi sebaliknya dari kondisi daerah-daerah yang berada pada peringkat A. Kategori E pada faktor ini memperlihatkan adanya kelemahan. Kepastian hukum merupakan variabel yang mendapat bobot terbesar dan menjadi perhatian utama bagi kalangan dunia usaha. Variabel ini merupakan ukuran dari kejelasan dan kelangsungan hidup suatu kegiatan usaha di daerah. Variabel-variabel lain yang dinilai sebagai penghambat kegiatan usaha adalah peraturan daerah yang tidak kondusif, banyaknya penyimpangan di tubuh birokrasi, pungutan liar yang membebani pelaku usaha, serta pelayanan birokrasi perizinan usaha yang tidak jelas dan berbelit-belit. Kepemimpinan kepala daerah yang lemah dan cenderung menyimpang, sering dianggap sebagai satu penyebab mengapa kondisi kelembagaan di daerah menjadi tidak baik.

## KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH

Kepemimpinan Kepala Daerah (Kepda) yang kuat diyakini oleh para pelaku usaha akan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah. Banyak kebijakan-kebijakan daerah yang lahir dari inisiatif Kepda. Adanya transparansi dan akuntabilitas kebijakan pembangunan daerah, juga banyak lahir dari inisiatif Kepda dalam menjalin hubungan yang baik dengan kalangan pelaku usaha yang ada di wilayahnya. Studi ini menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kualitas kepemimpinan Kepda dengan indeks daya saing investasi daerah yang bersangkutan.



Hubungan yang positif diperlihatkan antara inisiatif Kepda dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta kualitas kepemimpinan Kepda dalam memimpin bawahannya terhadap indeks daya saing investasi Faktor Kelembagaan. Semakin tinggi inisiatif Kepda dalam menciptakan iklim investasi, akan meningkatkan indeks daya saing investasi Faktor Kelembagaannya. Kepemimpinan Kepda bisa dilihat dari keteladanan yang ditunjukkan kepada bawahannya, sikap disiplin terhadap bawahnya, upaya pemberantasan KKN dalam tubuh birokrasi, dan lain sebagainya. Sementara inisiatif Kepda terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang dibuatnya baik secara informal maupun secara terlembaga dalam kerangka peraturan daerah yang kondusif, promosi investasi, menciptakan forum dialog dengan dunia usaha dan sebagainya. Hubungan diantara variabel-variabel tersebut dengan indeks daya saing investasi bisa dilihat dari persamaan hasil regresi seperti di bawah ini:

Dari ketiga Variabel Kepemimpinan Kepda, Indikator Hubungan Kepda dengan Pelaku Usaha mempunyai pengaruh paling besar terhadap indeks daya saing investasi daerah, kemudian disusul oleh Inisiatif Kepda dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan terakhir adalah keteladanan atau kepemimpinan (*leaderships*) Kepda terhadap bawahannya. Secara langsung, kepemimpinan Kepda akan mempengaruhi kualitas kelembagaan pemerintah daerah. Dengan melakukan regresi antara skor Variabel Hubungan Kepda dan Dunia Usaha dengan Indeks Daya Saing Investasi Faktor Kelembagaan, diperoleh kesimpulan bahwa kualitas hubungan antara Kepda dengan pelaku usaha secara signifikan akan memperbaiki kualitas kelembagaan di daerah. Setiap peningkatan kualitas hubungan Kepda dengan pelaku usaha di daerah sebesar satu satuan, akan meningkatkan kualitas kelembagaan di daerah sebesar 0.19 satuan indeks daya saing investasi untuk Faktor Kelembagaan.

Walau dari uji ekonometri terbukti bahwa masing-masing variabel tersebut berpengaruh terhadap indeks daya saing investasi daerah, namun di berbagai daerah memperlihatkan kondisi yang kurang signifikan. Dilihat dari indikator-indikator pembentuk ketiga variabel tersebut di atas, terlihat bahwa menurut 20-30% pelaku usaha, kondisi kepemimpinan Kepda masih kurang baik hingga sangat tidak baik. Berdasarkan uji ekonometri, indikator-indikator dalam variabel hubungan antara Kepda dengan pelaku usaha memiliki pengaruh paling besar terhadap indeks daya saing investasi. Namun ironisnya, indikator-indikator dalam variabel tersebut justru memperlihatkan kondisi yang paling memprihatinkan. Lebih dari 30% pelaku usaha menyatakan bahwa kualitas hubungan antara Kepda dengan pelaku usaha, serta penyalahgunaan Kepda dalam memberikan izin usaha berada dalam kondisi yang buruk hingga sangat buruk.

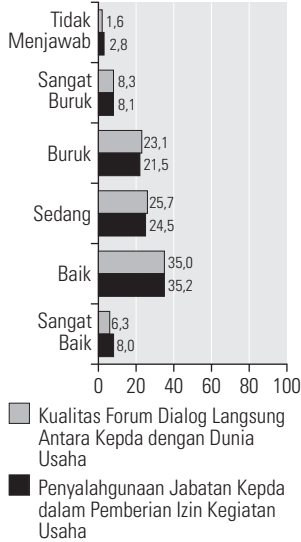
## PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah (Perda), sebagai suatu kerangka acuan hukum dalam pelaksanaan kebijakan di daerah, merupakan aspek penting yang diperhatikan oleh para pelaku usaha. Tidak sedikit kalangan dunia usaha merasa terbebani oleh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini. Hal ini barangkali telah disadari benar oleh pemerintah daerah. Terbukti, hasil studi tahun demi tahun pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa dari

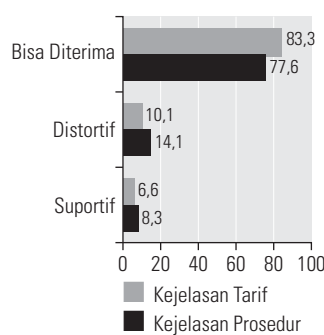
hasil analisa perda semakin sedikit peraturan daerah yang dinilai mendistorsi kegiatan usaha.

Presentase perda yang berpotensi mendistorsi kegiatan usaha dari tahun ke tahun semakin berkurang. Pada tahun 2004 terdapat 30.15% perda yang berpotensi mendistorsi kegiatan usaha. Sementara tahun 2005 untuk kejelasan tarif yang mendistorsi turun menjadi 10.1% dan untuk kejelasan prosedur turun menjadi 14.04%. Sementara jumlah perda yang bisa diterima tahun 2004 sebanyak 57.85% tahun 2005 meningkat menjadi sebanyak 83.3% untuk kejelasan tarif, dan 77.63% untuk kejelasan prosedur. Perda yang mendistorsi kegiatan usaha juga menjadi semakin berkurang, dimana untuk tahun 2004 terdapat 11.9% perda, untuk tahun 2005 hanya ada 10.1% namun untuk kejelasan prosedur masih cukup banyak yakni sebesar 14.4%.

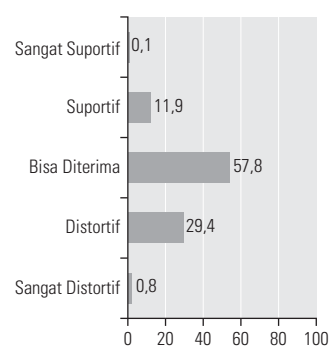
**Hubungan Kepala Daerah dengan Pelaku Usaha**  
(dalam %)



**Kualitas Perda**  
Hasil Tahun 2005 (dalam %)



**Jenis Kebermasalahan**  
Hasil Tahun 2004 (dalam %)

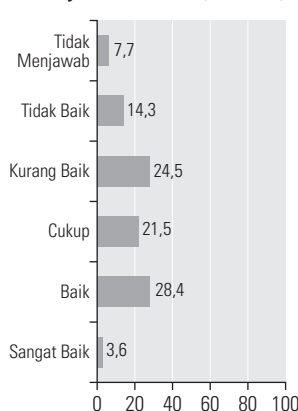


## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN

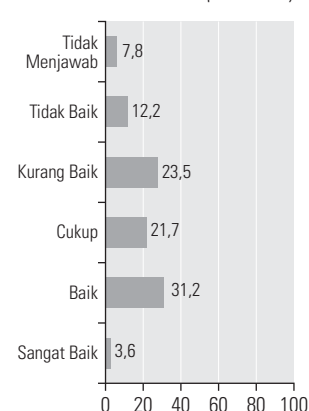
Tingkat keterlibatan dunia usaha dalam proses perumusan perda atau kebijakan daerah lainnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 jumlah responden yang tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan daerah sebanyak 82.5%. Dalam studi daya saing investasi daerah tahun 2005, partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan daerah semakin baik, terlihat dari berkurangnya jumlah responden yang tidak terlibat dalam proses perumusan perda menjadi hanya sebanyak 61.3%.

Proses sosialisasi kebijakan daerah juga menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat. Secara umum, 52% para pelaku usaha di daerah menyatakan bahwa keterlibatan dunia usaha dalam proses perumusan kebijakan daerah cukup baik hingga sangat baik. Namun kualitas keterlibatan dunia usaha ini perlu ditingkatkan lagi karena masih terdapat 39% pelaku usaha yang menyatakan kualitas proses keterlibatan dunia usaha dalam perumusan kebijakan daerah masih kurang baik, hingga tidak baik.

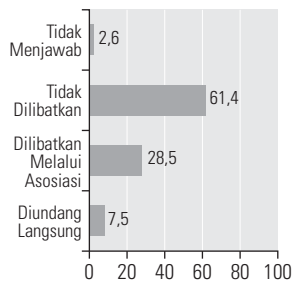
**Kualitas Pelibatan Dunia Usaha dalam Proses Perumusan Kebijakan Daerah** (dalam %)



**Proses / Bentuk Sosialisasi Kebijakan Daerah yang dilakukan oleh Pemda kepada Dunia Usaha** (dalam %)



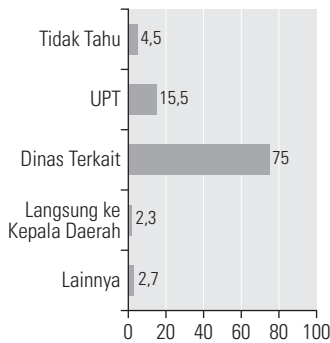
**Keterlibatan Dunia Usaha dalam Perumusan Kebijakan Daerah (dalam %)**



Selain proses keterlibatan, sosialisasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berpengaruh terhadap aktifitas usaha, juga perlu untuk disosialisasikan ke masyarakat secara umum. Dari studi ini terlihat bahwa 55% pelaku usaha menyatakan proses sosialisasinya sudah cukup baik hingga sangat baik. Sementara masih ada 36% responden yang menyatakan kurang baik dan tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah masih belum merata menyentuh lapisan masyarakat yang lebih luas lagi.

**PERIZINAN USAHA**

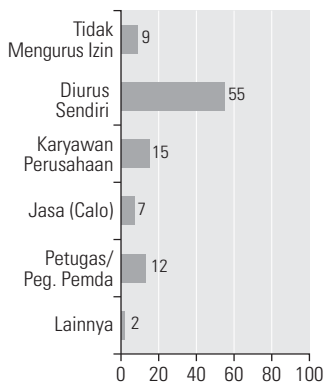
**Instansi yang Melayani Perizinan Usaha (dalam %)**



Masalah birokrasi perizinan usaha diyakini masih menjadi faktor yang sangat signifikan dalam menciptakan daya tarik investasi. Salah satu bentuk kebijakan yang populer di tingkat daerah dalam rangka otonomi daerah adalah perizinan. Sebagai instrumen pengendalian, perizinan dipandang oleh beberapa daerah (pemerintah daerah) memiliki posisi yang penting, yaitu: di satu sisi merupakan wujud nyata dari kewenangan daerah (otonomi politik), dan di sisi lain merupakan sumber pendapatan daerah (otonomi ekonomi). Dalam konteks ini, maka tidaklah mengherankan apabila salah satu perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah semakin banyaknya izin yang harus dikantongi oleh swasta dan masyarakat untuk melakukan sesuatu. Konsekuensi dari banyaknya izin adalah banyaknya beban yang harus ditanggung oleh masyarakat atau swasta untuk “melegalkan” kegiatan yang hendak mereka lakukan. Persoalan yang juga muncul terkait dengan perizinan adalah proses bagaimana swasta atau masyarakat dapat memperoleh / mengurus perizinan tersebut. Prosedur yang panjang dan berbelit, kepastian waktu, dan biaya, merupakan persoalan klasik yang dialami di Indonesia.

Pihak-pihak dan instansi birokrasi perizinan yang biasa dihadapi oleh para pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha, diantaranya adalah Unit Pelayanan Terpadu (dengan berbagai nama dan variansinya), dinas-dinas teknis sektoral, langsung kepada Kepala Daerah, dan lain-lain. Namun, menurut para pelaku usaha di berbagai daerah, sebagian besar (74.95%) proses perizinan usaha masih ditangani melalui dinas-dinas teknis sektoral yang ada di Pemda. Baru 15.49% pelaku usaha yang mengurus perizinan usaha melalui sistem *One Stop Service (OSS)*, bahkan ada 2.25% pelaku usaha yang langsung mengurus perizinan usaha kepada kepala daerah.

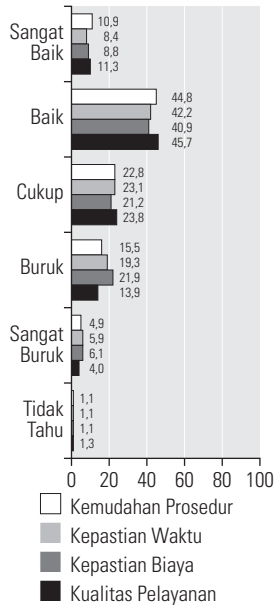
**Pengurusan Izin Usaha (dalam %)**



Dari survei daya saing investasi daerah juga diketahui, bahwa sebagian besar pelaku usaha telah mengurus perizinan usaha yang mereka lakukan (91% dari 8.727 pelaku usaha). Hanya 9% pelaku usaha yang tidak mengurus perizinan untuk kegiatan usaha mereka.

Meskipun sebagian besar pelaku usaha mengurus sendiri izin usaha mereka, yakni sebesar 55% dari 8.727 responden, sebagian lagi dilakukan oleh karyawan perusahaan (15%). Namun demikian dalam mengurus perizinan usaha masih ditemukan banyak pelaku usaha yang mengurus melalui jasa perantara, baik itu calo (7% responden), maupun melalui petugas/pegawai Pemda (12%). Hal ini tentu saja mengundang pertanyaan mengapa masih cukup

**Persoalan Dalam Birokrasi Perizinan Usaha (dalam %)**



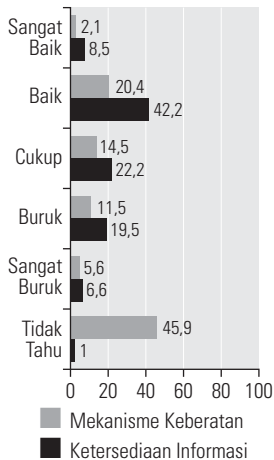
banyak pelaku usaha yang memanfaatkan jasa perantara, dibandingkan dengan mengurus sendiri, baik itu secara pribadi maupun oleh karyawan perusahaan.

Hal ini menunjukkan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha kepada pemerintah daerah yang biasanya terkait dengan kejelasan prosedur, kepastian biaya, dan kepastian waktu. Lebih dari 20% mengeluhkan bawah pelayanan birokrasi perizinan usaha yang dilakukan oleh Pemda secara rata-rata dibawah memuaskan. Aspek kepastian biaya merupakan persoalan yang banyak dikeluhkan oleh para pelaku usaha, yakni sebanyak 27.98% responden. Aspek berikutnya yang banyak dikeluhkan oleh para pelaku usaha adalah kepastian waktu, yang dikeluhkan oleh 25.05% pelaku usaha. Sementara untuk kemudahan prosedur dinilai kurang jelas hingga tidak jelas, oleh 20,40% pelaku usaha.

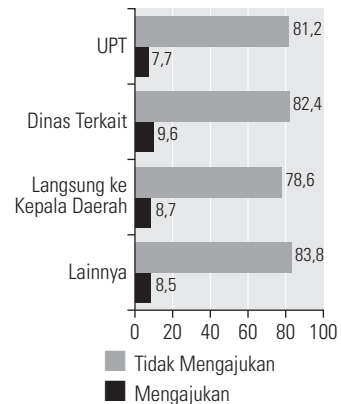
Banyaknya keluhan terhadap kejelasan prosedur ini terkait dengan ketersediaan informasi mengenai proses perizinan baik dalam hal prosedur, biaya, serta waktu untuk mengurus perizinan usaha. Yang ironis adalah begitu banyaknya keluhan para pengguna jasa pelayanan perizinan, namun menurut 45.85% pelaku usaha, ternyata dalam birokrasi perizinan tidak tersedia adanya mekanisme pengajuan keberatan terhadap ketidak-puasan mereka. Anehnya meskipun banyak pelaku usaha yang mengeluhkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam proses perizinan, namun tidak banyak pelaku usaha yang mengajukan keberatan.

Secara keseluruhan, hanya 9% responden yang mengajukan keberatan atas ketidakpuasan pelayanan yang dilakukan oleh Pemda. Dilihat dari instansi yang menangani perizinan usaha, ternyata responden yang paling sedikit mengajukan keberatan adalah mereka yang mengurus perizinan melalui *One Stop Service*, yakni sebanyak 7.7%. Sementara pengajuan keberatan terbesar dilakukan oleh responden yang dilayani oleh dinas-dinas teknis terkait, yaitu sebanyak 9.55% responden. Apakah hal ini mengisyaratkan bahwa pelayanan perizinan dengan sistem *One Stop Service*, lebih baik dibandingkan dengan sistem yang lainnya?

**Faktor Penyebab Masalah Birokrasi Perizinan (dalam %)**



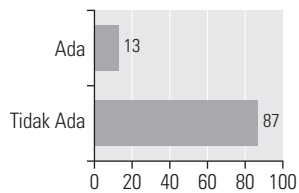
**Pelaku Usaha yang Mengajukan Keberatan (dalam %)**



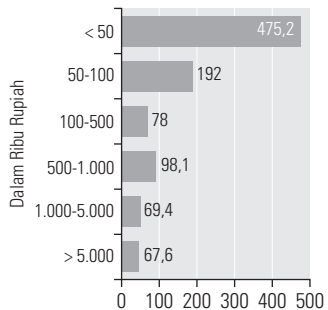
**PENYIMPANGAN DALAM PERIZINAN USAHA**

Perizinan usaha tampaknya menjadi persoalan yang menjadi perhatian sebagian besar pelaku usaha. Persoalan yang muncul dalam perizinan adalah adanya ketidak sesuaian antara ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan formal, baik itu dalam peraturan daerah, SK Kepala Daerah, maupun peraturan formal lainnya. Penyimpangan yang sering kali muncul adalah dalam hal tarif pungutan terkait dengan biaya untuk mendapatkan suatu jenis perizinan tertentu, prosedur yang harus dilalui, maupun dalam hal ketepatan waktu.

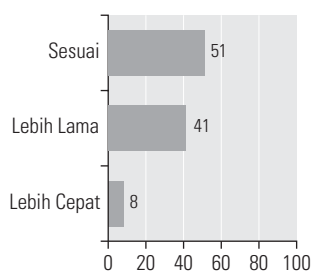
**Biaya Tambahan dalam Perizinan Usaha (dalam %)**



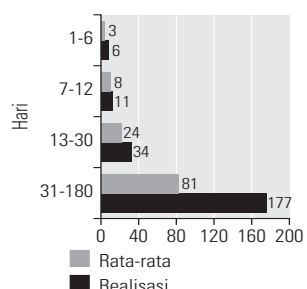
**Biaya Tambahan dalam Perizinan Usaha (dalam %)**



**Kepastian Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (dalam %)**



**Waktu Penyelesaian dalam Perizinan**



Dalam hal kepastian biaya,, dari 8.727 pelaku usaha, 13% diantaranya menyatakan harus memberikan biaya tambahan diluar biaya resmi yang telah ditetapkan. Secara statistik barangkali angka ini tidak terlalu besar, namun penting untuk kita perhatikan. Besarnya tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha mereka bervariasi tergantung dari besarnya biaya resmi yang telah ditetapkan. Namun secara rata-rata besarnya tambahan biaya tidak resmi adalah sebesar 109.36% dari biaya yang telah ditetapkan secara resmi.

Jika dilihat dari prosentasenya, semakin besar biaya resmi yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan izin, maka prosentase tambahan biaya tidak resmi menjadi lebih kecil. Namun jika dilihat dari nominalnya tetap saja cukup memberatkan bagi pemohon izin. Yang paling besar menanggung tambahan biaya tidak resmi adalah para pelaku usaha yang mengajukan perizinan dengan biaya resminya dibawah Rp.50.000,- (rata-rata Rp.15.124,-), yakni harus membayar tambahan rata-rata biaya tidak resmi sebesar Rp.52.050,- atau 475.2% dari biaya resmi.

Persoalan tambahan beban biaya tidak resmi tersebut, diperberat dengan adanya ketidakpastian waktu untuk penyelesaian perizinan. 41% Para pelaku usaha yang pernah berpengalaman berhadapan dengan birokrasi perizinan, menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pengurusan izin lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan atau dijanjikan oleh pemda. Namun demikian, sebanyak 8% pelaku usaha yang menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perizinan lebih cepat dibandingkan dengan waktu yang telah diatur, sementara 51% pelaku usaha yang lain menyatakan bahwa waktu untuk proses perizinan sesuai dengan yang dijanjikan oleh pemda.

Untuk menyelesaikan proses perizinan di daerah-daerah penelitian, dari permohonan diajukan hingga perizinan diperoleh, rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 32 hari, padahal waktu yang ditetapkan oleh pemda rata-rata adalah 17 hari, artinya 15 hari lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan oleh birokrasi yang menangani perizinan usaha. Waktu untuk menyelesaikan perizinan yang dijanjikan oleh pemda berkisar antara 31 hari hingga 180 hari atau rata-rata 81 hari kerja, tergantung dari jenis perizinan yang diajukan. Untuk menyelesaikan perizinan ini ternyata realisasi waktu yang diperlukan adalah 177 hari kerja, atau 97 hari kerja lebih lama.

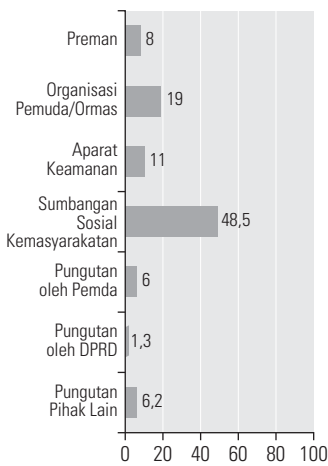
Bagi para pelaku usaha, ketidakpastian waktu untuk memproses perizinan yang harus mereka peroleh untuk kegiatan usaha mereka adalah adanya tambahan *opportunity cost*. *Opportunity cost* ini tentunya akan menghambat kegiatan usaha mereka. Tambahan waktu juga berarti adanya tambahan biaya jika mereka ingin segera memperoleh perizinan yang diinginkan. Karena biasanya untuk mempercepat waktu proses perizinan, para pelaku usaha harus mengeluarkan biaya ekstra, diluar biaya resmi. Hal ini belum ditambah dengan biaya transportasi dan biaya-biaya lainnya.

# PUNGUTAN TIDAK RESMI

Citra bahwa pelaku usaha merupakan pihak yang memiliki banyak uang, tampaknya menjadikan para pelaku usaha sebagai obyek pungutan dari berbagai pihak. Dengan berbagai alasan banyak pihak yang kemudian melakukan pungutan terhadap pelaku usaha, baik itu dalam kaitannya dengan kegiatan usaha mereka maupun dengan alasan lainnya. Persoalannya adalah pungutan-pungutan tersebut tidak diatur secara formal dengan alasan yang kadang kala tidak masuk akal. Pihak-pihak yang sering melakukan pungutan bisa berasal dari pemerintahan di daerah, aparat keamanan maupun masyarakat secara umum dengan mengatasnamakan pribadi maupun organisasi tertentu.

Pungutan yang paling banyak dikenakan terhadap pelaku usaha adalah pungutan yang mengatasnamakan sumbangan sosial kemasyarakatan, yakni dialami oleh 49% responden. Pungutan lainnya juga datang dari organisasi kepemudaan atau ormas yang ada di sekitar lokasi usaha, yakni dialami oleh 19%, kemudian diikuti pungutan dari aparat keamanan (11% responden), pungutan oleh preman (8% responden). Sementara walaupun tidak banyak responden yang mengalami pungutan, tetapi ternyata pungutan tidak resmi juga dilakukan oleh Pemda (6% responden), dan dari pihak DPRD (1% responden).

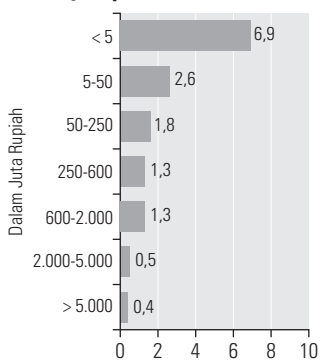
**Pihak yang Memungut (dalam %)**



Dilihat dari pihak-pihak yang melakukan pungutan tidak resmi ternyata pungutan terbesar datang dari institusi-institusi resmi seperti DPRD, Pemda, dan Aparat Keamanan. Dilihat dari rata-rata besarnya pungutan pungutan oleh DPRD secara nominal paling besar yakni Rp.1.176.885,- dalam satu bulan, diikuti oleh pungutan dari pihak pemda sebesar Rp.817.944,-, pihak lainnya Rp.816.158,- dan aparat keamanan sebesar Rp.752.077,-.

Banyaknya pungutan tidak resmi yang dialami oleh para pelaku usaha di berbagai daerah ini, tentunya merupakan tambahan biaya yang menyebabkan *high cost economy*. Tambahan biaya ini akan meningkatkan biaya operasional untuk melakukan kegiatan usaha mereka. Dibandingkan dengan biaya operasional perbulan dari kegiatan usaha para responden, rata-rata tambahan biaya tidak resmi yang dipungut oleh berbagai pihak adalah sebesar 2.1% dari total biaya operasional. Semakin besar biaya operasional dari sebuah kegiatan usaha ternyata secara nominal jumlah pungutan tidak resmi juga semakin besar. Untuk biaya operasional diatas Rp.5 milyar, pungutan tidak resmi rata-rata perbulan sebesar Rp.77.252.609,- atau rata-rata sebesar 0.42%

**Rata-rata Pungutan thd Biaya Operasional (dalam %)**



Para pelaku usaha skala kecil dan mikro merupakan kelompok pengusaha yang paling besar menanggung pungutan tidak resmi ini. Untuk pelaku usaha yang biaya operasional perbulan dibawah Rp.5.000.000,- rata-rata pungutan tidak resmi yang menjadi beban rata-rata adalah sebesar Rp.252.196,- atau 6.90% dari biaya operasionalnya. Sementara untuk kegiatan usaha dengan biaya operasional antara Rp.5 juta s/d Rp.50 juta, rata-rata pungutan tidak resminya sebesar Rp.776.600,- atau 2.57% dari biaya operasional. Persoalan pungutan-pungutan tidak resmi ini harus segera diatasi karena jika dibiarkan terus berlangsung akan menghambat perkembangan usaha dan perekonomian secara keseluruhan.



### 3. Peringkat Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya

Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya, merupakan faktor yang pada pemeringkatan tahun 2005 memiliki bobot pengaruh terbesar dalam membentuk daya saing investasi daerah, yakni sebesar 27.4%. Faktor ini terdiri dari 3 variabel (Variabel Keamanan, Variabel Politik dan Variabel Sosial Budaya), yang kemudian terbagi dalam 10 indikator. Indikator Keamanan Kegiatan Usaha merupakan indikator dengan bobot terbesar dalam faktor ini (16.8%), dan terbesar kedua secara keseluruhan setelah Indikator PDRB Perkapita (17.5%) dalam Faktor Ekonomi Daerah. Besarnya bobot faktor inilah yang sedikit banyak mempengaruhi hasil peringkat daya saing investasi secara total. Daerah-daerah yang aman untuk kegiatan usaha merupakan daerah yang kemudian akan memperoleh skor daya tarik investasi yang relatif tinggi.

Secara umum sebenarnya kondisi Keamanan Politik dan Sosial Budaya berbagai daerah di Indonesia cukup baik, terlihat dari rata-rata indeks daya saing investasi untuk faktor ini yang cukup tinggi yakni sebesar 6.37. Dari hasil skor untuk faktor ini, walaupun tidak berbeda jauh, terlihat bahwa daerah-daerah kabupaten lebih kondusif dibandingkan dengan daerah perkotaan. Untuk daerah kabupaten, indeks daya saing investasi Faktor Keamanan Politik dan Sosial Budaya adalah sebesar 6.41, sementara untuk daerah kota

**Tabel 3.1**  
**Peringkat "A"**  
**Berdasarkan Faktor Keamanan,**  
**Politik dan Sosial Budaya**

Kota	Skor	Kota	Skor
Denpasar	7,55	Sawahlunto	7,20
Sibolga	7,50	Sukabumi	7,19
Balikpapan	7,45	Bontang	7,12
Cilegon	7,29	Kendari	7,08

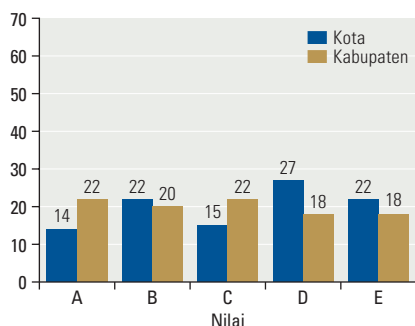
  

Kabupaten	Skor	Kabupaten	Skor
Maros	8,09	Pekalongan	7,34
Bangli	8,07	Pesisir Selatan	7,33
Gianyar	8,01	Kuningan	7,30
Lingga	7,77	Tebo	7,29
Konawe Selatan	7,76	Dairi	7,29
Klungkung	7,72	Tabalong	7,28
Karangasem	7,69	Kutai Kertanegara	7,28
Tabanan	7,64	Takalar	7,25
Kutai Timur	7,62	Pasir	7,18
Rejang Lebong	7,56	Sukabumi	7,18
Bulungan	7,55	Tegal	7,17
Nunukan	7,54	Majene	7,16
Sawahlunto Sijunjung	7,52	Bantaeng	7,15
Lebak	7,49	Lampung Barat	7,14
Musi Banyuasin	7,49	Kolaka	7,14
Ciamis	7,45	Purbalingga	7,09
Ogan Ilir	7,37	Cianjur	7,09
Jembrana	7,36	Pasaman	7,08
Berau	7,34		

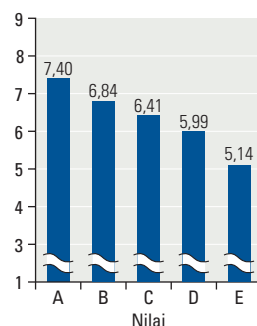
sebesar 6.23. Terdapat 22% daerah kabupaten yang masuk dalam kategori A, sementara daerah kota ada 14% yang berada dalam kategori A. Untuk kategori B terdapat 20% sementara daerah kota sebanyak 22%.

Daerah-daerah perkotaan yang mendapat rata-rata skor lebih rendah dibandingkan dengan daerah kabupaten lebih banyak dipengaruhi oleh dampak kegiatan unjuk rasa di daerah perkotaan (buruh dan masyarakat secara umum), hubungan eksekutif dan legislatif, serta hubungan antar partai politik. Sementara untuk Variabel Sosial Budaya relatif tidak ada perbedaan antara daerah kota dan daerah kabupaten. Untuk keamanan kegiatan usaha, daerah kota juga tidak lebih jelek dibandingkan dengan daerah kabupaten. Namun

**Grafik 4.1**  
**Kelompok Peringkat Kota dan Kabupaten Berdasarkan Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya (dalam %)**



**Grafik 4.2**  
**Nilai Rata-rata Berdasarkan Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya**



untuk kondisi keamanan lingkungan masyarakat, daerah kota cenderung lebih buruk dibandingkan dengan daerah kabupaten. Hal ini wajar karena kompleksitas permasalahan daerah perkotaan mengakibatkan kondisi keamanan dan sosial politik yang lebih buruk dibandingkan dengan daerah pedesaan (kabupaten). Intensitas kegiatan unjuk rasa yang banyak mengganggu kegiatan usaha juga lebih banyak terjadi di daerah perkotaan. Hal ini disebabkan karena daerah perkotaan merupakan konsentrasi kegiatan industri yang melibatkan banyak buruh, yang selama tahun 2005 banyak melakukan kegiatan unjuk rasa.

Yang menarik dari hasil peringkat Faktor

Keamanan Politik Sosial Budaya ini adalah, 7 dari 9 kabupaten di Pulau Bali masuk dalam peringkat A. Kota Denpasar merupakan satu-satunya daerah kota yang berhasil masuk kategori A dalam peringkat Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya. Hal ini wajar, karena Denpasar sebagai salah satu pusat kegiatan pariwisata membentuk masyarakatnya menjadi sadar dalam menciptakan iklim yang kondusif dan aman bagi industri pariwisata yang ada di sana. Hal yang cukup menarik adalah hanya dua daerah di Pulau Jawa yang masuk dalam kategori peringkat A untuk faktor ini. Dalam kelompok daerah kabupaten, Maros menduduki peringkat teratas 8.09 diikuti Kab. Bangli di posisi ke dua dengan skor 8.07, dan Gianyar pada posisi ke tiga dengan skor 8.01.

Terdapat beberapa daerah yang sedang dan sering dilanda konflik sosial yang berada dalam kategori E untuk Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya. Kab. Poso yang sampai saat ini masih dilanda konflik sosial, sama seperti hasil pemeringkatan tahun-tahun sebelumnya tetap menduduki peringkat bawah dengan kategori E. Daerah yang sering dilanda konflik lain yang berada dalam kelompok E adalah Kab. Donggala. Satu daerah di Bali yang dikenal mempunyai potensi konflik yang tinggi adalah Kab. Buleleng, sehingga daerah ini juga berada dalam peringkat E. Beberapa daerah industri di Jawa Timur, seperti Gresik, Tulung Agung, Lamongan dan Pamekasan dan Madiun, dan Kota Bekasi di Jawa Barat juga berada pada kategori E. Hal ini mempertegas bahwa faktor maraknya kegiatan unjuk rasa serta gangguan keamanan lingkungan dan kegiatan usaha merupakan faktor penentu peringkat untuk faktor ini. Hubungan antara eksekutif dan legislatif juga menjadi kendala utama dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha. Faktor Budaya seperti keberadaan tanah ulayat dan klaim-klaim masyarakat atas tanah untuk kegiatan usaha, juga banyak dikeluhkan di daerah Sorong dan Rokan Hulu.

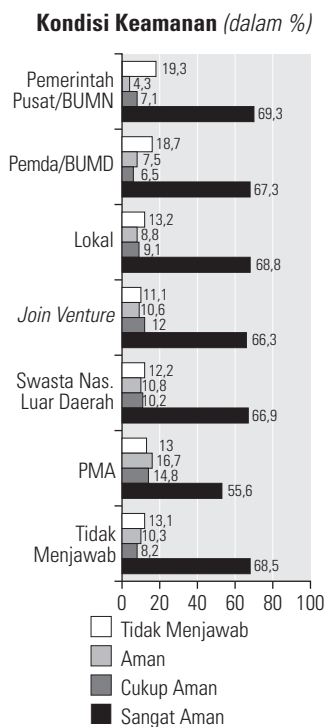
**Tabel 3.2**  
**Peringkat "E"**  
**Berdasarkan Faktor Keamanan,**  
**Politik dan Sosial Budaya**

Kota	Skor	Kota	Skor
Palangkaraya	5,57	Palu	5,21
Pekanbaru	5,52	Tanjung Balai	5,05
Malang	5,41	Kupang	4,99
Pontianak	5,39	Sorong	4,88
Bengkulu	5,37	Bekasi	4,85
Pekalongan	5,33	Madiun	4,43
DKI Jakarta	5,32		

Kabupaten	Skor	Kabupaten	Skor
Lampung Timur	5,66	Fakfak	5,22
Tolitoli	5,63	Bengkulu Selatan	5,18
Sleman	5,63	Buton	5,16
Mimika	5,57	Gresik	5,02
Sorong	5,48	Tulungagung	5,00
Situbondo	5,47	Buleleng	4,98
Manokwari	5,42	Lamongan	4,97
Wonosobo	5,41	Simalungun	4,97
Bekasi	5,41	Donggala	4,89
Timor Tengah Selatan	5,37	Sumba Barat	4,62
Jember	5,37	Pamekasan	4,56
Barito Selatan	5,37	Muna	4,50
Ponorogo	5,36	Poso	4,40
Bondowoso	5,32	Bangka	4,38
Serang	5,32	Rokan Hulu	3,95
Lombok Timur	5,32		

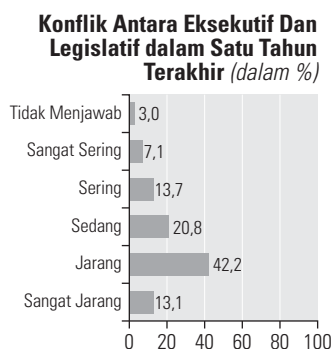
## KONDISI KEAMANAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA



Jika faktor keamanan usaha merupakan indikator paling menentukan dalam membentuk daya saing investasi suatu daerah, dari studi ini diperoleh hasil bahwa secara umum kondisi keamanan daerah-daerah di Indonesia dinilai cukup kondusif untuk kegiatan investasi. Hanya ada beberapa daerah tertentu yang dinilai masih kurang aman untuk kegiatan investasi. Dari studi ini diperoleh hasil bahwa hanya 9.6% menyatakan bahwa kondisi keamanan daerah-daerah di Indonesia kurang aman hingga tidak aman, yang menyatakan tidak aman hanya sebesar 2.9% sementara 68.4% menyatakan aman dan sangat aman, dan 8.2% menyatakan cukup aman untuk kegiatan usaha.

Asal investor tampaknya berpengaruh terhadap persepsi responden dalam menilai kondisi keamanan usaha di suatu daerah. Semakin jauh asal investor dari daerah tempat mereka melakukan kegiatan usaha, maka rasa aman untuk melakukan kegiatan usaha di suatu daerah juga semakin rendah. Responden dari perusahaan PMA memiliki tingkat rasa aman melakukan kegiatan usaha paling rendah dibandingkan dengan responden lainnya, yakni 16.7% dari responden PMA menyatakan kondisi keamanan di daerah kurang/ tidak aman untuk kegiatan usaha. Sementara dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan responden yang menyatakan kurang aman hingga tidak aman, tampak bahwa responden dari perusahaan *Joint Venture*, Swasta Nasional, Luar Daerah, dan PMA, mempunyai tingkat rasa aman yang lebih rendah dibandingkan dengan rasa aman keseluruhan responden (9.6% seluruh responden menyatakan tidak/kurang aman). Hal yang menarik adalah bahwa investor yang berasal dari pemerintah cenderung mempunyai persepsi yang lebih baik dalam menilai kondisi keamanan usaha, hal ini terlihat dari banyaknya responden yang berasal dari BUMN dan BUMD yang hanya sedikit yang menyatakan kondisi keamanan daerah kurang aman yakni masing-masing sebesar 4.3% (BUMN) dan 7.5% BUMD, lebih baik dibandingkan dengan investor yang berasal dari daerah yang bersangkutan (investor lokal).

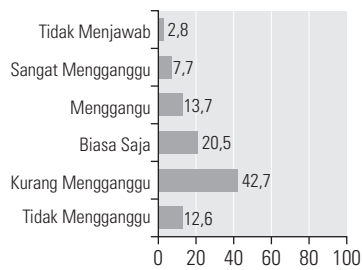
## HUBUNGAN EKSEKUTIF - LEGISLATIF



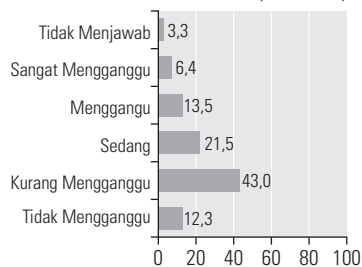
Dua unsur pemerintahan daerah yang berperan besar terhadap jalannya pembangunan di daerah adalah DPRD (Legislatif) dan Pemerintah Daerah (Eksekutif). Selain peran serta masyarakat dan kalangan dunia usaha, jalannya pembangunan di daerah sangat dipengaruhi hubungan antara kedua unsur tersebut, dalam menjalankan fungsi masing-masing. Namun dalam praktiknya hubungan kedua unsur pemerintahan tersebut seringkali justru menghambat kegiatan pembangunan. Pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab eksekutif, seringkali terhambat oleh hubungan yang tidak harmonis dengan pihak legislatif. Menurut 20.81% pelaku usaha dalam survei daya saing investasi daerah, selama satu tahun terakhir ini sering bahkan sangat sering terjadi konflik antara eksekutif dan legislatif.

Konflik antara eksekutif dan legislatif yang terjadi selama satu tahun terakhir, diakui oleh 21.34% pelaku usaha mengganggu bahkan sangat mengganggu proses pelayanan birokrasi terhadap dunia usaha, yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini tentu sangat disayangkan karena, semestinya kedua unsur pemerintah daerah ini dapat bekerja sama agar tercipta pelayanan publik yang lebih baik di

**Pengaruh Hubungan Eksekutif - Legislatif terhadap Pelayanan Dunia Usaha dalam Satu Tahun Terakhir (dalam %)**



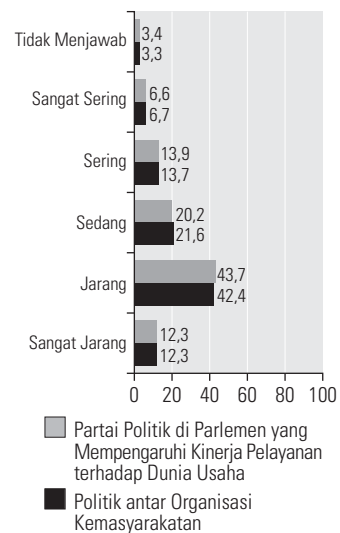
**Pengaruh Hubungan antar Partai Politik Atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan terhadap Aktivitas Usaha (dalam %)**



daerah, dalam hal ini dunia usaha, sehingga perekonomian daerah dapat berkembang dengan baik.

Dilihat dari aspek politik, sebagaimana terlihat dalam tabel di samping, tampaknya bukan hanya hubungan eksekutif dan legislatif yang menjadi kendala dalam kegiatan usaha di daerah-daerah. Konflik politik yang sering terjadi diantara partai politik yang ada di parlemen, serta intensitas konflik politik antar organisasi masyarakat selain partai politik di berbagai daerah, juga menjadi kendala bagi jalannya kegiatan usaha. Selama satu tahun terakhir konflik politik diparlemen, dan konflik politik antar ormas selain partai politik sering terjadi di daerah. Banyaknya konflik politik yang terjadi di daerah juga diakui oleh lebih dari 20% pelaku usaha, telah mengganggu aktivitas usaha mereka. Kondisi politik di beberapa daerah seperti di atas, menyebabkan mengapa Variabel Politik mendapat bobot besar dalam menentukan daya saing investasi suatu daerah.

**Intensitas Konflik (dalam %)**



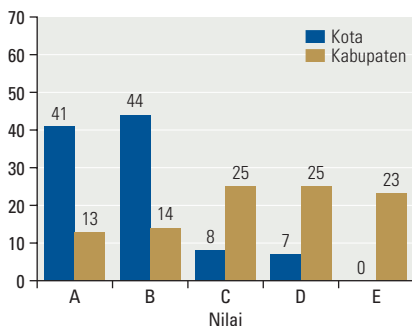
**4. Peringkat Faktor Ekonomi Daerah**

Faktor Ekonomi Daerah terdiri dari Variabel Potensi Ekonomi dan Variabel Struktur Ekonomi. Potensi ekonomi bisa dilihat dari potensi yang berbasis sumber daya alam, maupun potensi akibat bentukan karena didorong oleh aktivitas usaha atau adanya investasi. Kedua aspek tersebut harus dapat berjalan selaras agar tercipta pertumbuhan

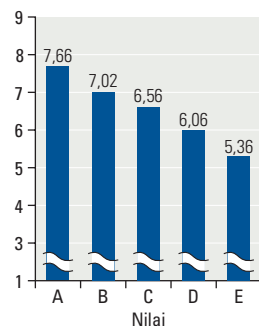
ekonomi yang tinggi, dan struktur ekonomi yang kuat sehingga dapat memacu kemajuan perekonomian daerah, peningkatan daya beli, dan sikap mental masyarakat yang mendorong kearah kemajuan dan modern.

Faktor Ekonomi Daerah suatu daerah yang merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam keputusan berinvestasi. Dalam pemeringkatan tahun 2005, Faktor Ekonomi Daerah mendapat bobot 22.6%. Peringkat atas untuk Faktor Ekonomi Daerah, didominasi oleh daerah-daerah yang memiliki daya beli tinggi yang diukur dengan PDRB Perkapita. Indikator PDRB Perkapita ini mendapat bobot terbesar dalam membentuk daya saing investasi daerah dibandingkan dengan 47 indikator lainnya yang digunakan KPPOD dalam menilai daya saing investasi daerah, yakni sebesar 17.5%. Pertumbuhan ekonomi juga dipandang sebagai indikasi akan sebagai potensi keberhasilan kegiatan usaha di daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dipicu oleh

**Grafik 5.1**  
**Kelompok Peringkat Kota dan Kabupaten Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah (dalam %)**



**Grafik 5.2**  
**Nilai Rata-rata Berdasarkan Faktor Faktor Ekonomi Daerah**



aktivitas bisnis yang relatif modern yang ditunjukkan dengan tingkat industrialisasi yang tinggi. Hasil pemeringkatan tahun 2005 menunjukkan bahwa daerah perkotaan dan daerah-daerah sekitar perkotaan dengan tingkat industrialisasi yang tinggi berada pada peringkat teratas.

Dibandingkan faktor-faktor lainnya, Faktor Ekonomi Daerah memiliki index daya saing investasi yang paling baik, yakni dengan rata-rata sebesar 6.57 dari skala 1 sampai dengan 9. Perbandingan antara rata-rata index daya saing investasi berdasarkan Faktor Ekonomi antara daerah kota dan kabupaten menunjukkan bahwa kondisi perekonomian daerah perkotaan lebih baik dibandingkan dengan daerah kabupaten. Rata-rata indeks ekonomi daerah kota adalah 7.20 sementara kabupaten hanya 6.35. Dari kategori peringkat yang berhasil diraih oleh setiap daerah juga memperlihatkan bahwa daerah kota lebih baik dibandingkan dengan daerah kabupaten.

**Tabel 4.1**  
**Peringkat "A"**  
**Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah**

Kota	Skor	Kota	Skor
Samarinda	8,30	Malang	7,61
Pekanbaru	8,08	Surabaya	7,60
Balikpapan	7,99	Tanjung Balai	7,59
Cilegon	7,94	Padang	7,54
Batam	7,89	Tanjung Pinang	7,52
Tarakan	7,85	Denpasar	7,50
Tangerang	7,83	Kediri	7,48
Medan	7,77	DKI Jakarta	7,46
Makasar	7,75	Mojokerto	7,44
Semarang	7,71	Pematang Siantar	7,38
Cirebon	7,67	Pontianak	7,34
Bandung	7,64	Palu	7,33

Kabupaten	Skor	Kabupaten	Skor
Kutai Timur	8,62	Tabalong	7,54
Kuantan Singgigi	7,94	Bengkalis	7,54
Kutai Kertanegara	7,89	Batanghari	7,51
Pelalawan	7,88	Deliserdang	7,44
Gresik	7,86	Berau	7,44
Bekasi	7,72	Kudus	7,43
Sidoarjo	7,70	Barru	7,42
Cilacap	7,68	Kampar	7,40
Rokan Hulu	7,66	Barito Utara	7,40
Pasir	7,63	Musi Banyuasin	7,33
Indragiri Hilir	7,62	Karimun	7,33

Mayoritas daerah kota (85% diantara daerah kota) berada pada kelompok peringkat B hingga A (41% A dan 44% B), dan tidak satupun yang memiliki peringkat E. Sebaliknya 73% daerah kabupaten berada pada peringkat C hingga E. Hanya 13% kabupaten yang berada di peringkat A dan 14% berada pada peringkat B. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa untuk Faktor Ekonomi Daerah, daerah kota mempunyai daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah kabupaten.

Pada kelompok daerah yang berada pada kategori A, Kota Samarinda menduduki peringkat tertinggi dengan skor 8.30, disusul oleh Kota Pekanbaru (8.08), Kota Balikpapan (7.99) dan Kota Cilegon (7.94). Daerah kota yang berada pada kategori A ini rata-rata merupakan daerah industri dan jasa yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayahnya masing-masing. Kota Samarinda dan Balikpapan merupakan pusat kegiatan ekonomi di Propinsi Kalimantan Timur, yang merupakan propinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi akibat aktivitas di bidang pertambangan dan industri ikutannya. Kota Batam dan Pekanbaru juga merupakan dua daerah di Riau dan Kepulauan Riau yang sudah sejak lama menjadi *leader* bagi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Daerah-daerah yang berada di peringkat A untuk Faktor Ekonomi Daerah, memiliki karakteristik sebagai daerah yang memiliki basis ekonomi yang kuat. Ada dua jenis basis ekonomi dari daerah-daerah yang berada pada peringkat A, yaitu daerah-daerah dengan basis ekonomi sumber daya bentukan, dan ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam. Perekonomian daerah yang berbasis sumber daya bentukan berkembang karena adanya kegiatan ekonomi produktif yakni pada sektor sekunder (industrialisasi) dan sektor tersier. Dilihat dari kota-kota yang berada pada peringkat A, terlihat adanya pola bahwa beberapa kota mempunyai indikator ekonomi yang baik akibat dari kedekatan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Riau dan Kalimantan Timur merupakan dua daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kegiatan eksploitasi sumber daya alam di kedua daerah

ini, mendatangkan berkah bagi kota-kota utama di kedua daerah tersebut. Sementara Kota Cilegon, Tangerang, dan Medan merupakan kawasan industri yang sangat maju di Indonesia, wajar jika kemudian perekonomian kedua daerah ini juga menjadi baik. Daerah-daerah yang berada di pusat pertumbuhan, dan yang termasuk dalam wilayah metropolitan atau daerah penyangga kota-kota besar, biasanya memperlihatkan adanya kegiatan ekonomi modern, dari sektor sekunder hingga sektor tersier. Kegiatan industri merupakan satu sektor yang memiliki nilai tambah dan *multiplier effects* yang besar bagi perekonomian daerah. Kondisi perekonomian daerah kota yang jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah kabupaten karena PDRB yang tinggi, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula, yang dipicu oleh industrialisasi dan kegiatan ekonomi produktif di daerah-daerah perkotaan.

Kelompok daerah kabupaten yang berada pada kelompok A juga menunjukkan pola yang hampir sama dengan daerah kota. Pertama adalah daerah-daerah yang berbasis ekonomi sumberdaya alam, dan kedua adalah daerah-daerah industri. Kutai Timur, Kuantan Senggigi, Kutai Kertanegara, Bengkalis, Barito Utara, Berau dan Pelalawan, merupakan daerah pertambangan dan perkebunan yang memiliki potensi yang sangat besar. Anugerah kandungan sumber daya alam mendorong peningkatan PDRB Perkapita bagi penduduknya, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Sementara kelompok daerah lainnya adalah kabupaten-kabupaten yang berbasis ekonomi sumber daya bentukan atau akibat proses industrialisasi yang maju di daerah yang bersangkutan. Kab. Bekasi merupakan daerah berbasis industri yang berdekatan dengan Jakarta yang merupakan pusat kegiatan ekonomi terbesar di Indonesia. Sementara Kab. Gresik dan Sidoarjo di propinsi Jawa Timur, merupakan daerah industri yang besar di Jawa Timur. Gresik dan Sidoarjo merupakan daerah penyangga bagi Surabaya, yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. Jika kita lihat lebih detail lagi, maka terlihat bahwa daerah-daerah

industri yang berdekatan dengan kota-kota utama, juga memperoleh peringkat yang tinggi (B). Hasil selengkapnya bisa dilihat pada bagian lampiran.

Disisi lain keterpurukan peringkat berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah, juga disebabkan paling tidak oleh dua hal. *Pertama* karena daerah-daerah ini tidak mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup memadai. Anugerah sumberdaya alam yang dimiliki oleh suatu daerah, merupakan suatu modal awal bagi terciptanya kegiatan ekonomi, yang mampu meningkatkan perekonomian daerah. Apabila sumberdaya alam yang ada dapat dikelola secara baik, tentunya akan mendatangkan *multiplier effects* bagi kegiatan ekonomi lainnya. *Kedua*, secara geografis tampak jelas bahwa daerah-daerah yang berada pada peringkat E ini merupakan daerah-daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi atau jauh dari Kota. Dari 13 kabupaten yang berada pada peringkat E, 8 diantaranya berada di Propinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Kab. Sika, Ende, Timor Tengah Selatan, Sumba Barat, Ngada, Timor Tengah Utara, Lembata, dan Manggarai. Selebihnya adalah kabupaten kota yang

**Tabel 4.2**  
**Peringkat "E"**  
**Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah**

Kabupaten	Skor	Kabupaten	Skor
Kuningan	5,73	Pemalang	5,47
Sangihe Talaut	5,72	Lombok Timur	5,46
Pekalongan	5,72	Tanah Toraja	5,43
Bengkulu Utara	5,71	Jeneponto	5,43
Lebak	5,71	Pamekasan	5,42
Gorontalo	5,68	Kebumen	5,41
Tasikmalaya	5,68	Sika	5,39
Selayar	5,67	Ende	5,38
Tegal	5,66	Lampung Barat	5,37
Hulu Sungai Tengah	5,65	Timor Tengah Selatan	5,36
Maros	5,63	Sumba Barat	5,35
Luwu Utara	5,63	Ngada	5,31
Majene	5,58	Wonosobo	5,28
Hulu Sungai Utara	5,57	Timor Tengah Utara	5,27
Lombok Barat	5,56	Lembata	5,13
Gowa	5,53	Manggarai	5,09
Bondowoso	5,52	Jayawijaya	4,87
Asahan	5,52	Rejang Lebong	4,11
Belitung	5,49	Buton	1,96
Purbalingga	5,48		

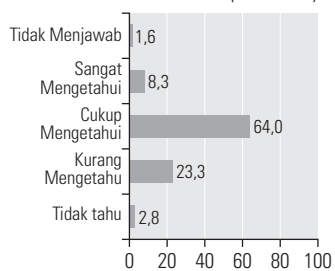
cukup terpencil yakni Lampung Barat, Jayawijaya, Rejang Lebong, dan Buton. Dengan melihat letak geografis ekonomi dari daerah-daerah yang berada pada peringkat E ini, semakin mempertegas bahwa, kondisi perekonomian suatu daerah sangat dipengaruhi oleh keberadaannya secara geografis diantara daerah-daerah lainnya. Kedekatan suatu daerah dengan pusat pertumbuhan ekonomi, akan memacu pertumbuhan daerah yang bersangkutan akibat aglomerasi dan *multiplier effects* dari pusat pertumbuhan ekonomi di dekatnya. Dalam hal ini, kota merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat kegiatan ekonomi produktif, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di sekitarnya.

Penyebab lainnya yang mungkin terjadi adalah bahwa daerah-daerah ini belum mampu menemukan potensi ekonomi daerah

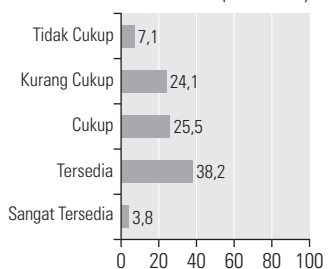
yang bisa dikembangkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Banyak daerah yang sesungguhnya memiliki potensi ekonomi yang cukup baik, namun mereka tidak mampu menemukan potensi yang dimiliki, dan merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat agar dapat mendatangkan kemajuan bagi daerah dan masyarakatnya. Sementara ada juga persoalan ketidakmampuan atau ketidakberdayaan dalam mengelola potensi yang ada. Untuk itu peran swasta, baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah tentunya akan sangat mendukung. Yang menjadi persoalan adalah, daerah tidak mampu menjual potensi yang dimilikinya. Sehingga potensi tersebut tetap tidur dan terkubur tanpa bisa berkembang. Tampak bahwa masih sedikit daerah yang mampu memberikan informasi potensi ekonomi yang dimilikinya untuk dikembangkan oleh pihak luar.

## INFORMASI POTENSI INVESTASI DAERAH

**Pengetahuan akan Potensi Ekonomi/Investasi di Daerah**  
(dalam %)



**Kecukupan Sarana yang Digunakan Untuk Promosi Potensi Investasi Daerah**  
(dalam %)



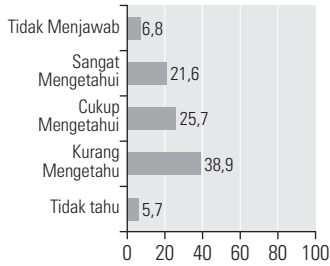
Banyak daerah yang memiliki potensi ekonomi tetapi tidak mampu mengelola dengan baik. Di sisi lain, tidak banyak pihak swasta yang berperan untuk mengelola potensi yang ada. Salah satu penyebab mengapa tidak banyak pihak swasta - baik dari daerah maupun dari luar daerah - yang berperan dalam mengelola potensi daerah adalah kurangnya pengetahuan mereka akan keberadaan potensi investasi yang ada di daerah-daerah. Dari studi pemeringkatan daya saing investasi daerah ditemukan, bahwa hanya 8.27% pelaku usaha yang mengetahui secara baik mengenai potensi investasi di daerahnya, sementara 26.11% pelaku usaha menyatakan kurang dan bahkan tidak mengetahui mengenai potensi investasi di daerah.

Cukup mengherankan jika hanya sedikit pelaku usaha (8.27%) yang mengetahui secara baik potensi investasi di daerah, karena sebagian besar pelaku usaha (67.43%) menyatakan bahwa dilihat dari sarana yang digunakan oleh pemda untuk promosi peluang investasi cukup tersedia dan sangat tersedia. Perlu dipertanyakan bagaimana kualitas sarana dan kegiatan yang dilakukan oleh pemda dalam rangka melakukan promosi investasi daerah.

Dari studi ini diketahui bahwa informasi mengenai potensi investasi yang diberikan oleh pemerintah daerah kurang jelas dan tidak jelas. Hal ini dinyatakan paling tidak oleh 28.4% responden. Dari sini tampak bahwa masih sedikit daerah yang mampu memberikan informasi potensi ekonomi yang dimilikinya untuk dikembangkan oleh pihak luar.

Para pelaku usaha menyatakan bahwa sumber informasi mengenai potensi ekonomi daerah bukan diperoleh dari pemerintah daerah. Sebanyak 53.93% pelaku usaha

**Kejelasan Informasi Mengenai Potensi Investasi Daerah**  
(dalam %)



memperoleh informasi mengenai peluang investasi di daerah dari rekan usaha, 37.17% berusaha mencari informasi sendiri, dan 35.94% pengusaha mendapat informasi dari media massa. Hanya 18.47% yang mengaku memperoleh informasi potensi investasi melalui acara promosi investasi yang dilakukan oleh pemda, dan 13.59% berasal dari brosur yang dibuat oleh pemda. Selebihnya, mereka memperoleh informasi dari situs internet yang dikelola oleh pemda (4.9%) dan dari pegawai pemda yang mendatangi mereka langsung (3.1%). Kondisi di atas menunjukkan bahwa pemda kurang mampu dalam mengemas potensi ekonomi yang dimilikinya,

hingga menjadi suatu informasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Belum banyak daerah yang memiliki strategi investasi yang efektif dan efisien dalam rangka promosi investasi. Akibatnya, potensi investasi yang ada di daerah tersebut tetap tidur dan terkubur tanpa bisa berkembang.

**Sumber Informasi Potensi Investasi Daerah**

Sumber Informasi Potensi Investasi Daerah	%
1. Dari rekan usaha.	53,9
2. Berusaha sendiri mencari informasi karena tidak tersedia informasi.	37,2
3. Melalui media masa (Surat kabar/Televisi/Radio)	35,9
4. Melalui acara promosi investasi daerah yang dilakukan oleh Pemda.	18,5
5. Melalui brosur yang dibuat oleh Pemda.	14,0
6. Melalui Situs Internet Pemda.	4,9
7. Didatangi oleh Pemda.	3,1

**5. Peringkat Faktor Tenaga Kerja**

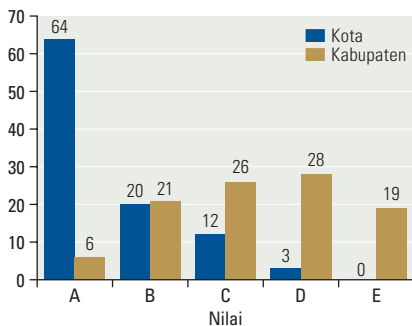
Dalam aktivitas usaha, selain kapital, dan input produksi, tenaga kerja dipandang sebagai salah satu faktor produksi yang mempunyai peran penting. Tenaga kerja merupakan motor penggerak kegiatan usaha. Dari tiga variabel yang tergabung dalam Faktor Tenaga Kerja, terlihat bahwa Variabel Kualitas Tenaga Kerja memiliki bobot terbesar dalam pertimbangan keputusan berinvestasi oleh para pelaku usaha di suatu daerah yakni sebesar 49%. Variabel Kualitas Tenaga Kerja

terdiri dari dua indikator yang secara umum juga memiliki bobot yang besar yakni Indikator Produktivitas (5.7%) dan Pendidikan Tenaga Kerja (3.3%). Diluar kedua indikator tersebut, Indikator Ketersediaan Tenaga Kerja Usia Produktif yang masuk dalam Variabel Ketersediaan Tenaga Kerja juga memiliki bobot yang besar yakni 3.5% terhadap daya saing investasi daerah secara umum. Dari pembobotan ini kita ketahui bahwa, pada akhirnya produktivitas tenaga kerja yang tinggi merupakan daya tarik yang besar bagi investasi. Hal inilah yang menjadi salah satu

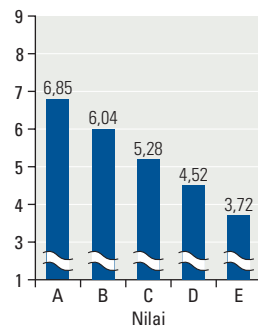
penentu peringkat daya tarik investasi suatu daerah, di samping ketersediaan tenaga kerja usia produktif dan tenaga kerja yang berpendidikan.

Kondisi ketenagakerjaan daerah-daerah di Indonesia pada tahun 2005 tampaknya cukup mengkhawatirkan, hal ini terlihat dari rata-rata skor yang diperoleh untuk Faktor Ketenagakerjaan yang hanya 5.38 untuk skala 1 s/d 9. Sementara dari hasil peringkat untuk Faktor Ketenagakerjaan diketahui bahwa daerah kota memperoleh rata-rata skor 6.47 yang

**Grafik 6.1**  
**Kelompok Peringkat Kota dan Kabupaten Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja**  
(dalam %)



**Grafik 6.2**  
**Nilai Rata-rata Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja**





lebih baik dibandingkan dengan daerah kabupaten yang hanya 5.00. Sebanyak 64% daerah kota berhasil masuk dalam kategori A, dan 20% lainnya masuk dalam kategori B. Tidak satupun daerah kota yang masuk dalam kategori E. kondisi sebaliknya terjadi pada daerah kabupaten, dimana 73% diantaranya masuk dalam kategori sedang hingga sangat kurang. Hanya 6% daerah kabupaten berada pada kategori peringkat A dan 20% pada kategori B, kondisi ini mencerminkan peta ketenagakerjaan daerah-daerah di Indonesia secara keseluruhan. Daerah perkotaan dapat menyediakan tenaga kerja yang lebih berkualitas, baik dilihat dari segi pendidikan maupun produktivitasnya, dibandingkan dengan daerah kabupaten. Dapat dimengerti bahwa, terbatasnya lapangan kerja di pedesaan telah mendorong perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota. Lapangan pekerjaan di kota menuntut tenaga kerjanya

lebih produktif dan memiliki pendidikan yang baik dibandingkan lapangan pekerjaan yang tersedia di pedesaan. Akibatnya daerah kabupaten yang sebagian besar merupakan daerah pedesaan menjadi kekurangan tenaga kerja yang berkualitas. Sebaliknya kualitas tenaga kerja di kota menjadi lebih baik daripada di kabupaten.

Dilihat dari daerah-daerah yang berhasil menduduki peringkat atas untuk Faktor Tenaga Kerja, terlihat bahwa semuanya merupakan daerah-daerah yang berbasis industri serta perdagangan jasa. Kota Kediri berada pada peringkat pertama dengan skor 7.67, disusul Kota Cirebon (7.61), kemudian Kota Padang (7.34) pada peringkat ke-3. Pada peringkat ke-4 diduduki oleh 2 daerah dengan skor 1.32, yakni Kota Jakarta dan Makasar. Industrialisasi di Kota Kediri telah mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja yang ada. Institusi-institusi pendidikan yang ada disana mampu menciptakan tenaga kerja dengan kualitas yang memadai. Kemakmuran kota ini, menarik orang dari daerah lain untuk bermigrasi, sehingga menambah ketersediaan tenaga kerja dengan upah yang kompetitif. Kota Padang berhasil berada pada peringkat ke-3 karena dilihat dari ketiga variabel pada faktor ini dinilai sangat baik. Kota Padang memiliki ketersediaan tenaga kerja yang besar dengan keterampilan dan pendidikan yang memadai, sehingga menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi. Selain itu upah tenaga kerja di Kota Padang juga lebih kompetitif dibandingkan dengan daerah-daerah kota lainnya. Beberapa kota besar seperti Jakarta, Makasar, Batam dan Tangerang, walau biaya tenaga kerja tergolong tinggi, namun produktivitas tenaga kerjanya sangat tinggi.

Pada pemeringkatan tahun 2005 hanya terdapat Kab. Pangkajene Kepulauan yang berada pada peringkat tertinggi untuk Faktor Ketenagakerjaan pada kelompok daerah kabupaten dengan skor 7.19. Di daerah ini berhasil menduduki peringkat tertinggi lebih banyak disebabkan oleh variabel biaya tenaga kerja yang relatif murah. Di samping itu di Pangkajene juga telah tersedia tenaga kerja dengan produktivitas dan keterampilan yang

**Tabel 5.1**  
**Peringkat "A"**  
**Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja**

Kota	Skor	Kota	Skor
Kediri	7,67	Palembang	6,87
Cirebon	7,61	Kendari	6,86
Padang	7,34	Surabaya	6,85
Tanjung Pinang	7,21	Sawahlunto	6,84
Makasar	7,20	Semarang	6,83
DKI Jakarta	7,20	Manado	6,74
Binjai	7,14	Bitung	6,65
Madiun	7,13	Bontang	6,64
Yogyakarta	7,13	Cilegon	6,62
Bandar Lampung	7,12	Kupang	6,62
Batam	7,10	Palu	6,60
Tangerang	7,01	Palangkaraya	6,58
Pekanbaru	7,00	Mataram	6,54
Malang	6,99	Bandung	6,51
Pematang Siantar	6,97	Dumai	6,50
Surakarta	6,95	Denpasar	6,45
Medan	6,94	Magelang	6,41
Pontianak	6,90	Bengkulu	6,39
Sibolga	6,89	Samarinda	6,36

Kabupaten	Skor	Kabupaten	Skor
Pangkajene Kepulauan	7,19	Bekasi	6,75
Bangka Barat	6,93	Kerinci	6,73
Musi Banyuasin	6,83	Gresik	6,72
Kolaka	6,82	Kampar	6,40
Pesisir Selatan	6,76	Sidoarjo	6,38

tinggi karena telah terbiasa dengan kegiatan produksi di bidang industri. Disamping itu Pangkajene juga merupakan daerah yang menyediakan tenaga kerja usia produktif. Standard upah tenaga kerja di Pangkajene juga dinilai relatif bersaing dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Hal inilah yang membuat daerah ini berhasil menduduki peringkat tertinggi dibandingkan daerah kabupaten lainnya. Daerah kabupaten lain yang mendapat peringkat yang A, juga didominasi oleh daerah-daerah kabupaten yang kegiatan ekonominya berbasis industri, seperti yang diperlihatkan oleh Kab. Gresik, Bekasi, dan Sidoarjo. Kegiatan industri dari skala besar hingga kecil yang ada di daerah ini saling beraglomerasi, hingga mampu menyediakan tenaga kerja terdidik dan produktif dalam jumlah banyak. Daerah-daerah yang memiliki jumlah tenaga kerja yang banyak juga berhasil menempati posisi teratas, seperti Kab. Pesisir Selatan, Bangka Barat, Musi Banyuasin, Kerinci dan Kab. Kampar. Di daerah-daerah tersebut upah tenaga kerja juga yang relatif murah, baik dilihat dari ketentuan formal (UMP/UMK) maupun upah riil yang biasa diberikan oleh pemberi kerja. Dari sini terlihat bahwa di samping produktivitas tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja dan biaya tenaga

kerja yang kompetitif memberikan kontribusi terhadap tingkat daya saing investasi daerah.

Tampaknya ada hubungan yang kuat antara tingkat industrialisasi suatu daerah dengan peringkat Faktor Ketenagakerjaan. Hal ini diperlihatkan bahwa daerah-daerah yang menduduki peringkat atas merupakan daerah-daerah yang telah mengalami industrialisasi yang relatif maju. Sementara daerah-daerah belum banyak mengalami industrialisasi, cenderung memiliki peringkat daya saing investasi daerah yang rendah. Dilihat dari basis kegiatan ekonomi di daerah-daerah yang menduduki peringkat bawah atau masuk dalam kategori E, seluruhnya didominasi oleh kegiatan ekonomi sektor primer yakni pertanian pangan, kehutanan, dan perkebunan. Kab. Nunukan merupakan daerah yang perekonomiannya lebih banyak ditopang oleh sektor Kehutanan, menduduki peringkat terbawah dengan skor 2.33, demikian juga Kab. Jayawijaya yang didominasi oleh sektor kehutanan dan pertanian lainnya. Kegiatan sektor ekonomi primer ini cenderung kurang memerlukan tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi. Hal yang sama juga diperlihatkan oleh daerah lain yang berada pada peringkat E, dimana secara keseluruhan perekonomian daerahnya didominasi oleh sektor pertanian pangan dalam skala kecil (pertanian rakyat).

Pada tahun 2005, secara keseluruhan, kondisi ketenagakerjaan di Indoneisa mengalami penurunan kualitas. Dilihat dari produktivitasnya, terjadi penurunan rata-rata yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2004 rata-rata produktivitas tenaga kerja sebesar Rp 24.891.997, pada tahun 2005 angka ini turun menjadi Rp 21.549.653. Penurunan upah formal juga terjadi secara proporsional selama masa krisis ekonomi. Perkembangan paska krisis menunjukkan upah di sektor formal meningkat secara drastis, dan berdasarkan nilai riil saat ini telah meningkat lebih dari 30 persen dibandingkan sebelum krisis. Perkembangan ini didorong oleh kenaikan upah minimum. Peningkatan ini, sebagian dipicu oleh pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan, dan lebih jauh lagi dengan pemberlakuan undang-undang jaminan sosial yang baru.

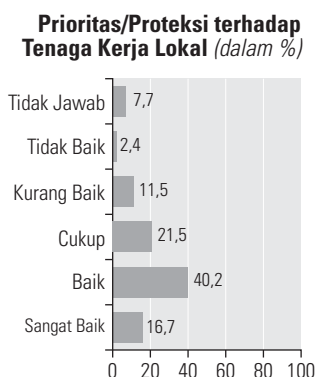
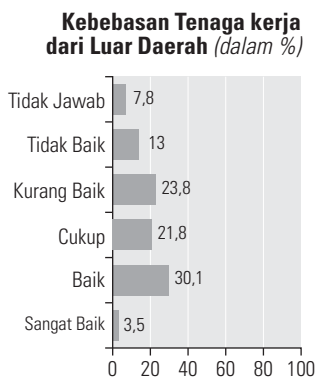
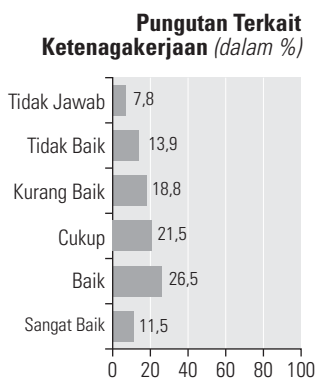
**Tabel 5.2**  
**Peringkat "E"**  
**Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja**

Kabupaten	Skor	Kabupaten	Skor
Pasuruhan	4,15	Luwu Utara	3,87
Jember	4,11	Hulu Sungai Utara	3,86
Tasikmalaya	4,11	Way Kanan	3,81
Ogan Ilir	4,08	Indramayu	3,8
Lamongan	4,07	Lembata	3,65
Banyuwangi	4,07	Bondowoso	3,63
Cianjur	4,07	Jeneponto	3,63
Lombok Barat	4,06	Jepara	3,57
Bantaeng	4,04	Buton	3,56
Timor Tengah Utara	3,99	Pamekasan	3,35
Ngada	3,99	Purbalingga	3,31
Pekalongan	3,95	Sumba Barat	3,15
Kebumen	3,93	Manggarai	3,13
Blitar	3,9	Sika	3,11
Kuningan	3,88	Jayawijaya	2,88
Pemalang	3,88	Nunukan	2,33

Perbandingan dalam dua tahun terakhir, untuk upah tenaga kerja baik berdasarkan aturan formal, maupun secara riil mengalami peningkatan. Biaya formal pada tahun 2004 secara rata-rata sebesar Rp.439.765,- pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp.532.659,- demikian juga untuk biaya aktual rata-rata

pada tahun 2004 sebesar Rp.718.194,- meningkat menjadi Rp.791.031,- pada tahun 2005. Bagaimanapun, pemerintah perlu menjamin bahwa biaya-biaya tenaga kerja sejalan dengan peningkatan produktivitas untuk menghindari resiko hilangnya daya saing dan lapangan kerja

## PETA MASALAH KETENAGAKERJAAN DI ERA OTONOMI



Faktor ketenagakerjaan, baik ketersediaan, produktivitas, besaran upah, dan lain sebagainya, menempati pengaruh penting dalam membentuk iklim usaha dan kemajuan suatu perusahaan. Bahkan, dalam studi pemeringkatan daya tarik investasi Kabupaten/Kota KPPOD tahun ini, bobot pengaruh faktor tersebut yang selama empat tahun sebelumnya menyumbang angka 13%, kini muncul dengan bobot sebesar 18%.

Namun patut dicatat, membesarnya bobot pengaruh faktor ini, antara lain, justru karena derajat persoalan dalam faktor ini juga tinggi atau semakin tinggi. Dalam hal upah/biaya, misalnya. Berdasarkan studi Sarken (2005), biaya formal dan biaya aktual rata-rata tenaga kerja tahun 2004 dan 2005 mengalami kenaikan, yakni masing-masingnya adalah Rp 439.765 menjadi Rp 532.659 dan Rp 718.194 menjadi Rp 791.031. Bagi para pelaku usaha, upah yang tinggi atau semakin tinggi sesungguhnya tidak menjadi masalah sejauh hal itu berjalan paralel dengan tingkat produktivitas. Sayangnya, hasil studi yang sama menunjukkan arah sebaliknya, tingkat produktivitas rata-rata justru menurun dari Rp 24.891.997 menjadi Rp 21.549.653.

Jenis permasalahan lainnya adalah, di lingkup daerah saat ini, bermasalahnya pungutan-pungutan terkait ketenagakerjaan diakui oleh para responden studi pemeringkatan KPPOD tahun ini. Dari 8.722 responden yang diwawancarai, sekitar 14% di antaranya menjawab bahwa pungutan-pungutan tersebut bermasalah dan 18% lainnya menjawab cukup bermasalah. Penilaian serupa juga terdapat dalam hal keberpihakan berlebihan (proteksi) atas tenaga kerja lokal yang dianggap bermasalah dan cukup bermasalah oleh masing-masing 2,3% dan 11,48% responden.

Dari kajian tekstual yang dilakukan KPPOD, dalam aspek kebijakan dan regulasi (Perda/SK Kepala Daerah), peta persoalan umum yang menandai distorsi kebijakan ketenagakerjaan di sejumlah daerah dalam masa pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini adalah: *pertama*, pelanggaran dalam hal perijinan dan pungutan terkait penggunaan tenaga kerja asing. Hal ini antara lain terlihat dalam Perda Kabupaten Mimika No.14 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan, Perda Kabupaten Musi Banyuasin No.19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan, Perda Kabupaten Bitung No.15 Tahun 2001 tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, dll. Padahal, perijinan (menurut Pasal 42 UU No.13 Tahun 2003) maupun pungutan (menurut Pasal 3 PP No.92 Tahun 2002) yang terkait dengan penggunaan TKA berada di pusat.

*Kedua*, pungutan yang tidak proporsional dan amat lemah dalam acuan konsiderans. Contoh baik mengenai poin ini adalah Perda Kabupaten Serang No. 13 Tahun 03 tentang Kewajiban Penyediaan Fasilitas Buruh/Pekerja. Melalui perda ini, dengan aturan tata cara penyeleng-garaannya dalam SK Bupati Serang No. 04 dan 05 Tahun 2004, setiap perusahaan swasta wajib menyediakan sejumlah fasilitas kesejahteraan buruh/pekerjanya, seperti fasilitas pendukung kesehatan, peribadatan, tempat makan olahraga, pakaian seragam kerja, rekreasi, koperasi, dan asuransi jaminan kecelakaan di luar jam kerja (Pasal 4 Perda No.13/03).

*Ketiga*, diskriminasi jender. Di sejumlah daerah ditemukan cukup banyak perda yang mengatur jam kerja lembur atau ijin kerja lembur malam bagi wanita dan mengenakan pungutan (retribusi) tertentu atasnya. Sebagai contoh, di Kabupaten Mamuju lewat Perda No.9 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Ketenagakerjaan menetapkan besaran tarif sebanyak Rp25.000/tahun bagi ijin kerja malam wanita (Pasal 9 huruf F). Sementara di Kota Tangerang, melalui Perda No.13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan, menetapkan besaran retribusi secara variatif berdasarkan skala perusahaan, yakni : perusahaan kecil sebesar Rp 15.000/tahun, perusahaan sedang sebesar Rp 25.000/tahun dan perusahaan besar sebesar

Rp 50.000/tahun sebagai biaya ijin kerja malam.

*Keempat*, proteksionisme (perlindungan berlebihan) bagi tenaga kerja lokal. Tidak hanya terjadi dalam sektor pemerintahan, di mana muncul tuntutan preferensi berlebihan bagi putera daerah untuk duduk dalam jabatan-jabatan strategis (politik dan birokrasi), gejala serupa juga terjadi dalam dunia swasta (bahkan tidak sekedar sebagai tuntutan masyarakat tapi sudah menjadi kebijakan pemerintah) terkait pemberian kesempatan kerja, dimana perusahaan wajib memberikan jatah, yang bahkan dengan patokan kuota tertentu bagi putera daerah untuk sesuatu pekerjaan dalam perusahaan tersebut.

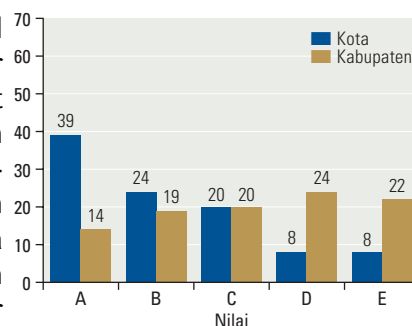
Begitu pentingnya posisi pengaruh Faktor Ketenagakerjaan di satu sisi dan banyaknya persoalan pada sisi lain menyebabkan efek serius bagi kelancaran berusaha di daerah. Semua itu menambah biaya tambahan (*additional cost*) dalam ongkos berbisnis (*cost of doing business*), baik biaya waktu (banyaknya waktu untuk bernegosiasi dengan pihak buruh dan pemda) maupun biaya material karena berbagai pungutan legal dan ilegal yang ada. Kekakuan dalam kebijakan ketenagakerjaan kita maupun iklim kebijakan makro yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah merupakan peta jalan ke mana arah menelusuri persoalan.

## 6. Peringkat Faktor Infrastruktur Fisik

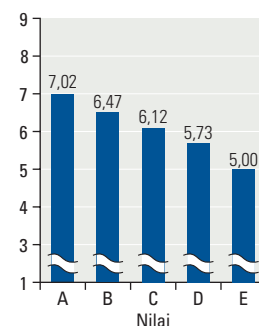
Suatu kegiatan usaha tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan infrastruktur fisik. Semakin besar skala usaha, maka kebutuhan akan infrastruktur fisik juga semakin besar. Infrastruktur fisik merupakan pendukung bagi kelancaran kegiatan usaha. Dua variabel penting dalam Faktor Infrastruktur Fisik adalah Variabel Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Fisik. Kedua variabel ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan usaha yang terjadi di daerah-daerah. Tidak heran jika pada tahun 2005 ini, para pelaku usaha memberikan perhatian yang lebih besar terhadap Faktor Infrastruktur

Fisik, dengan memberi bobot sebesar 16.7% terhadap pembentukan daya saing investasi suatu daerah. Indikator Ketersediaan dan Kualitas Sambungan Listrik merupakan dua

**Grafik 7.1**  
Kelompok Peringkat Kota dan Kabupaten Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik (dalam %)



**Grafik 7.2**  
Nilai Rata-rata Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik



indikator yang memiliki bobot terbesar diantara indikator-indikator lainnya dalam Faktor Infrastruktur Fisik ini.

Hasil pemeringkatan tahun 2005 menunjukkan terjadinya perbedaan yang signifikan skor daya saing investasi untuk Faktor Infrastruktur Fisik antara daerah Kabupaten dan daerah Kota. Secara rata-rata kondisi infrastruktur daerah kota lebih baik dibandingkan dengan kabupaten. Untuk daerah kota rata-rata indeks daya saing investasi untuk Faktor Infrastruktur Fisik adalah sebesar 6.47, sementara untuk kabupaten sebesar 5.95 dari skala 1 s/d 9.

Daerah kota memiliki ketersediaan maupun kualitas infrastruktur yang lebih lengkap dan baik, hanya sebagian kecil kota yang ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisiknya berada pada peringkat D dan E. Sebaliknya sebagian besar daerah kabupaten berada pada peringkat C, D dan E. Sebanyak 39% daerah kota, berada dalam kategori peringkat A dan 24% berada pada peringkat B. Sementara daerah kabupaten yang masuk dalam kategori A hanya sebesar 14% dan masuk kategori B sebanyak 19%. Kondisi sebaliknya terjadi pada perbandingan prosentase jumlah daerah Kota yang berada pada kategori D dan E. Daerah kabupaten yang berada pada ketegori D sebanyak 24% , kota hanya 8%, dan untuk kategori E kota hanya 8% sedangkan kabupaten sebanyak 22%. Kota-kota utama di Indonesia, berhasil menduduki peringkat teratas berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik. Tidak diragukan lagi bahwa kota-kota seperti Kota Balikpapan menduduki peringkat pertama dengan skor 8.02, disusul oleh Kota Padang (7.83), Batam (7.69). Kota-kota seperti Surabaya, Medan, dan Banjarmasin dan Jakarta juga berada pada peringkat atas, karena telah memiliki fasilitas yang telah lengkap, baik dari sisi ketersediaan jalan, sarana transportasi udara, laut, listrik, maupun sarana komunikasi seperti telepon.

Kota sebagai konsentrasi penduduk dengan aktivitas ekonomi yang kompleks, menuntut ketersediaan infrastruktur pendukung yang lebih lengkap dan lebih baik dibandingkan daerah kabupaten. Salah satu pendorong kemajuan ekonomi kota-kota

tersebut adalah dukungan sarana infrastruktur fisik dengan kualitas terbaik. Dukungan sarana transportasi darat, laut, dan udara, membuat mobilitas manusia, barang dan jasa, intra daerah dan ke luar daerah, menjadi lebih lancar. Sarana telekomunikasi yang tersedia di setiap jengkal wilayah kota, membuat seolah-olah kota-kota tersebut tidak lagi berjarak dengan dunia lainnya. Hal inilah yang membuat kota-kota tersebut menempati peringkat teratas dilihat dari Faktor Infrastruktur Fisik. Namun perlu diperhatikan juga bahwa, seiring dengan perkembangan kota-kota tersebut, ada sejumlah persoalan yang dapat mengganggu dari sisi ketersediaan infrastruktur fisik. Dengan beban pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, kota-kota seperti Jakarta, dan Surabaya, menghadapi persoalan kelancaran transportasi darat sebagai akibat kemacetan lalu lintas. Tidak heran jika kemudian kedua kota terbesar di

**Tabel 6.1**  
**Peringkat "A"**  
**Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik**

Kota	Skor	Kota	Skor
Balikpapan	8,02	Makasar	6,93
Padang	7,83	Bandar Lampung	6,89
Batam	7,69	Cilegon	6,89
Surabaya	7,34	Sukabumi	6,88
Medan	7,31	Manado	6,83
Banjarmasin	7,25	Yogyakarta	6,82
DKI Jakarta	7,21	Semarang	6,78
Denpasar	7,12	Pekanbaru	6,75
Bekasi	7,12	Sibolga	6,74
Bandung	7,05	Depok	6,70
Tangerang	7,02	Cirebon	6,68
Surakarta	6,96		

Kabupaten	Skor	Kabupaten	Skor
Maros	8,08	Sawahlunto Sijunjung	6,77
Gianyar	7,6	Sukabumi	6,76
Kediri	7,56	Bantul	6,76
Jembrana	7,4	Purbalingga	6,73
Karawang	7,23	Kuningan	6,73
Purwakarta	7,21	Klungkung	6,72
Bogor	7,13	Gresik	6,68
Bangli	7,07	Sidoarjo	6,68
Tabanan	6,97	Ciamis	6,67
Donggala	6,87	Lombok Barat	6,66
Cianjur	6,8	Bulungan	6,66
Solok	6,78	Jepara	6,66

Indonesia tersebut tidak menduduki peringkat teratas untuk Faktor Infrastruktur Fisik ini.

Peringkat atas untuk kelompok kabupaten, diduduki oleh kabupaten-kabupaten yang berbasis industri dan merupakan penyangga ibukota provinsi, dengan peringkat pertama adalah Kab. Maros dengan skor 8.08. Maros merupakan merupakan daerah penyangga Kota Makassar yang merupakan kota utama di wilayah Indonesia bagian timur. Maros memiliki kawasan industri yang cukup besar, yang terhubung dengan pelabuhan laut dan udara berskala internasional. Dua daerah di Bali berhasil menduduki peringkat atas yakni Kab. Gianyar pada peringkat ke-2 dengan skor 7.60 dan Kab. Jembrana pada peringkat empat dengan skor 7.40. Untuk hasil pemeringkatan tahun 2005 ini, dominasi daerah di Jawa dalam peringkat infrastruktur fisik sedikit bergeser, dimana tahun ini diwakili oleh Kab. Karawang dan Kab. Kediri, dan Purwakarta, Bogor, dan beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Daerah-daerah

ini merupakan pusat kegiatan industri modern di Indonesia. Di Kab. Karawang, terdapat kawasan industri dan kota industri modern yang terbesar di ASEAN, selain puluhan zona-zona industri. Daerah yang berada pada kategori A di atas, memiliki infrastruktur fisik yang memadai, dan akses yang lancar ke pelabuhan laut maupun udara, sehingga memudahkan mobilitas kegiatan usaha pebisnis di daerah-daerah ini. Daerah-daerah ini memiliki keuntungan sebagai dampak aglomerasi dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi dari daerah sekitarnya. Aglomerasi ini memungkinkan terjadinya *sharing* fasilitas suatu daerah dengan daerah-daerah di sekitarnya.

Berbeda dengan daerah-daerah yang berada di peringkat atas, daerah-daerah yang menempati peringkat bawah, rata-rata adalah daerah yang jauh dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi. Hanya ada 5 daerah kota yang berada pada kelompok peringkat E, yakni Kota Tanjung Balai di Sumatera Utara, Kota Sorong di Papua, Kota Samarinda di Kaltim, Palangkaraya di Kalteng, dan Pekalongan di Jawa Tengah. Kota-kota ini kurang berkembang karena lokasinya yang kurang strategis, dan tidak banyak kegiatan ekonomi produktif yang dapat memacu perkembangan kota, sehingga perkembangan sarana dan prasarana fisiknya juga kurang maju. Kabupaten-kabupaten yang berada di luar Pulau Jawa, seperti Kalimantan, Papua, NTT, dan daerah pelosok lainnya mendominasi peringkat terbawah untuk Faktor Infrastruktur Fisik. Kab. Kutai Timur dan Barito Selatan, meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak didukung oleh infrastruktur fisik yang memadai, baik berupa jalan darat, laut, maupun udara. Di daerah ini juga masih dinilai kekurangan sumber energi listrik maupun jaringan komunikasi. Hal yang relatif sama terjadi pada Kab. Rokan Hulu, Bengkulu Selatan, Fak-fak di Papua, Sanggau di Kalimantan Barat dan lainnya, serta di beberapa daerah kepulauan terpencil seperti di Natura. Tiga daerah di Jawa yang berada pada peringkat E yakni Lamongan, Kulonprogo, Pasuruan dan Kab. Magetan. Daerah-daerah ini jauh dari pusat kota,

**Tabel 6.2**  
**Peringkat "E"**  
**Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik**

Kota	Skor	Kota	Skor
Pekalongan	5,38	Samarinda	5,09
Sorong	5,29	Tanjung Balai	4,90
Palangkaraya	5,27		

Kabupaten	Skor	Kabupaten	Skor
Luwu Utara	5,49	Poso	5,14
Lampung Timur	5,49	Sambas	5,12
Lamongan	5,48	Lingga	5,1
Pasuruhan	5,48	Tapanuli Utara	4,94
Bengkulu Utara	5,46	Magetan	4,9
Karo	5,43	Bangka Selatan	4,86
Kulonprogo	5,38	Sanggau	4,79
Kapuas Hulu	5,35	Fakfak	4,78
Majene	5,34	Natuna	4,72
Pelalawan	5,31	Muna	4,7
Way Kanan	5,31	Dompu	4,64
Mimika	5,31	Buton	4,62
Tapin	5,3	Kutai Timur	4,46
Dairi	5,28	Kampar	4,45
Pontianak	5,27	Bengkulu Selatan	4,37
Bangka	5,26	Jayawijaya	4,37
Sorong	5,24	Barito Selatan	4,34
Kuansing	5,19	Rokan Hulu	3,91
Ngada	5,14	Tanjung Jabung Timur	3,3

sehingga merika tidak memperoleh mafaat dari efek aglomerasi sharring infrastruktur fisik kota yang lebih baik. Kab. Magetan merupakan daerah yang terletak di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah bagian selatan. Persoalan infrastruktur fisik dasar seperti jalan darat dan tenaga listrik tampaknya masih menjadi kendala utama bagi perkembangan

ekonomi di daerah-daerah ini. Walaupun sebagian dari daerah-daerah ini memiliki potensi ekonomi yang baik, namun keterisolasian akibat minimnya sarana pendukung berupa infrastruktur fisik menjadi penghambat kegiatan ekonomi di daerah-daerah ini.

## **KONDISI KETENAGA- LISTRIKAN INDONESIA**

Pertumbuhan perekonomian Indonesia yang diukur dengan membandingkan antara Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tahun 2005 dengan tahun 2004 mencapai 5,60%. Sementara pertumbuhan pada tahun 2004 sendiri jika dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar 5,13%. Namun demikian pertumbuhan pesat di bidang perekonomian ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan.

Kondisi infrastruktur di sektor ketenagalistrikan selama ini terjadi peningkatan yang tidak seimbang antara jumlah permintaan dengan peningkatan kapasitas energi listrik, selain itu juga terjadi ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pasokan dari bahan bakar minyak dan batu bara. Untuk memenuhi kebutuhan listrik hingga tahun 2013, pemerintah, menurut Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerja Sama Internasional (Bapekki) Departemen Keuangan dan *Center for Energy and Power Studies* PT PLN (Persero), memperkirakan perlu ada tambahan kapasitas pembangkit sekitar 6.161 megawatt (MW), sudah termasuk *committed* dan *on going projects*. Perinciannya, 5.338 MW proyek PLN dan 823 MW proyek swasta dan pemerintah daerah (pemda).

Upaya peningkatan produksi energi listrik tentunya tidak dapat diselesaikan dalam hitungan satu atau dua bulan, tetapi lebih merupakan proses yang harus dilakukan secara bertahap. Sementara kondisi ketersediaan energi listrik sendiri sudah sangat kritis, pemadaman dapat terjadi apabila pada saat tertentu pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik mengalami hambatan dan apabila pada saat beban puncak terjadi pemakaian daya melebihi dari kapasitas yang terpasang.

Untuk mencegah terjadinya pemadaman listrik oleh PLN Pemerintah melalui Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005, menganjurkan penghematan terhadap instansi-instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha daerah, dan sektor swasta. Dalam pelaksanaannya instruksi ini tidak banyak membantu dalam menyelesaikan kekurangan pasokan energi oleh PLN. Sehingga perlu adanya partisipasi masyarakat (swasta), baik untuk menyediakan kebutuhan energi listrik masyarakat umum ataupun kebutuhannya sendiri. Untuk mengundang pihak swasta dalam penyediaan energi listrik tersebut, pemerintah belum memberikan insentif bagi pengusaha. Rendahnya harga jual energi listrik dan tingginya pungutan bagi pengusaha dalam menyelenggarakan produksi energi listrik, ikut menghambat pertumbuhan investasi di bidang ketenagalistrikan.

Selain permasalahan mengenai rendahnya harga jual energi listrik pengusaha juga menghadapi kendala perpajakan ditingkat pusat dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di daerah. PPJ dipungut atas dasar manfaat penerangan jalan yang diterima oleh masyarakat, dasar pengenaan tariff PPJ dihitung berdasarkan pada penggunaan energi listrik baik yang disediakan oleh PLN maupun energi yang tidak disediakan oleh PLN. Dasar hukum dari PPJ adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Tarif PPJ menurut UU dihitung berdasarkan pada nilai jual tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh Negara (PLN) maupun dihasilkan oleh swasta. Dalam hal tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah.

Pelaksanaan penetapan tarif yang didasarkan pada penaksiran dalam sejumlah perda, diatur lebih lanjut dengan ketetapan kepala daerah. Sementara, perda sendiri tidak memberikan rumusan yang jelas bagi kepala daerah untuk menetapkan perhitungan penaksiran penggunaan energi listrik. Selain itu penghitungan tarif yang didasarkan pada kapasitas terpasang bukan realisasi penggunaan energi bertentangan dengan prinsip penerima manfaat yang lebih banyak maka dia harus membayar pajak lebih besar, dan juga bertentangan dengan prinsip keadilan pajak, dimana bisa saja terjadi mesin yang memiliki kapasitas lebih tinggi hanya menggunakan energi yang lebih kecil.

Kebutuhan pengaturan perda PPJ sebagai sarana pembiayaan oleh pemda memiliki dasar hukum yang kuat karena merupakan amanat dalam UU 34/2000 dan PP 65/2001. Namun demikian dalam pembentukannya pemda sebaiknya tidak semata-mata hanya melihat pada aspek legalitas, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek filosofis dan kebutuhan masyarakat. Karena itu Perda PPJ setidaknya juga memperhatikan pada prinsip manfaat yang menyatakan bahwa siapa yang menikmati manfaat lebih banyak dari adanya pelayanan pemerintah maka dia harus membayar lebih banyak dan setiap orang harus kena pajak dalam proporsi penerimaan yang dinikmati atas perlindungan negara.

Karena itu pemungutan PPJ atas penggunaan energi listrik yang tidak disediakan oleh negara (PLN) menjadi tidak tepat dan harus ditinjau ulang kembali. Sedangkan untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah dan melindungi keamanan (lingkungan) terkait dengan penggunaan energi listrik oleh swasta perlu ditetapkan dalam objek pajak yang berbeda, namun demikian penetapan pajak baru ini harus memperhatikan pada aspek ekonomi biaya tinggi. Terutama untuk mendukung pemerintah dalam memenuhi kebutuhan energi listrik yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.



## IV. Penutup

---

Salah satu motivasi dibalik penerapan kebijakan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. 5 tahun pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan hasil yang beragam. Di beberapa daerah, perbaikan kinerja pemerintah ini diikuti oleh kemajuan, sementara di beberapa daerah lain masih dijumpai persoalan akibat kebijakan yang tumpang tindih, rumit, dan tidak konsisten. Kondisi tersebut tergambar dalam laporan tahunan studi pemeringkatan daya saing investasi daerah yang dilakukan oleh KPPOD. Hasil studi tahun 2005 memperlihatkan perlunya upaya untuk mendorong tumbuhnya kegiatan usaha baru untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah yang dengan sendirinya penerimaan daerah dari sektor pajak akan meningkat, yang dapat digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik, seperti untuk pendidikan, kesehatan dan perbaikan sarana transportasi. Dari hasil pemeringkatan dan penelusuran di lapangan dapat diambil beberapa catatan penting sebagai berikut:

### A. TEMUAN

1. Sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan otonomi daerah Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya masih menjadi perhatian utama bagi para pelaku usaha, dan memiliki bobot pengaruh yang

terbesar dibandingkan dengan 4 faktor lainnya. Dibandingkan hasil pembobotan faktor-faktor penentu daya saing investasi tahun sebelumnya (2002-2004), hasil pembobotan faktor penentu daya saing investasi pada tahun 2005 memperlihatkan bawah Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya memiliki bobot terbesar dalam mempengaruhi daya saing investasi suatu daerah, yakni sebesar 27.4%, kemudian disusul Faktor Ekonomi Daerah (22.6%), Faktor Tenaga Kerja (18.3%), Faktor Infrastruktur Fisik (16.7%), dan terakhir bobot terkecil diperoleh Faktor Kelembagaan (15%);

2. Faktor Kelembagaan yang pada tahun 2002-2004 memiliki bobot terbesar (31%), untuk pemeringkatan tahun 2005 justru memiliki bobot terkecil dibandingkan dengan keempat faktor lainnya, yakni hanya sebesar 15%. Hasil ini secara positif dapat diartikan bahwa iklim investasi daerah-daerah di Indonesia kembali pada kondisi normal yakni lebih banyak dipengaruhi oleh Faktor Ekonomi, Infrastruktur dan Tenaga Kerja. Sebaliknya, hasil ini juga dapat diartikan adanya apatisme dari para pelaku usaha terhadap kondisi kelembagaan di daerah-daerah, mengingat selama 5 tahun pelaksanaan otonomi daerah, ternyata belum banyak terjadi perbaikan yang signifikan dalam Faktor Kelembagaan;

3. Secara umum, studi ini menemukan bahwa daya saing investasi daerah kabupaten/kota di Indonesia masih belum memuaskan, terlihat dari rata-rata indeks daya saing investasi yang masih rendah (6,04), masih jauh dari nilai 9. Kelemahan daya saing investasi daerah di Indonesia terutama dari Faktor Kelembagaan dan Tenaga Kerja. Rata-rata indeks daya saing kedua faktor ini sangat rendah, yakni 5,43 dan 5,38. Daya saing investasi daerah secara umum, bisa menjadi lebih baik jika rata-rata indeks daya saing untuk Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya, serta Faktor Ekonomi Daerah lebih baik lagi, karena kedua faktor ini memiliki bobot pengaruh yang paling besar dibandingkan dengan faktor lainnya;
4. Secara umum, studi pemeringkatan 2005 ini memperlihatkan kecenderungan bahwa daerah perkotaan dan daerah-daerah yang berdekatan dengan kota, memiliki daya saing investasi yang lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan (kabupaten). Hal ini, bisa dijelaskan oleh perbedaan karakteristik antara kota dan kabupaten yang mempunyai pengaruh dalam upaya menciptakan iklim investasi. Beberapa kabupaten dan kota yang berada dalam peringkat atas terutama karena daerah-daerah tersebut memiliki keunggulan pada Faktor Ekonomi, Tenaga Kerja, dan Infrastruktur Fisik;
5. Kondisi kelembagaan daerah-daerah di Indonesia sampai dengan tahun kelima pelaksanaan otonomi daerah belum menggembirakan. Peringkat berdasarkan Faktor Kelembagaan, terlihat rata-rata skor dan peringkat kabupaten lebih baik dibandingkan dengan peringkat daerah kota, walau perbedaannya tidak terlalu mencolok. Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas untuk Faktor Kelembagaan disebabkan oleh kuatnya kepemimpinan kepala daerah, perbaikan dalam prosedur pelayanan perizinan usaha, serta upaya mengurangi persoalan pungutan liar, kepastian hukum, peraturan daerah dan sebagainya;
6. Sejumlah daerah telah mulai melakukan perbaikan dalam birokrasi perizinan usaha dengan membentuk sistem perizinan secara *One Stop Services (OSS)*. Sekitar 15% responden dalam penelitian ini mengaku menggunakan OSS untuk mengurus berbagai perijinan usaha. Namun demikian, belum banyak pemerintah daerah yang mendirikan OSS dengan fasilitas dan pelayanan yang diharapkan oleh para pelaku usaha;
7. Aspek kepemimpinan daerah diyakini oleh para pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing investasi daerah. Hubungan yang baik antara pelaku usaha dengan kepala daerah merupakan indikator yang paling berpengaruh dalam meningkatkan daya saing investasi daerah. Diyakini adanya hubungan antara intensitas kepala daerah dalam menciptakan iklim investasi dengan tingkat indeks daya saing investasi baik secara keseluruhan maupun dalam hal perbaikan kelembagaan pemerintah daerah. Keteladanan kepala daerah juga merupakan faktor pendukung dalam peningkatan daya saing investasi daerah;
8. Walaupun kepemimpinan daerah memiliki pengaruh yang besar dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, namun ternyata menurut para pelaku usaha justru dalam praktiknya banyak dijumpai persoalan yang terkait dengan kualitas kepemimpinan kepala daerah. Lebih dari 30% responden menyatakan bahwa kualitas hubungan antara kepala daerah, serta penyalahgunaan kepala daerah dalam memberikan izin usaha dinilai buruk, bahkan sangat buruk;

9. Terkait dengan Faktor Kelembagaan, terutama masalah kepastian hukum, meski ditemui adanya penurunan yang cukup signifikan, pungutan liar dari berbagai pihak (preman, organisasi pemuda/ormas, aparat keamanan, sumbangan sosial, pungutan Pemda, DPRD, dll), diakui masih menjadi beban para pelaku usaha. Besarnya pungutan liar rata-rata diperkirakan sebesar 2.1% dari biaya produksi kegiatan usaha;
10. Besarnya beban pungutan tidak resmi berbanding terbalik dengan skala usaha. Studi ini menemukan bahwa semakin kecil skala usaha, maka prosentase beban biaya tidak resmi terhadap biaya operasional usaha semakin besar. UKM menanggung biaya tidak resmi paling besar dibandingkan dengan pengusaha skala usaha yang lebih besar. Dalam satu bulan, UKM harus membayar biaya tidak resmi sebesar rata-rata 6.9% dari biaya operasional usaha. Sebaliknya perusahaan dengan modal usaha sampai dengan 50 juga mendapat beban sebesar 2.57% dari biaya operasional, dan skala usaha besar dengan biaya operasional usaha diatas 2 milyar beban biaya tidak resmi yang ditanggung sebesar rata-rata 0.45%;
11. Pelaksanaan birokrasi pelayanan perizinan usaha di daerah masih belum sesuai dengan harapan dunia usaha. Untuk mendapatkan izin usaha, para pelaku usaha harus mengeluarkan tambahan biaya tidak resmi diluar biaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang besarnya rata-rata 109.4% dari biaya resmi. Semakin kecil biaya resmi, semakin besar tambahan biaya tidak resmi yang harus dibayar untuk mendapatkan sebuah perijinan usaha. Untuk rata-rata biaya tidak resmi sebesar Rp.15.000,- rata-rata tambahan biaya tidak resmi yang harus ditanggung sebesar Rp.52.000,- atau 475%. Untuk rata-rata biaya resmi diatas Rp.8.000.000,-rata-rata tambahan biaya tidak resmi sebesar 67.6% dari biaya resminya;
12. Belum ada kepastian waktu untuk menyelesaikan perizinan usaha. Rata-rata waktu untuk menyelesaikan seluruh perizinan usaha yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah selama 17 hari kerja. Dalam realisasinya, rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah selama 32 hari kerja, atau ada tambahan 15 hari kerja untuk menyelesaikan perizinan usaha di daerah. Waktu paling cepat yang dijanjikan oleh pemerintah daerah adalah 3 hari kerja, sementara realisasinya adalah 6 hari kerja, atau ada tambahan 3 hari kerja. Rata-rata waktu paling lama yang dijanjikan oleh pemerintah daerah 81 hari kerja, dan realisasinya selama 177 hari kerja atau adanya tambahan 97 hari kerja dari yang dijanjikan;
13. Masih ditemukan sejumlah perda di berbagai daerah yang mendistorsi kegiatan usaha. Berdasarkan penelusuran lapangan, 24.6% pelaku usaha yang menjadi responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan usaha mereka terdistorsi oleh perda-perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sementara dari hasil kajian terhadap 1.379 perda yang disebar di 228 daerah, ditemukan bahwa dari sisi kejelasan tarif, 10,1% diantaranya berpotensi mendistorsi kegiatan usaha. Dan dari sisi kejelasan prosedur perizinan, 14,04% diantaranya juga berpotensi mendistorsi aktivitas usaha. Meski demikian, hasil penelitian tahun 2005 ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2004, dimana dari 1.025 Perda di 214 daerah, 30,1% diantaranya berpotensi mendistorsi kegiatan usaha;
14. Banyaknya perda yang bermasalah ini, terkait dengan proses perumusan perda yang kurang partisipatif. Meskipun

demikian hasil penelitian pada tahun 2005 menunjukkan bahwa 61,3% responden menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam proses perumusan peraturan daerah. Hasil ini lebih baik dibandingkan tahun 2004, dimana 86.4% responden menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam perumusan kebijakan daerah. Kalaupun tingkat keterlibatan pelaku usaha dalam perumusan perda meningkat, namun kualitas keterlibatan pelaku usaha ini ternyata masih kurang memuaskan. Hal ini dinyatakan oleh 38,82% responden. Sementara itu, hanya 3.55% yang menyatakan kualitas keterlibatan sudah mencapai kualitas yang sangat baik;

15. Selama tahun 2005, hanya ada beberapa daerah yang dinilai kurang aman untuk kegiatan investasi, sehingga daya saing investasi berdasarkan Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya daerah-daerah di Indonesia memiliki rata-rata indeks yang cukup tinggi yakni 6,37 atau 6,23 untuk kota dan 6,41 untuk kabupaten. Sementara perbandingan antara kabupaten dan kota, terlihat bahwa Faktor Keamanan Politik dan Sosial Budaya, kabupaten sedikit lebih kondusif dibandingkan dengan kota. Kota yang memiliki kompleksitas masalah sosial yang tinggi, seperti tingginya intensitas gangguan demonstrasi terhadap kegiatan usaha dan kriminalitas. Kabupaten dan kota dengan keamanan, politik dan sosial budaya yang stabil, tercipta dari keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi kegiatan usaha, hubungan yang baik dengan legislatif, dan jaminan kebebasan mobilitas barang dan jasa, serta penggunaan tenaga kerja dari daerah atau negara lain;
16. Faktor Ekonomi memiliki indeks paling baik dibandingkan 4 faktor lainnya, yakni rata-rata sebesar 6,57. Kota mempunyai

daya saing yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten. Pada tahun 2005, secara umum kondisi ekonomi daerah perkotaan lebih baik dibandingkan dengan daerah kabupaten. Kondisi ekonomi daerah perkotaan di tahun 2005 mengalami perbaikan, sementara untuk daerah kabupaten justru mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan oleh mayoritas daerah kota berada pada peringkat A dan B, dan tidak satupun kota yang berada pada peringkat E, sementara daerah kabupaten lebih banyak pada peringkat D dan E. Faktor yang menyebabkan ekonomi kota lebih baik adalah karena daya beli masyarakat kota lebih tinggi dibandingkan kabupaten. Pada tahun 2004, rata-rata PDRB Perkapita Kota adalah sebesar Rp.16,5 juta, sementara rata-rata PDRB Perkapita Kabupaten hanya sebesar Rp.13,5 juta pertahun;

17. Daerah-daerah yang berada pada peringkat atas untuk Faktor Ekonomi Daerah, merupakan daerah-daerah yang perekonomiannya didominasi oleh sektor modern seperti manufaktur dan perdagangan jasa. Di sisi lain daerah-daerah pertanian tradisional dan terpencil berada pada peringkat rendah. Perkembangan perekonomian daerah ini banyak dipengaruhi oleh biaya ekonomi sebagaimana terepresentasikan oleh indeks kemahalan konstruksi yang merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam studi ini. Hal ini menyebabkan peringkat Faktor Ekonomi kota lebih baik dibandingkan kabupaten;
18. Kondisi ketenagakerjaan daerah-daerah di Indonesia pada tahun 2005 cukup mengkhawatirkan, hal ini terlihat dari rata-rata skor yang diperoleh untuk Faktor Ketenagakerjaan yang hanya 5,38. Kondisi ini, sedikit banyak mencerminkan peta permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia secara keseluruhan. Pada tahun 2005 produktivitas tenaga kerja mengalami penurunan yang cukup

signifikan, dari rata-rata Rp.25 juta pada tahun 2004 menjadi Rp. 21,5 juta di tahun 2005. Pasca krisis 1998, upah minimum meningkat secara drastis hingga lebih 30 persen dibandingkan sebelum krisis;

19. Sementara perbandingan antara kota dan kabupaten memperlihatkan ketenagakerjaan daerah perkotaan juga lebih baik dibandingkan dengan daerah kabupaten. Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas, daerah kota lebih banyak berada pada peringkat A dan B, dibandingkan dengan daerah kabupaten. Dari sisi ketersediaan dan kualitas tenaga kerja, kota lebih baik dibandingkan kabupaten. Hal ini disebabkan oleh kualitas sistem pendidikan, industrialisasi mendorong peningkatan produktivitas dan keterampilan pekerja, serta ketersediaan penduduk usia kerja. Adapun hal yang menyebabkan kualitas dan ketersediaan tenaga kerja kota lebih baik dibandingkan dengan kabupaten adalah, terbatasnya lapangan kerja di pedesaan, yang kemudian mendorong perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota. Sementara kegiatan ekonomi kota menuntut tenaga kerjanya lebih produktif daripada di pedesaan;
20. Terlihat perbedaan yang signifikan pada daya saing investasi antara daerah kabupaten dan kota berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik. Infrastruktur kota lebih baik dibandingkan dengan kabupaten, baik dari sisi ketersediaan maupun kualitas. Daerah-daerah yang berada di pusat kegiatan ekonomi dan industri dan sekitarnya mendominasi peringkat atas berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik. Daerah-daerah ini memperoleh manfaat dari efek aglomerasi dengan pembagian infrastruktur antar daerah yang saling berdekatan. Kota sebagai konsentrasi penduduk dengan aktivitas ekonomi yang kompleks, menuntut ketersediaan infrastruktur pendukung yang lebih lengkap dan lebih baik dibandingkan

daerah kabupaten. Kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya walaupun memiliki skor tinggi untuk Faktor Infrastruktur Fisik, namun tidak diimbangi dengan kebijakan kelembagaan yang baik dalam pengelolaan infrastruktur, sehingga menghadapi persoalan yang rumit terkait dengan penyediaan infrastruktur fisik;

## B. SARAN-SARAN

1. Daerah-daerah perlu mengenali faktor-faktor kelemahan dalam menarik investasi di daerahnya, agar dapat melakukan perbaikan. Selain itu juga perlu dilakukan penelusuran lebih dalam faktor-faktor, variabel, atau indikator yang menjadi kekuatan dari daerah lainnya, untuk kemudian dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing investasinya;
2. Perbaikan pelayanan publik perlu dilakukan oleh daerah-daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi terhadap dunia usaha, agar tercipta pelayanan yang prima, mudah, murah dan cepat yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi sebagaimana tuntutan dunia usaha. Pembentukan pelayanan birokrasi pelayanan publik dengan sistem OSS yang memberi kemudahan dalam pelayanan perizinan usaha perlu direplikasikan di daerah-daerah otonom lainnya;
3. Keterlibatan dunia usaha dan *stakeholders* lainnya dalam setiap perumusan kebijakan publik merupakan syarat mutlak agar tercipta sebuah pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan, serta terwujudnya kebijakan publik yang berkualitas dan dapat diterima oleh setiap pihak. Praktik-praktik positif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh daerah lainnya, seperti transparansi dan partisipasi publik perlu direplikasikan dan dikembangkan di daerahnya sesuai dengan karakteristik masyarakat di daerahnya;

4. Untuk meningkatkan daya saing investasi daerah perlu dilakukan kerjasama antar daerah dan membentuk iklim investasi yang mencakup kawasan tertentu. Keuntungan dari kerjasama antar daerah ini adalah dapat memperoleh efek aglomerasi yang salah satunya adalah berbagi infrastruktur, berbagi informasi dan keterkaitan ekonomi antar daerah;
5. Perbaikan sarana fisik dan pembangunan infrastruktur baru sebagai pendukung kegiatan usaha mutlak untuk terus dilakukan, mengingat bahwa ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik ini mampu mendorong tumbuhnya aktivitas usaha baru dan mendatangkan *multiplier-effects* yang besar;
6. Kota maupun kabupaten yang memiliki skor tinggi untuk infrastruktur fisik, harus melakukan perencanaan pembangunan jangka panjang dan terus melakukan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada. Dalam jangka panjang, seiring perkembangan perekonomian daerah, akan dijumpai sejumlah persoalan terkait dengan ketersediaan infrastruktur fisik;
7. Mengingat bahwa sebagian besar daerah yang memperoleh peringkat tinggi adalah daerah-daerah yang berada di sekitar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka perlu dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di kawasan tertentu secara terpadu. Upaya pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut akan dapat terwujud dengan baik apabila beberapa rekomendasi di atas dijalankan secara konsisten.

## Lampiran

---

PERINGKAT DAERAH  
PROFIL DAERAH  
BOBOT PEMERINGKAT

## PERINGKAT DAERAH

Lampiran 1.1 : Peringkat 59 Kota Berdasarkan Seluruh Faktor (Umum)

No.	Propinsi	Kota	Nilai	Peringkat
1	KEPRI	Batam	7,16	A
2	BANTEN	Cilegon	7,09	A
3	SUMBAR	Padang	7,09	A
4	KALTIM	Balikpapan	7,08	A
5	BALI	Denpasar	7,07	A
6	BANTEN	Tangerang	6,99	A
7	LAMPUNG	Bandar Lampung	6,89	A
8	SUMUT	Sibolga	6,85	A
9	SUMBAR	Sawahlunto	6,82	A
10	JABAR	Cirebon	6,80	A
11	SULSEL	Makasar	6,78	A
12	JATENG	Surakarta	6,74	A
13	JATIM	Surabaya	6,65	A
14	KEPRI	Tanjung Pinang	6,64	A
15	SUMUT	Medan	6,58	A
16	JATIM	Kediri	6,57	A
17	JABAR	Bandung	6,56	A
18	DIY	Yogyakarta	6,56	A
19	SULUT	Manado	6,55	A
20	RIAU	Pekanbaru	6,55	A
21	JATENG	Semarang	6,54	A
22	SULTRA	Kendari	6,52	B
23	SUMUT	Binjai	6,50	B
24	JAMBI	Jambi	6,48	B
25	JABAR	Sukabumi	6,46	B
26	RIAU	Dumai	6,44	B
27	NTB	Mataram	6,43	B
28	KALTIM	Tarakan	6,43	B
29	DKI JAKARTA	Jakarta	6,41	B
30	JABAR	Depok	6,33	B


No.	Propinsi	Kota	Nilai	Peringkat
31	PAPUA	Jayapura	6,33	B
32	KALSEL	Banjarmasin	6,32	B
33	KALTIM	Bontang	6,32	B
34	JATIM	Malang	6,32	B
35	SUMUT	Tebing Tinggi	6,32	B
36	JATENG	Magelang	6,28	B
37	JATIM	Mojokerto	6,28	B
38	SULSEL	Parepare	6,27	B
39	SUMSEL	Palembang	6,26	B
40	JATENG	Tegal	6,25	B
41	SUMUT	Pematang Siantar	6,22	B
42	BABEL	Pangkal Pinang	6,21	B
43	SULUT	Bitung	6,19	B
44	JABAR	Tasikmalaya	6,15	C
45	NTT	Kupang	6,14	C
46	KALTIM	Samarinda	6,14	C
47	KALBAR	Pontianak	6,13	C
48	JATIM	Probolinggo	6,12	C
49	GORONTALO	Gorontalo	6,10	C
50	JABAR	Bogor	6,06	C
51	JABAR	Banjar	5,99	C
52	BENGKULU	Bengkulu	5,99	C
53	JABAR	Bekasi	5,95	C
54	SULTENG	Palu	5,95	C
55	KALTENG	Palangkaraya	5,82	D
56	JATIM	Madiun	5,66	D
57	JATENG	Pekalongan	5,63	D
58	SUMUT	Tanjung Balai	5,46	E
59	PAPUA	Sorong	5,45	E



**Lampiran 1.2** : Peringkat 169 Kabupaten Berdasarkan Seluruh Faktor (Umum)

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai	Peringkat
1	BALI	Gianyar	6,93	A
2	BALI	Klungkung	6,92	A
3	SUMSEL	Musi Banyuasin	6,91	A
4	SULTRA	Kolaka	6,81	A
5	KALTIM	Kutai Kertanegara	6,77	A
6	SUMBAR	Sawahlunto Sijunjung	6,75	A
7	KALTIM	Pasir	6,74	A
8	JATIM	Sidoarjo	6,70	A
9	KALTIM	Bulungan	6,68	A
10	JABAR	Purwakarta	6,68	A
11	SUMBAR	Solok	6,66	A
12	BALI	Bangli	6,65	A
13	KALSEL	Tabalong	6,65	A
14	RIAU	Indragiri Hilir	6,64	A
15	SULSEL	Maros	6,64	A
16	BALI	Jembrana	6,61	A
17	KALTIM	Kutai Timur	6,58	A
18	RIAU	Pelalawan	6,58	A
19	BALI	Tabanan	6,58	A
20	JATENG	Kudus	6,56	A
21	SULSEL	Pangkajene Kepulauan	6,55	A
22	JAMBI	Kerinci	6,54	A
23	SULTRA	Konawe Selatan	6,54	A
24	JABAR	Karawang	6,53	A
25	KALTIM	Berau	6,49	B
26	SUMBAR	Pesisir Selatan	6,49	B
27	SULSEL	Barru	6,47	B
28	JABAR	Bogor	6,41	B
29	SULSEL	Luwu	6,36	B
30	KEPRI	Karimun	6,34	B
31	JAMBI	Batanghari	6,29	B
32	BANTEN	Lebak	6,29	B
33	SULSEL	Pinrang	6,29	B
34	KALSEL	Tanah Laut	6,29	B
35	JABAR	Bekasi	6,28	B
36	DIY	Bantul	6,26	B
37	SULSEL	Bone	6,26	B
38	JATENG	Cilacap	6,26	B
39	JATIM	Gresik	6,26	B
40	JAMBI	Tebo	6,26	B
41	JATENG	Karanganyar	6,24	B
42	BABEL	Bangka Barat	6,23	B
43	BABEL	Belitung	6,23	B
44	BALI	Karangasem	6,23	B
45	BANTEN	Tangerang	6,22	B
46	RIAU	Bengkalis	6,21	B
47	SUMUT	Dairi	6,18	B
48	KEPRI	Lingga	6,18	B
49	KALSEL	Hulu Sungai Selatan	6,17	C

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai	Peringkat
50	JABAR	Sukabumi	6,17	C
51	SUMSEL	Lahat	6,16	C
52	SULUT	Minahasa	6,16	C
53	JAMBI	Bungo	6,15	C
54	JABAR	Ciamis	6,15	C
55	RIAU	Kampar	6,15	C
56	LAMPUNG	Lampung Barat	6,15	C
57	SUMSEL	Muaraenim	6,15	C
58	KALSEL	Hulu Sungai Tengah	6,14	C
59	JABAR	Subang	6,14	C
60	SUMUT	Deliserdang	6,12	C
61	BABEL	Bangka Selatan	6,11	C
62	SULSEL	Bantaeng	6,11	C
63	JABAR	Cianjur	6,11	C
64	SUMBAR	Pasaman	6,09	C
65	JATIM	Kediri	6,08	C
66	RIAU	Kuansing	6,08	C
67	DIY	Sleman	6,07	C
68	JABAR	Kuningan	6,06	C
69	SULSEL	Sinjai	6,06	C
70	DIY	Gunungkidul	6,05	C
71	SUMUT	Langkat	6,05	C
72	LAMPUNG	Lampung Utara	6,03	C
73	JATENG	Boyolali	6,02	C
74	JABAR	Garut	6,02	C
75	JATENG	Pekalongan	6,02	C
76	KALBAR	Pontianak	6,01	C
77	JATENG	Banyumas	5,99	C
78	SUMSEL	Musi Rawas	5,99	C
79	KALTIM	Nunukan	5,98	C
80	JATENG	Tegal	5,97	C
81	SULSEL	Selayar	5,95	C
82	KALSEL	Tapin	5,94	C
83	JATENG	Sukoharjo	5,93	C
84	GORONTALO	Gorontalo	5,92	D
85	SULTENG	Morowali	5,92	D
86	JABAR	Sumedang	5,92	D
87	SUMUT	Karo	5,92	D
88	JATENG	Kendal	5,91	D
89	KALTENG	Kapuas	5,90	D
90	KALBAR	Ketapang	5,90	D
91	SUMSEL	Ogan Ilir	5,90	D
92	KALTENG	Barito Utara	5,88	D
93	JATENG	Purbalingga	5,88	D
94	KALBAR	Sambas	5,88	D
95	JATIM	Banyuwangi	5,85	D
96	BENGKULU	Rejang Lebong	5,85	D
97	JATIM	Mojokerto	5,84	D

Bersambung 

Lanjutan...

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai	Peringkat
98	SULSEL	Takalar	5,84	D
99	SULTENG	Tolitoli	5,84	D
100	JATIM	Jombang	5,83	D
101	KALBAR	Kapuas Hulu	5,82	D
102	NTB	Lombok Barat	5,82	D
103	LAMPUNG	Lampung Selatan	5,80	D
104	JATENG	Magelang	5,80	D
105	SULSEL	Gowa	5,79	D
106	JABAR	Bandung	5,78	D
107	JATIM	Bangkalan	5,78	D
108	JATENG	Jejara	5,77	D
109	DIY	Kulonprogo	5,76	D
110	JATENG	Klaten	5,75	D
111	SULSEL	Majene	5,75	D
112	BANTEN	Serang	5,75	D
113	SULSEL	Tanah Toraja	5,75	D
114	NTT	Ende	5,74	D
115	NTB	Dompu	5,73	D
116	PAPUA	Manokwari	5,72	D
117	JABAR	Tasikmalaya	5,72	D
118	JATIM	Magetan	5,71	D
119	LAMPUNG	Way Kanan	5,71	D
120	SULTENG	Banggai	5,70	D
121	SULTENG	Donggala	5,70	D
122	SUMUT	Asahan	5,69	D
123	JABAR	Cirebon	5,69	D
124	SUMUT	Simalungun	5,69	D
125	JATIM	Blitar	5,67	D
126	NTT	Lembata	5,67	D
127	SUMUT	Tapanuli Utara	5,61	E
128	KEPRI	Natuna	5,60	E
129	KALBAR	Sanggau	5,60	E
130	JATENG	Kebumen	5,58	E
131	SULUT	Sangihe Talaut	5,56	E
132	BENGKULU	Bengkulu Utara	5,55	E
133	NTT	Timor Tengah Selatan	5,54	E

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai	Peringkat
134	JATENG	Pemalang	5,53	E
135	SULSEL	Jeneponto	5,52	E
136	PAPUA	Fakfak	5,50	E
137	BALI	Badung	5,49	E
138	BALI	Buleleng	5,48	E
139	JATIM	Tulungagung	5,48	E
140	KALSEL	Hulu Sungai Utara	5,45	E
141	JATIM	Situbondo	5,45	E
142	BABEL	Bangka	5,44	E
143	NTB	Bima	5,44	E
144	SULSEL	Luwu Utara	5,43	E
145	PAPUA	Mimika	5,42	E
146	PAPUA	Sorong	5,40	E
147	SULTENG	Poso	5,37	E
148	KALTENG	Barito Selatan	5,36	E
149	JABAR	Indramayu	5,35	E
150	NTT	Sika	5,33	E
151	NTT	Ngada	5,32	E
152	NTT	Timor Tengah Utara	5,32	E
153	JATIM	Jember	5,30	E
154	LAMPUNG	Lampung Timur	5,29	E
155	BENGKULU	Bengkulu Selatan	5,27	E
156	NTB	Lombok Timur	5,26	E
157	NTT	Manggarai	5,25	E
158	JATIM	Pasuruhan	5,24	E
159	JATIM	Ponorogo	5,23	E
160	JAMBI	Tanjung Jabung Timur	5,23	E
161	JATIM	Lamongan	5,15	E
162	SULTRA	Muna	5,13	E
163	JATENG	Wonosobo	5,12	E
164	RIAU	Rokan Hulu	5,11	E
165	JATIM	Bondowoso	4,97	E
166	JATIM	Pamekasan	4,95	E
167	PAPUA	Jayawijaya	4,81	E
168	NTT	Sumba Barat	4,81	E
169	SULTRA	Buton	4,05	E

**Lampiran 2.1** : Peringkat 59 Kota Berdasarkan Faktor Kelembagaan


No.	Propinsi	Kota	Nilai	Peringkat
1	SUMBAR	Sawahlunto	6,50	A
2	KEPRI	Batam	6,43	A
3	NTT	Kupang	6,38	A
4	JABAR	Sukabumi	6,35	A
5	BANTEN	Cilegon	6,27	A
6	BALI	Denpasar	6,21	A
7	BANTEN	Tangerang	6,14	A
8	GORONTALO	Gorontalo	6,07	A
9	RIAU	Dumai	5,96	B
10	LAMPUNG	Bandar Lampung	5,89	B
11	JABAR	Tasikmalaya	5,87	B
12	NTB	Mataram	5,83	B
13	DIY	Yogyakarta	5,83	B
14	JAMBI	Jambi	5,81	B
15	JATENG	Tegal	5,80	B
16	JATENG	Surakarta	5,78	B
17	SULSEL	Makasar	5,70	B
18	SUMBAR	Padang	5,61	C
19	JABAR	Depok	5,59	C
20	SULSEL	Parepare	5,55	C
21	KALTIM	Tarakan	5,55	C
22	PAPUA	Jayapura	5,55	C
23	KALSEL	Banjarmasin	5,55	C
24	JATENG	Magelang	5,49	C
25	JATIM	Malang	5,48	C
26	JABAR	Bandung	5,40	C
27	JABAR	Bogor	5,39	C
28	RIAU	Pekanbaru	5,33	C
29	SUMUT	Tebing Tinggi	5,26	C
30	BABEL	Pangkal Pinang	5,25	D

No.	Propinsi	Kota	Nilai	Peringkat
31	JABAR	Cirebon	5,24	D
32	JABAR	Banjar	5,21	D
33	SUMUT	Sibolga	5,19	D
34	KALTIM	Balikpapan	5,17	D
35	KEPRI	Tanjung Pinang	5,04	D
36	BENGKULU	Bengkulu	5,02	D
37	SULUT	Bitung	4,99	D
38	DKI JAKARTA	Jakarta	4,98	D
39	JATENG	Semarang	4,97	D
40	JABAR	Bekasi	4,91	D
41	KALBAR	Pontianak	4,87	E
42	KALTIM	Bontang	4,82	E
43	JATIM	Kediri	4,78	E
44	JATIM	Surabaya	4,77	E
45	JATENG	Pekalongan	4,77	E
46	SUMSEL	Palembang	4,76	E
47	SULTRA	Kendari	4,70	E
48	KALTENG	Palangkaraya	4,68	E
49	JATIM	Probolinggo	4,65	E
50	JATIM	Mojokerto	4,62	E
51	SUMUT	Binjai	4,62	E
52	SULUT	Manado	4,58	E
53	SUMUT	Medan	4,55	E
54	PAPUA	Sorong	4,46	E
55	SULTENG	Palu	4,45	E
56	JATIM	Madiun	4,44	E
57	KALTIM	Samarinda	4,35	E
58	SUMUT	Pematang Siantar	4,06	E
59	SUMUT	Tanjung Balai	3,11	E

**Lampiran 2.2** : Peringkat 169 Kabupaten Berdasarkan Faktor Kelembagaan

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai	Peringkat
1	SULSEL	Barro	7,06	A
2	SUMBAR	Solok	6,81	A
3	BANTEN	Lebak	6,65	A
4	BALI	Jembrana	6,59	A
5	BABEL	Belitung	6,57	A
6	KALSEL	Hulu Sungai Tengah	6,56	A
7	KALSEL	Hulu Sungai Selatan	6,54	A
8	KALSEL	Tabalong	6,52	A
9	SULTRA	Kolaka	6,51	A
10	JATENG	Purbalingga	6,46	A
11	BALI	Gianyar	6,46	A
12	BALI	Klungkung	6,44	A
13	BALI	Bangli	6,39	A
14	SUMBAR	Sawahlunto Sijunjung	6,35	A
15	KALSEL	Tanah Laut	6,34	A
16	NTT	Lembata	6,34	A
17	RIAU	Indragiri Hilir	6,33	A
18	JAMBI	Kerinci	6,32	A
19	SUMSEL	Musi Banyuasin	6,25	A
20	JABAR	Kuningan	6,23	A
21	KALTIM	Bulungan	6,22	A
22	JABAR	Cianjur	6,22	A
23	BALI	Tabanan	6,20	A
24	SUMBAR	Pesisir Selatan	6,19	A
25	BABEL	Bangka Selatan	6,18	A
26	JABAR	Sukabumi	6,14	A
27	SUMSEL	Lahat	6,13	A
28	BALI	Karangasem	6,12	A
29	LAMPUNG	Lampung Barat	6,12	A
30	JATENG	Boyolali	6,10	A
31	BABEL	Bangka Barat	6,09	A
32	JATENG	Jejara	6,08	A
33	DIY	Gunungkidul	6,07	A
34	JATENG	Pekalongan	6,05	A
35	JABAR	Bogor	6,05	A
36	SULSEL	Maros	6,04	A
37	KEPRI	Karimun	6,02	A
38	SULSEL	Luwu	5,96	B
39	SULSEL	Sinjai	5,96	B
40	KALTIM	Nunukan	5,95	B
41	NTT	Ende	5,94	B
42	KALSEL	Hulu Sungai Utara	5,91	B
43	GORONTALO	Gorontalo	5,90	B
44	KALBAR	Sambas	5,89	B
45	SULSEL	Jeneponto	5,89	B
46	KALBAR	Ketapang	5,89	B
47	SULSEL	Gowa	5,88	B
48	JATENG	Kudus	5,87	B
49	JATIM	Sidoarjo	5,87	B

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai	Peringkat
50	BABEL	Bangka	5,86	B
51	NTB	Lombok Barat	5,86	B
52	JABAR	Garut	5,86	B
53	JATIM	Kediri	5,86	B
54	JATENG	Tegal	5,84	B
55	NTT	Manggarai	5,84	B
56	JABAR	Purwakarta	5,81	B
57	JATENG	Banyumas	5,80	B
58	KALTIM	Pasir	5,79	B
59	NTT	Timor Tengah Selatan	5,78	B
60	DIY	Bantul	5,77	B
61	JATENG	Kebumen	5,77	B
62	JAMBI	Bungo	5,76	B
63	SULSEL	Pinrang	5,76	B
64	SULSEL	Bantaeng	5,75	B
65	KALTIM	Berau	5,74	B
66	LAMPUNG	Way Kanan	5,74	B
67	JAMBI	Tebo	5,72	B
68	SUMUT	Langkat	5,72	B
69	JABAR	Subang	5,68	B
70	KALSEL	Tapin	5,67	B
71	SULSEL	Selayar	5,67	B
72	JABAR	Tasikmalaya	5,64	B
73	SUMSEL	Muaraenim	5,62	B
74	RIAU	Pelalawan	5,61	C
75	JATIM	Blitar	5,59	C
76	JATENG	Magelang	5,58	C
77	BENGKULU	Rejang Lebong	5,57	C
78	JATENG	Karanganyar	5,56	C
79	JAMBI	Batanghari	5,56	C
80	SULTENG	Morowali	5,54	C
81	RIAU	Bengkalis	5,54	C
82	JATENG	Cilacap	5,54	C
83	SUMBAR	Pasaman	5,52	C
84	SULSEL	Bone	5,51	C
85	JATIM	Lamongan	5,49	C
86	KALTIM	Kutai Kertanegara	5,48	C
87	NTT	Sumba Barat	5,45	C
88	SULTENG	Tolitoli	5,44	C
89	SULUT	Minahasa	5,44	C
90	NTT	Ngada	5,43	C
91	SULTENG	Banggai	5,42	C
92	KALTIM	Kutai Timur	5,40	C
93	NTT	Timor Tengah Utara	5,39	C
94	JABAR	Cirebon	5,37	C
95	JATIM	Pamekasan	5,37	C
96	BANTEN	Serang	5,36	C
97	SUMSEL	Musi Rawas	5,36	C

Bersambung 

Lanjutan...

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai	Peringkat
98	LAMPUNG	Lampung Utara	5,35	C
99	SULSEL	Majene	5,34	C
100	SULSEL	Tanah Toraja	5,34	C
101	JATIM	Bangkalan	5,34	C
102	SULTRA	Konawe Selatan	5,31	C
103	DIY	Kulonprogo	5,30	C
104	NTB	Dompu	5,30	C
105	JABAR	Indramayu	5,28	C
106	BENGKULU	Bengkulu Utara	5,28	C
107	JATENG	Pemalang	5,25	D
108	SUMUT	Asahan	5,25	D
109	NTT	Sika	5,23	D
110	SULUT	Sangihe Talaut	5,22	D
111	SULTENG	Poso	5,21	D
112	RIAU	Kampar	5,20	D
113	SULTRA	Muna	5,17	D
114	KALBAR	Pontianak	5,16	D
115	BANTEN	Tangerang	5,15	D
116	KEPRI	Lingga	5,13	D
117	SULTRA	Buton	5,13	D
118	KALTENG	Kapuas	5,12	D
119	SUMSEL	Ogan Ilir	5,12	D
120	SUMUT	Dairi	5,11	D
121	KALBAR	Sanggau	5,10	D
122	DIY	Sleman	5,09	D
123	JATIM	Gresik	5,06	D
124	SULSEL	Luwu Utara	5,06	D
125	SULSEL	Pangkajene Kepulauan	5,05	D
126	JABAR	Sumedang	5,03	D
127	PAPUA	Fakfak	5,03	D
128	SULSEL	Takalar	5,02	D
129	BALI	Badung	5,01	D
130	JATENG	Wonosobo	4,99	D
131	JATIM	Jombang	4,99	D
132	SULTENG	Donggala	4,98	D
133	JABAR	Bekasi	4,98	D

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai	Peringkat
134	KALTENG	Barito Utara	4,97	D
135	PAPUA	Jayawijaya	4,97	D
136	PAPUA	Manokwari	4,96	D
137	SUMUT	Simalungun	4,95	D
138	BALI	Buleleng	4,95	D
139	JATIM	Banyuwangi	4,93	D
140	NTB	Bima	4,92	D
141	JATIM	Jember	4,90	D
142	KALBAR	Kapuas Hulu	4,89	E
143	RIAU	Kuansing	4,88	E
144	NTB	Lombok Timur	4,87	E
145	PAPUA	Mimika	4,86	E
146	SUMUT	Tapanuli Utara	4,83	E
147	LAMPUNG	Lampung Selatan	4,82	E
148	JATENG	Kendal	4,82	E
149	SUMUT	Karo	4,82	E
150	JABAR	Bandung	4,80	E
151	JABAR	Karawang	4,77	E
152	JATIM	Mojokerto	4,77	E
153	JATIM	Tulungagung	4,73	E
154	JABAR	Ciamis	4,72	E
155	JATIM	Magetan	4,63	E
156	JATIM	Situbondo	4,62	E
157	JATENG	Klaten	4,62	E
158	LAMPUNG	Lampung Timur	4,62	E
159	KEPRI	Natuna	4,56	E
160	SUMUT	Deliserdang	4,47	E
161	JATIM	Bondowoso	4,43	E
162	PAPUA	Sorong	4,36	E
163	JATENG	Sukoharjo	4,34	E
164	JATIM	Pasuruhan	4,28	E
165	BENGKULU	Bengkulu Selatan	4,20	E
166	JATIM	Ponorogo	4,15	E
167	KALTENG	Barito Selatan	3,89	E
168	RIAU	Rokan Hulu	3,79	E
169	JAMBI	Tanjung Jabung Timur	3,65	E

**Lampiran 3.1** : Peringkat 59 Kota Berdasarkan Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya


No.	Propinsi	Kota	Nilai	Peringkat
1	BALI	Denpasar	7,55	A
2	SUMUT	Sibolga	7,50	A
3	KALTIM	Balikpapan	7,45	A
4	BANTEN	Cilegon	7,29	A
5	SUMBAR	Sawahlunto	7,20	A
6	JABAR	Sukabumi	7,19	A
7	KALTIM	Bontang	7,12	A
8	SULTRA	Kendari	7,08	A
9	LAMPUNG	Bandar Lampung	7,00	B
10	JABAR	Banjar	6,94	B
11	JAMBI	Jambi	6,90	B
12	SUMBAR	Padang	6,89	B
13	SULUT	Manado	6,86	B
14	SULSEL	Parepare	6,84	B
15	SUMUT	Binjai	6,77	B
16	JABAR	Depok	6,73	B
17	BANTEN	Tangerang	6,72	B
18	KEPRI	Batam	6,66	B
19	JATENG	Surakarta	6,64	B
20	JABAR	Tasikmalaya	6,62	B
21	SUMUT	Tebing Tinggi	6,62	B
22	JATENG	Tegal	6,48	C
23	GORONTALO	Gorontalo	6,48	C
24	JABAR	Cirebon	6,46	C
25	KEPRI	Tanjung Pinang	6,46	C
26	JATIM	Surabaya	6,34	C
27	JATIM	Probolinggo	6,33	C
28	NTB	Mataram	6,32	C
29	PAPUA	Jayapura	6,31	C
30	RIAU	Dumai	6,28	C

No.	Propinsi	Kota	Nilai	Peringkat
31	JATIM	Kediri	6,23	D
32	SULSEL	Makasar	6,18	D
33	KALTIM	Tarakan	6,13	D
34	JATENG	Semarang	6,11	D
35	JATENG	Magelang	6,11	D
36	BABEL	Pangkal Pinang	6,07	D
37	JABAR	Bogor	6,04	D
38	SUMUT	Medan	6,03	D
39	JABAR	Bandung	6,03	D
40	JATIM	Mojokerto	6,02	D
41	SUMUT	Pematang Siantar	5,96	D
42	KALSEL	Banjarmasin	5,90	D
43	SULUT	Bitung	5,85	D
44	DIY	Yogyakarta	5,82	D
45	KALTIM	Samarinda	5,81	D
46	SUMSEL	Palembang	5,80	D
47	KALTENG	Palangkaraya	5,57	E
48	RIAU	Pekanbaru	5,52	E
49	JATIM	Malang	5,41	E
50	KALBAR	Pontianak	5,39	E
51	BENGKULU	Bengkulu	5,37	E
52	JATENG	Pekalongan	5,33	E
53	DKI JAKARTA	Jakarta	5,32	E
54	SULTENG	Palu	5,21	E
55	SUMUT	Tanjung Balai	5,05	E
56	NTT	Kupang	4,99	E
57	PAPUA	Sorong	4,88	E
58	JABAR	Bekasi	4,85	E
59	JATIM	Madiun	4,43	E

**Lampiran 3.2** : Peringkat 169 Kabupaten Berdasarkan Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai	Peringkat
1	SULSEL	Maros	8,09	A
2	BALI	Bangli	8,07	A
3	BALI	Gianyar	8,01	A
4	KEPRI	Lingga	7,77	A
5	SULTRA	Konawe Selatan	7,76	A
6	BALI	Klungkung	7,72	A
7	BALI	Karangasem	7,69	A
8	BALI	Tabanan	7,64	A
9	KALTIM	Kutai Timur	7,62	A
10	BENGKULU	Rejang Lebong	7,56	A
11	KALTIM	Bulungan	7,55	A
12	KALTIM	Nunukan	7,54	A
13	SUMBAR	Sawahlunto Sijunjung	7,52	A
14	BANTEN	Lebak	7,49	A
15	SUMSEL	Musi Banyuasin	7,49	A
16	JABAR	Ciamis	7,45	A
17	SUMSEL	Ogan Ilir	7,37	A
18	BALI	Jembrana	7,36	A
19	KALTIM	Berau	7,34	A
20	JATENG	Pekalongan	7,34	A
21	SUMBAR	Pesisir Selatan	7,33	A
22	JABAR	Kuningan	7,30	A
23	JAMBI	Tebo	7,29	A
24	SUMUT	Dairi	7,29	A
25	KALSEL	Tabalong	7,28	A
26	KALTIM	Kutai Kertanegara	7,28	A
27	SULSEL	Takalar	7,25	A
28	KALTIM	Pasir	7,18	A
29	JABAR	Sukabumi	7,18	A
30	JATENG	Tegal	7,17	A
31	SULSEL	Majene	7,16	A
32	SULSEL	Bantaeng	7,15	A
33	LAMPUNG	Lampung Barat	7,14	A
34	SULTRA	Kolaka	7,14	A
35	JATENG	Purbalingga	7,09	A
36	JABAR	Cianjur	7,09	A
37	SUMBAR	Pasaman	7,08	A
38	SULSEL	Pinrang	7,06	B
39	LAMPUNG	Way Kanan	7,06	B
40	KALSEL	Hulu Sungai Tengah	7,05	B
41	SULSEL	Sinjai	7,05	B
42	JATIM	Magetan	7,03	B
43	JABAR	Purwakarta	7,02	B
44	RIAU	Pelalawan	7,02	B
45	SULSEL	Bone	7,00	B
46	JAMBI	Bungo	6,99	B
47	DIY	Gunungkidul	6,99	B
48	KALSEL	Hulu Sungai Selatan	6,99	B
49	SUMBAR	Solok	6,96	B

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai	Peringkat
50	JATIM	Banyuwangi	6,95	B
51	JABAR	Karawang	6,94	B
52	SULSEL	Pangkajene Kepulauan	6,93	B
53	JABAR	Garut	6,91	B
54	SULSEL	Barru	6,90	B
55	RIAU	Indragiri Hilir	6,90	B
56	GORONTALO	Gorontalo	6,88	B
57	KALBAR	Kapuas Hulu	6,86	B
58	NTT	Lembata	6,85	B
59	SUMUT	Langkat	6,82	B
60	SULSEL	Selayar	6,78	B
61	JABAR	Subang	6,76	B
62	SULSEL	Luwu	6,75	B
63	JABAR	Sumedang	6,75	B
64	JATENG	Boyolali	6,74	B
65	NTB	Lombok Barat	6,66	B
66	JAMBI	Kerinci	6,64	B
67	BABEL	Belitung	6,64	B
68	JABAR	Tasikmalaya	6,63	B
69	JATENG	Karanganyar	6,61	B
70	BABEL	Bangka Selatan	6,61	B
71	SULSEL	Jeneponto	6,61	B
72	JATIM	Kediri	6,60	C
73	SULSEL	Tanah Toraja	6,60	C
74	LAMPUNG	Lampung Selatan	6,59	C
75	NTT	Ende	6,54	C
76	JATENG	Kudus	6,54	C
77	JATIM	Sidoarjo	6,53	C
78	JATENG	Sukoharjo	6,52	C
79	RIAU	Kampar	6,52	C
80	SULSEL	Gowa	6,50	C
81	SULSEL	Luwu Utara	6,49	C
82	NTT	Sika	6,49	C
83	KALSEL	Tanah Laut	6,48	C
84	KEPRI	Karimun	6,47	C
85	SUMSEL	Musi Rawas	6,46	C
86	KALBAR	Sambas	6,46	C
87	JABAR	Cirebon	6,44	C
88	DIY	Bantul	6,44	C
89	JATIM	Blitar	6,43	C
90	SUMUT	Tapanuli Utara	6,41	C
91	JATENG	Pemalang	6,40	C
92	KALBAR	Pontianak	6,40	C
93	JATENG	Magelang	6,39	C
94	BANTEN	Tanggerang	6,38	C
95	JATENG	Kebumen	6,38	C
96	KALTENG	Kapuas	6,36	C
97	SUMSEL	Lahat	6,34	C

Bersambung 

Lanjutan...

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai	Peringkat
98	DIY	Kulonprogo	6,34	C
99	KALBAR	Ketapang	6,32	C
100	JATENG	Jepara	6,32	C
101	JAMBI	Batanghari	6,31	C
102	JATENG	Klaten	6,30	C
103	BENGKULU	Bengkulu Utara	6,30	C
104	JATENG	Banyumas	6,28	C
105	NTB	Bima	6,26	C
106	JATENG	Cilacap	6,26	C
107	JATIM	Jombang	6,25	C
108	NTT	Ngada	6,25	C
109	KALSEL	Tapin	6,23	D
110	NTT	Manggarai	6,23	D
111	PAPUA	Jayawijaya	6,22	D
112	SULTENG	Morowali	6,20	D
113	NTB	Dompu	6,20	D
114	SUMUT	Karo	6,17	D
115	SUMSEL	Muaraenim	6,16	D
116	KALTENG	Barito Utara	6,14	D
117	JABAR	Bandung	6,13	D
118	SULTENG	Banggai	6,08	D
119	SULUT	Minahasa	6,06	D
120	JATIM	Mojokerto	6,05	D
121	JABAR	Bogor	6,04	D
122	JATENG	Kendal	6,04	D
123	BABEL	Bangka Barat	6,03	D
124	JAMBI	Tanjung Jabung Timur	6,00	D
125	JATIM	Bangkalan	5,96	D
126	LAMPUNG	Lampung Utara	5,95	D
127	NTT	Timor Tengah Utara	5,94	D
128	KALSEL	Hulu Sungai Utara	5,91	D
129	SUMUT	Deliserdang	5,90	D
130	SUMUT	Asahan	5,86	D
131	KEPRI	Natuna	5,83	D
132	KALBAR	Sanggau	5,81	D
133	SULUT	Sangihe Talaut	5,77	D

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai	Peringkat
134	RIAU	Bengkalis	5,77	D
135	BALI	Badung	5,75	D
136	RIAU	Kuansing	5,70	D
137	JATIM	Pasuruhan	5,68	D
138	JABAR	Indramayu	5,68	D
139	LAMPUNG	Lampung Timur	5,66	E
140	SULTENG	Tolitoli	5,63	E
141	DIY	Sleman	5,63	E
142	PAPUA	Mimika	5,57	E
143	PAPUA	Sorong	5,48	E
144	JATIM	Situbondo	5,47	E
145	PAPUA	Manokwari	5,42	E
146	JATENG	Wonosobo	5,41	E
147	JABAR	Bekasi	5,41	E
148	NTT	Timor Tengah Selatan	5,37	E
149	JATIM	Jember	5,37	E
150	KALTENG	Barito Selatan	5,37	E
151	JATIM	Ponorogo	5,36	E
152	JATIM	Bondowoso	5,32	E
153	BANTEN	Serang	5,32	E
154	NTB	Lombok Timur	5,32	E
155	PAPUA	Fakfak	5,22	E
156	BENGKULU	Bengkulu Selatan	5,18	E
157	SULTRA	Buton	5,16	E
158	JATIM	Gresik	5,02	E
159	JATIM	Tulungagung	5,00	E
160	BALI	Buleleng	4,98	E
161	JATIM	Lamongan	4,97	E
162	SUMUT	Simalungun	4,97	E
163	SULTENG	Donggala	4,89	E
164	NTT	Sumba Barat	4,62	E
165	JATIM	Pamekasan	4,56	E
166	SULTRA	Muna	4,50	E
167	SULTENG	Poso	4,40	E
168	BABEL	Bangka	4,38	E
169	RIAU	Rokan Hulu	3,95	E



**Lampiran 4.1** : Peringkat 59 Kota Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah


No.	Propinsi	Kota	Nilai	Peringkat
1	KALTIM	Samarinda	8,30	A
2	RIAU	Pekanbaru	8,08	A
3	KALTIM	Balikpapan	7,99	A
4	BANTEN	Cilegon	7,94	A
5	KEPRI	Batam	7,89	A
6	KALTIM	Tarakan	7,85	A
7	BANTEN	Tangerang	7,83	A
8	SUMUT	Medan	7,77	A
9	SULSEL	Makasar	7,75	A
10	JATENG	Semarang	7,71	A
11	JABAR	Cirebon	7,67	A
12	JABAR	Bandung	7,64	A
13	JATIM	Malang	7,61	A
14	JATIM	Surabaya	7,60	A
15	SUMUT	Tanjung Balai	7,59	A
16	SUMBAR	Padang	7,54	A
17	KEPRI	Tanjung Pinang	7,52	A
18	BALI	Denpasar	7,50	A
19	JATIM	Kediri	7,48	A
20	DKI JAKARTA	Jakarta	7,46	A
21	JATIM	Mojokerto	7,44	A
22	SUMUT	Pematang Siantar	7,38	A
23	KALBAR	Pontianak	7,34	A
24	SULTENG	Palu	7,33	A
25	SULUT	Bitung	7,32	B
26	DIY	Yogyakarta	7,28	B
27	BENGKULU	Bengkulu	7,22	B
28	LAMPUNG	Bandar Lampung	7,22	B
29	SUMUT	Binjai	7,21	B
30	SUMSEL	Palembang	7,21	B

No.	Propinsi	Kota	Nilai	Peringkat
31	SUMUT	Sibolga	7,20	B
32	JATIM	Probolinggo	7,18	B
33	JATENG	Surakarta	7,17	B
34	SUMUT	Tebing Tinggi	7,16	B
35	SULUT	Manado	7,14	B
36	PAPUA	Jayapura	7,12	B
37	NTT	Kupang	7,07	B
38	JABAR	Sukabumi	7,04	B
39	JABAR	Bekasi	7,00	B
40	SULTRA	Kendari	6,98	B
41	SUMBAR	Sawahlunto	6,95	B
42	BABEL	Pangkal Pinang	6,95	B
43	JAMBI	Jambi	6,93	B
44	NTB	Mataram	6,89	B
45	RIAU	Dumai	6,86	B
46	PAPUA	Sorong	6,84	B
47	JATIM	Madiun	6,83	B
48	JATENG	Magelang	6,82	B
49	JATENG	Pekalongan	6,81	B
50	KALSEL	Banjarmasin	6,78	B
51	KALTENG	Palangkaraya	6,68	C
52	SULSEL	Parepare	6,66	C
53	JABAR	Tasikmalaya	6,58	C
54	JATENG	Tegal	6,45	C
55	KALTIM	Bontang	6,36	C
56	JABAR	Depok	6,26	D
57	JABAR	Bogor	6,24	D
58	JABAR	Banjar	6,00	D
59	GORONTALO	Gorontalo	5,91	D

**Lampiran 4.2** : Peringkat 169 Kabupaten Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai	Peringkat
1	KALTIM	Kutai Timur	8,62	A
2	RIAU	Kuansing	7,94	A
3	KALTIM	Kutai Kertanegara	7,89	A
4	RIAU	Pelalawan	7,88	A
5	JATIM	Gresik	7,86	A
6	JABAR	Bekasi	7,72	A
7	JATIM	Sidoarjo	7,70	A
8	JATENG	Cilacap	7,68	A
9	RIAU	Rokan Hulu	7,66	A
10	KALTIM	Pasir	7,63	A
11	RIAU	Indragiri Hilir	7,62	A
12	KALSEL	Tabalong	7,54	A
13	RIAU	Bengkalis	7,54	A
14	JAMBI	Batanghari	7,51	A
15	SUMUT	Deliserdang	7,44	A
16	KALTIM	Berau	7,44	A
17	JATENG	Kudus	7,43	A
18	SULSEL	Barro	7,42	A
19	RIAU	Kampar	7,40	A
20	KALTENG	Barito Utara	7,40	A
21	SUMSEL	Musi Banyuasin	7,33	A
22	KEPRI	Karimun	7,33	A
23	KEPRI	Natuna	7,30	B
24	SUMUT	Dairi	7,24	B
25	JATIM	Tulungagung	7,18	B
26	JABAR	Karawang	7,14	B
27	SUMSEL	Muaraenim	7,14	B
28	SULTENG	Morowali	7,12	B
29	BALI	Klungkung	7,12	B
30	KALTIM	Bulungan	7,09	B
31	SUMUT	Karo	7,08	B
32	JABAR	Purwakarta	7,07	B
33	BALI	Gianyar	7,04	B
34	SULTENG	Tolitoli	7,03	B
35	SUMBAR	Sawahlunto Sijunjung	6,95	B
36	DIY	Sleman	6,94	B
37	PAPUA	Sorong	6,90	B
38	SUMUT	Langkat	6,86	B
39	JABAR	Bogor	6,86	B
40	SULTENG	Donggala	6,86	B
41	DIY	Bantul	6,80	B
42	KALTENG	Barito Selatan	6,78	B
43	SULSEL	Pangkajene Kepulauan	6,78	B
44	JATENG	Banyumas	6,78	B
45	SULTRA	Konawe Selatan	6,78	B
46	SULTENG	Poso	6,77	C
47	KALSEL	Tanah Laut	6,77	C
48	JATIM	Banyuwangi	6,77	C
49	BALI	Jembrana	6,76	C

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai	Peringkat
50	SULTRA	Kolaka	6,73	C
51	JATENG	Karanganyar	6,72	C
52	JATIM	Jombang	6,71	C
53	BALI	Bangli	6,71	C
54	SULSEL	Bantaeng	6,71	C
55	BANTEN	Tangerang	6,71	C
56	KALBAR	Sanggau	6,70	C
57	KALTIM	Nunukan	6,69	C
58	SULSEL	Pinrang	6,69	C
59	SUMBAR	Solok	6,67	C
60	SUMUT	Simalungun	6,63	C
61	JAMBI	Tanjung Jabung Timur	6,63	C
62	BALI	Buleleng	6,61	C
63	KEPRI	Lingga	6,61	C
64	SUMUT	Tapanuli Utara	6,61	C
65	JAMBI	Kerinci	6,61	C
66	JATIM	Bangkalan	6,60	C
67	SULSEL	Luwu	6,60	C
68	JATIM	Mojokerto	6,59	C
69	BALI	Tabanan	6,57	C
70	KALTENG	Kapuas	6,56	C
71	SULUT	Minahasa	6,54	C
72	KALBAR	Sambas	6,53	C
73	KALSEL	Tapin	6,52	C
74	BABEL	Bangka Selatan	6,51	C
75	PAPUA	Fakfak	6,46	C
76	PAPUA	Manokwari	6,45	C
77	JATENG	Kendal	6,44	C
78	JABAR	Subang	6,41	C
79	PAPUA	Mimika	6,40	C
80	KALBAR	Pontianak	6,39	C
81	JAMBI	Bungo	6,37	C
82	BABEL	Bangka Barat	6,37	C
83	SUMBAR	Pasaman	6,36	C
84	JATIM	Blitar	6,34	C
85	JABAR	Sumedang	6,31	C
86	JABAR	Ciamis	6,31	C
87	SUMSEL	Lahat	6,31	C
88	LAMPUNG	Lampung Utara	6,31	C
89	BANTEN	Serang	6,30	D
90	JATENG	Sukoharjo	6,28	D
91	JABAR	Garut	6,26	D
92	SULTRA	Muna	6,26	D
93	JATIM	Situbondo	6,26	D
94	JATIM	Magetan	6,26	D
95	BABEL	Bangka	6,24	D
96	NTB	Dompu	6,23	D
97	BALI	Karangasem	6,22	D

Bersambung 

Lanjutan...

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai	Peringkat
98	DIY	Gunungkidul	6,21	D
99	KALBAR	Kapuas Hulu	6,19	D
100	SULTENG	Banggai	6,18	D
101	JABAR	Sukabumi	6,16	D
102	SULSEL	Sinjai	6,16	D
103	JAMBI	Tebo	6,13	D
104	KALSEL	Hulu Sungai Selatan	6,12	D
105	SUMSEL	Musi Rawas	6,12	D
106	JATENG	Klaten	6,10	D
107	SUMSEL	Ogan Ilir	6,09	D
108	JATIM	Jember	6,09	D
109	SUMBAR	Pesisir Selatan	6,08	D
110	DIY	Kulonprogo	6,06	D
111	JATIM	Pasuruhan	6,04	D
112	JATENG	Jejara	6,02	D
113	JABAR	Cianjur	6,00	D
114	SULSEL	Bone	5,99	D
115	LAMPUNG	Lampung Selatan	5,98	D
116	KALBAR	Ketapang	5,97	D
117	JATENG	Boyolali	5,93	D
118	BENGKULU	Bengkulu Selatan	5,89	D
119	JABAR	Indramayu	5,89	D
120	SULSEL	Takalar	5,88	D
121	LAMPUNG	Way Kanan	5,88	D
122	BALI	Badung	5,83	D
123	JATIM	Ponorogo	5,81	D
124	JABAR	Bandung	5,81	D
125	JABAR	Cirebon	5,81	D
126	JATENG	Magelang	5,81	D
127	JATIM	Kediri	5,78	D
128	NTB	Bima	5,77	D
129	LAMPUNG	Lampung Timur	5,76	D
130	JATIM	Lamongan	5,75	D
131	JABAR	Kuningan	5,73	E
132	SULUT	Sangihe Talaut	5,72	E
133	JATENG	Pekalongan	5,72	E

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai	Peringkat
134	BENGKULU	Bengkulu Utara	5,71	E
135	BANTEN	Lebak	5,71	E
136	GORONTALO	Gorontalo	5,68	E
137	JABAR	Tasikmalaya	5,68	E
138	SULSEL	Selayar	5,67	E
139	JATENG	Tegal	5,66	E
140	KALSEL	Hulu Sungai Tengah	5,65	E
141	SULSEL	Maros	5,63	E
142	SULSEL	Luwu Utara	5,63	E
143	SULSEL	Majene	5,58	E
144	KALSEL	Hulu Sungai Utara	5,57	E
145	NTB	Lombok Barat	5,56	E
146	SULSEL	Gowa	5,53	E
147	JATIM	Bondowoso	5,52	E
148	SUMUT	Asahan	5,52	E
149	BABEL	Belitung	5,49	E
150	JATENG	Purbalingga	5,48	E
151	JATENG	Pemalang	5,47	E
152	NTB	Lombok Timur	5,46	E
153	SULSEL	Tanah Toraja	5,43	E
154	SULSEL	Jeneponto	5,43	E
155	JATIM	Pamekasan	5,42	E
156	JATENG	Kebumen	5,41	E
157	NTT	Sika	5,39	E
158	NTT	Ende	5,38	E
159	LAMPUNG	Lampung Barat	5,37	E
160	NTT	Timor Tengah Selatan	5,36	E
161	NTT	Sumba Barat	5,35	E
162	NTT	Ngada	5,31	E
163	JATENG	Wonosobo	5,28	E
164	NTT	Timor Tengah Utara	5,27	E
165	NTT	Lembata	5,13	E
166	NTT	Manggarai	5,09	E
167	PAPUA	Jayawijaya	4,87	E
168	BENGKULU	Rejang Lebong	4,11	E
169	SULTRA	Buton	1,96	E

**Lampiran 5.1** : Peringkat 59 Kota Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja


No.	Propinsi	Kota	Nilai	Peringkat
1	JATIM	Kediri	7,67	A
2	JABAR	Cirebon	7,61	A
3	SUMBAR	Padang	7,34	A
4	KEPRI	Tanjung Pinang	7,21	A
5	SULSEL	Makasar	7,20	A
6	DKI JAKARTA	Jakarta	7,20	A
7	SUMUT	Binjai	7,14	A
8	JATIM	Madiun	7,13	A
9	DIY	Yogyakarta	7,13	A
10	LAMPUNG	Bandar Lampung	7,12	A
11	KEPRI	Batam	7,10	A
12	BANTEN	Tangerang	7,01	A
13	RIAU	Pekanbaru	7,00	A
14	JATIM	Malang	6,99	A
15	SUMUT	Pematang Siantar	6,97	A
16	JATENG	Surakarta	6,95	A
17	SUMUT	Medan	6,94	A
18	KALBAR	Pontianak	6,90	A
19	SUMUT	Sibolga	6,89	A
20	SUMSEL	Palembang	6,87	A
21	SULTRA	Kendari	6,86	A
22	JATIM	Surabaya	6,85	A
23	SUMBAR	Sawahlunto	6,84	A
24	JATENG	Semarang	6,83	A
25	SULUT	Manado	6,74	A
26	SULUT	Bitung	6,65	A
27	KALTIM	Bontang	6,64	A
28	BANTEN	Cilegon	6,62	A
29	NTT	Kupang	6,62	A
30	SULTENG	Palu	6,60	A

No.	Propinsi	Kota	Nilai	Peringkat
31	KALTENG	Palangkaraya	6,58	A
32	NTB	Mataram	6,54	A
33	JABAR	Bandung	6,51	A
34	RIAU	Dumai	6,50	A
35	BALI	Denpasar	6,45	A
36	JATENG	Magelang	6,41	A
37	BENGKULU	Bengkulu	6,39	A
38	KALTIM	Samarinda	6,36	A
39	JATIM	Mojokerto	6,31	B
40	PAPUA	Jayapura	6,28	B
41	KALSEL	Banjarmasin	6,19	B
42	KALTIM	Balikpapan	6,11	B
43	JABAR	Bekasi	6,11	B
44	JABAR	Bogor	6,11	B
45	JABAR	Depok	6,06	B
46	BABEL	Pangkal Pinang	6,00	B
47	JATENG	Tegal	5,86	B
48	JAMBI	Jambi	5,86	B
49	SUMUT	Tanjung Balai	5,85	B
50	KALTIM	Tarakan	5,83	B
51	SULSEL	Parepare	5,64	C
52	JATENG	Pekalongan	5,53	C
53	PAPUA	Sorong	5,53	C
54	JATIM	Probolinggo	5,53	C
55	SUMUT	Tebing Tinggi	5,50	C
56	GORONTALO	Gorontalo	5,44	C
57	JABAR	Tasikmalaya	5,38	C
58	JABAR	Banjar	4,73	D
59	JABAR	Sukabumi	4,37	D

**Lampiran 5.2** : Peringkat 169 Kabupaten Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai	Peringkat
1	SULSEL	Pangkajene Kepulauan	7,19	A
2	BABEL	Bangka Barat	6,93	A
3	SUMSEL	Musi Banyuasin	6,83	A
4	SULTRA	Kolaka	6,82	A
5	SUMBAR	Pesisir Selatan	6,76	A
6	JABAR	Bekasi	6,75	A
7	JAMBI	Kerinci	6,73	A
8	JATIM	Gresik	6,72	A
9	RIAU	Kampar	6,40	A
10	JATIM	Sidoarjo	6,38	A
11	RIAU	Bengkalis	6,35	B
12	KALBAR	Pontianak	6,33	B
13	LAMPUNG	Lampung Utara	6,33	B
14	BENGKULU	Bengkulu Selatan	6,31	B
15	RIAU	Pelalawan	6,27	B
16	SUMUT	Deliserdang	6,22	B
17	SULSEL	Bone	6,19	B
18	BABEL	Belitung	6,19	B
19	RIAU	Kuansing	6,11	B
20	SUMUT	Asahan	6,10	B
21	JATENG	Kudus	6,10	B
22	SULUT	Minahasa	6,09	B
23	DIY	Sleman	6,08	B
24	JABAR	Bandung	6,08	B
25	PAPUA	Manokwari	6,08	B
26	SUMUT	Simalungun	6,07	B
27	JABAR	Bogor	6,05	B
28	KALTIM	Pasir	6,03	B
29	BALI	Klungkung	6,03	B
30	SULTRA	Konawe Selatan	6,01	B
31	SULSEL	Luwu	5,99	B
32	JABAR	Karawang	5,99	B
33	SUMSEL	Lahat	5,96	B
34	SUMBAR	Solok	5,95	B
35	KALTIM	Kutai Kertanegara	5,94	B
36	BABEL	Bangka Selatan	5,93	B
37	JABAR	Purwakarta	5,92	B
38	RIAU	Rokan Hulu	5,90	B
39	BANTEN	Tangerang	5,90	B
40	BABEL	Bangka	5,89	B
41	BANTEN	Serang	5,79	B
42	PAPUA	Fakfak	5,78	B
43	JAMBI	Batanghari	5,77	B
44	NTB	Dompu	5,77	B
45	JATENG	Sukoharjo	5,77	B
46	KEPRI	Karimun	5,73	C
47	KALTENG	Barito Selatan	5,71	C
48	LAMPUNG	Lampung Barat	5,71	C
49	SUMBAR	Sawahlunto Sijunjung	5,65	C

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai	Peringkat
50	SUMSEL	Muaraenim	5,61	C
51	KALSEL	Tapin	5,55	C
52	JATENG	Karanganyar	5,52	C
53	SUMSEL	Musi Rawas	5,51	C
54	JATENG	Kendal	5,48	C
55	NTT	Timor Tengah Selatan	5,47	C
56	SUMUT	Karo	5,47	C
57	SULTENG	Poso	5,46	C
58	SULSEL	Selayar	5,43	C
59	KALTIM	Kutai Timur	5,43	C
60	JAMBI	Tanjung Jabung Timur	5,42	C
61	JAMBI	Bungo	5,40	C
62	JATENG	Klaten	5,37	C
63	RIAU	Indragiri Hilir	5,37	C
64	SULSEL	Tanah Toraja	5,30	C
65	KALTIM	Bulungan	5,29	C
66	DIY	Bantul	5,27	C
67	DIY	Kulonprogo	5,23	C
68	SULUT	Sangihe Talaut	5,20	C
69	BENGKULU	Rejang Lebong	5,19	C
70	KALTIM	Berau	5,18	C
71	SULTENG	Tolitoli	5,14	C
72	JAMBI	Tebo	5,11	C
73	KEPRI	Lingga	5,10	C
74	KALBAR	Sanggau	5,07	C
75	KALSEL	Tanah Laut	5,05	C
76	SULTRA	Muna	5,04	C
77	LAMPUNG	Lampung Selatan	5,03	C
78	JABAR	Subang	5,02	C
79	SULTENG	Donggala	4,99	C
80	KALTENG	Kapuas	4,97	C
81	KALBAR	Kapuas Hulu	4,97	C
82	BALI	Gianyar	4,95	C
83	JATENG	Cilacap	4,94	C
84	KALSEL	Tabalong	4,94	C
85	BALI	Tabanan	4,94	C
86	SUMUT	Dairi	4,92	C
87	KALBAR	Sambas	4,90	C
88	SULSEL	Maros	4,89	C
89	SULSEL	Pinrang	4,88	C
90	SUMBAR	Pasaman	4,84	D
91	JATIM	Mojokerto	4,82	D
92	JATIM	Ponorogo	4,79	D
93	KEPRI	Natuna	4,79	D
94	JATIM	Situbondo	4,78	D
95	NTT	Ende	4,73	D
96	JATENG	Magelang	4,72	D
97	KALSEL	Hulu Sungai Tengah	4,72	D

Bersambung 

Lanjutan...

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai	Peringkat
98	KALBAR	Ketapang	4,70	D
99	KALSEL	Hulu Sungai Selatan	4,69	D
100	JABAR	Ciamis	4,69	D
101	KALTENG	Barito Utara	4,69	D
102	JATIM	Magetan	4,68	D
103	SULSEL	Gowa	4,68	D
104	BALI	Badung	4,68	D
105	JATENG	Boyolali	4,65	D
106	SULTENG	Morowali	4,64	D
107	SULSEL	Sinjai	4,62	D
108	BALI	Jembrana	4,61	D
109	BANTEN	Lebak	4,60	D
110	SUMUT	Langkat	4,60	D
111	PAPUA	Mimika	4,56	D
112	BENGKULU	Bengkulu Utara	4,55	D
113	SULSEL	Majene	4,55	D
114	SULTENG	Banggai	4,54	D
115	JATENG	Banyumas	4,53	D
116	LAMPUNG	Lampung Timur	4,52	D
117	JATIM	Kediri	4,51	D
118	JABAR	Sumedang	4,51	D
119	JATIM	Tulungagung	4,50	D
120	SULSEL	Barru	4,49	D
121	BALI	Buleleng	4,49	D
122	DIY	Gunungkidul	4,47	D
123	PAPUA	Sorong	4,44	D
124	SUMUT	Tapanuli Utara	4,43	D
125	JABAR	Garut	4,40	D
126	GORONTALO	Gorontalo	4,38	D
127	SULSEL	Takalar	4,32	D
128	JATIM	Bangkalan	4,32	D
129	BALI	Bangli	4,27	D
130	JATIM	Jombang	4,26	D
131	NTB	Lombok Timur	4,24	D
132	JABAR	Cirebon	4,20	D
133	JATENG	Wonosobo	4,20	D

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai	Peringkat
134	NTB	Bima	4,19	D
135	BALI	Karangasem	4,18	D
136	JABAR	Sukabumi	4,16	D
137	JATENG	Tegal	4,15	D
138	JATIM	Pasuruhan	4,15	E
139	JATIM	Jember	4,11	E
140	JABAR	Tasikmalaya	4,11	E
141	SUMSEL	Ogan Ilir	4,08	E
142	JATIM	Lamongan	4,07	E
143	JATIM	Banyuwangi	4,07	E
144	JABAR	Cianjur	4,07	E
145	NTB	Lombok Barat	4,06	E
146	SULSEL	Bantaeng	4,04	E
147	NTT	Timor Tengah Utara	3,99	E
148	NTT	Ngada	3,99	E
149	JATENG	Pekalongan	3,95	E
150	JATENG	Kebumen	3,93	E
151	JATIM	Blitar	3,90	E
152	JABAR	Kuningan	3,88	E
153	JATENG	Pemalang	3,88	E
154	SULSEL	Luwu Utara	3,87	E
155	KALSEL	Hulu Sungai Utara	3,86	E
156	LAMPUNG	Way Kanan	3,81	E
157	JABAR	Indramayu	3,80	E
158	NTT	Lembata	3,65	E
159	JATIM	Bondowoso	3,63	E
160	SULSEL	Jeneponto	3,63	E
161	JATENG	Jepara	3,57	E
162	SULTRA	Buton	3,56	E
163	JATIM	Pamekasan	3,35	E
164	JATENG	Purbalingga	3,31	E
165	NTT	Sumba Barat	3,15	E
166	NTT	Manggarai	3,13	E
167	NTT	Sika	3,11	E
168	PAPUA	Jayawijaya	2,88	E
169	KALTIM	Nunukan	2,33	E

**Lampiran 6.1** : Peringkat 59 Kota Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik

No.	Propinsi	Kota	Nilai	Peringkat
1	KALTIM	Balikpapan	8,02	A
2	SUMBAR	Padang	7,83	A
3	KEPRI	Batam	7,69	A
4	JATIM	Surabaya	7,34	A
5	SUMUT	Medan	7,31	A
6	KALSEL	Banjarmasin	7,25	A
7	DKI JAKARTA	Jakarta	7,21	A
8	BALI	Denpasar	7,12	A
9	JABAR	Bekasi	7,12	A
10	JABAR	Bandung	7,05	A
11	BANTEN	Tangerang	7,02	A
12	JATENG	Surakarta	6,96	A
13	SULSEL	Makasar	6,93	A
14	LAMPUNG	Bandar Lampung	6,89	A
15	BANTEN	Cilegon	6,89	A
16	JABAR	Sukabumi	6,88	A
17	SULUT	Manado	6,83	A
18	DIY	Yogyakarta	6,82	A
19	JATENG	Semarang	6,78	A
20	RIAU	Pekanbaru	6,75	A
21	SUMUT	Sibolga	6,74	A
22	JABAR	Depok	6,70	A
23	JABAR	Cirebon	6,68	A
24	JATIM	Mojokerto	6,59	B
25	KEPRI	Tanjung Pinang	6,53	B
26	BABEL	Pangkal Pinang	6,53	B
27	SUMUT	Tebing Tinggi	6,53	B
28	RIAU	Dumai	6,52	B
29	GORONTALO	Gorontalo	6,49	B
30	JABAR	Banjar	6,49	B

No.	Propinsi	Kota	Nilai	Peringkat
31	JAMBI	Jambi	6,47	B
32	KALTIM	Tarakan	6,46	B
33	JATENG	Tegal	6,45	B
34	NTB	Mataram	6,42	B
35	SUMSEL	Palembang	6,41	B
36	JATENG	Magelang	6,39	B
37	JABAR	Bogor	6,38	B
38	JATIM	Probolinggo	6,32	C
39	JATIM	Kediri	6,29	C
40	SUMBAR	Sawahlunto	6,28	C
41	SUMUT	Pematang Siantar	6,21	C
42	SULTRA	Kendari	6,21	C
43	SULSEL	Parepare	6,11	C
44	JATIM	Malang	6,08	C
45	PAPUA	Jayapura	6,08	C
46	SUMUT	Binjai	6,06	C
47	NTT	Kupang	6,02	C
48	KALBAR	Pontianak	5,99	C
49	KALTIM	Bontang	5,93	C
50	SULTENG	Palu	5,92	D
51	JABAR	Tasikmalaya	5,90	D
52	BENGKULU	Bengkulu	5,78	D
53	SULUT	Bitung	5,78	D
54	JATIM	Madiun	5,58	D
55	JATENG	Pekalongan	5,38	E
56	PAPUA	Sorong	5,29	E
57	KALTENG	Palangkaraya	5,27	E
58	KALTIM	Samarinda	5,09	E
59	SUMUT	Tanjung Balai	4,90	E

**Lampiran 6.2** : Peringkat 169 Kabupaten Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai	Peringkat
1	SULSEL	Maros	8,08	A
2	BALI	Gianyar	7,60	A
3	JATIM	Kediri	7,56	A
4	BALI	Jembrana	7,40	A
5	JABAR	Karawang	7,23	A
6	JABAR	Purwakarta	7,21	A
7	JABAR	Bogor	7,13	A
8	BALI	Bangli	7,07	A
9	BALI	Tabanan	6,97	A
10	SULTENG	Donggala	6,87	A
11	JABAR	Cianjur	6,80	A
12	SUMBAR	Solok	6,78	A
13	SUMBAR	Sawahlunto Sijunjung	6,77	A
14	JABAR	Sukabumi	6,76	A
15	DIY	Bantul	6,76	A
16	JATENG	Purbalingga	6,73	A
17	JABAR	Kuningan	6,73	A
18	BALI	Klungkung	6,72	A
19	JATIM	Gresik	6,68	A
20	JATIM	Sidoarjo	6,68	A
21	JABAR	Ciamis	6,67	A
22	NTB	Lombok Barat	6,66	A
23	KALTIM	Bulungan	6,66	A
24	JATENG	Jepara	6,66	A
25	BANTEN	Lebak	6,65	B
26	SULTRA	Kolaka	6,63	B
27	BANTEN	Tangerang	6,61	B
28	KALSEL	Tanah Laut	6,61	B
29	SULUT	Minahasa	6,56	B
30	RIAU	Indragiri Hilir	6,55	B
31	JATIM	Mojokerto	6,54	B
32	JATENG	Tegal	6,52	B
33	SULSEL	Pinrang	6,52	B
34	JATENG	Kudus	6,52	B
35	KALSEL	Hulu Sungai Tengah	6,52	B
36	KALTIM	Nunukan	6,51	B
37	KALTIM	Kutai Kertanegara	6,50	B
38	JATENG	Pekalongan	6,49	B
39	JAMBI	Tebo	6,49	B
40	DIY	Sleman	6,47	B
41	KALTIM	Pasir	6,45	B
42	JATENG	Cilacap	6,43	B
43	KALSEL	Tabalong	6,42	B
44	KALBAR	Ketapang	6,42	B
45	JABAR	Bekasi	6,42	B
46	JATENG	Kendal	6,42	B
47	JATIM	Jombang	6,42	B
48	JABAR	Subang	6,41	B
49	JATENG	Boyolali	6,40	B

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai	Peringkat
50	JATENG	Karanganyar	6,39	B
51	JABAR	Sumedang	6,38	B
52	JATIM	Bangkalan	6,38	B
53	BENGKULU	Rejang Lebong	6,37	B
54	GORONTALO	Gorontalo	6,35	B
55	JATIM	Pamekasan	6,34	B
56	NTB	Lombok Timur	6,34	B
57	BALI	Buleleng	6,33	C
58	BABEL	Belitung	6,33	C
59	JAMBI	Kerinci	6,29	C
60	JATENG	Pemalang	6,26	C
61	SULSEL	Pangkajene Kepulauan	6,25	C
62	JATENG	Magelang	6,22	C
63	KALSEL	Hulu Sungai Selatan	6,21	C
64	JABAR	Cirebon	6,20	C
65	SULSEL	Bantaeng	6,20	C
66	JATENG	Banyumas	6,18	C
67	BALI	Karangasem	6,18	C
68	SULSEL	Bone	6,17	C
69	JABAR	Garut	6,16	C
70	SULSEL	Barru	6,14	C
71	JABAR	Tasikmalaya	6,14	C
72	SULSEL	Luwu	6,14	C
73	JATENG	Kebumen	6,13	C
74	LAMPUNG	Lampung Barat	6,12	C
75	SUMSEL	Musi Rawas	6,12	C
76	SULSEL	Gowa	6,10	C
77	JATENG	Sukoharjo	6,08	C
78	NTT	Lembata	6,08	C
79	SUMSEL	Musi Banyuasin	6,07	C
80	SUMUT	Deliserdang	6,06	C
81	LAMPUNG	Lampung Utara	6,05	C
82	BANTEN	Serang	6,01	C
83	LAMPUNG	Lampung Selatan	6,00	C
84	KALTENG	Kapuas	5,99	C
85	SULSEL	Sinjai	5,99	C
86	DIY	Gunungkidul	5,98	C
87	SUMBAR	Pasaman	5,98	C
88	KALTIM	Berau	5,93	C
89	SUMSEL	Ogan Ilir	5,93	C
90	SUMSEL	Lahat	5,92	C
91	NTT	Timor Tengah Selatan	5,92	D
92	SULTENG	Banggai	5,92	D
93	SULTRA	Konawe Selatan	5,91	D
94	BALI	Badung	5,90	D
95	KALSEL	Hulu Sungai Utara	5,88	D
96	SUMSEL	Muaraenim	5,87	D
97	SUMUT	Simalungun	5,87	D



Lanjutan...

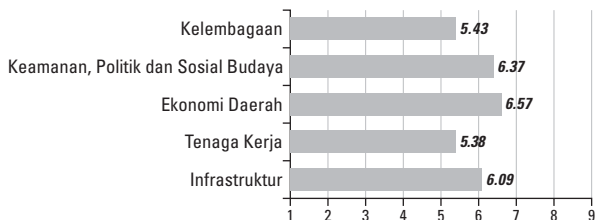
No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai	Peringkat
98	JABAR	Indramayu	5,86	D
99	NTT	Sika	5,86	D
100	SULSEL	Takalar	5,85	D
101	NTT	Ende	5,83	D
102	JATIM	Situbondo	5,82	D
103	SULSEL	Selayar	5,80	D
104	JAMBI	Batanghari	5,80	D
105	JATIM	Jember	5,80	D
106	NTT	Timor Tengah Utara	5,79	D
107	JATENG	Klaten	5,78	D
108	KEPRI	Karimun	5,76	D
109	JATIM	Tulungagung	5,74	D
110	BABEL	Bangka Barat	5,73	D
111	JATIM	Ponorogo	5,71	D
112	JABAR	Bandung	5,69	D
113	SULUT	Sangihe Talaut	5,69	D
114	NTT	Sumba Barat	5,67	D
115	SULTENG	Tolitoli	5,67	D
116	NTT	Manggarai	5,67	D
117	JAMBI	Bungo	5,65	D
118	SUMBAR	Pesisir Selatan	5,65	D
119	SULSEL	Tanah Toraja	5,64	D
120	JATIM	Bondowoso	5,62	D
121	SUMUT	Asahan	5,60	D
122	RIAU	Bengkalis	5,60	D
123	SUMUT	Langkat	5,60	D
124	SULSEL	Jeneponto	5,58	D
125	JATIM	Banyuwangi	5,56	D
126	SULTENG	Morowali	5,56	D
127	JATIM	Blitar	5,55	D
128	JATENG	Wonosobo	5,52	D
129	KALTENG	Barito Utara	5,51	D
130	PAPUA	Manokwari	5,51	D
131	NTB	Bima	5,50	D
132	SULSEL	Luwu Utara	5,49	E
133	LAMPUNG	Lampung Timur	5,49	E

No.	Propinsi	Kabupaten	Nilai	Peringkat
134	JATIM	Lamongan	5,48	E
135	JATIM	Pasuruhan	5,48	E
136	BENGKULU	Bengkulu Utara	5,46	E
137	SUMUT	Karo	5,43	E
138	DIY	Kulonprogo	5,38	E
139	KALBAR	Kapuas Hulu	5,35	E
140	SULSEL	Majene	5,34	E
141	RIAU	Pelalawan	5,31	E
142	LAMPUNG	Way Kanan	5,31	E
143	PAPUA	Mimika	5,31	E
144	KALSEL	Tapin	5,30	E
145	SUMUT	Dairi	5,28	E
146	KALBAR	Pontianak	5,27	E
147	BABEL	Bangka	5,26	E
148	PAPUA	Sorong	5,24	E
149	RIAU	Kuansing	5,19	E
150	NTT	Ngada	5,14	E
151	SULTENG	Poso	5,14	E
152	KALBAR	Sambas	5,12	E
153	KEPRI	Lingga	5,10	E
154	SUMUT	Tapanuli Utara	4,94	E
155	JATIM	Magetan	4,90	E
156	BABEL	Bangka Selatan	4,86	E
157	KALBAR	Sanggau	4,79	E
158	PAPUA	Fakfak	4,78	E
159	KEPRI	Natuna	4,72	E
160	SULTRA	Muna	4,70	E
161	NTB	Dompu	4,64	E
162	SULTRA	Buton	4,62	E
163	KALTIM	Kutai Timur	4,46	E
164	RIAU	Kampar	4,45	E
165	BENGKULU	Bengkulu Selatan	4,37	E
166	PAPUA	Jayawijaya	4,37	E
167	KALTENG	Barito Selatan	4,34	E
168	RIAU	Rokan Hulu	3,91	E
169	JAMBI	Tanjung Jabung Timur	3,30	E

## PROFIL DAERAH

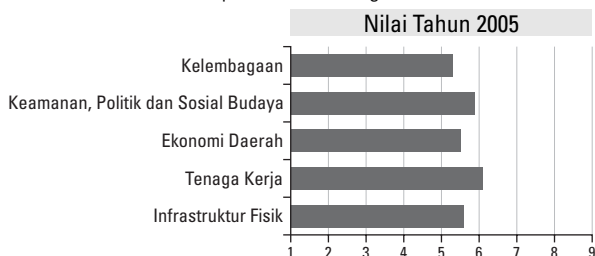
Lampiran 7 : Profil Daya Saing Investasi 59 Kota dan 169 Kabupaten di Indonesia

### Nilai Rata-rata 228 Kabupaten/Kota Tahun 2005



#### KABUPATEN ASAHAN

Ibu Kota : Kisaran  
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 5  
 Telp./Fax. : 0623-41100, 41928, 43441/0623-42100, 41100  
 Web : www.pemkab\_asahan.go.id



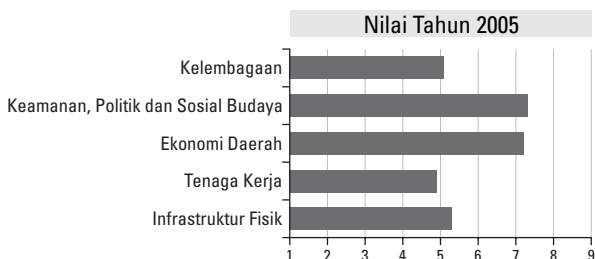
#### PROVINSI SUMATERA UTARA

Jumlah Penduduk 2004 : 1.028.472  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 4.694,34  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 14.375.987

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	E
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	D	• Biaya TK	D
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	E

#### KABUPATEN DAIRI

Ibu Kota : Sidi Kalang  
 Alamat : Jl. Sisingamangaraja No. 127  
 Telp./Fax. : 0627-21022, 21763/0627-21001  
 Web :

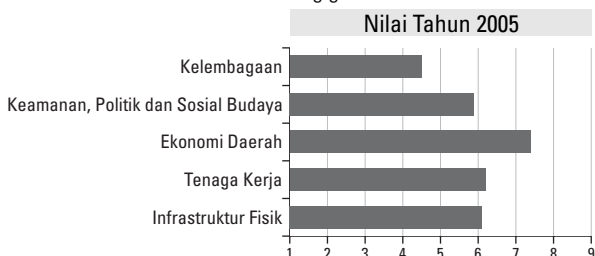


Jumlah Penduduk 2004 : 1.416.168  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 2.175,91  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 10.154.774

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	A	• Biaya TK	E
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	E

#### KABUPATEN DELI SERDANG

Ibu Kota : Lubuk Pakam  
 Alamat : Jl. Negara Medan No. 1,  
 Telp./Fax. : 061-7952000/061-7952007  
 Web : www.deliserdang.go.id

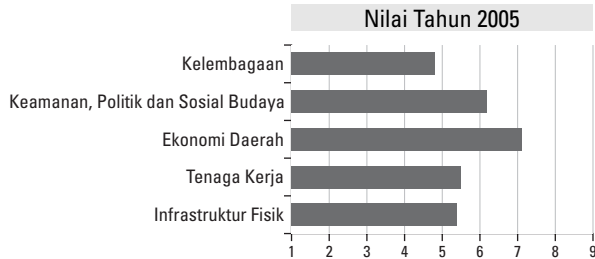


Jumlah Penduduk 2004 : 2.042,62  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 4.329,00  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 10.154.774

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	D	• Biaya TK	D
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	D

## KABUPATEN KARO

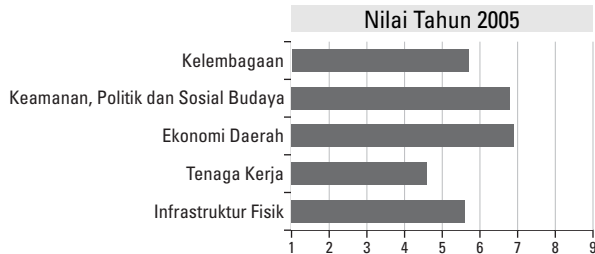
Ibu Kota : Kaban Jahe  
 Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 17  
 Telp./Fax. : 0628-20220, 20120/0628-20130  
 Web : www.pemkabkaro.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 324.001		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 2.127,27		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 10.096.780		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>B</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>B</b>
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Palayanan	C	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	B	• Biaya TK	D
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	E

## KABUPATEN LANGKAT

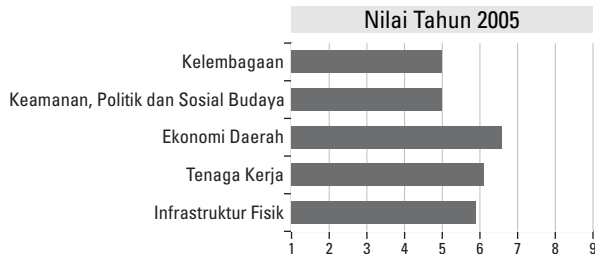
Ibu Kota : Stabat  
 Alamat : Jl. Proklamasi No. 41  
 Telp./Fax. : 061-8910200, 8910101/061-8910603  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 971.282		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 6.188,88		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 6.929.093		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>D</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Palayanan	E	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	E	• Biaya TK	D
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	D

## KABUPATEN SIMALUNGUN

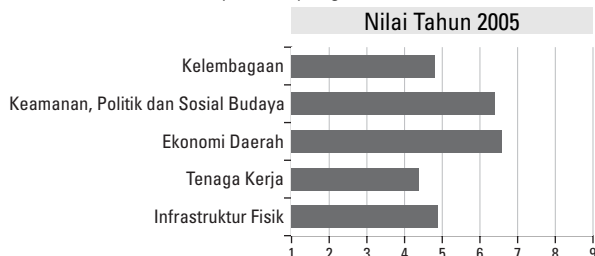
Ibu Kota : Pematang Raya  
 Alamat : Jl. Asahan Km 3,5  
 Telp./Fax. : 0622-51000, 50093/0622-51092, 51900  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 830.745		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 4.386,35		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 6.869.688		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>E</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>B</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Palayanan	E	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	D	• Biaya TK	E
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	D

## KABUPATEN TAPANULI UTARA

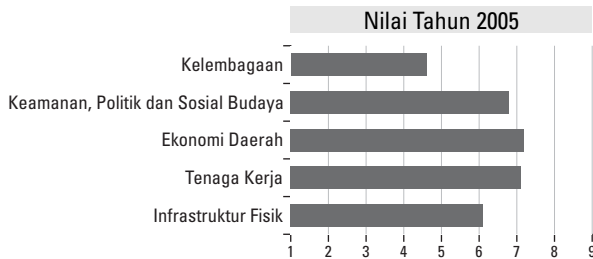
Ibu Kota : Tarutung  
 Alamat : Jl. Letjen. Suprpto No. 1  
 Telp./Fax. : 0633-21220/0633-21440  
 Web : www.pemdataput.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 267.411		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 3.791,64		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 6.823.413		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>E</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Palayanan	E	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	C	• Biaya TK	D
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KOTA BINJAI

Ibu Kota : Binjai  
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 6  
 Telp./Fax. : 061-8821736, 8821748/061-8824000, 8821736  
 Web : www.binjai.go.id

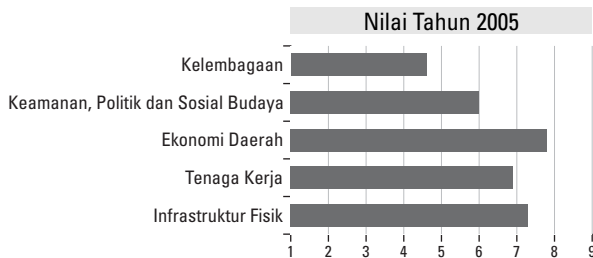


Jumlah Penduduk 2004 : 227.478  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 32,44  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 8.613.925

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	B	• Kualitas TK	A
• Politik	B	• Biaya TK	D
• Sosial Budaya	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
		• Ketersediaan	C
		• Kualitas	D

## KOTA MEDAN

Ibu Kota : Medan  
 Alamat : Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2  
 Telp./Fax. : 061-4512272, 4535179/061-4520782, 4570228  
 Web : www.pemkonedan.go.id

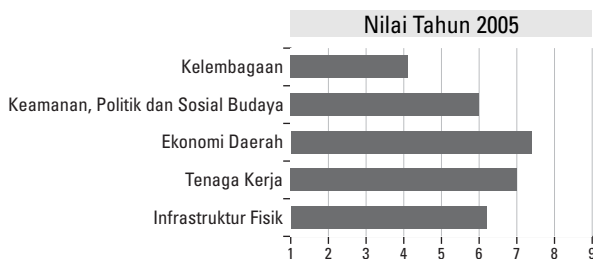


Jumlah Penduduk 2004 : 2.122.579  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 79,98  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 16.451.358

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	D	• Kualitas TK	A
• Politik	D	• Biaya TK	E
• Sosial Budaya	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
		• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KOTA PEMATANG SIANTAR

Ibu Kota : Pematang Siantar  
 Alamat : Jl. Merdeka No. 6  
 Telp./Fax. : 0622-21000/0622-21058  
 Web :

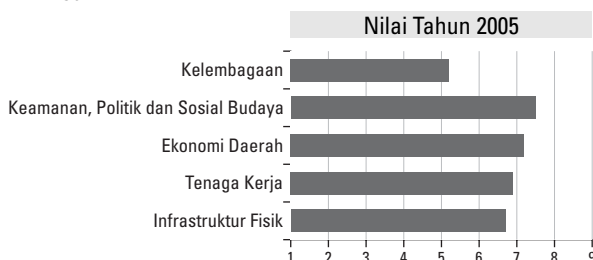


Jumlah Penduduk 2004 : 229.011  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 27,78  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 11.178.847

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	C	• Kualitas TK	A
• Politik	E	• Biaya TK	E
• Sosial Budaya	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
		• Ketersediaan	C
		• Kualitas	B

## KOTA SIBOLGA

Ibu Kota : Sibolga  
 Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 26A  
 Telp./Fax. : 0631-22000, 22376/0631-21143  
 Web :

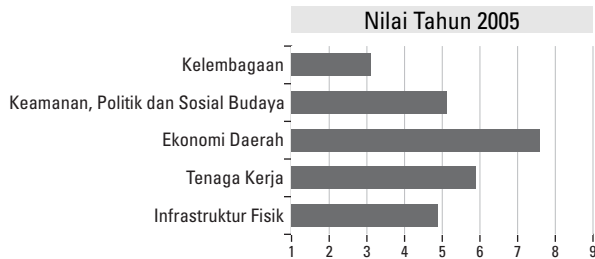


Jumlah Penduduk 2004 : 89.627  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 68,08  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 8.238.905

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	C	• Kualitas TK	A
• Politik	A	• Biaya TK	D
• Sosial Budaya	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
		• Ketersediaan	B
		• Kualitas	A

## KOTA TANJUNG BALAI

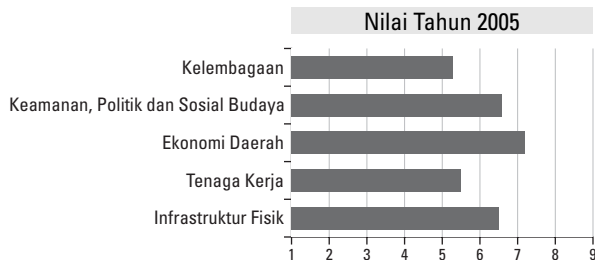
Ibu Kota : Tanjung Balai  
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 9  
 Telp./Fax. : 0623-92100, 92076/0623-93791  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 149.145		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 9,03		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 10.604.665		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>E</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>A</b>
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Palayanan	E	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	E	• Biaya TK	E
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KOTA TEBING TINGGI

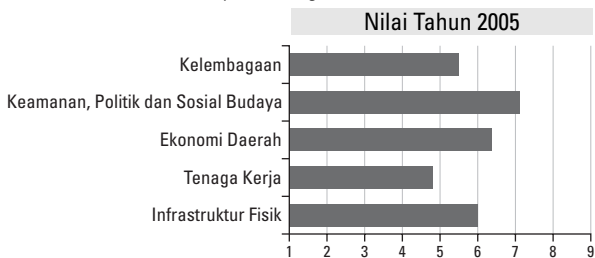
Ibu Kota : Tebing Tinggi  
 Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 14  
 Telp./Fax. : 0621-23444/0621-21273  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 138.377		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 114,66		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 8.309.304		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>C</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>B</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Palayanan	C	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	B	• Biaya TK	E
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	B

## KABUPATEN PASAMAN

Ibu Kota : Lubuk Sikapang  
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 40  
 Telp./Fax. : 0753-20020/0753-20281  
 Web : www.pasaman.go.id

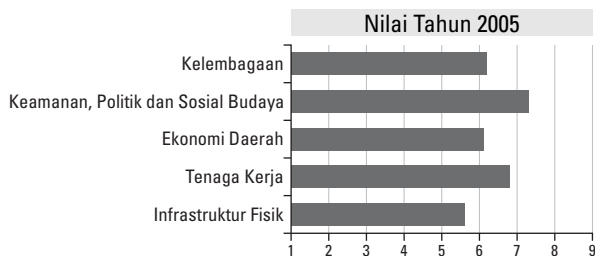


## PROPINSI SUMATERA BARAT

<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 242.789		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 3.947,63		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 5.334.449		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>C</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Palayanan	B	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	B	• Biaya TK	C
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	C

## KABUPATEN PESIRIS SELATAN

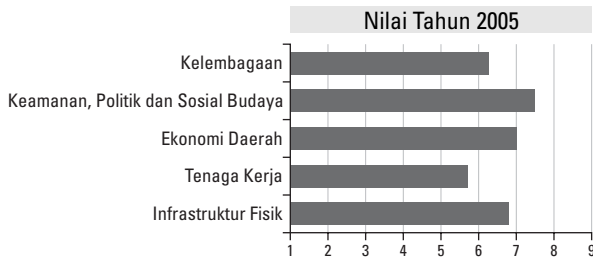
Ibu Kota : Painan  
 Alamat : Jl. H. agus Salim No. 1  
 Telp./Fax. : 0756-21000, 22155/0756-21414  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 411.249		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 5.749,89		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 4.614.114		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>A</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>D</b>
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Palayanan	B	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	A	• Biaya TK	C
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	D

## KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG

Ibu Kota : Muaro  
 Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin, SH No. 17  
 Telp./Fax. : 0754-20002/0754-61011  
 Web :

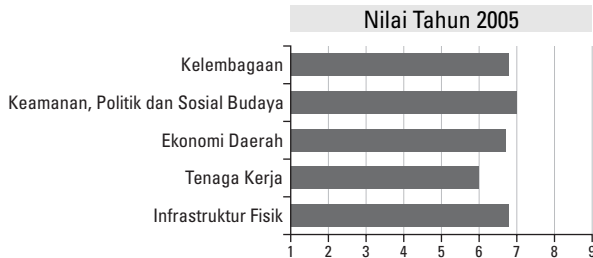


**Jumlah Penduduk 2004** : 181.047  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 3.130,40  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 7.037.405

KELEMBAGAAN	A	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	A	• Biaya TK	D
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KABUPATEN SOLOK

Ibu Kota : Solok  
 Alamat : Jl. Raya Koto Baru No. 7  
 Telp./Fax. : 0755-20127/0755-31333  
 Web : www.solok.go.id

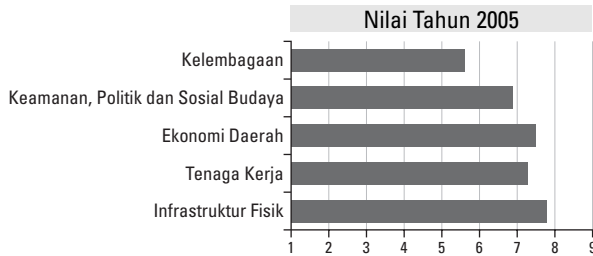


**Jumlah Penduduk 2004** : 341.702  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 3.738,00  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 6.005.960

KELEMBAGAAN	A	EKONOMI DAERAH	C
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	B	• Biaya TK	C
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	B

## KOTA PADANG

Ibu Kota : Padang  
 Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin, SH No. 70  
 Telp./Fax. : 0751-31800, 32386/0751-32386, 31806, 31800  
 Web : www.padang.go.id

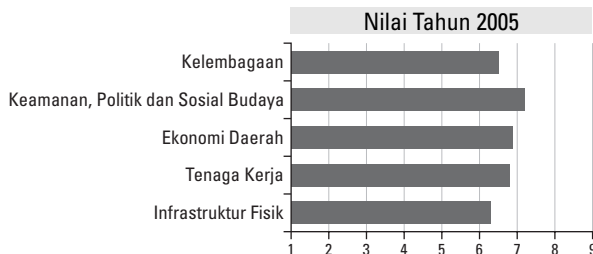


**Jumlah Penduduk 2004** : 774.748  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 693,66  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 14.318.628

KELEMBAGAAN	C	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	C	• Biaya TK	D
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KOTA SAWAHLUNTO

Ibu Kota : Sawahlunto  
 Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin, SH  
 Telp./Fax. : 0754-61063, 61011  
 Web :

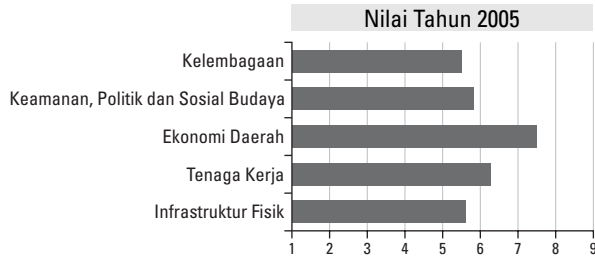


**Jumlah Penduduk 2004** : 53.215  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 273,45  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 10.832,022

KELEMBAGAAN	A	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	A	• Biaya TK	C
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	B

**KABUPATEN BENGKALIS****PROPINSI RIAU**

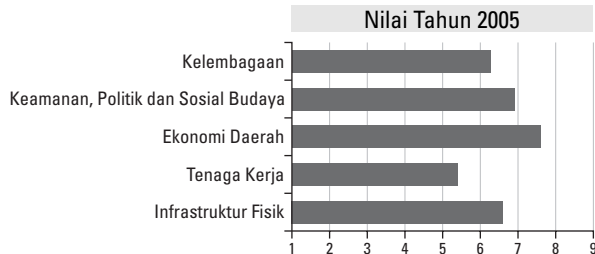
Ibu Kota : Bengkalis  
 Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 45  
 Telp./Fax. : 0766-21001, 21258/0766-21667  
 Web : www.bengkalis.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 637.163		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 11.629,70		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 10.964.359		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>C</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>A</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Palayanan	B	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	E	• Biaya TK	E
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	C

**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

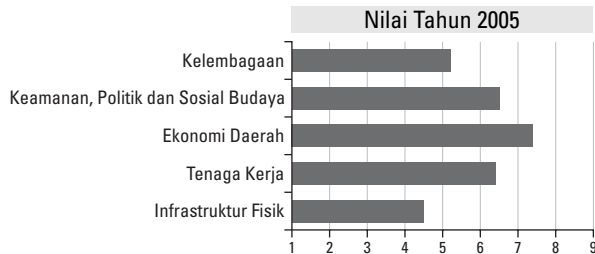
Ibu Kota : Tembilahan  
 Alamat : Jl. Swarna Bumi No. 1  
 Telp./Fax. : 0768-21002, 21010/0768-21555  
 Web : www.inhil.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 624.359		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 12.614,78		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 12.676.253		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>A</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>A</b>
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Palayanan	A	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	C	• Biaya TK	D
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	B

**KABUPATEN KAMPAR**

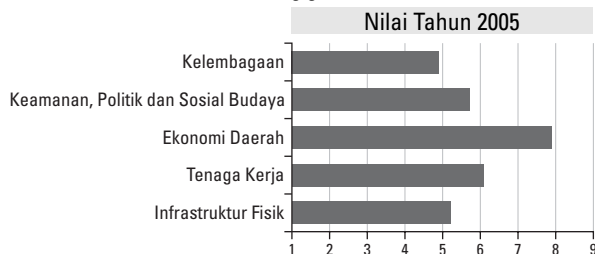
Ibu Kota : Bangkinang  
 Alamat : Jl. HR. Soebrantas  
 Telp./Fax. : 0762-20358, 20207/0762-20630  
 Web : www.kampar.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 532.236		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 10.983,47		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 9.550.580		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>D</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>A</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Palayanan	D	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	B	• Biaya TK	E
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

**KABUPATEN KUANTAN SENGINGI**

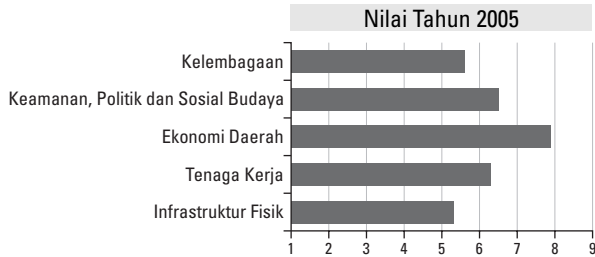
Ibu Kota : Teluk Kuantan  
 Alamat : Jl. Kuantan Sengingi  
 Telp./Fax. : 0760-20142, 20729  
 Web : www.kuansing.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 243.772		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 7.659,03		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 17.362.904		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>E</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>A</b>
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Palayanan	D	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	D	• Biaya TK	D
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	D

## KABUPATEN PELALAWAN

Ibu Kota : Pangkalan Kerinci  
 Alamat : Jl. Raya Lintas Timur No. 379  
 Telp./Fax. : 0761-95017, 95018/0761-493172  
 Web : www.bkpmmd.pelalawan.go.id

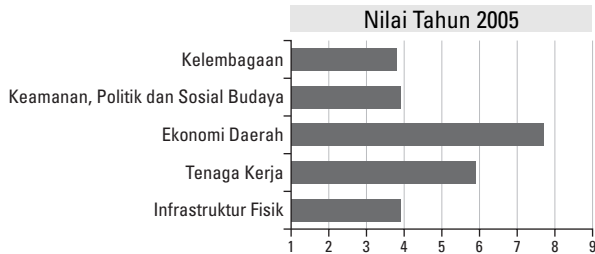


Jumlah Penduduk 2004 : 220.836  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 10.427,57  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 24.474.640

KELEMBAGAAN	C	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	B	• Kualitas TK	A
• Politik	A	• Biaya TK	E
• Sosial Budaya	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
		• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KABUPATEN ROKAN HULU

Ibu Kota : Pasir Pangarean  
 Alamat : Jl. Diponegoro Km. 6  
 Telp./Fax. : 0762-91029/0762-91352  
 Web : www.rokanhulu.go.id

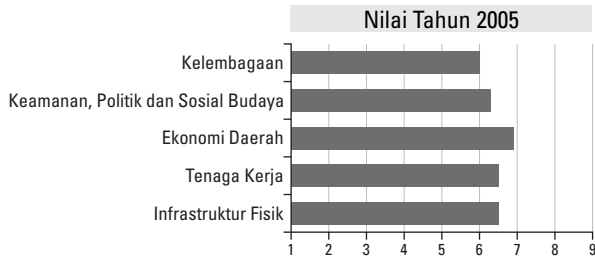


Jumlah Penduduk 2004 : 340.701  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 6.283,10  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 12.805.420

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	E	• Kualitas TK	B
• Politik	E	• Biaya TK	E
• Sosial Budaya	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
		• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KOTA DUMAI

Ibu Kota : Dumai  
 Alamat : Jl. HR. Soebrantas  
 Telp./Fax. : 0765-31070/0765-31179  
 Web : www.dumai.go.id

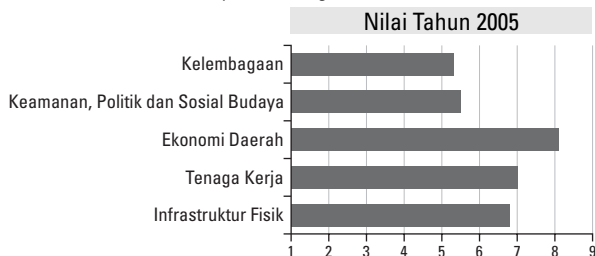


Jumlah Penduduk 2004 : 215.761  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 1.623,38  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 9.273.089

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	D	• Kualitas TK	B
• Politik	B	• Biaya TK	E
• Sosial Budaya	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
		• Ketersediaan	A
		• Kualitas	B

## KABUPATEN PEKANBARU

Ibu Kota : Pekanbaru  
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 464  
 Telp./Fax. : 0761-33000/0761-32333, 43214, 43125  
 Web : www.pekanbaru.go.id



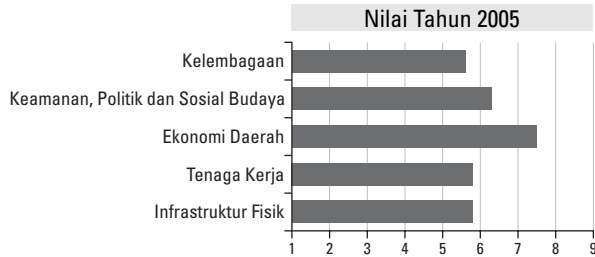
Jumlah Penduduk 2004 : 702.717  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 632,27  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 15.869.473

KELEMBAGAAN	C	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	E	• Kualitas TK	A
• Politik	E	• Biaya TK	E
• Sosial Budaya	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
		• Ketersediaan	B
		• Kualitas	A



**KABUPATEN BATANGHARI****PROPINSI JAMBI**

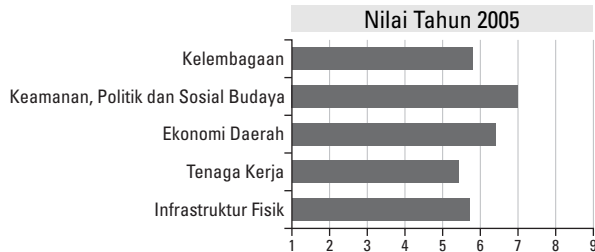
Ibu Kota : Muara Bulian  
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 1  
 Telp./Fax. : 0743-21345/0743-21007  
 Web : www.batanghari.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 217.858		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 11.130,00		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 6.102.857		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>C</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>A</b>
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Palayanan	C	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	B	• Biaya TK	B
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	C

**KABUPATEN BUNGO**

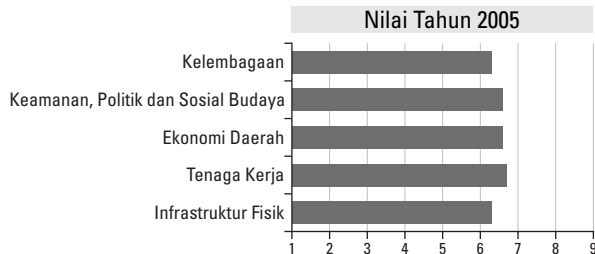
Ibu Kota : Muara Bungo  
 Alamat : Jl. R.M. Taher No. 503  
 Telp./Fax. : 0747-21510, 21024  
 Web : www.bungo.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 240.637		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 6.161,00		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 5.466.761		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>B</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Palayanan	C	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	B	• Biaya TK	C
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	D

**KABUPATEN KERINCI**

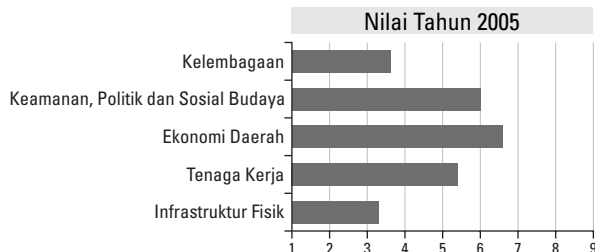
Ibu Kota : Sungai Penuh  
 Alamat : Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 1  
 Telp./Fax. : 0748-21002/0748-21011  
 Web : www.kerincijambi.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 305.362		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 4.200,00		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 6.470.430		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>A</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Palayanan	A	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	B	• Biaya TK	B
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	C

**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

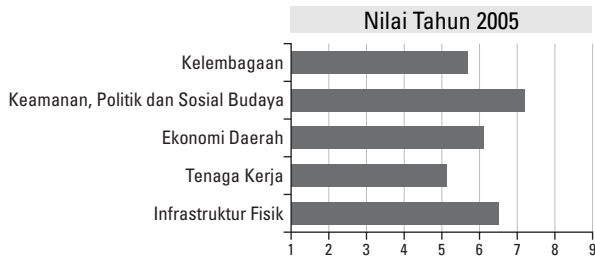
Ibu Kota : Muaro Sabak  
 Alamat : Jl. Kapten Marzuki No. 1  
 Telp./Fax. : 0742-322966/0742-322966  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 204.142		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 5.445,00		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 6.094.150		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>E</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Palayanan	E	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	C	• Biaya TK	B
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KABUPATEN TEBO

Ibu Kota : Muaro Tebo  
 Alamat : Jl. Lintas Bungo Tebo Km. 2,5  
 Telp./Fax. : 0744-21290/0744-21316  
 Web : www.tebo.go.id

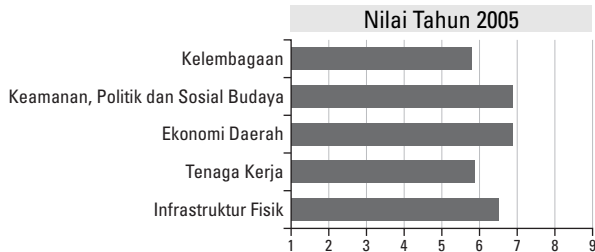


Jumlah Penduduk 2004 : 236.344  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 6.461,00  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 4.608.429

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	A	• Biaya TK	B
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	B

## KOTA JAMBI

Ibu Kota : Jambi  
 Alamat : Jl. Jend. Basuki Rachmat, Kota Baru  
 Telp./Fax. : 0741-40827, 40263/0741-40032  
 Web : www.jambi.wasantara.net.id

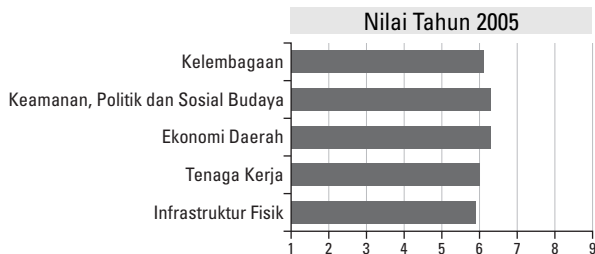


Jumlah Penduduk 2004 : 489.289  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 205,43  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 7.269.690

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	B	• Biaya TK	C
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	A

## KABUPATEN LAHAT

Ibu Kota : Lahat  
 Alamat : Jl. Kol. Barlian Bandar Jaya  
 Telp./Fax. : 0731-321021, 32512/0731-321512  
 Web :



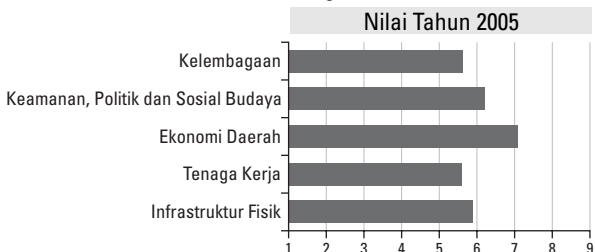
## PROPINSI SUMATERA SELATAN

Jumlah Penduduk 2004 : 570.557  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 6.528,70  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 5.740.977

KELEMBAGAAN	A	EKONOMI DAERAH	C
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	C	• Biaya TK	D
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	D

## KABUPATEN MUARA ENIM

Ibu Kota : Muara Enim  
 Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 16  
 Telp./Fax. : 0734-421001, 421019/0734-421080, 421019  
 Web : www.muaraenim.go.id

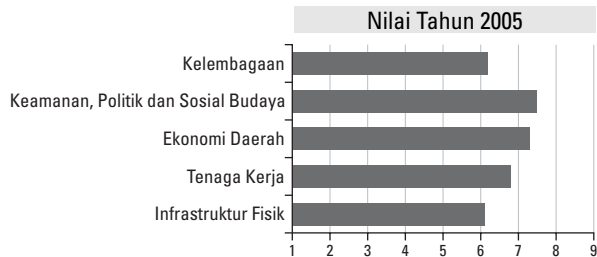


Jumlah Penduduk 2004 : 641.204  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 1.004,72  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 8.336.943

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	D	• Biaya TK	D
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	C

## KABUPATEN MUSI BANYUASIN

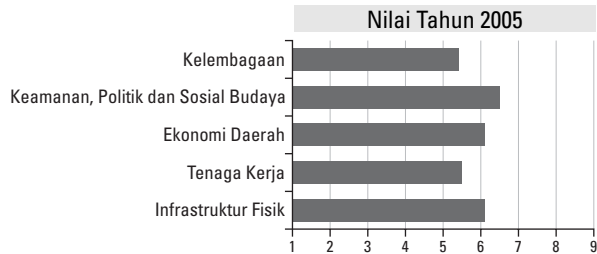
Ibu Kota : Sekayu  
 Alamat : Jl. Kol. Wahid Udin No. 257  
 Telp./Fax. : 0714-321021, 321013/0714-321363  
 Web : www.muba.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 474.212		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 14.265,96		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 9.289.743		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>A</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>A</b>
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Palayanan	B	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	A	• Biaya TK	D
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	C

## KABUPATEN RAWAS

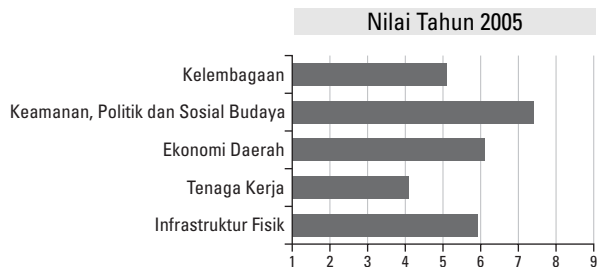
Ibu Kota : Lubuk Linggau  
 Alamat : Jl. Yos. Sudarso Km. 7 No. 2 Taba Pingin  
 Telp./Fax. : 0733-451565, 451233/0733-451000  
 Web : www.musi-rawas.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 477.598		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 21.456,58		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 4.873.865		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>C</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>D</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Palayanan	D	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	D	• Biaya TK	D
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	D

## KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

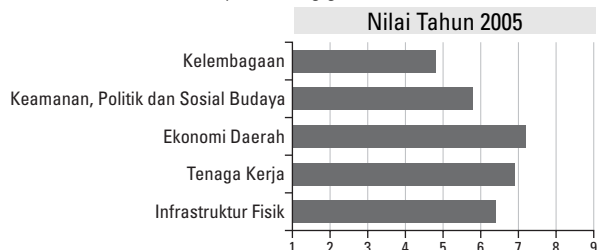
Ibu Kota : Kayu Agung  
 Alamat : Jl. Raya Lintas Timur Km. 35 Muara Baru  
 Telp./Fax. : 0712-321025/0712-321701  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 656.828		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 1.903,55		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 4.826.565		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>D</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>D</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Palayanan	C	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	A	• Biaya TK	D
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	E

## KOTA PALEMBANG

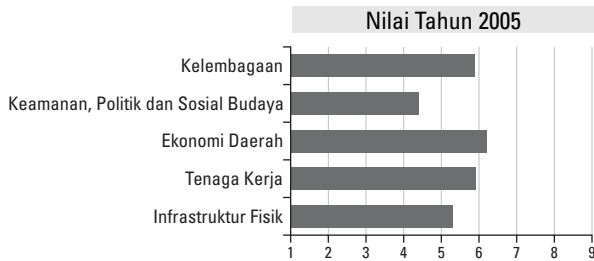
Ibu Kota : Palembang  
 Alamat : Jl. Merdeka No. 2  
 Telp./Fax. : 0711-311871/0711-372384  
 Web : www.palembang.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 1.357.866		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 369,22		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 9.929.457		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>E</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>B</b>
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Palayanan	E	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	E	• Biaya TK	D
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	D

**KABUPATEN BANGKA**

Ibu Kota : Sungai Liat  
 Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani  
 Telp./Fax. : 0717-92016, 92554/0717-92534  
 Web :

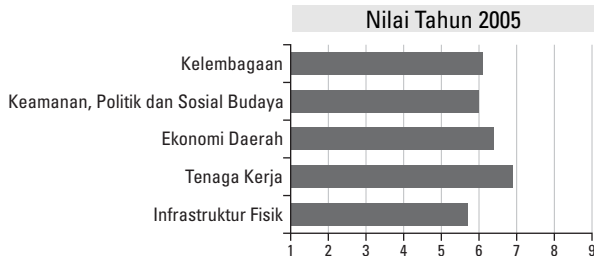
**PROPINSI BANGKA BELITUNG**

Jumlah Penduduk 2004 : 232.356  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 2.950,68  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 6.389.379

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	E	• Kualitas TK	B
• Politik	E	• Biaya TK	D
• Sosial Budaya	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
		• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

**KABUPATEN BANGKA BARAT**

Ibu Kota : Muntok  
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 1  
 Telp./Fax. : 0716-22305/0716-22305  
 Web :

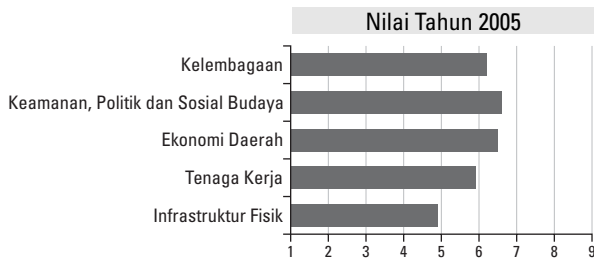


Jumlah Penduduk 2004 : 140.355  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 2.820,61  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 16.631.207

KELEMBAGAAN	A	EKONOMI DAERAH	C
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	C	• Kualitas TK	A
• Politik	E	• Biaya TK	D
• Sosial Budaya	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
		• Ketersediaan	D
		• Kualitas	D

**KABUPATEN BANGKA SELATAN**

Ibu Kota : Toboali  
 Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani  
 Telp./Fax. : 0718-41666/0718-41666  
 Web :

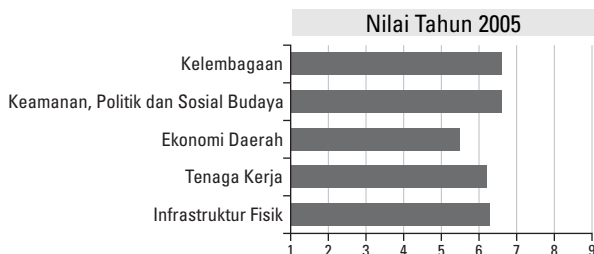


Jumlah Penduduk 2004 : 149.173  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 3.607,08  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 7.265.817

KELEMBAGAAN	A	EKONOMI DAERAH	C
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	C	• Kualitas TK	C
• Politik	B	• Biaya TK	D
• Sosial Budaya	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
		• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

**KABUPATEN BELITUNG**

Ibu Kota : Tanjung Pandan  
 Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani  
 Telp./Fax. : 0719-21001/0719-21339  
 Web :

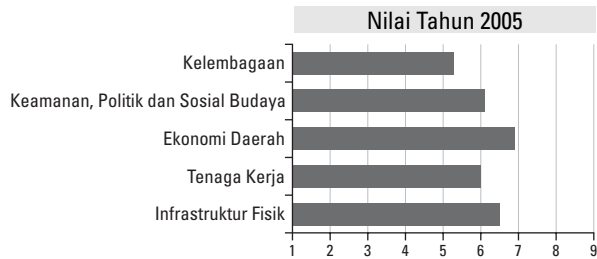


Jumlah Penduduk 2004 : 136.451  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 2.293,69  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 822.496

KELEMBAGAAN	A	EKONOMI DAERAH	E
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	C	• Kualitas TK	B
• Politik	B	• Biaya TK	C
• Sosial Budaya	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
		• Ketersediaan	C
		• Kualitas	C

## KABUPATEN PANGKAL PINANG

Ibu Kota : Pangkal Pinang  
 Alamat : Jl. Bukit Intan  
 Telp./Fax. : 0717-421466, 43191/0717-422375  
 Web :

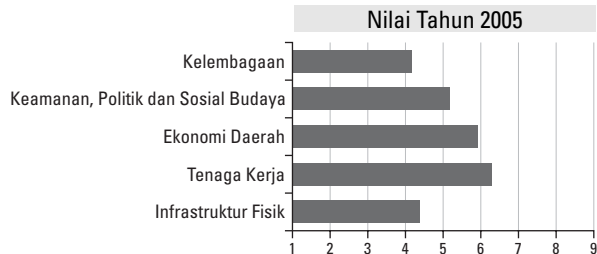


**Jumlah Penduduk 2004** : 141.963  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 89,40  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 7.983.231

<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>D</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>B</b>
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Palayanan	C	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	D	• Biaya TK	D
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	B

## KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Ibu Kota : Manna  
 Alamat : Jl. Raya Pdang Panjang No. 1  
 Telp./Fax. : 0739-21001/0739-21069  
 Web :



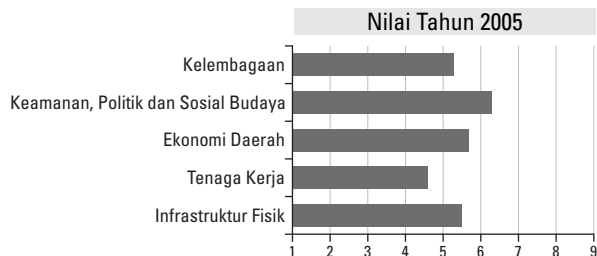
## PROPINSI BENGKULU

**Jumlah Penduduk 2004** : 136.398  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 1.186,10  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 4.338.189

<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>E</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>D</b>
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Palayanan	E	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	E	• Biaya TK	B
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KABUPATEN BENGKULU UTARA

Ibu Kota : Arga Makmur  
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 1  
 Telp./Fax. : 0737-521018/0737-521222  
 Web :

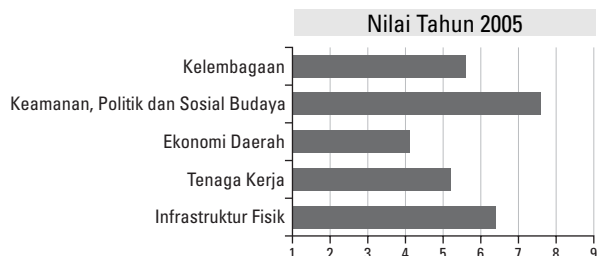


**Jumlah Penduduk 2004** : 345.455  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 5.548,34  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 3.685.112

<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>C</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>E</b>
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Palayanan	C	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	C	• Biaya TK	B
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	D

## KABUPATEN REJANG LEBONG

Ibu Kota : Curup  
 Alamat : Jl. S. Sukowati No. 52  
 Telp./Fax. : 0732-21410/0732-21350  
 Web :

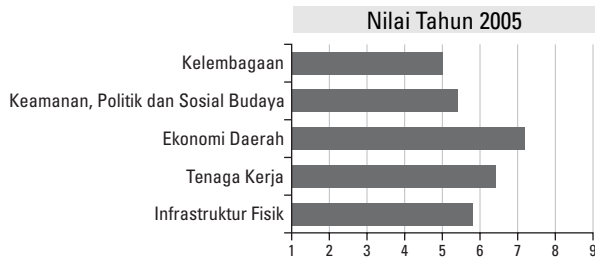


**Jumlah Penduduk 2004** : 248000  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 1.516,00  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 5.699.600

<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>C</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>E</b>
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Palayanan	B	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	A	• Biaya TK	B
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	C

## KOTA BENGKULU

Ibu Kota : Bengkulu  
 Alamat : Jl. Letjen. S. Parman No. 1  
 Telp./Fax. : 0736-21450/0736-36992  
 Web :

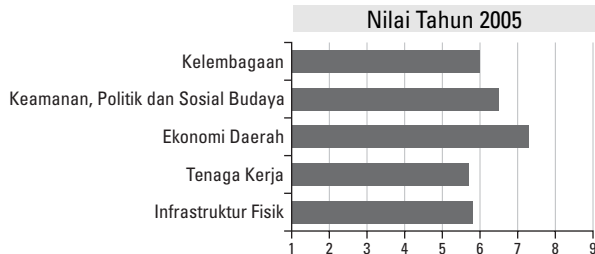


Jumlah Penduduk 2004 : 266.989  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 144,52  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 8.184.216

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	E	• Biaya TK	B
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	D

## KABUPATEN KARIMUN

Ibu Kota : Tanjung Balai  
 Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 1  
 Telp./Fax. : 0777-21050/0777-21666  
 Web :



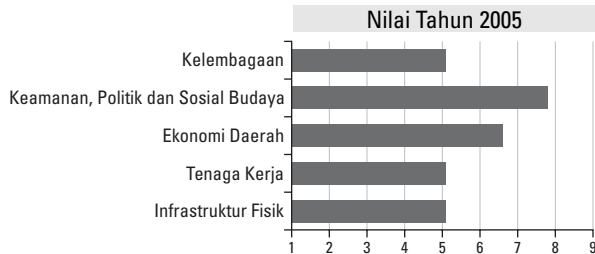
## PROPINSI KEPULAUAN RIAU

Jumlah Penduduk 2004 : 187.457  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 4.257,00  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 10.869.650

KELEMBAGAAN	A	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	C	• Biaya TK	D
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	C

## KABUPATEN LINGGA

Ibu Kota : Lingga  
 Alamat : Jl. Datuk Laksamana  
 Telp./Fax. : 0776-322300  
 Web :

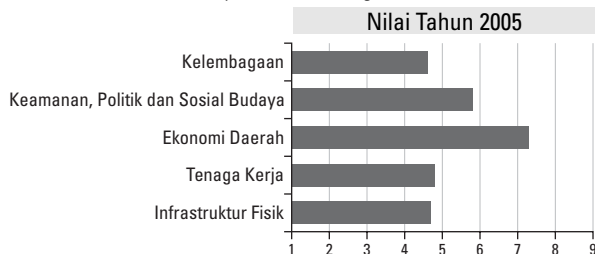


Jumlah Penduduk 2004 : 77.078  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 411,10  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 6.398.208

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	C
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	A	• Biaya TK	E
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KABUPATEN NATUNA

Ibu Kota : Ranai  
 Alamat : Jl. Datuk Kayawan Muhammad Benteng  
 Telp./Fax. : 0773-31446/0773-31001  
 Web : www.pemkab-natuna.go.id

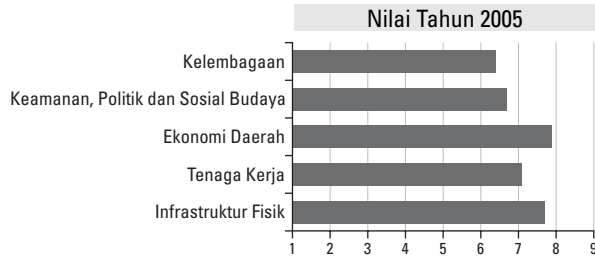


Jumlah Penduduk 2004 : 87.354  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 1.511,88  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 10.999.386

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	D	• Biaya TK	E
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KOTA BATAM

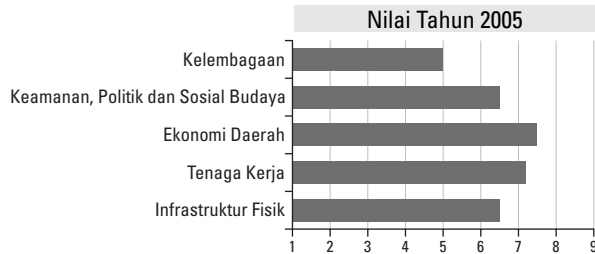
Ibu Kota : Batam  
 Alamat : Jl. Engku Putri No. 1 Batam Centre  
 Telp./Fax. : 0778-461164, 462217/0778-461813  
 Web : www.pemko-batam.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 572.452		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 969,00		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 46.781.689		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>A</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>A</b>
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	D	• Biaya TK	E
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KOTA TANJUNG PINANG

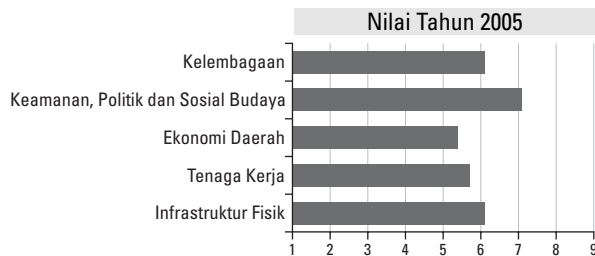
Ibu Kota : Tanjung Pinang  
 Alamat : Jl. KH. Agus Salim No. 1  
 Telp./Fax. : 0771-21361, 22865  
 Web : www.tpi.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 160.918		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 239,40		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 13.232.647		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>D</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>A</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	C	• Biaya TK	D
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	B

## KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Ibu Kota : Liwa  
 Alamat : Jl. Raden Intan No. 1  
 Telp./Fax. : 0728-21101, 21122/0728-21026  
 Web :

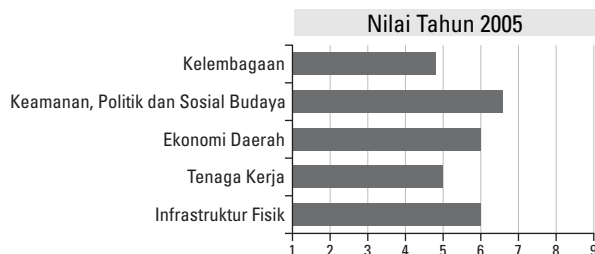


## PROPINSI LAMPUNG

<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 397.877		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 4.950,40		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 2.809.867		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>A</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>E</b>
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	A	• Biaya TK	A
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	C

## KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

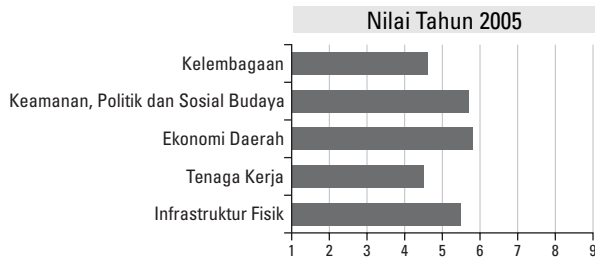
Ibu Kota : Kalianda  
 Alamat : Jl. Indra Bangsawan No. 1  
 Telp./Fax. : 0727-2069, 2068/0727-2334  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 1.226.009		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 5.562,55		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 4.576.938		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>E</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>D</b>
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	B	• Biaya TK	A
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	C

## KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Ibu Kota : Sukadana  
 Alamat : Jl. KH. A. Hanafiyah  
 Telp./Fax. : 0725-42100, 42200/0725-42200  
 Web :

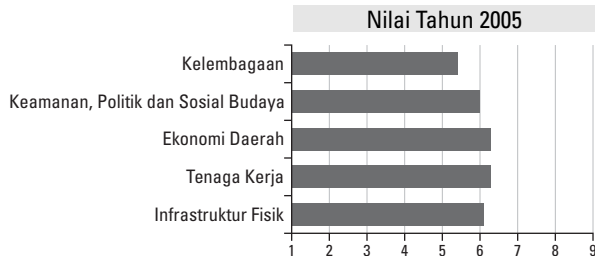


Jumlah Penduduk 2004 : 927.642  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 5.325,03  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 4.189.417

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	D
• Keamanan	D	• Biaya TK	A
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	D

## KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Ibu Kota : Kota Bumi  
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 1  
 Telp./Fax. : 0724-21087/0724-22708  
 Web : www.lampungutara.go.id

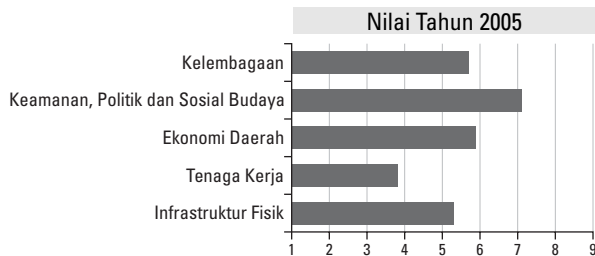


Jumlah Penduduk 2004 : 573.253  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 2.724,81  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 4.789.383

KELEMBAGAAN	C	EKONOMI DAERAH	C
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	B
• Keamanan	D	• Biaya TK	A
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	D

## KABUPATEN WAY KANAN

Ibu Kota : Blambangan Umpu  
 Alamat : Jl. Radin Jambat No. 9  
 Telp./Fax. : 0828-722052, 724334/0828-722163  
 Web :

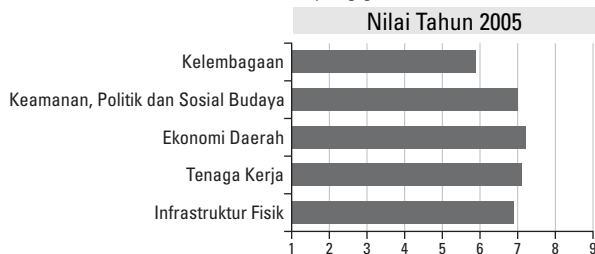


Jumlah Penduduk 2004 : 375.806  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 3.821,73  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 3.595.226

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	E
• Keamanan	A	• Biaya TK	A
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	D

## KOTA BANDAR LAMPUNG

Ibu Kota : Bandar Lampung  
 Alamat : Jl. Dr. Susilo No. 2 Teluk Betung  
 Telp./Fax. : 0721-252300, 254274/0721-254984  
 Web : www.bandarlampung.go.id



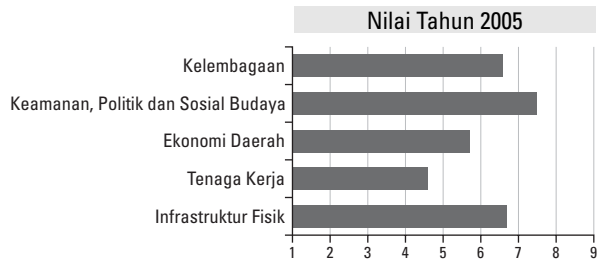
Jumlah Penduduk 2004 : 830.386  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 192,93  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 7.855.234

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	A
• Keamanan	B	• Biaya TK	B
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A



**KABUPATEN LEBAK****PROPINSI BANTEN**

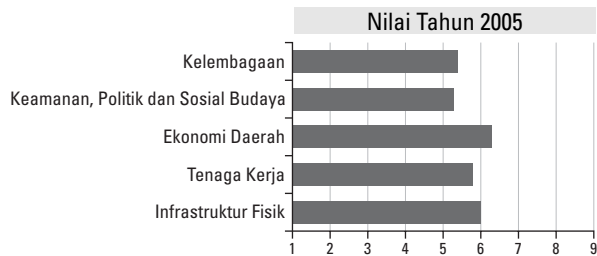
Ibu Kota : Rangkasbitung  
 Alamat : Jl. Abdinegara No. 3  
 Telp./Fax. : 0252-502626/0252-201102  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 1.148.269		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 3.044,72		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 3.702.256		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>A</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>E</b>
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	A	• Biaya TK	D
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	B

**KABUPATEN SERANG**

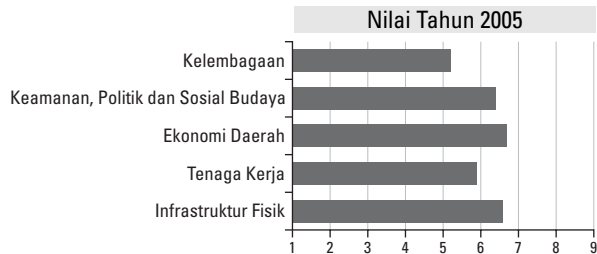
Ibu Kota : Serang  
 Alamat : Jl. Veteran No. 1  
 Telp./Fax. : 0254-200737, 200721/0254-201952  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 1.816.383		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 1.704,12		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 5.440.471		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>C</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>D</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	D	• Biaya TK	E
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	D

**KABUPATEN TANGERANG**

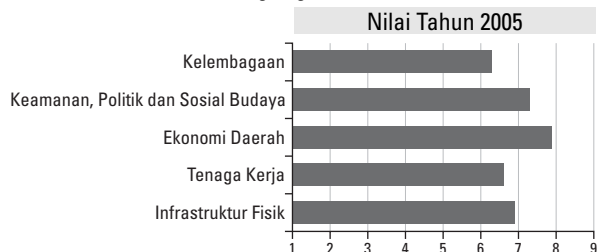
Ibu Kota : Tangerang  
 Alamat : Jl. Daan Mogot No. 53  
 Telp./Fax. : 021-5524864, 5524002/021-5524001  
 Web : www.kabtangerang.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 3.215.737		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 1.160,41		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 6.435.320		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>D</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	C	• Biaya TK	E
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	A

**KOTA CILEGON**

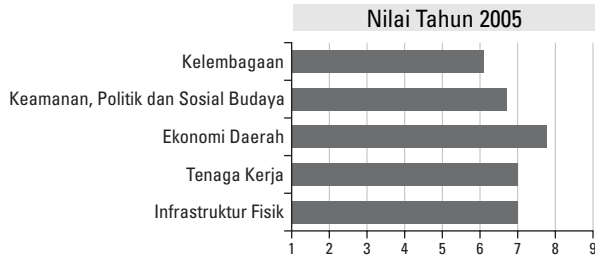
Ibu Kota : Cilegon  
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 2  
 Telp./Fax. : 0254-380557/0254-398902  
 Web : www.cilegon.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 331.924		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 175,51		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 35.271.605		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>A</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>A</b>
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	A	• Biaya TK	E
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KOTA TANGERANG

Ibu Kota : Tangerang  
 Alamat : Jl. Daan Mogot No. 69  
 Telp./Fax. : 021-5527284, 5523677/021-5523676  
 Web : www.kotatangerang.go.id

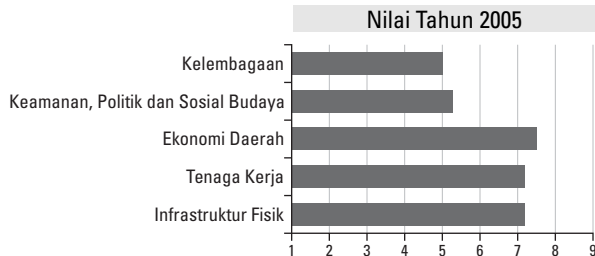


**Jumlah Penduduk 2004** : 1.512.714  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 186,97  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 17.565.066

KELEMBAGAAN	A	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	C	• Biaya TK	E
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KOTA DKI JAKARTA

Ibu Kota : Jakarta  
 Alamat : Jl. Merdeka Selatan  
 Telp./Fax. :  
 Web : www.dki.go.id



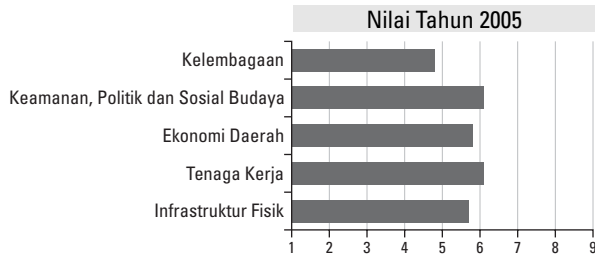
## PROPINSI DKI JAKARTA

**Jumlah Penduduk 2004** : 9.111.651  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 740,29  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 42.952.513

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	E	• Biaya TK	E
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KABUPATEN BANDUNG

Ibu Kota : Bandung  
 Alamat : Komp. Pemda Tk. II, Jl. Soreang Km. 7  
 Telp./Fax. : 022-5891004, 5891003/022-5891183  
 Web : www.kabbandung.go.id



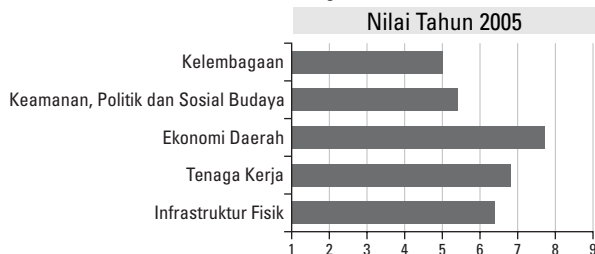
## PROPINSI JAWA BARAT

**Jumlah Penduduk 2004** : 4.049.631  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 3.073,69  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 6.606.516

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	C	• Biaya TK	D
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	D

## KABUPATEN BEKASI

Ibu Kota : Bekasi  
 Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 100  
 Telp./Fax. : 021-8810119, 8841336/021-8841166  
 Web : www.kab-bekasi.go.id

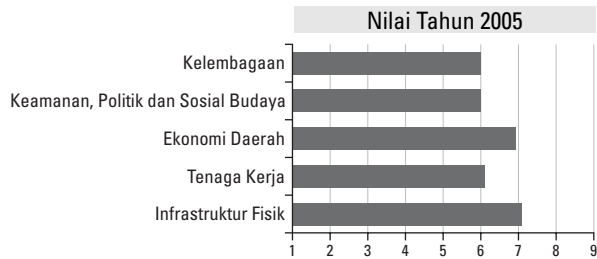


**Jumlah Penduduk 2004** : 1.951.075  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 1.224,88  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 22.908.599

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	E	• Biaya TK	E
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	B

## KABUPATEN BOGOR

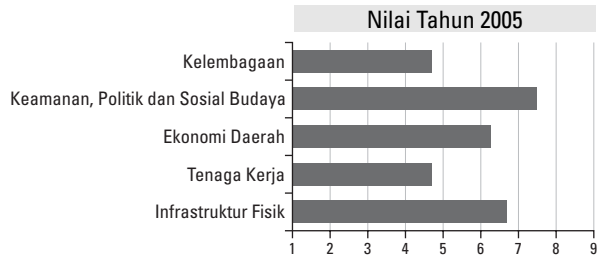
Ibu Kota : Bogor  
 Alamat : Ds. Tengah, Kec. Cibinong  
 Telp./Fax. : 021-8754733, 87552528/021-8750747  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 4.038.764		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 3.357,92		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 7.773.702		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>A</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>B</b>
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	E	• Biaya TK	D
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KABUPATEN CIAMIS

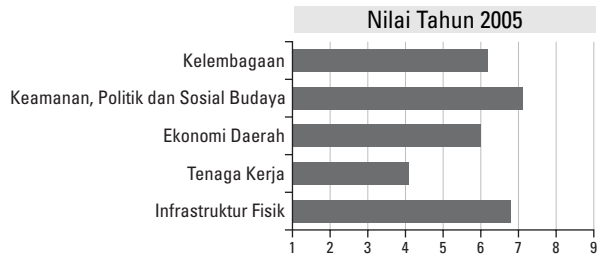
Ibu Kota : Ciamis  
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 16  
 Telp./Fax. : 0265-771945, 771511/0265-772776  
 Web : www.ciamis.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 1.550.575		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 2.506,43		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 4.997.320		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>E</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	A	• Biaya TK	A
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	B

## KABUPATEN CIANJUR

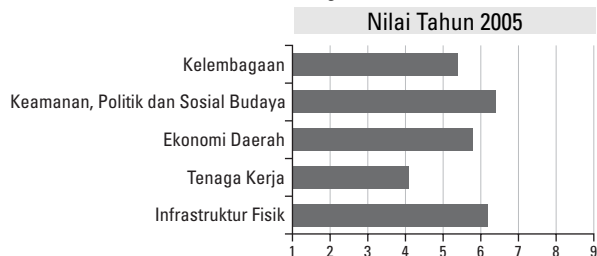
Ibu Kota : Cianjur  
 Alamat : Jl. Hj. Jenab No. 31  
 Telp./Fax. : 0263-261890, 261892/0263-263686  
 Web : www.cianjur.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 2.050.823		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 3.217,89		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 4.512.257		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>A</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>D</b>
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	B	• Biaya TK	A
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KABUPATEN CIREBON

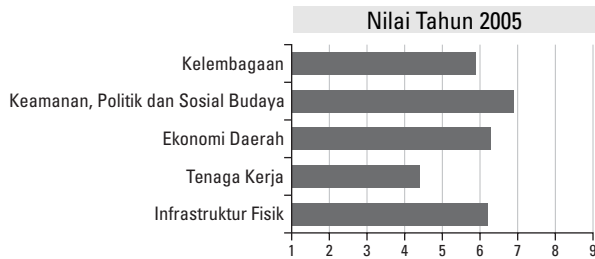
Ibu Kota : Cirebon  
 Alamat : Jl. Sunan Kalijaga No. 7  
 Telp./Fax. : 0231-321231, 321197/0231-321025  
 Web : www.kabcirebon.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 2.056.992		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 990,92		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 3.690.043		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>C</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>D</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	C	• Biaya TK	B
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	B

## KABUPATEN GARUT

Ibu Kota : Garut  
 Alamat : Jl. Pembangunan Tarogong No. 199  
 Telp./Fax. : 0262-232225/0262-231118  
 Web : www.garut.go.id

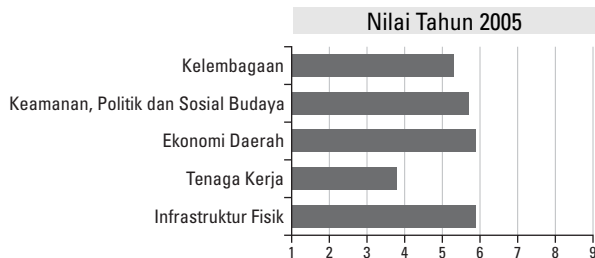


Jumlah Penduduk 2004 : 2.254.671  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 3.065,21  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 5.155.079

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	B	• Biaya TK	A
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	C

## KABUPATEN INDRAMAYU

Ibu Kota : Indramayu  
 Alamat : Jl. Mayjen. Sutoyo No. 1/F  
 Telp./Fax. : 0234-474252/0234-272797  
 Web : www.indramayu.go.id

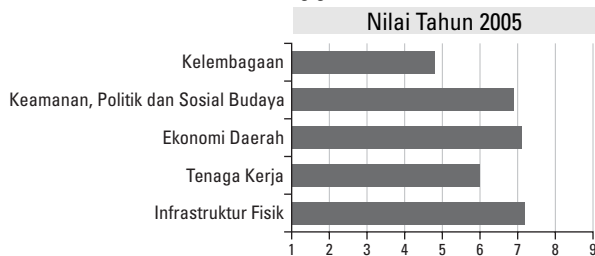


Jumlah Penduduk 2004 : 1.687.467  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 1.862,61  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 4.627.574

KELEMBAGAAN	C	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	E	• Biaya TK	B
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	D

## KABUPATEN KARAWANG

Ibu Kota : Karawang  
 Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No.1  
 Telp./Fax. : 0267-422938  
 Web : www.karawang.go.id

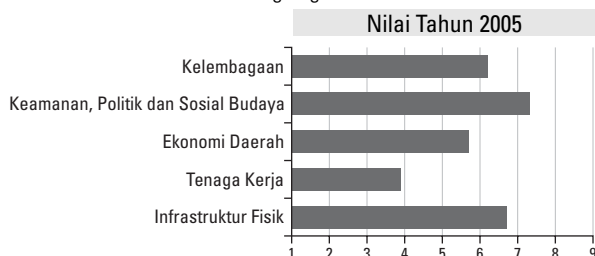


Jumlah Penduduk 2004 : 1.933.412  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 1.753,17  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 9.803.678

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	A	• Biaya TK	E
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KABUPATEN KUNINGAN

Ibu Kota : Kuningan  
 Alamat : Jl. Siliwangi No. 88  
 Telp./Fax. : 0232-871040/0232-871068  
 Web : www.kuningan.go.id

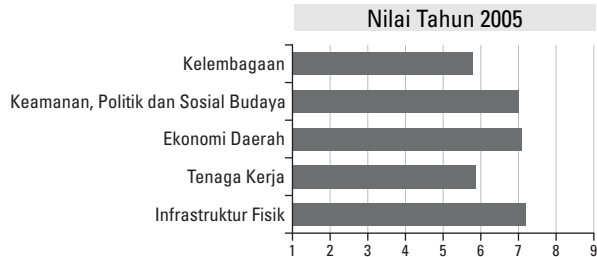


Jumlah Penduduk 2004 : 1.056.093  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 806,76  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 3.654.032

KELEMBAGAAN	A	EKONOMI DAERAH	E
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	A	• Biaya TK	A
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	A

## KABUPATEN PURWAKARTA

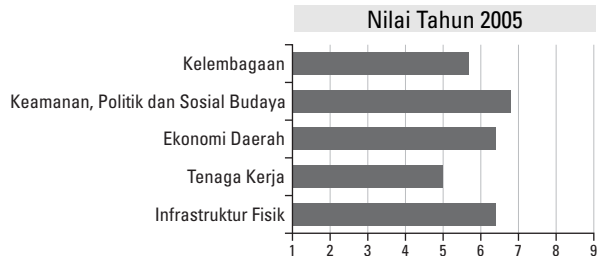
Ibu Kota : Purwakarta  
 Alamat : Jl. Ganda Negara No. 25  
 Telp./Fax. : 0264-200435, 200187/0264-200037  
 Web : www.purwakarta.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 756.854		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 825,74		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 8.861.376		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>B</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>B</b>
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Palayanan	C	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	B	• Biaya TK	D
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KABUPATEN SUBANG

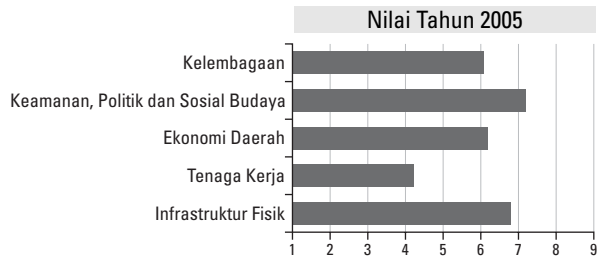
Ibu Kota : Subang  
 Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 2  
 Telp./Fax. : 0260-411005/0260-411003  
 Web : www.subang.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 1.375.346		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 2.049,60		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 4.884.738		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>B</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Palayanan	B	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	B	• Biaya TK	C
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	B

## KABUPATEN SUKABUMI

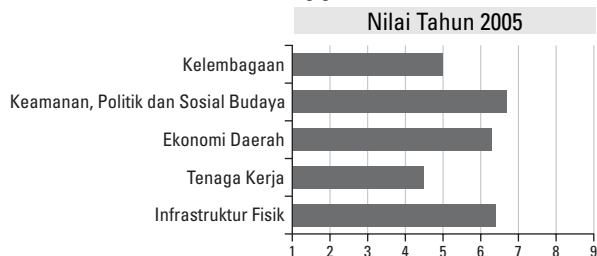
Ibu Kota : Sukabumi  
 Alamat : Jl. R. Syamsudin No. 54  
 Telp./Fax. : 0266-222040/0266-221011  
 Web : www.kabsukabumi.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 2.231.431		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 3.947,83		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 4.148.710		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>A</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>D</b>
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Palayanan	A	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	B	• Biaya TK	B
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	B

## KABUPATEN SUMEDANG

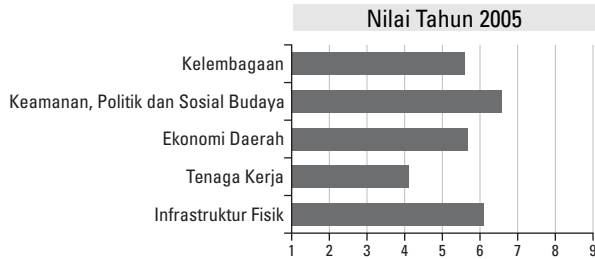
Ibu Kota : Sumedang  
 Alamat : Jl. Prabu Geusan Ulun No. 36  
 Telp./Fax. : 0261-201670, 202001/0261-201606  
 Web : www.sumedang.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 1.034.598		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 1.524,66		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 5.795.107		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>D</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Palayanan	C	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	B	• Biaya TK	D
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	B

## KABUPATEN TASIKMALAYA

Ibu Kota : Tasikmalaya  
 Alamat : Jl. Mayor Utaraya No. 1  
 Telp./Fax. : 0265-333157, 333154/0265-333937  
 Web : www.tasikmalaya.go.id

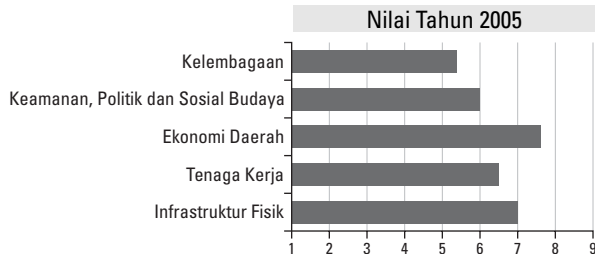


**Jumlah Penduduk 2004** : 1.629.041  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 2.904,78  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 3.553.165

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	E
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	C	• Biaya TK	A
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	C

## KOTA BANDUNG

Ibu Kota : Bandung  
 Alamat : Komp. Pemda Tk. II, Jl. Soreang Km. 7  
 Telp./Fax. : 022-5891004, 5891003/022-5891183  
 Web : www.bandung.go.id

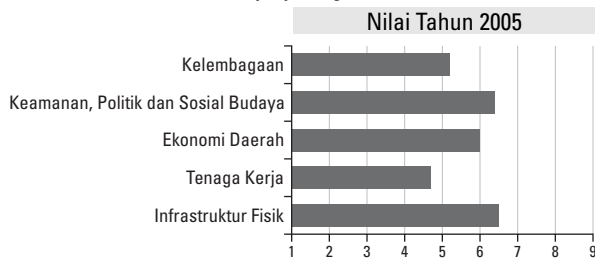


**Jumlah Penduduk 2004** : 2.232.896  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 1.669,78  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 12.491.174

KELEMBAGAAN	C	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	C	• Biaya TK	E
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	B

## KOTA BANJAR

Ibu Kota : Banjar  
 Alamat :  
 Telp./Fax. :  
 Web : www.banjar-jabar.go.id

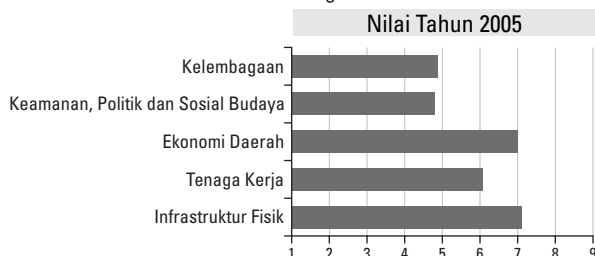


**Jumlah Penduduk 2004** : 166.796  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 113,49  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 4.779.829

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	B	• Biaya TK	B
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	B

## KOTA BEKASI

Ibu Kota : Bekasi  
 Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 100  
 Telp./Fax. : 021-8810119, 8802834/021-88342723  
 Web : www.kotabekasi.go.id

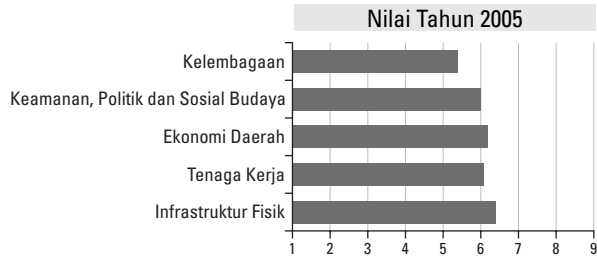


**Jumlah Penduduk 2004** : 2.052.210  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 210,49  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 7.418.150

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	E	• Biaya TK	E
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KOTA BOGOR

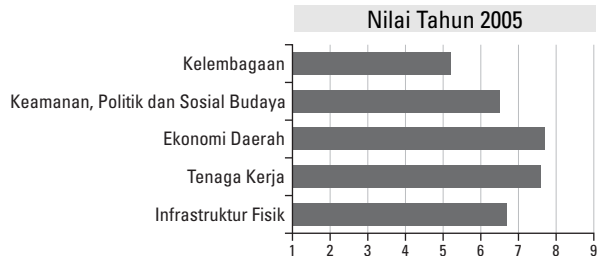
Ibu Kota : Bogor  
 Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 10  
 Telp./Fax. : 0251-328378, 321000/0251-321000  
 Web : www.kotabogor.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 831.694		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 118,50		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 4.464.147		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>C</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>D</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Palayanan	C	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	D	• Biaya TK	E
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	A

## KOTA CIREBON

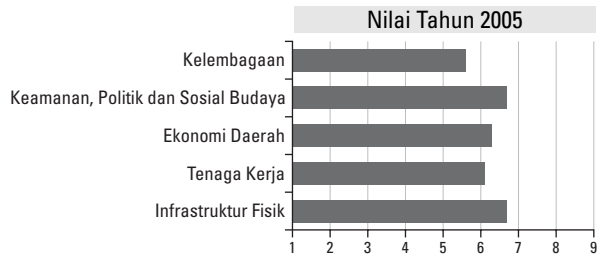
Ibu Kota : Cirebon  
 Alamat : Jl. Siliwangi No. 84  
 Telp./Fax. : 0231-202051, 206013/0231-206011  
 Web : www.cirebon.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 284.930		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 37,36		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 20.892.787		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>D</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>A</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Palayanan	D	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	C	• Biaya TK	C
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KOTA DEPOK

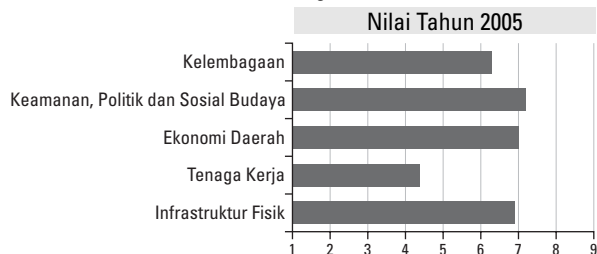
Ibu Kota : Depok  
 Alamat : Jl. Margonda Raya No. 54  
 Telp./Fax. : 021-7521440, 7773610/021-7520721  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 1.369.461		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 200,29		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 4.780.683		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>C</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>D</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Palayanan	B	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	B	• Biaya TK	E
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	A

## KOTA SUKABUMI

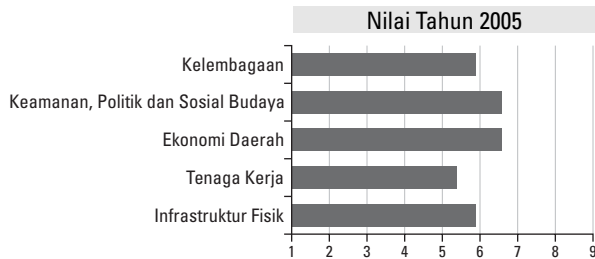
Ibu Kota : Sukabumi  
 Alamat : Jl. R. Syamsudin SH. No. 25  
 Telp./Fax. : 0266-221124, 221125/0266-221125  
 Web : www.sukabumi.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 273.860		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 48,00		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 6.829.261		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>A</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>B</b>
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Palayanan	A	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	B	• Biaya TK	B
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KOTA TASIKMALAYA

Ibu Kota : Tasikmalaya  
 Alamat : Jl. Woenong Saputra  
 Telp./Fax. : 0265-322865  
 Web : www.kota-tasikmalaya.go.id

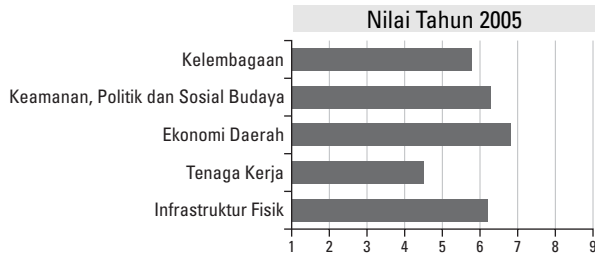


Jumlah Penduduk 2004 : 593.232  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 171,56  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 6.574.862

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	C
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	D
• Keamanan	B	• Biaya TK	A
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	C

## KABUPATEN BANYUMAS

Ibu Kota : Banyumas  
 Alamat : Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto  
 Telp./Fax. : 0281-632283, 635308/0281-635332  
 Web : www.banyumas.go.id



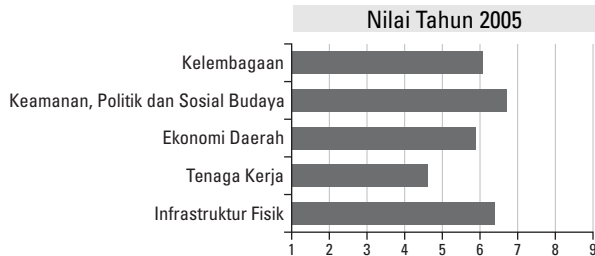
## PROPINSI JAWA TENGAH

Jumlah Penduduk 2004 : 1.543.264  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 1.327,65  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 2.894.488

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	D
• Keamanan	D	• Biaya TK	A
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	C

## KABUPATEN BOYOLALI

Ibu Kota : Boyolali  
 Alamat : Jl. Merbabu No. 48  
 Telp./Fax. : 0276-321021, 321292/0276-321172  
 Web : www.boyalali.go.id

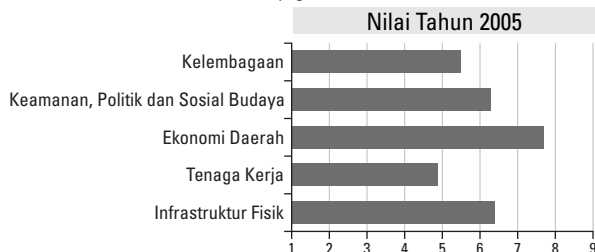


Jumlah Penduduk 2004 : 955.616  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 1.015,10  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 4.874.324

KELEMBAGAAN	A	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	D
• Keamanan	B	• Biaya TK	A
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	B

## KABUPATEN CILACAP

Ibu Kota : Cilacap  
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 32  
 Telp./Fax. : 0282-533-100/0282-535900  
 Web : www.cilacap.go.id



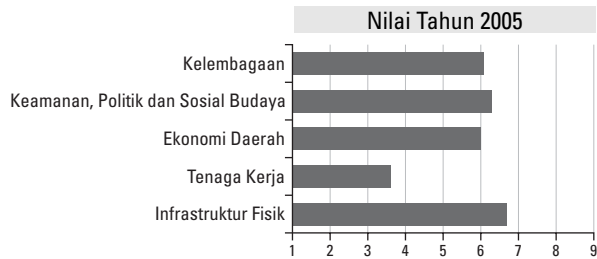
Jumlah Penduduk 2004 : 1.714.664  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 2.138,50  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 12.658.026

KELEMBAGAAN	C	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	D
• Keamanan	C	• Biaya TK	B
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	C



## KABUPATEN JEPARA

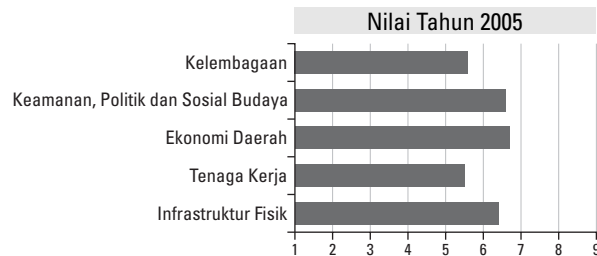
Ibu Kota : Jepara  
 Alamat : Jl. Kartini No. 1  
 Telp./Fax. : 0291-591492/0291-591037  
 Web : www.jepara.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 1.045.450		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 1.162,61		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 4.392.683		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>A</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>D</b>
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Palayanan	B	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	D	• Biaya TK	B
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	C

## KABUPATEN KARANGANYAR

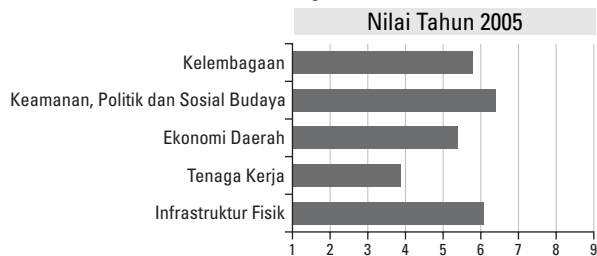
Ibu Kota : Karanganyar  
 Alamat : Jl. Lawu  
 Telp./Fax. : 0271-495039/0271-495590  
 Web : www.karanganyar.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 822.041		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 717,90		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 5.295.638		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>A</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>D</b>
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Palayanan	A	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	A	• Biaya TK	B
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	B

## KABUPATEN KEBUMEN

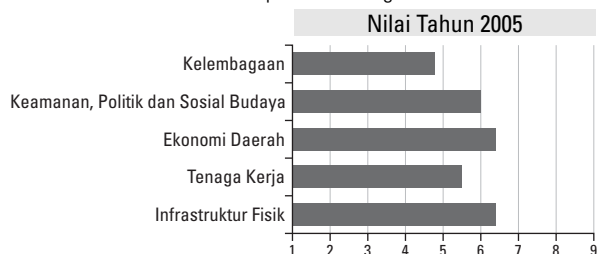
Ibu Kota : Kebumen  
 Alamat : Jl. Veteran No. 2  
 Telp./Fax. : 0287-381728/0287-381423  
 Web : www.kebumen.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 1.236.945		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 1.306,80		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 2.631.713		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>B</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>E</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Palayanan	C	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	C	• Biaya TK	A
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	C

## KABUPATEN KENDAL

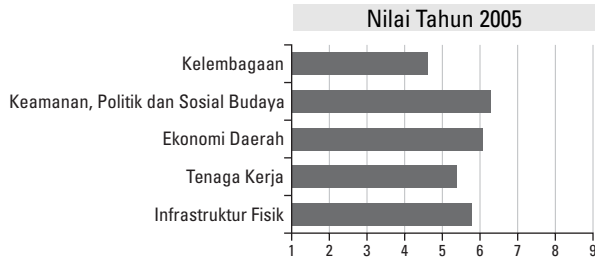
Ibu Kota : Kendal  
 Alamat : Jl. Raya No. 193  
 Telp./Fax. : 0294-381293, 381251/0294-381062  
 Web : www.kabupaten-kendal.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 909.625		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 1.002,33		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 6.623.073		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>E</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Palayanan	D	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	C	• Biaya TK	B
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	B

## KABUPATEN KLATEN

Ibu Kota : Klaten  
 Alamat : Jl. Pemuda No. 294  
 Telp./Fax. : 0272-22303, 21046/0272-22567  
 Web : www.klaten.go.id

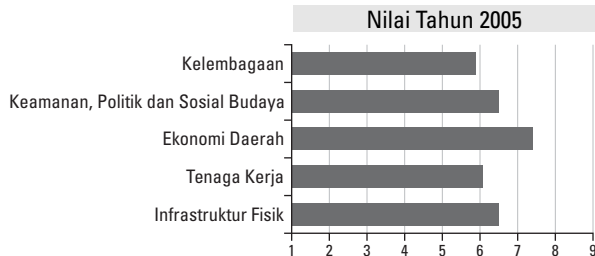


Jumlah Penduduk 2004 : 1.150.379  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 656,16  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 4.865.915

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	B	• Kualitas TK	D
• Politik	E	• Biaya TK	A
• Sosial Budaya	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
		• Ketersediaan	D
		• Kualitas	C

## KABUPATEN KUDUS

Ibu Kota : Kudus  
 Alamat : Jl. Simpang Tujuh No. 1  
 Telp./Fax. : 0291-437010, 439000/0291-437009  
 Web : www.kabupatenkudus.go.id

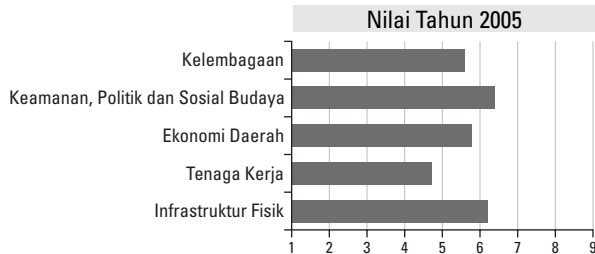


Jumlah Penduduk 2004 : 751.891  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 425,15  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 16.501.202

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	B	• Kualitas TK	C
• Politik	D	• Biaya TK	A
• Sosial Budaya	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
		• Ketersediaan	B
		• Kualitas	B

## KABUPATEN MAGELANG

Ibu Kota : Magelang  
 Alamat : Jl. Letnan Tukiyat, Kota Mungkit  
 Telp./Fax. : 0293-788117/0293-788122  
 Web : www.kabmagelang.go.id

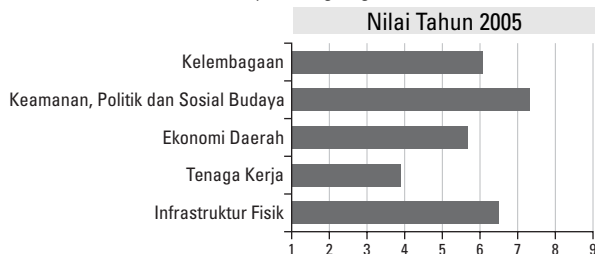


Jumlah Penduduk 2004 : 1.215.770  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 1.085,74  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 3.830.148

KELEMBAGAAN	C	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	C	• Kualitas TK	D
• Politik	C	• Biaya TK	A
• Sosial Budaya	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
		• Ketersediaan	C
		• Kualitas	C

## KABUPATEN PEKALONGAN

Ibu Kota : Pekalongan  
 Alamat : Jl. Nusantara No. 1  
 Telp./Fax. : 0285-424319, 424520/0285-424662  
 Web : www.kabpekalongan.go.id

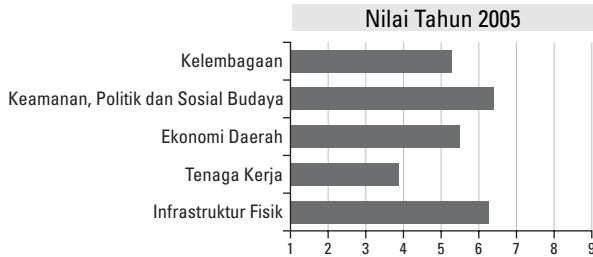


Jumlah Penduduk 2004 : 850.518  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 861,41  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 4.268.289

KELEMBAGAAN	A	EKONOMI DAERAH	E
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	A	• Kualitas TK	E
• Politik	A	• Biaya TK	A
• Sosial Budaya	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
		• Ketersediaan	B
		• Kualitas	B

## KABUPATEN PEMALANG

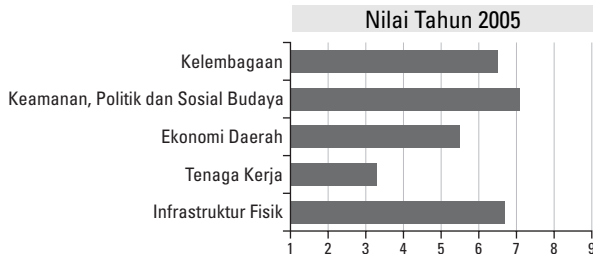
Ibu Kota : Pemalang  
 Alamat : Jl. Surohadikusumo No. 1  
 Telp./Fax. : 0284-321068, 321376/0284-322410  
 Web : www.pemalangikhlas.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 1.358.348		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 1.115,31		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 3.273.195		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>D</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>E</b>
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	B	• Biaya TK	A
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	C

## KABUPATEN PURBALINGGA

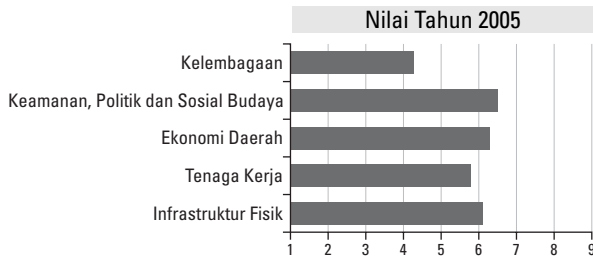
Ibu Kota : Purbalingga  
 Alamat : Jl. Onje No 1B  
 Telp./Fax. : 0281-91271, 91012/0281-891475  
 Web : www.purbalingga.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 870.247		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 777,63		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 2.928.301		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>A</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>E</b>
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	B	• Biaya TK	A
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	B

## KABUPATEN SUKOHARJO

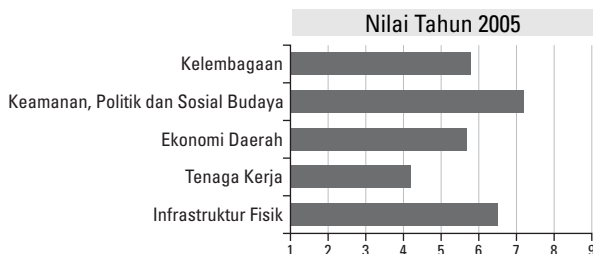
Ibu Kota : Sukoharjo  
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 199  
 Telp./Fax. : 0271-593067, 593181/0271-593335  
 Web : www.sukoharjo.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 832.426		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 466,66		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 5.747.036		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>E</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>D</b>
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	A	• Biaya TK	A
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	C

## KABUPATEN TEGAL

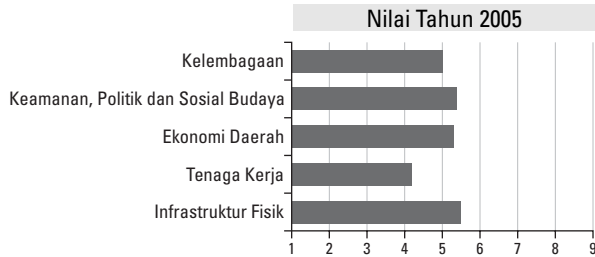
Ibu Kota : Slawi  
 Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1  
 Telp./Fax. : 0283-358149/0283-353673  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 1.465.664		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 864,88		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 2.509,204		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>B</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>E</b>
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	B	• Biaya TK	A
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	A

## KABUPATEN WONOSOBO

Ibu Kota : Wonosobo  
 Alamat : Jl. Merdeka No. 1  
 Telp./Fax. : 0286-321001, 321345/0286-21183  
 Web : www.wonosobo.go.id

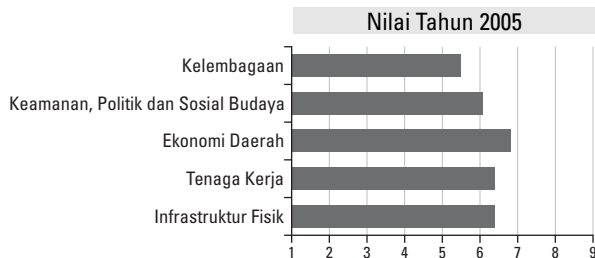


**Jumlah Penduduk 2004** : 790.165  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 987,84  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 2.775.507

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	E
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	E
• Keamanan	E	• Biaya TK	A
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	D

## KOTA MAGELANG

Ibu Kota : Magelang  
 Alamat : Jl. Panca Arga No. 2  
 Telp./Fax. : 0293-788117/0293-788122  
 Web :

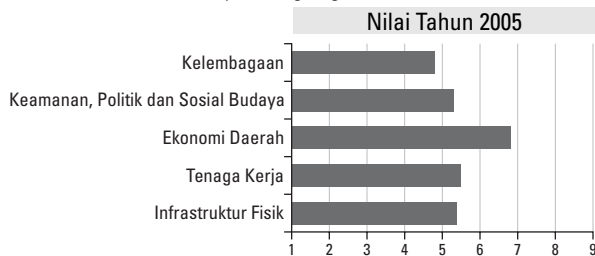


**Jumlah Penduduk 2004** : 123.643  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 18,12  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 9.666.540

KELEMBAGAAN	C	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	C
• Keamanan	D	• Biaya TK	A
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	C

## KOTA PEKALONGAN

Ibu Kota : Pekalongan  
 Alamat : Jl. Matraman No. 1  
 Telp./Fax. : 0285-23001, 421093/0285-24061  
 Web : www.pekalongan.go.id

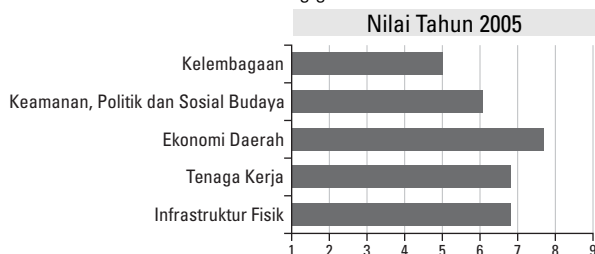


**Jumlah Penduduk 2004** : 279.161  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 45,25  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 8.018.880

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	C
• Keamanan	E	• Biaya TK	A
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	D

## KOTA SEMARANG

Ibu Kota : Semarang  
 Alamat : Jl. Pemuda No. 148  
 Telp./Fax. : 024-3540001, 513366/024-542522  
 Web : www.semarang.go.id

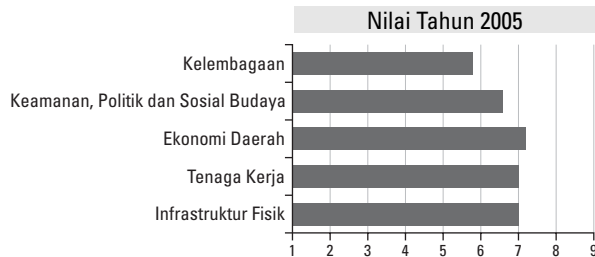


**Jumlah Penduduk 2004** : 1.416.522  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 373,69  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 17.597.383

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	A
• Keamanan	C	• Biaya TK	C
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	A

## KOTA SURAKARTA

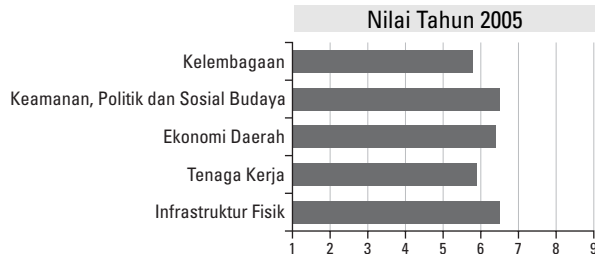
Ibu Kota : Surakarta  
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 2  
 Telp./Fax. : 0271-644644, 662266/0271-44308  
 Web : www.surakarta.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 510.48		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 43,97		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 9.951.180		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>B</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>B</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Palayanan	C	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	B	• Biaya TK	A
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KOTA TEGAL

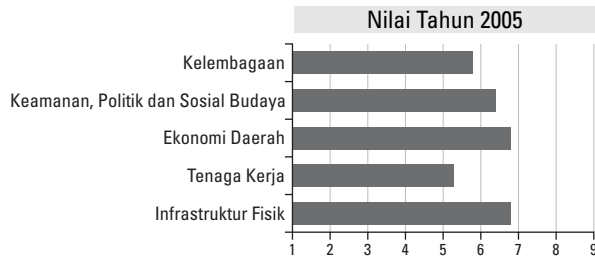
Ibu Kota : Tegal  
 Alamat : Jl. Ki Gede Sebayu No. 12  
 Telp./Fax. : 0283-355137/0283-353673  
 Web : www.kotategal.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 246.133		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 35,38		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 5.149.202		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>B</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Palayanan	B	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	C	• Biaya TK	B
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	B

## KABUPATEN BANTUL

Ibu Kota : Bantul  
 Alamat : Jl. R. Wolter Monginsidi  
 Telp./Fax. : 0274-367509, 367770/0274-589622  
 Web : www.bantul.go.id

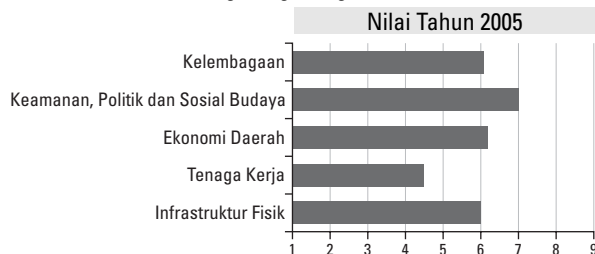


## PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 823.242		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 508,13		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 5.094.733		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>B</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>B</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Palayanan	B	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	C	• Biaya TK	A
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	A

## KABUPATEN GUNUNG KIDUL

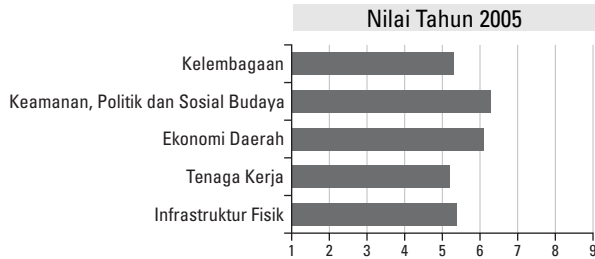
Ibu Kota : Gunungkidul  
 Alamat : Jl. Brigjend. Katamso No. 1  
 Telp./Fax. : 0274-391531/0274-391001  
 Web : www.gunungkidul.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 695.625		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 1.431,42		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 4.913.406		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>A</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>D</b>
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Palayanan	B	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	B	• Biaya TK	A
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	C

## KABUPATEN KULON PROGO

Ibu Kota : Kulonprogo  
 Alamat : Jl. Perwakilan No. 1 Wates  
 Telp./Fax. : 0274-773010/0274-773148  
 Web : www.kulonprogo.go.id

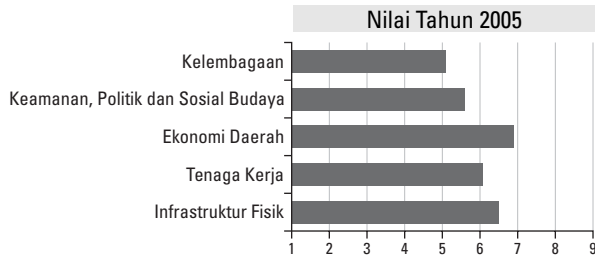


Jumlah Penduduk 2004 : 386.707  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 586,28  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 4.881.790

KELEMBAGAAN	C	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	C	• Kualitas TK	C
• Politik	C	• Biaya TK	A
• Sosial Budaya	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
		• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KABUPATEN SLEMAN

Ibu Kota : Sleman  
 Alamat : Jl. Parasamya No. 1  
 Telp./Fax. : 0274-868448, 868405/0274-868945  
 Web : www.sleman.go.id

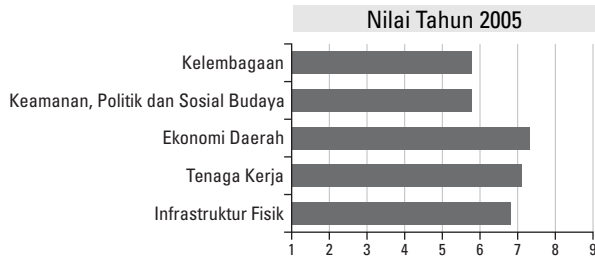


Jumlah Penduduk 2004 : 955.027  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 574,82  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 7.025.602

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	E	• Kualitas TK	C
• Politik	D	• Biaya TK	A
• Sosial Budaya	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
		• Ketersediaan	B
		• Kualitas	B

## KOTA YOGYAKARTA

Ibu Kota : Yogyakarta  
 Alamat : Komp. Balaikota Tomoho, Jl. Kenari No. 56  
 Telp./Fax. : 0274-515864, 564167/0274-562590  
 Web : www.jogja.go.id

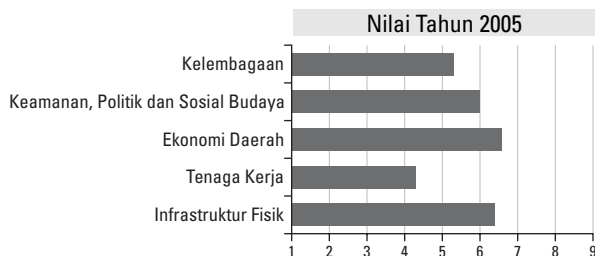


Jumlah Penduduk 2004 : 421.100  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 32,50  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 14.829.195

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	D	• Kualitas TK	A
• Politik	D	• Biaya TK	A
• Sosial Budaya	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
		• Ketersediaan	B
		• Kualitas	A

## KABUPATEN BANGKALAN

Ibu Kota : Bangkalan  
 Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. 35  
 Telp./Fax. : 031-3095505/031-3092179  
 Web :



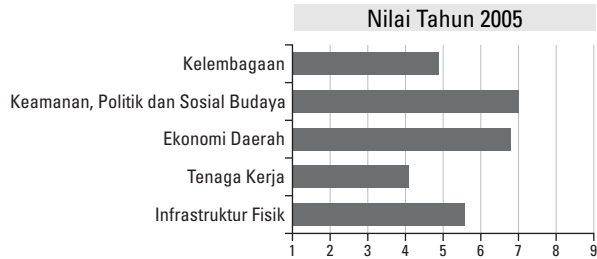
## PROPINSI JAWA TIMUR

Jumlah Penduduk 2004 : 892.987  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 1.001,44  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 4.099.098

KELEMBAGAAN	C	EKONOMI DAERAH	C
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	D	• Kualitas TK	D
• Politik	D	• Biaya TK	B
• Sosial Budaya	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
		• Ketersediaan	B
		• Kualitas	C

## KABUPATEN BANYUWANGI

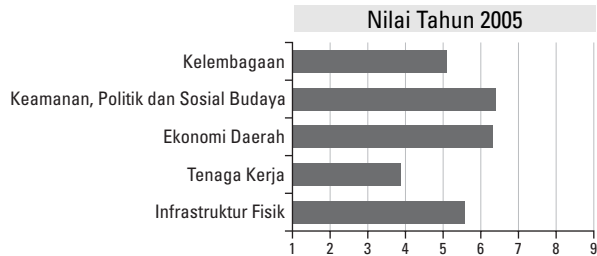
Ibu Kota : Banyuwangi  
 Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 100  
 Telp./Fax. : 0333-425001, 423555/0333-427445  
 Web : www.banyuwangi.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 1.582.318		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 5.782,40		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 6.064.220		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>D</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Palayanan	E	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	B	• Biaya TK	A
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	D

## KABUPATEN BLITAR

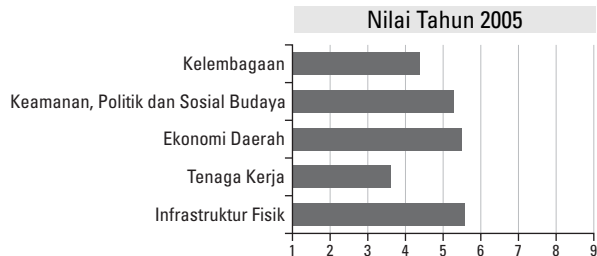
Ibu Kota : Blitar  
 Alamat : Jl. Sudanco Supriadi No. 17  
 Telp./Fax. : 0342-801745, 801490/0342-805494  
 Web : www.kabblitar.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 1.137.964		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 1.336,48		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 5.140.911		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>C</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Palayanan	B	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	C	• Biaya TK	D
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	D

## KABUPATEN BONDOWOSO

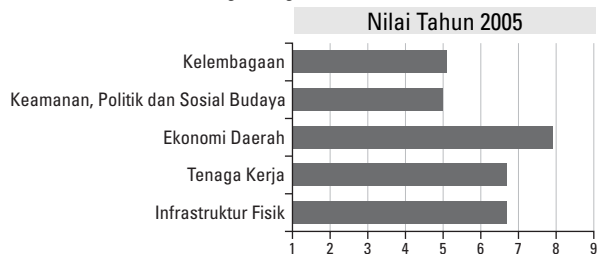
Ibu Kota : Bondowoso  
 Alamat : Jl. Letnan Amir Kusman No. 2  
 Telp./Fax. : 0332-421152, 421153/0332-423067  
 Web : www.bondowoso.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 724.412		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 1.525,97		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 3.075.915		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>E</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>E</b>
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Palayanan	E	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	D	• Biaya TK	A
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	E

## KABUPATEN GRESIK

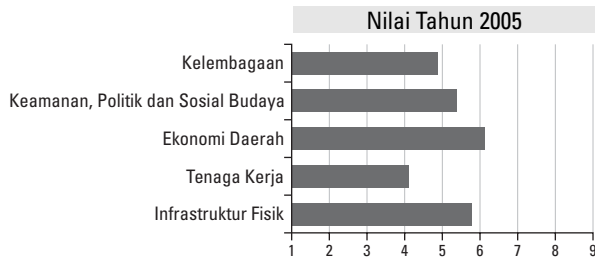
Ibu Kota : Gresik  
 Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245  
 Telp./Fax. : 031-3952829, 3952830/031-3952819  
 Web : www.gresik.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 1.072.273		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 1.211,25		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 20.291.317		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>D</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>A</b>
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Palayanan	C	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	E	• Biaya TK	D
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	A

## KABUPATEN JEMBER

Ibu Kota : Jember  
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 1  
 Telp./Fax. : 0331-487945, 481945/0331-422715  
 Web : www.pemdajember.go.id

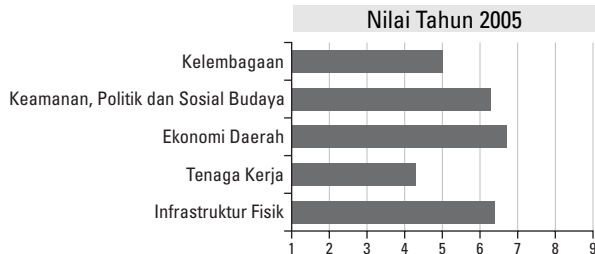


Jumlah Penduduk 2004 : 2.252.345  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 3.092,34  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 4.620.202

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	E
• Keamanan	E	• Biaya TK	A
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	D

## KABUPATEN JOMBANG

Ibu Kota : Jombang  
 Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 137  
 Telp./Fax. : 0321-861945, 870530/0321-865468  
 Web : www.pemdajombang.go.id

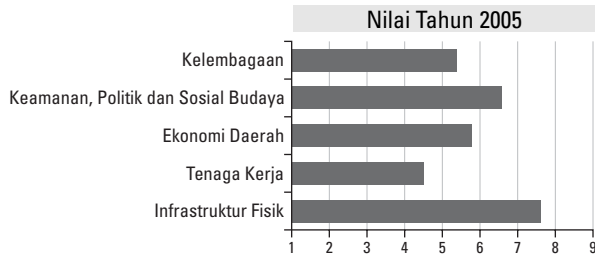


Jumlah Penduduk 2004 : 1.207.783  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 1.115,09  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 4.047.982

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	C
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	E
• Keamanan	D	• Biaya TK	A
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	B

## KABUPATEN KEDIRI

Ibu Kota : Kediri  
 Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. 1  
 Telp./Fax. : 0354-689901, 689905/0354-686812  
 Web : www.kediri.go.id

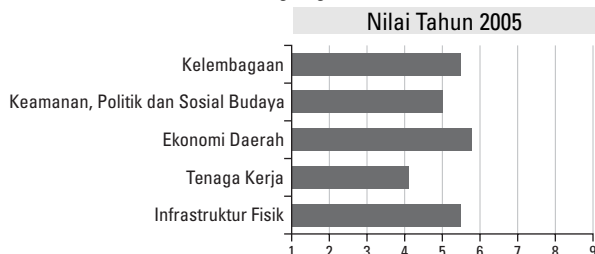


Jumlah Penduduk 2004 : 1.513.510  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 1.386,05  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 4.573.960

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	D
• Keamanan	B	• Biaya TK	B
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KABUPATEN LAMONGAN

Ibu Kota : Lamongan  
 Alamat : Jl. KH. Achmad Dahlan No. 1  
 Telp./Fax. : 0322-321007, 321481/0322-321003  
 Web : www.lamongan.go.id



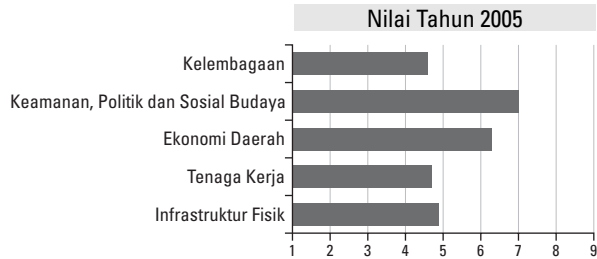
Jumlah Penduduk 2004 : 1.269.516  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 1.782,05  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 4.021.501

KELEMBAGAAN	C	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	E
• Keamanan	E	• Biaya TK	A
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	E



## KABUPATEN MAGETAN

Ibu Kota : Magetan  
 Alamat : Jl. Basuki Rahmat Selatan No. 1  
 Telp./Fax. : 0351-895001, 895280/0351-895982  
 Web : www.magetan.go.id

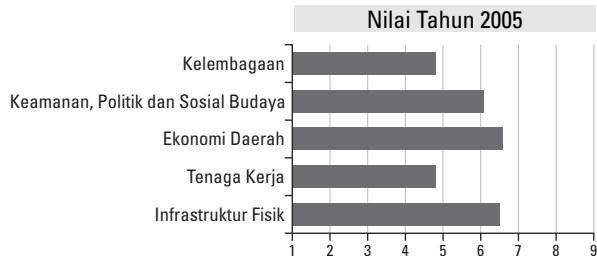


**Jumlah Penduduk 2004** : 642.967  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 688,84  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 5.358.496

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Palayanan	E	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	A	• Biaya TK	A
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KABUPATEN MOJOKERTO

Ibu Kota : Mojokerto  
 Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 16  
 Telp./Fax. : 0321-321946, 321744/0321-327373  
 Web : www.pemkab-mojokerto.go.id

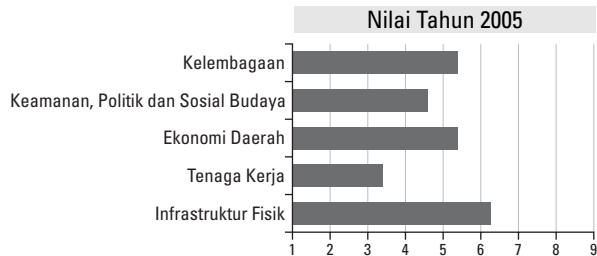


**Jumlah Penduduk 2004** : 981.887  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 717,83  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 6.373.352

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	C
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Palayanan	E	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	D	• Biaya TK	C
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	B

## KABUPATEN PAMEKASAN

Ibu Kota : Pamekasan  
 Alamat : Jl. Pamong Praja No. 1  
 Telp./Fax. : 0324-322945/0324-322197  
 Web : www.pamekasan.go.id

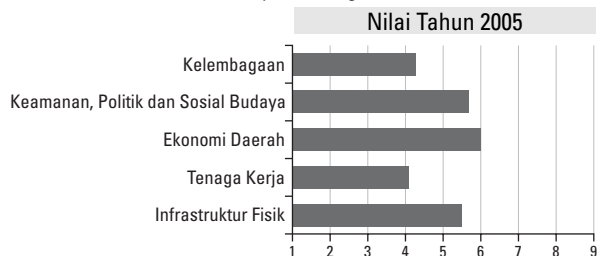


**Jumlah Penduduk 2004** : 751.296  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 792,24  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 3.314.412

KELEMBAGAAN	C	EKONOMI DAERAH	E
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Palayanan	C	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	E	• Biaya TK	B
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	B

## KABUPATEN PASURUHAN

Ibu Kota : Pasuruan  
 Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 14  
 Telp./Fax. : 0343-424004, 421032/0343-424344  
 Web : www.kab-pasuruan.go.id

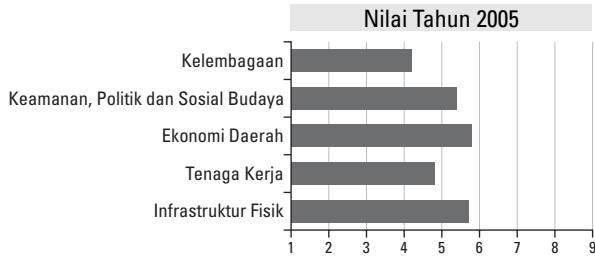


**Jumlah Penduduk 2004** : 1.444.434  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 1.474,02  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 4.788.349

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Palayanan	E	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	D	• Biaya TK	C
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	E

## KABUPATEN PONOROGO

Ibu Kota : Ponorogo  
 Alamat : Jl. Alun-alun Utara No. 3  
 Telp./Fax. : 0352-482917, 481737/0352-481484  
 Web : www.ponorogo.go.id

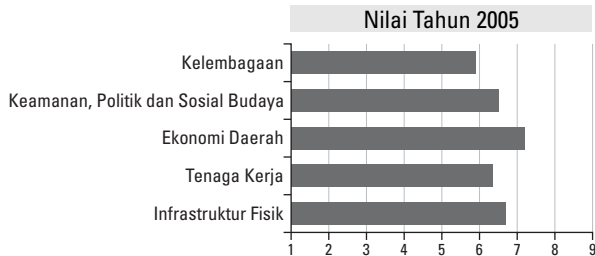


Jumlah Penduduk 2004 : 897.784  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 1.305,70  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 3.656.347

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	E	• Kualitas TK	D
• Politik	E	• Biaya TK	A
• Sosial Budaya	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
		• Ketersediaan	D
		• Kualitas	D

## KABUPATEN SIDOARJO

Ibu Kota : Sidoarjo  
 Alamat : Jl. Gubernur Suryo No. 1  
 Telp./Fax. : 031-8921945, 8921946/031-8921945  
 Web : www.sidoarjo.go.id

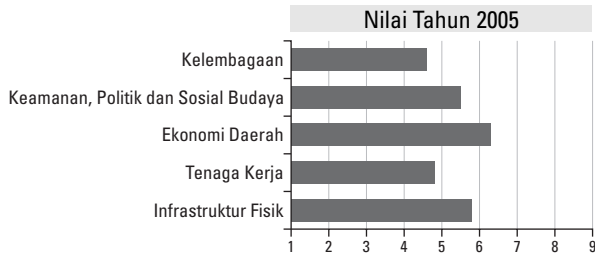


Jumlah Penduduk 2004 : 1.737.977  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 634,38  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 16.197.883

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	B	• Kualitas TK	B
• Politik	D	• Biaya TK	D
• Sosial Budaya	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
		• Ketersediaan	B
		• Kualitas	A

## KABUPATEN SITUBONDO

Ibu Kota : Situbondo  
 Alamat : Jl. PB. Sudirman No. 1  
 Telp./Fax. : 0338-671176, 671915/0338-671176  
 Web : www.situbondo.go.id

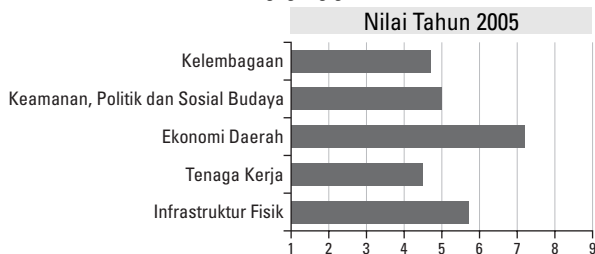


Jumlah Penduduk 2004 : 631.313  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 559,76  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 5.881.227

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	D	• Kualitas TK	D
• Politik	E	• Biaya TK	A
• Sosial Budaya	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
		• Ketersediaan	C
		• Kualitas	E

## KABUPATEN TULUNGAGUNG

Ibu Kota : Tulungagung  
 Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 37  
 Telp./Fax. : 0355-321945, 323651/0355-325581  
 Web : www.tulungagung.go.id

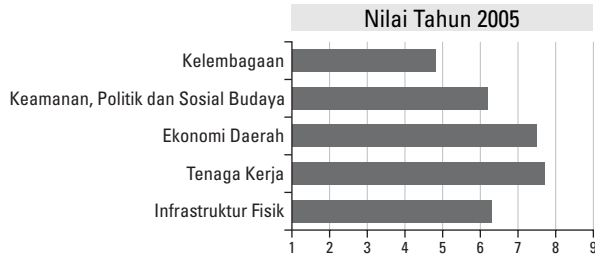


Jumlah Penduduk 2004 : 991.634  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 1.055,65  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 8.748.584

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	E	• Kualitas TK	E
• Politik	E	• Biaya TK	A
• Sosial Budaya	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
		• Ketersediaan	D
		• Kualitas	C

## KOTA KEDIRI

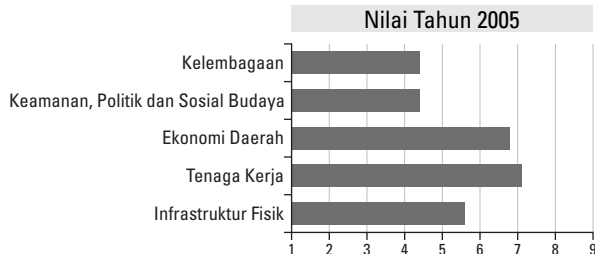
Ibu Kota : Kediri  
 Alamat : Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 15  
 Telp./Fax. : 0354-682885/0354-686813  
 Web : www.kotakediri.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 258.510		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 63,40		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 116.624.651		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>E</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>A</b>
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	D	• Biaya TK	C
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	A

## KOTA MADIUN

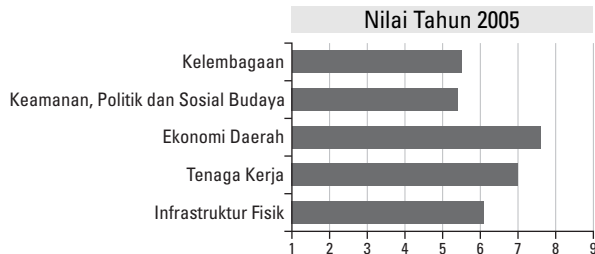
Ibu Kota : Madiun  
 Alamat : Jl. Pahlawan No. 37  
 Telp./Fax. : 0351-458073, 495559/0351-457331  
 Web : www.madiunkota.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 175.908		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 33,92		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 7.169.601		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>E</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>B</b>
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	E	• Biaya TK	A
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	C

## KOTA MALANG

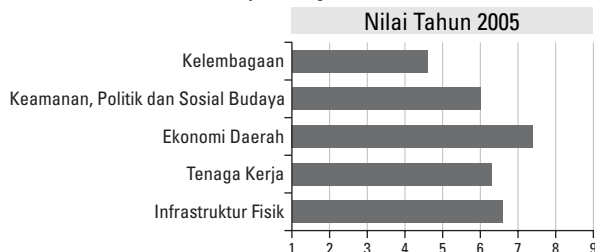
Ibu Kota : Malang  
 Alamat : Jl. Tugu No. 1A  
 Telp./Fax. : 0341-366011, 362704/0341-352070  
 Web : www.pemkot-malang.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 791.571		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 145,28		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 16.701.295		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>C</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>A</b>
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	E	• Biaya TK	D
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	B

## KOTA MOJOKERTO

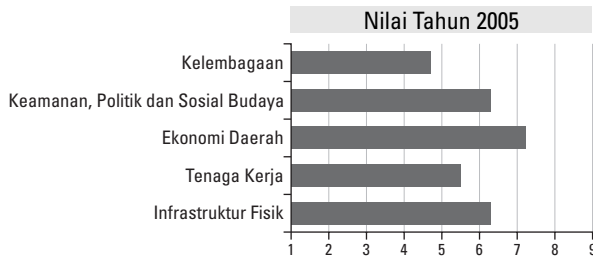
Ibu Kota : Mojokerto  
 Alamat : Jl. Gajah Mada No. 145  
 Telp./Fax. : 0321-321747, 321061/0321-397345  
 Web : www.mojokerto.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 115.610		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 16,47		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 13.200.093		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>E</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>A</b>
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	D	• Biaya TK	C
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	B

## KOTA PROBOLINGGO

Ibu Kota : Probolinggo  
 Alamat : Jl. PB. Sudirman No. 19  
 Telp./Fax. : 0335-421045/0335-421910  
 Web : www.probolinggo.go.id

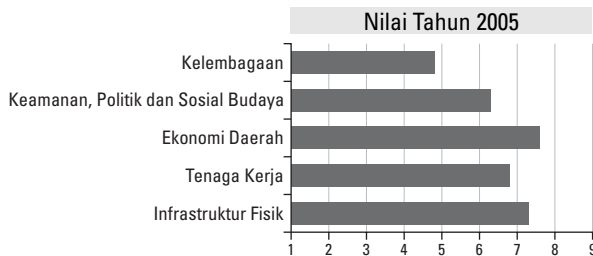


Jumlah Penduduk 2004 : 206.001  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 56,67  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 9.766.124

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	D	• Kualitas TK	C
• Politik	B	• Biaya TK	B
• Sosial Budaya	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
		• Ketersediaan	B
		• Kualitas	C

## KOTA SURABAYA

Ibu Kota : Surabaya  
 Alamat : Jl. Taman Surya No. 1  
 Telp./Fax. : 031-5345687/031-5320108  
 Web : www.surabaya.go.id

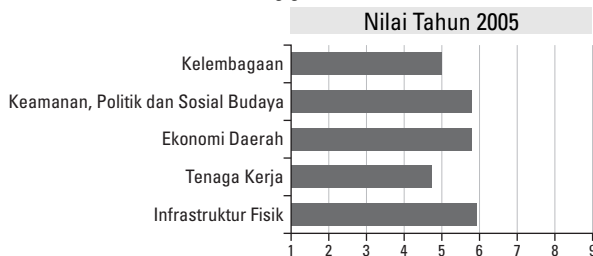


Jumlah Penduduk 2004 : 2.744.076  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 350,54  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 29.479.726

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	C	• Kualitas TK	A
• Politik	B	• Biaya TK	D
• Sosial Budaya	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
		• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KABUPATEN BADUNG

Ibu Kota : Denpasar  
 Alamat : Jl. Sangalangit No. 1  
 Telp./Fax. : 0361-461200, 461100/0361-464600  
 Web : www.badung.go.id



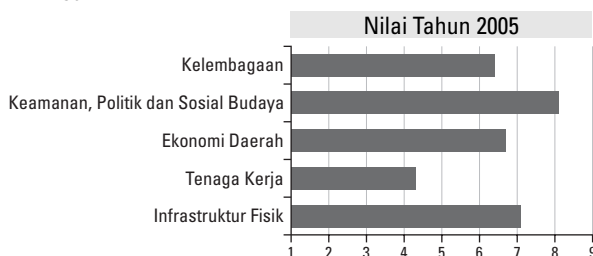
## PROPINSI BALI

Jumlah Penduduk 2004 : 423.712  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 281,33  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 14.475.559

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	D	• Kualitas TK	D
• Politik	D	• Biaya TK	B
• Sosial Budaya	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
		• Ketersediaan	D
		• Kualitas	C

## KABUPATEN BANGLI

Ibu Kota : Bangli  
 Alamat : Jl. Brigjen. Ngurah Rai No. 30  
 Telp./Fax. : 0366-910011, 910032  
 Web :

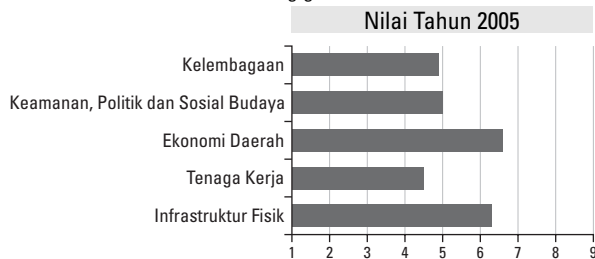


Jumlah Penduduk 2004 : 213.183  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 490,71  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 5.606.378

KELEMBAGAAN	A	EKONOMI DAERAH	C
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	A	• Kualitas TK	D
• Politik	A	• Biaya TK	B
• Sosial Budaya	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
		• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KABUPATEN BULELENG

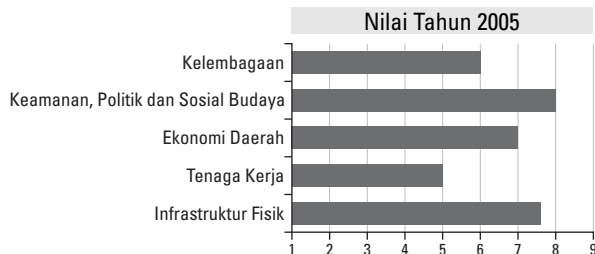
Ibu Kota : Singaraja  
 Alamat : Jl. Pahlawan No. 1  
 Telp./Fax. : 0362-21985/0362-22380  
 Web : www.buleleng.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 615.427		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 1.365,88		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 6.210.123		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>D</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Palayanan	E	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	E	• Biaya TK	B
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	C

## KABUPATEN GIANYAR

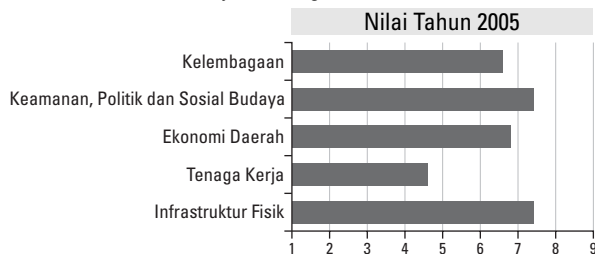
Ibu Kota : Gianyar  
 Alamat : Jl. Ngurah Rai No. 5-7  
 Telp./Fax. : 0361-943056/0361-943170  
 Web : www.gianyar.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 428.117		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 368,00		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 8.941.717		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>A</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>B</b>
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Palayanan	A	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	A	• Biaya TK	B
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KABUPATEN JEMBRANA

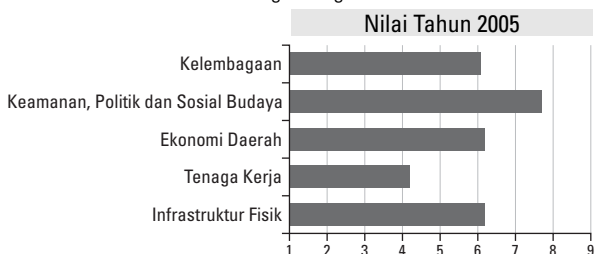
Ibu Kota : Negara  
 Alamat : Jl. Surapati No. 1  
 Telp./Fax. : 0365-41210/0365-41010  
 Web : www.jembrana.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 254.070		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 841,80		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 7.929.260		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>A</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Palayanan	A	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	A	• Biaya TK	B
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KABUPATEN KARANGASEM

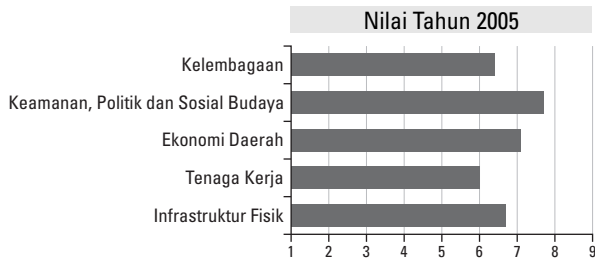
Ibu Kota : Amiapura  
 Alamat : Jl. Ngurah Rai No. 31  
 Telp./Fax. : 0363-21001/0363-21954  
 Web : www.karangasem.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 407.070		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 839,54		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 6.075.833		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>C</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Palayanan	C	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	C	• Biaya TK	B
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	B

## KABUPATEN KLUNGKUNG

Ibu Kota : Klungkung  
 Alamat : Jl. Untung Surapati No. 2 Samarapura  
 Telp./Fax. : 0366-21001/0366-21901  
 Web : www.klungkung.go.id

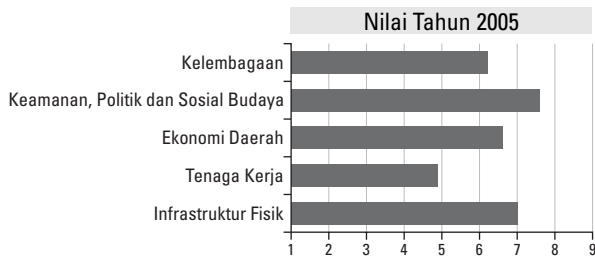


Jumlah Penduduk 2004 : 174.498  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 315,00  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 8.903.952

KELEMBAGAAN	A	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	A	• Biaya TK	C
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KABUPATEN TABANAN

Ibu Kota : Tabanan  
 Alamat : Jl. Pahlawan No. 17  
 Telp./Fax. : 0361-811471/0361-812703  
 Web : www.tabanan.go.id

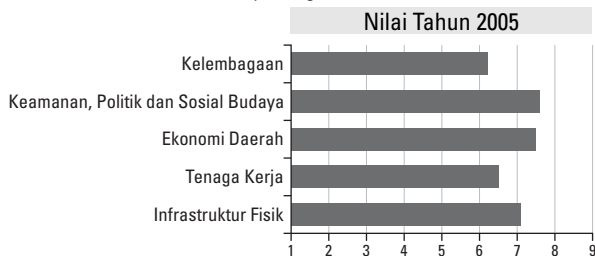


Jumlah Penduduk 2004 : 421.765  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 821,33  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 5.932.436

KELEMBAGAAN	A	EKONOMI DAERAH	C
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	A	• Biaya TK	B
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KOTA DENPASAR

Ibu Kota : Denpasar  
 Alamat : Jl. Gajah Mada No. 1  
 Telp./Fax. : 0361-234831, 226163/0361-221534  
 Web : www.denpasar.go.id

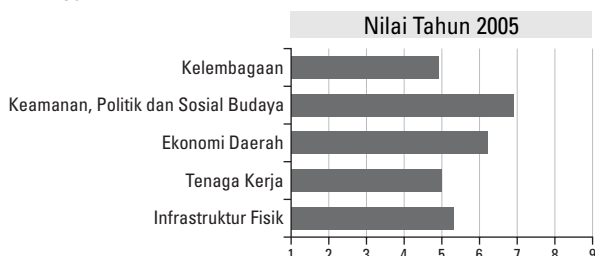


Jumlah Penduduk 2004 : 551.922  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 127,78  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 10.840.284

KELEMBAGAAN	A	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	A	• Biaya TK	C
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KABUPATEN KAPUAS HULU

Ibu Kota : Putisibau  
 Alamat : Jl. P. Antasari No. 1  
 Telp./Fax. : 0567-25175, 21003/0567-21397  
 Web :



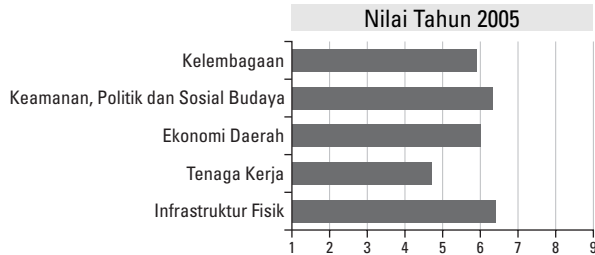
## PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Jumlah Penduduk 2004 : 209.275  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 29.841,70  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 5.126.310

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	A	• Biaya TK	C
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KABUPATEN KETAPANG

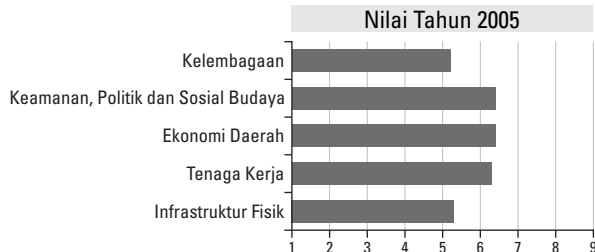
Ibu Kota : Ketapang  
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 37  
 Telp./Fax. : 0534-32080/0534-32090  
 Web : www.ketapang.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 465.233		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 35.809,00		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 4.884.434		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>B</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>D</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Palayanan	A	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	D	• Biaya TK	B
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	B

## KABUPATEN PONTIANAK

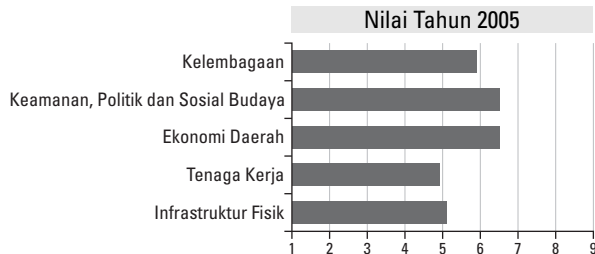
Ibu Kota : Mempawah  
 Alamat : Jl. DG. Manambon  
 Telp./Fax. : 0561-691003/0561-691509  
 Web : www.mempawah.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 712.150		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 8.235,12		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 7.712.288		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>D</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Palayanan	B	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	C	• Biaya TK	B
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KABUPATEN SAMBAS

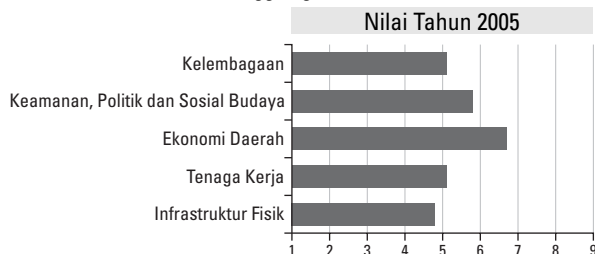
Ibu Kota : Singkawang  
 Alamat : Jl. Firdaus No. 1  
 Telp./Fax. : 0562-631300/0562-392443  
 Web : www.sambas.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 482.110		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 6.706,52		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 6.761.428		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>B</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Palayanan	C	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	C	• Biaya TK	B
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	D

## KABUPATEN SANGGAU

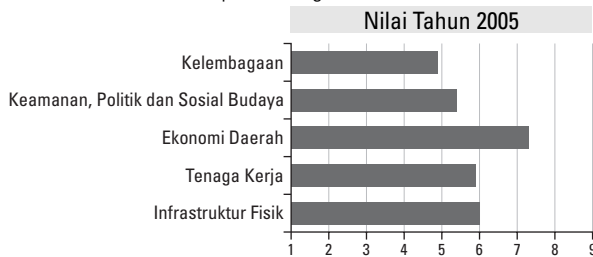
Ibu Kota : Sanggau  
 Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 1  
 Telp./Fax. : 0564-21001, 21002/0564-21009  
 Web : www.sanggau.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 370.716		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 12.840,70		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 7.773.598		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>D</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Palayanan	C	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	D	• Biaya TK	C
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KOTA PONTIANAK

Ibu Kota : Pontianak  
 Alamat : Jl. Rahadi Usman  
 Telp./Fax. : 0561-733040/0561-736029  
 Web : www.pontianak.go.id

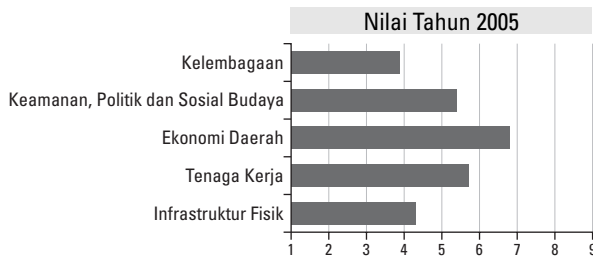


Jumlah Penduduk 2004 : 518.223  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 107,81  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 14.622.208

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	E	• Kualitas TK	B
• Politik	E	• Biaya TK	B
• Sosial Budaya	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
		• Ketersediaan	C
		• Kualitas	C

## KABUPATEN BARITO SELATAN

Ibu Kota : Buntok  
 Alamat : Jl. Pelita Raya No. 1  
 Telp./Fax. : 0525-21001/0525-21446  
 Web :



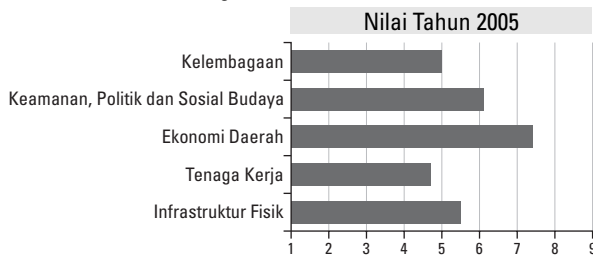
## PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Jumlah Penduduk 2004 : 120.593  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 8.830,00  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 9.167.529

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	E	• Kualitas TK	B
• Politik	E	• Biaya TK	D
• Sosial Budaya	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
		• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KABUPATEN BARITO UTARA

Ibu Kota : Muara Teweh  
 Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 76  
 Telp./Fax. : 0519-21120/0519-21234  
 Web : utara.go.id

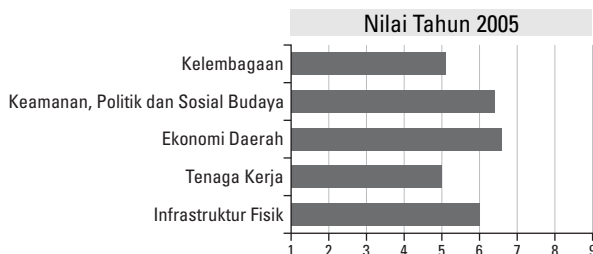


Jumlah Penduduk 2004 : 122.976  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 8.300,00  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 10.381.763

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	D	• Kualitas TK	C
• Politik	C	• Biaya TK	D
• Sosial Budaya	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
		• Ketersediaan	E
		• Kualitas	D

## KABUPATEN KAPUAS

Ibu Kota : Kuala Kapuas  
 Alamat : Jl. Pemuda  
 Telp./Fax. : 0513-21002/0513-21732  
 Web :



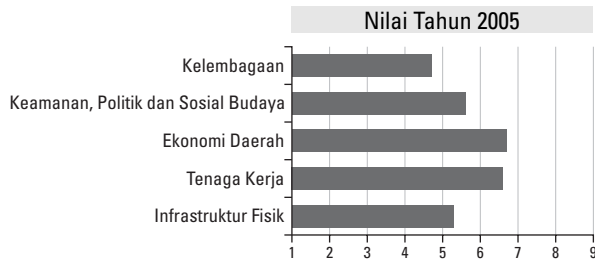
Jumlah Penduduk 2004 : 334.293  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 14.999,00  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 6.525.340

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	C
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
• Keamanan	C	• Kualitas TK	C
• Politik	C	• Biaya TK	D
• Sosial Budaya	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
		• Ketersediaan	C
		• Kualitas	C



## KOTA PALANGKARAYA

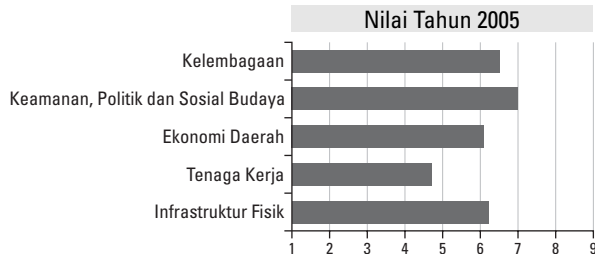
Ibu Kota : Palangkaraya  
 Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5  
 Telp./Fax. : 0536-323487, 31488/0536-31422  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 169.051		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 2.399,50		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 7.750.330		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>E</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	E	• Biaya TK	D
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Ibu Kota : Kandangan  
 Alamat : Jl. Pangeran Antasari No. 1  
 Telp./Fax. : 0517-21043/0517-21017  
 Web :

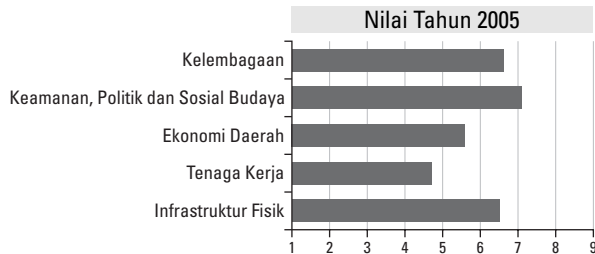


## PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 203.928		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 1.804,94		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 5.118.710		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>A</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>D</b>
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	B	• Biaya TK	D
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	C

## KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

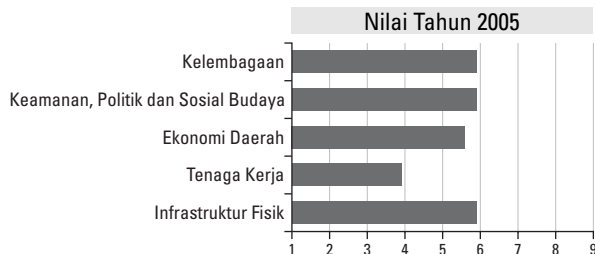
Ibu Kota : Barabai  
 Alamat : Jl. Perwira No. 1  
 Telp./Fax. : 0517-41045/0517-41052  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 234.002		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 1.472,00		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 4.074.310		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>A</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>E</b>
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	B	• Biaya TK	C
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	B

## KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

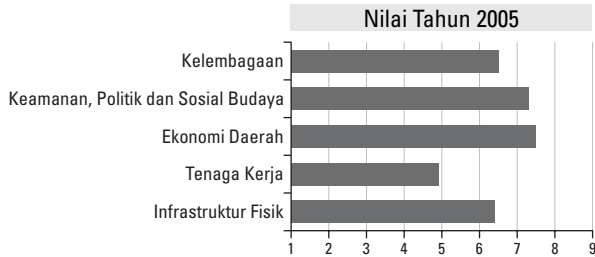
Ibu Kota : Amuntai  
 Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12  
 Telp./Fax. : 0527-61666/0527-612888  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 211.117		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 832,70		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 3.757.173		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>B</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>E</b>
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	D	• Biaya TK	C
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	C

## KABUPATEN TABALONG

Ibu Kota : Tanjung  
 Alamat : Jl. Pangeran Antasari No. 1  
 Telp./Fax. : 0526-21017/0526-21510  
 Web : www.kabupatentabalong.go.id

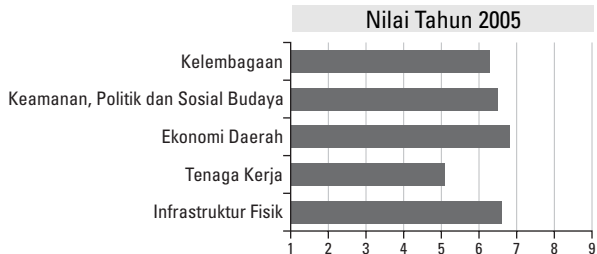


Jumlah Penduduk 2004 : 186.100  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 3.946,95  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 11.101.263

KELEMBAGAAN	A	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	A	• Biaya TK	D
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	A

## KABUPATEN TANAH LAUT

Ibu Kota : Pelaihari  
 Alamat : Komp. Perkantoran Gagah, Jl. A. Syairani  
 Telp./Fax. : 0512-21002/0512-21300  
 Web :

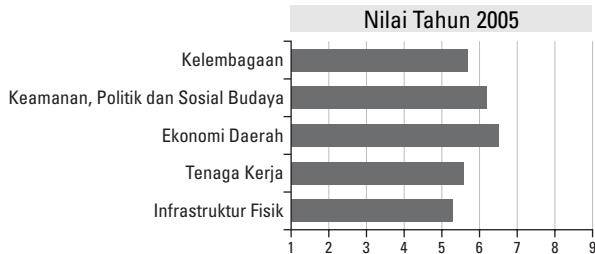


Jumlah Penduduk 2004 : 256.832  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 3.632,35  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 2.903.973

KELEMBAGAAN	C	EKONOMI DAERAH	E
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	B	• Biaya TK	C
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	D

## KABUPATEN TAPIN

Ibu Kota : Rantau  
 Alamat : Jl. H. Hasan Basri No. 22  
 Telp./Fax. : 0517-31006/0517-31435  
 Web : www.kabtapiin.go.id

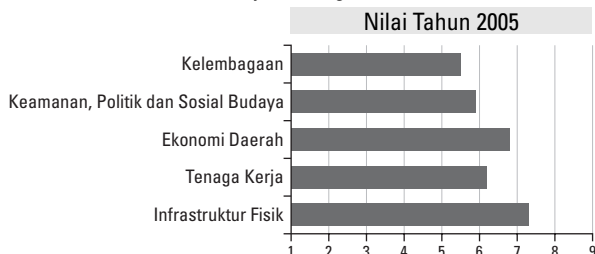


Jumlah Penduduk 2004 : 152.602  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 2.700,82  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 6.063.283

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	C
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	C	• Biaya TK	D
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KOTA BANJARMASIN

Ibu Kota : Banjarmasin  
 Alamat : Jl. RE. Martadinata No. 2  
 Telp./Fax. : 0511-53933/0511-53633  
 Web : www.banjarmasin.go.id

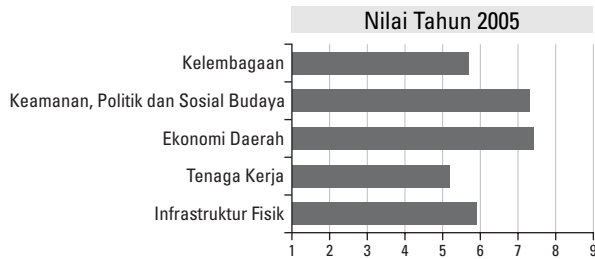


Jumlah Penduduk 2004 : 575.275  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 72,00  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 7.725.298

KELEMBAGAAN	C	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	D	• Biaya TK	C
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

**KABUPATEN BERAU****PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

Ibu Kota : Tanjung Redep  
 Alamat : Jl. Atipi Pranoto  
 Telp./Fax. : 0554-21001/0554-21068  
 Web : www.berau.go.id

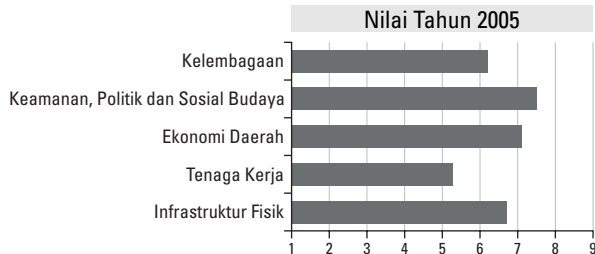


**Jumlah Penduduk 2004** : 148.769  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 2.325,21  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 23.637.034

<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>B</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>A</b>
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	A	• Biaya TK	E
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	C

**KABUPATEN BULUNGAN**

Ibu Kota : Bulungan  
 Alamat : Jl. Skip Tanjung Selor  
 Telp./Fax. : 0552-21010/0552-21001  
 Web : www.bulungan.go.id

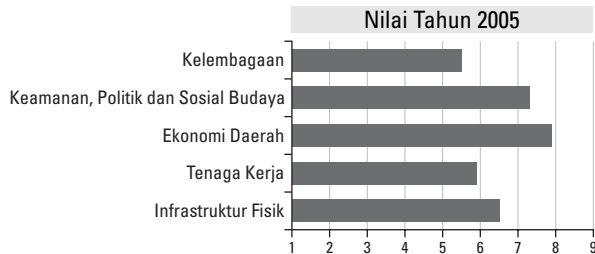


**Jumlah Penduduk 2004** : 108.121  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 18.010,50  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 12.368.856

<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>A</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>B</b>
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	A	• Biaya TK	E
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	B

**KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA**

Ibu Kota : Tenggarong  
 Alamat : Jl. Wolter Monginsidi  
 Telp./Fax. : 0541-661085,661029/0541-661030,661490  
 Web : www.kutaitertanegara.go.id

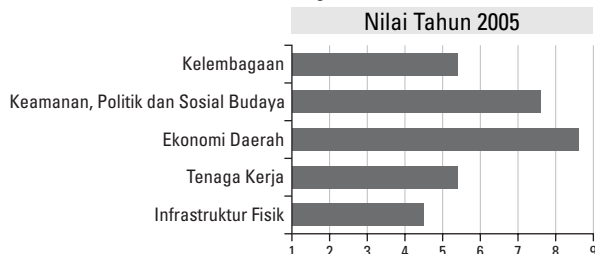


**Jumlah Penduduk 2004** : 517.384  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 28.927,98  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 18.528.782

<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>C</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>A</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	A	• Biaya TK	E
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	B

**KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Ibu Kota : Sanggata  
 Alamat : Jl. Bumiayu No. 1  
 Telp./Fax. : 0549-23108/0549-23468  
 Web : www.kutaitimur.go.id

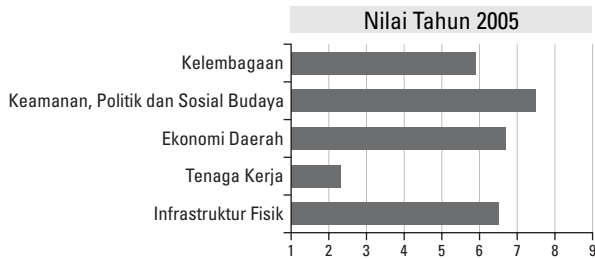


**Jumlah Penduduk 2004** : 177.214  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 35.747,00  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 54.719.906

<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>C</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>A</b>
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	A	• Biaya TK	E
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KABUPATEN NUNUKAN

Ibu Kota : Nunukan  
 Alamat : Jl. P. Antasari No. 88  
 Telp./Fax. : 0556-21088/0556-21088  
 Web :

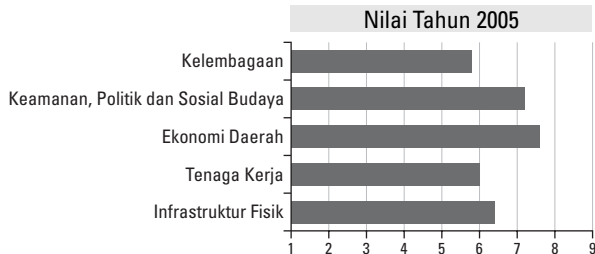


Jumlah Penduduk 2004 : 122.21  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 14.585,70  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 6.782.043

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	C
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	A	• Biaya TK	E
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	B

## KABUPATEN PASIR

Ibu Kota : Pasir  
 Alamat : Jl. RM. Noto Sunardi  
 Telp./Fax. : 0543-21002/0543-21079  
 Web :

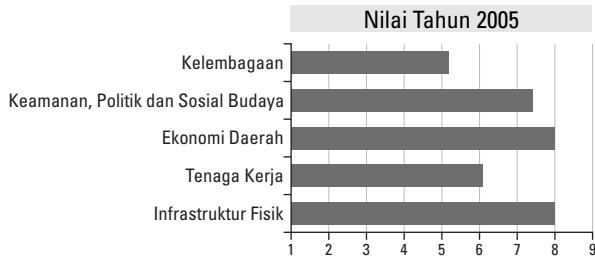


Jumlah Penduduk 2004 : 187.722  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 11.603,94  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 18.335.806

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	A	• Biaya TK	E
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	B

## KOTA BALIK PAPAN

Ibu Kota : Balikpapan  
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 100  
 Telp./Fax. : 0542-421-500/0542-425-412  
 Web : www.balikpapan.go.id

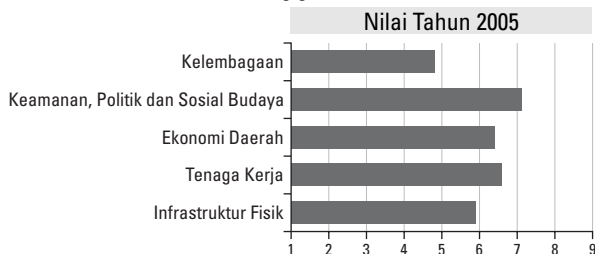


Jumlah Penduduk 2004 : 478.175  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 503,31  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 19.524.522

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	A	• Biaya TK	E
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KOTA BONTANG

Ibu Kota : Bontang  
 Alamat : Jl. Awang Long  
 Telp./Fax. : 0548-21790/0548-21790  
 Web : www.bontang.go.id

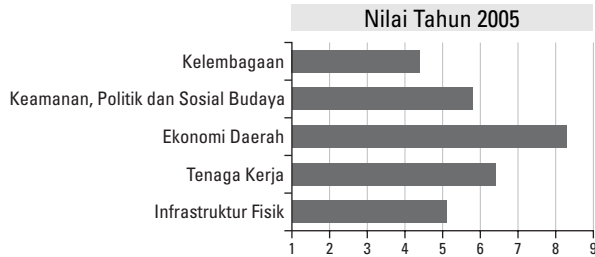


Jumlah Penduduk 2004 : 132.934  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 406,70  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 310.583.100

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	C
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	B	• Biaya TK	E
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	D

## KOTA SAMARINDA

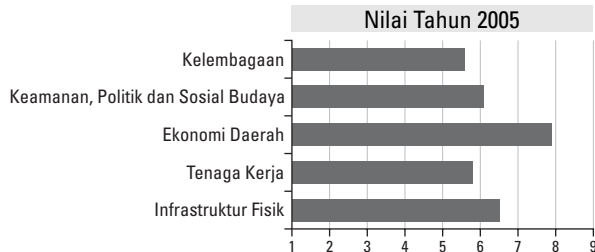
Ibu Kota : Samarinda  
 Alamat : Jl. Kesuma Bangsa No. 82  
 Telp./Fax. : 0541-741593,731324/0541-731455  
 Web : www.samarinda.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 580.766		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 781,25		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 20.270.213		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>E</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>A</b>
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Palayanan	E	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	D	• Biaya TK	E
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KOTA TARAKAN

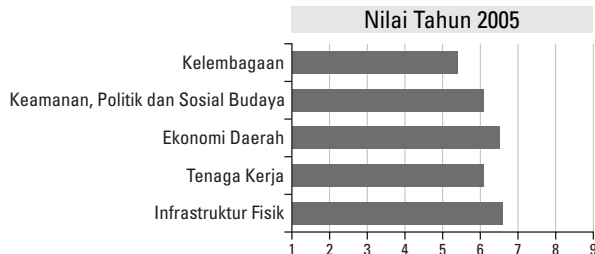
Ibu Kota : Tarakan  
 Alamat : Jl. Kalimantan Kampung Satu Skip  
 Telp./Fax. : 0551-21623,34301/0551-21622  
 Web : www.kotatarakan.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 161.977		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 507,10		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 15.025.209		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>C</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>A</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Palayanan	C	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	D	• Biaya TK	E
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	B

## KABUPATEN MINAHASA

Ibu Kota : Tondano  
 Alamat : Jl. Sam Ratulangi  
 Telp./Fax. : 0431-321411/0431-323258  
 Web : www.minahasa.go.id

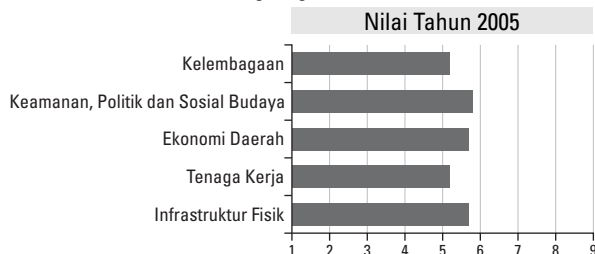


## PROPINSI SULAWESI UTARA

<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 299.492		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 982,55		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 6.124.510		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>C</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Palayanan	B	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	D	• Biaya TK	D
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	B

## KABUPATEN SANGIHE TALAUT

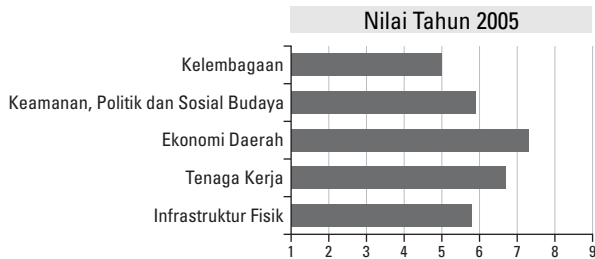
Ibu Kota : Tahuna  
 Alamat : Jl. Makaampo No. 22  
 Telp./Fax. : 0432-21032,21001/0432-21510  
 Web : www.sangihe.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 213.587		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 997,68		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 3.110.796		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>D</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>E</b>
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Palayanan	D	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	D	• Biaya TK	D
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	D

## KOTA BITUNG

Ibu Kota : Bitung  
 Alamat : Jl. Sam Ratulangi No. 45  
 Telp./Fax. : 0438-21003/0438-21008  
 Web :

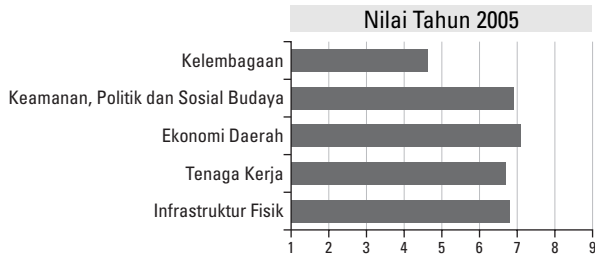


**Jumlah Penduduk 2004** : 165.624  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 302,89  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 4.515.026

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	A
• Keamanan	D	• Biaya TK	D
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	D

## KOTA MANADO

Ibu Kota : Manado  
 Alamat : Jl. Balai No. 1  
 Telp./Fax. : 0431-851103/0431-863003  
 Web : www.kotamanado.go.id

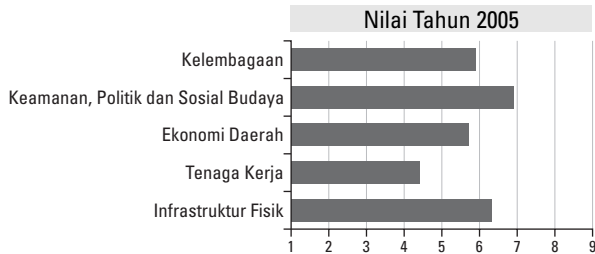


**Jumlah Penduduk 2004** : 401.493  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 157,27  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 11.485.913

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	A
• Keamanan	B	• Biaya TK	D
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KABUPATEN GORONTALO

Ibu Kota : Gorontalo  
 Alamat : Jl. DI Panjaitan  
 Telp./Fax. : 0435-821001/0435-830412  
 Web : www.kabgtlo.go.id



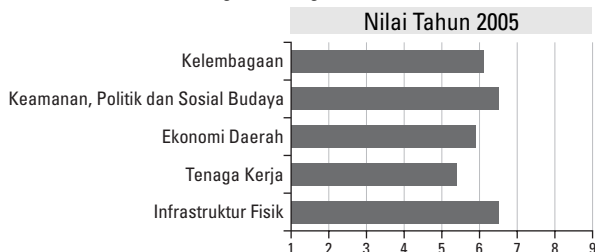
## PROPINSI GORONTALO

**Jumlah Penduduk 2004** : 424.316  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 3.354,67  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 3.667.831

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	E
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	E
• Keamanan	B	• Biaya TK	B
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	B

## KOTA GORONTALO

Ibu Kota : Gorontalo  
 Alamat : Jl. Jend. Ahmat Yani No. 3  
 Telp./Fax. : 0435-821001,821012/0435-821001  
 Web : www.gorontalo.go.id

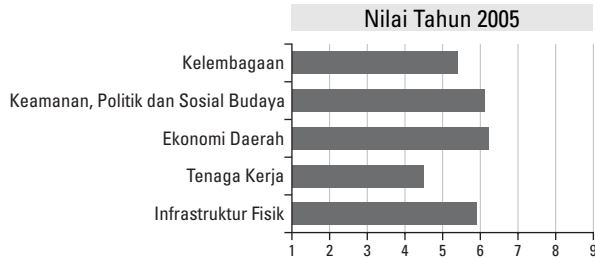


**Jumlah Penduduk 2004** : 151.414  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 64,79  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 10.084.329

KELEMBAGAAN	A	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	C
• Keamanan	C	• Biaya TK	B
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	B

**KABUPATEN BANGGAI****PROPINSI SULAWESI TENGAH**

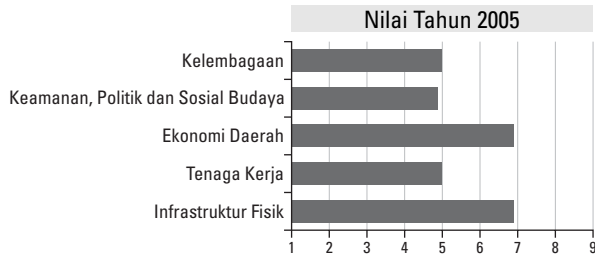
Ibu Kota : Banggai  
 Alamat : Jl. Ahmat Yani No. 12  
 Telp./Fax. : 0461-21053/0461-21014  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 297.979		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 10.641,70		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 5.716.343		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>C</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>D</b>
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Palayanan	D	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	C	• Biaya TK	B
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	C

**KABUPATEN DONGGALA**

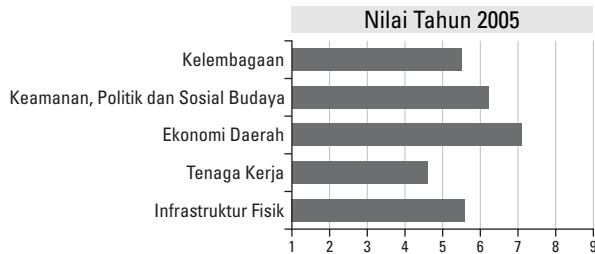
Ibu Kota : Donggala  
 Alamat : Jl. Pelabuhan Donggala No. 39  
 Telp./Fax. : 0457-71770/0457-71740  
 Web : www.donggala.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 444.515		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 9.471,10		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 6.424.918		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>D</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>B</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Palayanan	D	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	E	• Biaya TK	C
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	C

**KABUPATEN MOROWALI**

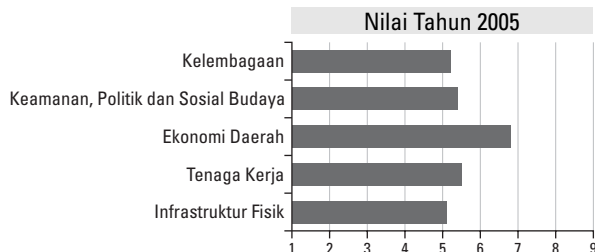
Ibu Kota : Morowali  
 Alamat : Kolonodale  
 Telp./Fax. : 0465-21011/0465-21031  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 171.416		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 15.489,98		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 6.903.725		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>C</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>B</b>
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Palayanan	C	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	D	• Biaya TK	B
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	D

**KABUPATEN POSO**

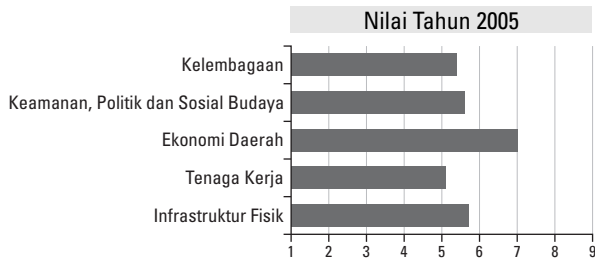
Ibu Kota : Poso  
 Alamat : Jl. Pulau Sumba No. 1  
 Telp./Fax. : 0452-21888/0452-23638  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 171.218		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 8.711,85		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 7.689.861		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>D</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Palayanan	B	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	E	• Biaya TK	C
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	D

## KABUPATEN TOLI TOLI

Ibu Kota : Tolitoli  
 Alamat : Jl. Moh. Bantilan No. 1  
 Telp./Fax. : 0453-21281,21001/0453-22364  
 Web :

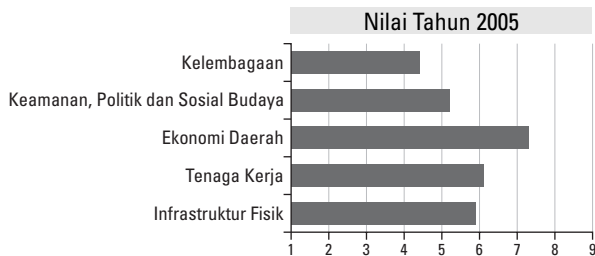


**Jumlah Penduduk 2004** : 219.443  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 4.079,77  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 2.675.298

KELEMBAGAAN	C	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	C
• Keamanan	E	• Biaya TK	C
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	D

## KOTA PALU

Ibu Kota : Palu  
 Alamat : Jl. Balai Kota No. 1  
 Telp./Fax. : 0451-421666,425580/0451-428222  
 Web :

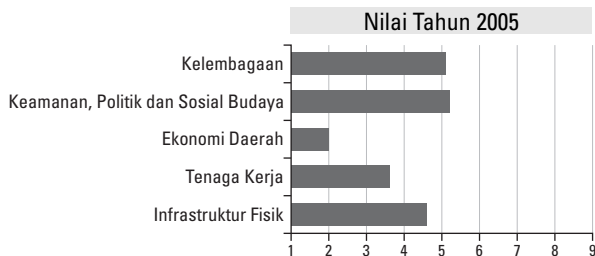


**Jumlah Penduduk 2004** : 293.111  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 395,06  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 8.446.372

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	A
• Keamanan	E	• Biaya TK	C
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	D

## KABUPATEN BUTON

Ibu Kota : Buton  
 Alamat : Jl. Balai Kota No. 1  
 Telp./Fax. : 0402-21010,0402-21221  
 Web :



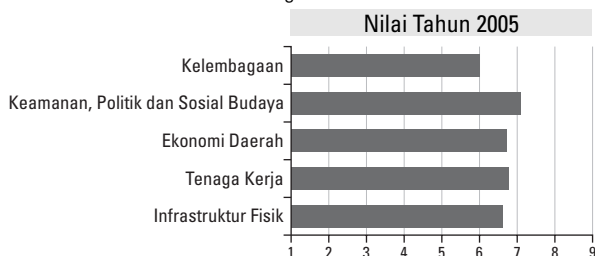
## PROPINSI SULAWESI TENGGARA

**Jumlah Penduduk 2004** : 262.546  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 2.648,08  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 2.463.153

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	E
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	E
• Keamanan	E	• Biaya TK	C
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KABUPATEN KOLAKA

Ibu Kota : Kolaka  
 Alamat : Jl. Pemuda No. 118  
 Telp./Fax. : 0405-21335/0405-21301,21010  
 Web : www.kolaka.go.id



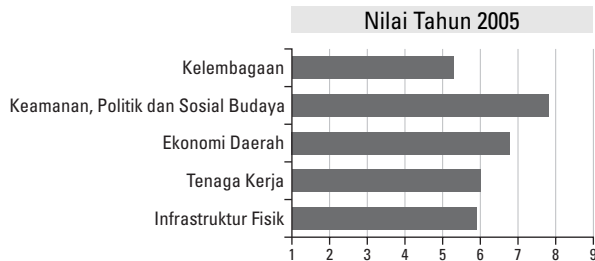
**Jumlah Penduduk 2004** : 266.714  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 6.928,58  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 9.671.640

KELEMBAGAAN	A	EKONOMI DAERAH	C
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	A
• Keamanan	B	• Biaya TK	C
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	A



## KABUPATEN KONAWA

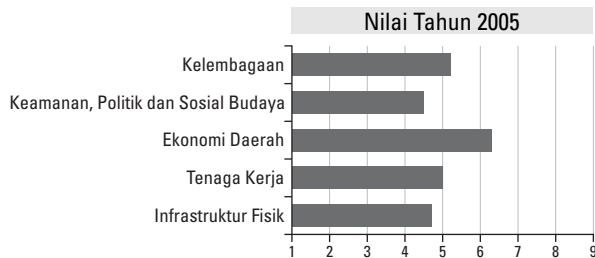
Ibu Kota :  
 Alamat :  
 Telp./Fax. :  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 259.108		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 10.045,30		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 5.405.482		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>C</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>B</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	A	• Biaya TK	C
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	B

## KABUPATEN MUNA

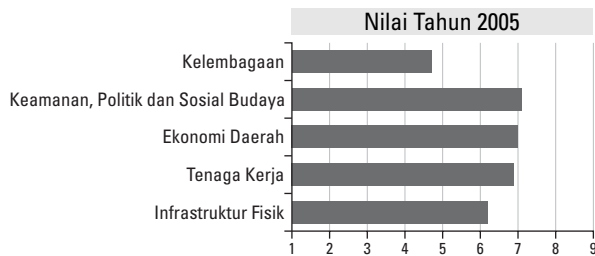
Ibu Kota : Muna  
 Alamat : Jl. MH. Thamrin No. 8  
 Telp./Fax. : 0403-21011,21016/0403-22025  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 296.506		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 4.037,83		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 4.390.987		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>D</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>D</b>
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	E	• Biaya TK	C
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KOTA KENDARI

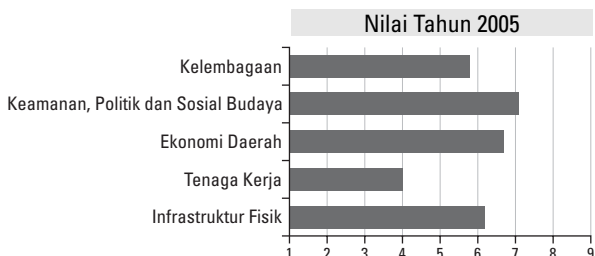
Ibu Kota : Kendari  
 Alamat : Jl. Letjend S. Parman  
 Telp./Fax. : 0401-321-402/0401-323-593  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 225.598		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 300,89		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 7.090.266		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>E</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>B</b>
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	A	• Biaya TK	C
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	C

## KABUPATEN BANTAENG

Ibu Kota : Bantaeng  
 Alamat : Jl. Mannapiang No. 5  
 Telp./Fax. : 0413-21001/0413-22765 www.bantaeng.go.id  
 Web :

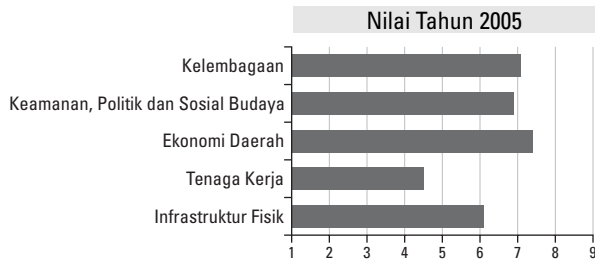


## PROPINSI SULAWESI SELATAN

<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 171.134		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 395,83		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 4.170.690		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>B</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	A	• Biaya TK	C
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	C

## KABUPATEN BARRU

Ibu Kota : Barru  
 Alamat : Jl. Sultan Hasannudin  
 Telp./Fax. : 0427-21042/0427-322045  
 Web :

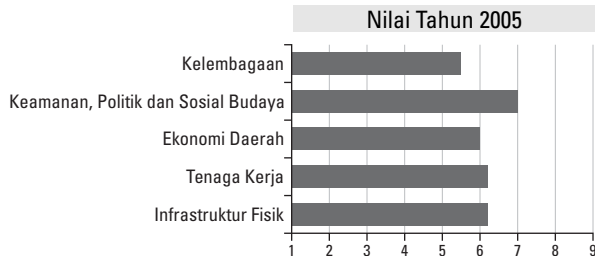


Jumlah Penduduk 2004 : 159.316  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 1.174,71  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 4.441.289

KELEMBAGAAN	A	EKONOMI DAERAH	A
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	B	• Biaya TK	B
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	C

## KABUPATEN BONE

Ibu Kota : Bone  
 Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani, Watampone  
 Telp./Fax. : 0481-21350/0481-21361  
 Web : www.bone.go.id

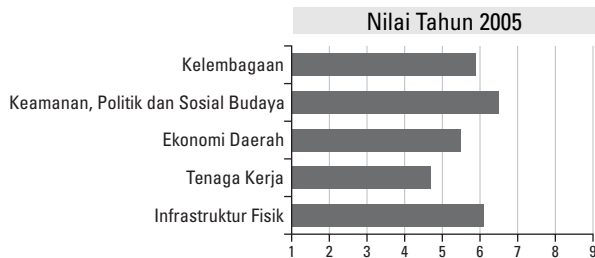


Jumlah Penduduk 2004 : 691.962  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 4.559,00  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 4.328.925

KELEMBAGAAN	C	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	A	• Biaya TK	D
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	D

## KABUPATEN GOWA

Ibu Kota : Gowa  
 Alamat : Jl. Mesjid Raya, Sunggu minasa  
 Telp./Fax. : 0411-861006/0411-866440  
 Web :

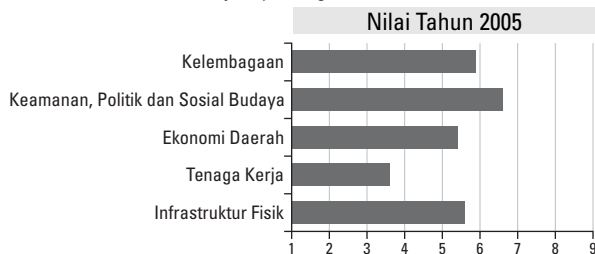


Jumlah Penduduk 2004 : 554.391  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 1.883,32  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 3.224.436

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	E
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	B	• Biaya TK	C
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	D

## KABUPATEN JENEPONTO

Ibu Kota : Jeneponto  
 Alamat : Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 43  
 Telp./Fax. : 0419-21022/0419-21222  
 Web : www.jeneponto.go.id

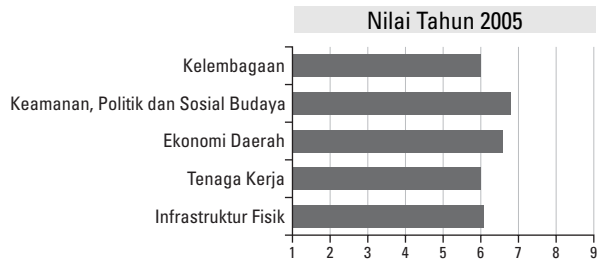


Jumlah Penduduk 2004 : 325.432  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 706,52  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 2.873.613

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	E
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	A	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	B	• Biaya TK	C
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	D

## KABUPATEN LUWU

Ibu Kota : Luwu  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 66  
Telp./Fax. : 0471-21001/0471-22004  
Web :

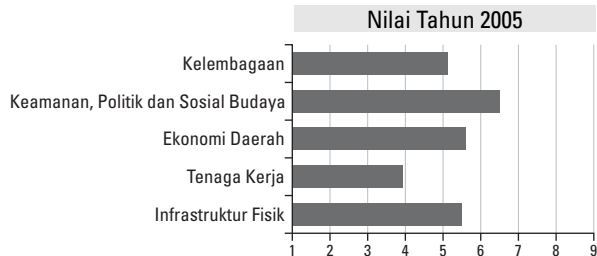


**Jumlah Penduduk 2004** : 307.442  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 3.092,58  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 4.932,762

<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>B</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Palayanan	A	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	C	• Biaya TK	C
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	D

## KABUPATEN LUWU UTARA

Ibu Kota : Luwu Utara  
Alamat : Kota Masamba  
Telp./Fax. : 0473-21003/0473-21003  
Web : www.luwuutara.go.id

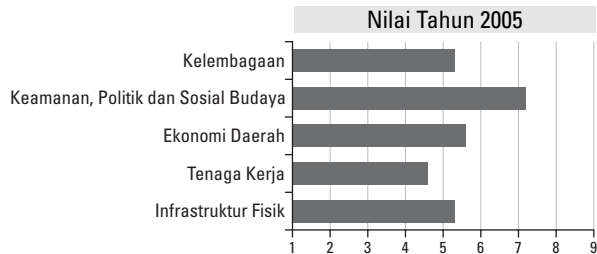


**Jumlah Penduduk 2004** : 274.425  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 7.502,58  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 4.252,485

<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>D</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>E</b>
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Palayanan	D	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	B	• Biaya TK	C
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	D

## KABUPATEN MAJENE

Ibu Kota : Majene  
Alamat : Jl. Gatoto Subroto No. 59  
Telp./Fax. : 0422-21001, 21363/0422-21799  
Web : www.majene.go.id

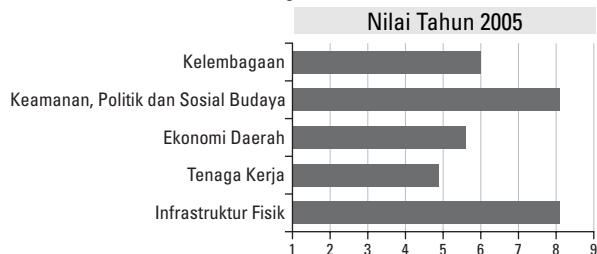


**Jumlah Penduduk 2004** : 120.918  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 947,84  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 4.175,862

<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>C</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>E</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Palayanan	C	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	A	• Biaya TK	C
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	D

## KABUPATEN MAROS

Ibu Kota : Maros  
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 6  
Telp./Fax. : 0411-371051, 372100/0411-371139  
Web : www.maros.go.id

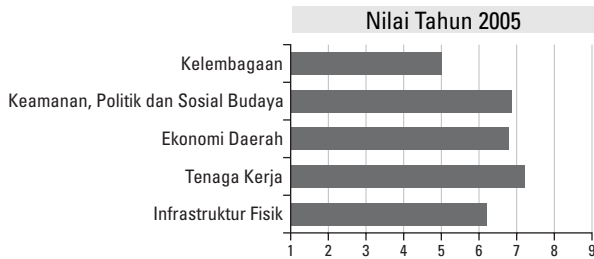


**Jumlah Penduduk 2004** : 296.574  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 1.621,12  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 3.645.518

<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>A</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>E</b>
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Palayanan	D	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	A	• Biaya TK	D
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

### KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN

Ibu Kota : Pangkep  
 Alamat : Jl. Beringin No. 5  
 Telp./Fax. : 0410-21001/0410-21111  
 Web :

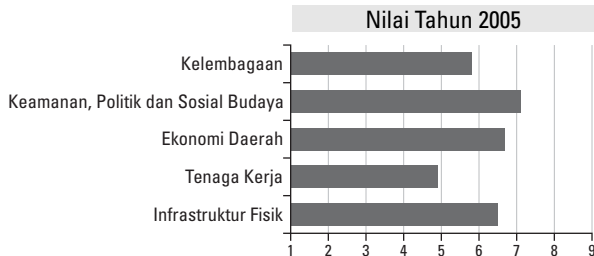


Jumlah Penduduk 2004 : 284.726  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 1.132,08  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 7.725.784

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	A
• Keamanan	A	• Biaya TK	C
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	C

### KABUPATEN PINRANG

Ibu Kota : Pinrang  
 Alamat : Jl. Jend. Sokawati No. 40  
 Telp./Fax. : 0421-921001/0421-921222  
 Web :

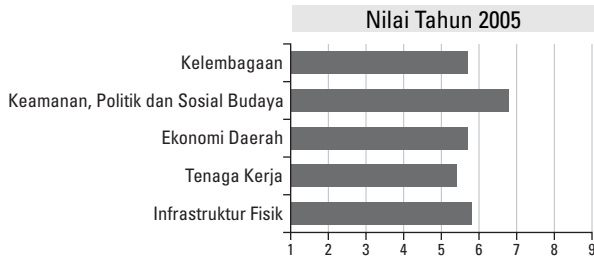


Jumlah Penduduk 2004 : 332.959  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 1.961,77  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 6.586.147

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	C
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	D
• Keamanan	B	• Biaya TK	C
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	B

### KABUPATEN SELAYAR

Ibu Kota : Selayar  
 Alamat : Jl. Kemiri No. 27 Banteng  
 Telp./Fax. : 0414-21004, 21001/0414-21465  
 Web : www.selayar.go.id

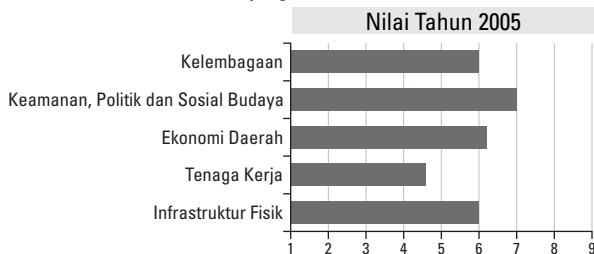


Jumlah Penduduk 2004 : 111.171  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 1.357,03  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 3.994.490

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	E
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	C
• Keamanan	A	• Biaya TK	D
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	C

### KABUPATEN SINJAI

Ibu Kota : Sinjai  
 Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani  
 Telp./Fax. : 0482-21029, 21002/0482-21500  
 Web : www.sinjai.go.id

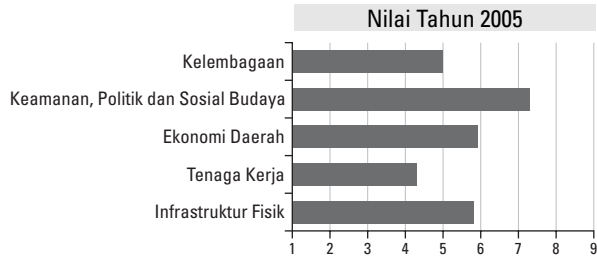


Jumlah Penduduk 2004 : 221.129  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 798,96  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 4.853.119

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	D
• Keamanan	A	• Biaya TK	C
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	D

## KABUPATEN TAKALAR

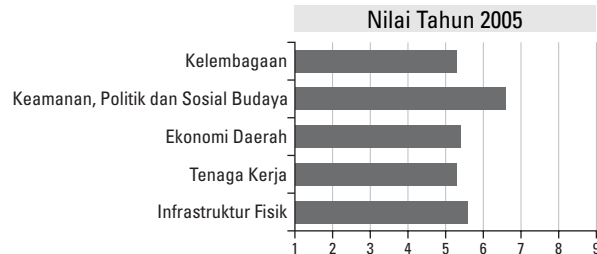
Ibu Kota : Takalar  
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 26  
 Telp./Fax. : 0418-21186/0418-21105  
 Web : www.takalar.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 244.899		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 566,51		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 3.502.134		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>D</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>D</b>
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Palayanan	D	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>A</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	A	• Biaya TK	C
• Politik	A	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	D

## KABUPATEN TANA TORAJA

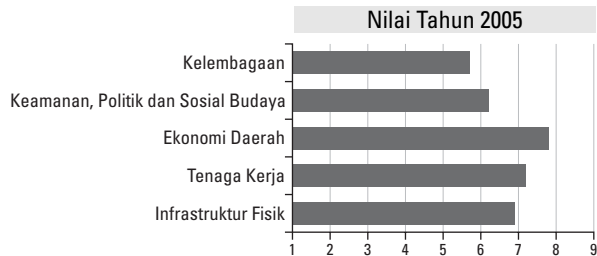
Ibu Kota : Makale  
 Alamat : Jl. Pongtiku No. 120  
 Telp./Fax. : 0423-22120, 22091/0423-22688  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 430.115		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 3.010,93		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 7.811.757		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>A</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Palayanan	A	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	D	• Biaya TK	C
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	A

## KOTA MAKASAR

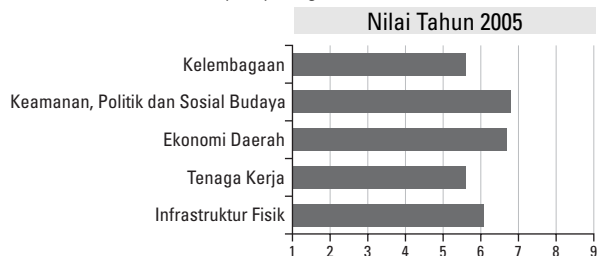
Ibu Kota : Makassar  
 Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2  
 Telp./Fax. : 0411-317007/0411-317720  
 Web : www.makassar.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 1.207.592		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 199,26		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 11.220.006		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>B</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>A</b>
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Palayanan	A	• Struktur Ekonomi	A
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	D	• Biaya TK	C
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	A

## KOTA PAREPARE

Ibu Kota : Parepare  
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 78  
 Telp./Fax. : 0421-21000/0421-24330  
 Web : www.parepare.go.id

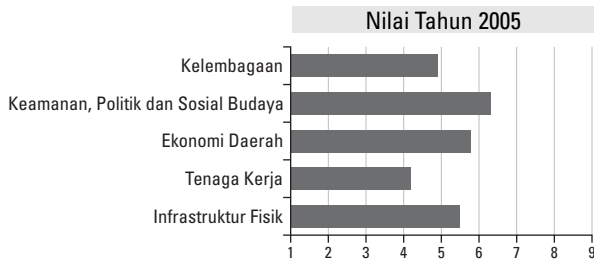


<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 118.417		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 99,33		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 5.952.403		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>C</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>C</b>
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	C
• Aparatur & Palayanan	A	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	A	• Biaya TK	D
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	C

**KABUPATEN BIMA****PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ibu Kota : Bima Raba  
 Alamat : Jl. Soekarno-Hatta  
 Telp./Fax. : 0374-43228/0374-43300  
 Web :

**Jumlah Penduduk 2004** : 426.034  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 3.475,38  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 3.952.616

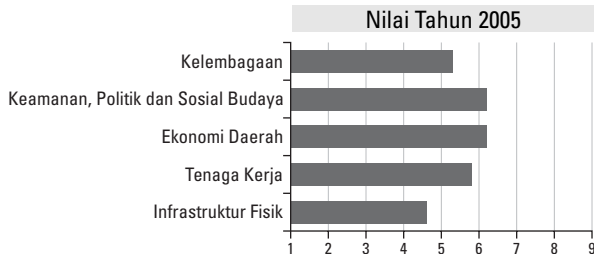


KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	C	• Biaya TK	B
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	D

**KABUPATEN DOMPU**

Ibu Kota : Dompu  
 Alamat : Jl. Beringin No. 1  
 Telp./Fax. : 0373-21027, 21418/0373-21504  
 Web : www.dompu.go.id

**Jumlah Penduduk 2004** : 200.401  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 2.391,54  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 4.966.170

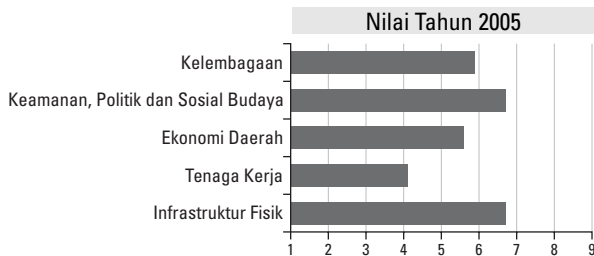


KELEMBAGAAN	C	EKONOMI DAERAH	D
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	C
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	C	• Biaya TK	B
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

**KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Ibu Kota : Girimenang  
 Alamat : Jl. Soekarno-Hatta  
 Telp./Fax. : 0370-681311/0370-640655  
 Web :

**Jumlah Penduduk 2004** : 736.660  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 1.672,81  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 3.460.926

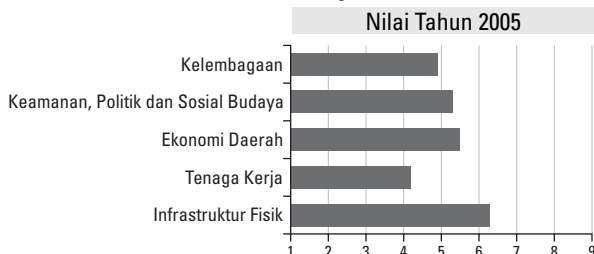


KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	E
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	C	• Biaya TK	B
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>A</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	A
		• Kualitas	B

**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Ibu Kota : Mataram  
 Alamat : Jl. Prof. HM. Yamin No. 90  
 Telp./Fax. : 0370-634319  
 Web : www.lomboktimur.go.id

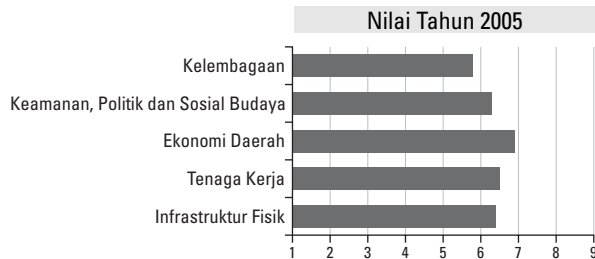
**Jumlah Penduduk 2004** : 1.042.765  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 2.142,78  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 2.892.461



KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	E
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	E	• Biaya TK	A
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	C

## KOTA MATARAM

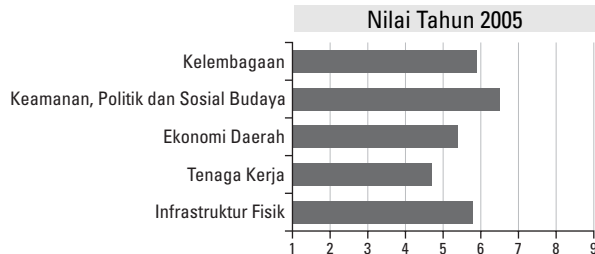
Ibu Kota : Mataram  
 Alamat : Jl. Pejanggal  
 Telp./Fax. : 0370-634319, 634320/0370-634321  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 350.689		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 61,30		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 5.562.112		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>B</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>B</b>
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Palayanan	B	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	D	• Biaya TK	B
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>B</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	B
		• Kualitas	B

## KABUPATEN ENDE

Ibu Kota : Ende  
 Alamat : Jl. Raya Eltari No. 12  
 Telp./Fax. : 0381-21001/0381-21139  
 Web : www.ende.go.id

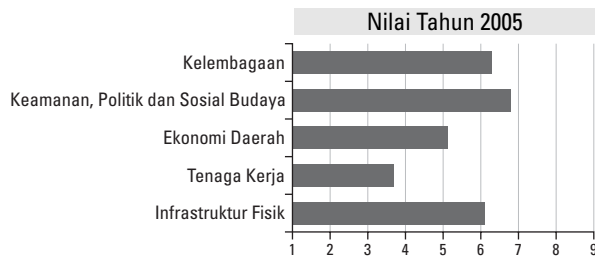


## PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 239.611		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 1.566,30		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 3.291.883		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>B</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>E</b>
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Palayanan	B	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	C	• Biaya TK	C
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	C

## KABUPATEN LEMBATA

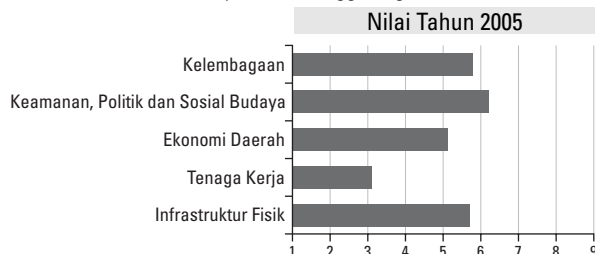
Ibu Kota : Lewoleba  
 Alamat : Jl. Trans Lembata No. 1  
 Telp./Fax. : 0383-41001, 41038/0383-41002  
 Web :



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 100.733		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 1.266,48		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 1.914.906		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>A</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>E</b>
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Palayanan	A	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	A	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	A	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>B</b>	• Kualitas TK	D
• Keamanan	B	• Biaya TK	C
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	A	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	C

## KABUPATEN MANGGARAI

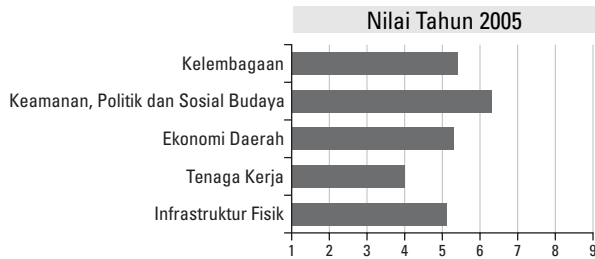
Ibu Kota : Ruteng  
 Alamat : Jl. Motang Rua No. 1  
 Telp./Fax. : 0385-21001/0385-21195  
 Web : www.pemkab-manggarai.go.id



<b>Jumlah Penduduk 2004</b>	: 482.339		
<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	: 4.739,37		
<b>PDRB perkapita 2004</b>	: Rp. 2.182.664		
<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>B</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>E</b>
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Palayanan	A	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	D	• Biaya TK	A
• Politik	B	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	D

## KABUPATEN NGADA

Ibu Kota : Bajawa  
 Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. 1  
 Telp./Fax. : 0384-21001, 21013/0384-21008  
 Web :

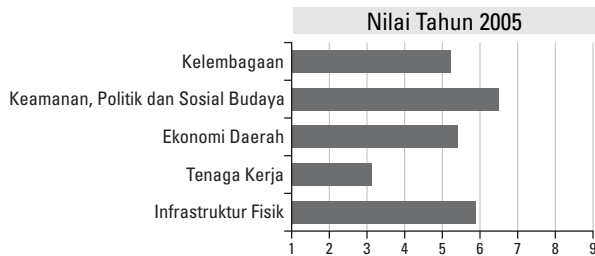


Jumlah Penduduk 2004 : 238.700  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 3.062,64  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 3.198.845

KELEMBAGAAN	C	EKONOMI DAERAH	E
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	E
• Keamanan	C	• Biaya TK	B
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KABUPATEN SIKKA

Ibu Kota : Maumere  
 Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani  
 Telp./Fax. : 0382-21700/0382-21003  
 Web :

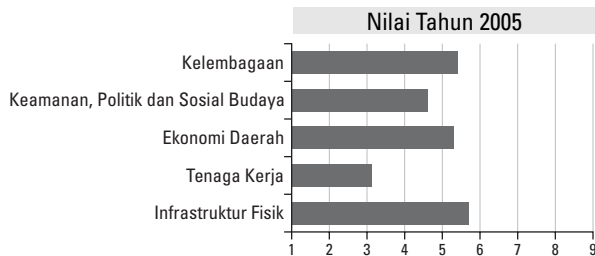


Jumlah Penduduk 2004 : 277.992  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 1.731,90  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 3.220.045

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	E
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	C	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	E
• Keamanan	C	• Biaya TK	B
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	C

## KABUPATEN SUMBA BARAT

Ibu Kota : Waikabubak  
 Alamat : Jl. Basuki Rahmat  
 Telp./Fax. : 0387-21095/0387-21093  
 Web :

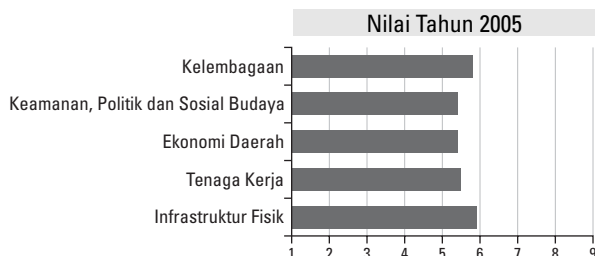


Jumlah Penduduk 2004 : 387.046  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 4.587,00  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 2.075.757

KELEMBAGAAN	C	EKONOMI DAERAH	E
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	E
• Keamanan	E	• Biaya TK	A
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	C	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	E

## KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Ibu Kota : Soe  
 Alamat : Jl. Hayam Wuruk  
 Telp./Fax. : 0388-21001, 21176/0388-21131  
 Web :



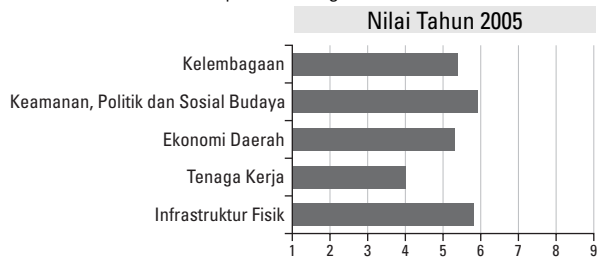
Jumlah Penduduk 2004 : 207.564  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 2.277,29  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 6.147.048

KELEMBAGAAN	B	EKONOMI DAERAH	E
• Kepastian Hukum	B	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>		• Kualitas TK	B
• Keamanan	E	• Biaya TK	B
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	D



## KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Ibu Kota : Kefamenanu  
 Alamat : Jl. Basuki Rahmat  
 Telp./Fax. : 0388-31027, 31003/0388-31222  
 Web : www.pemkab-ttu.go.id

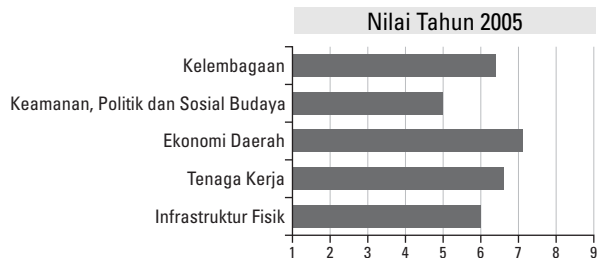


**Jumlah Penduduk 2004** : 404.426  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 3.947,00  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 2.697.194

KELEMBAGAAN	C	EKONOMI DAERAH	E
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Palayanan	C	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	D
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	D	• Biaya TK	C
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	E

## KOTA KUPANG

Ibu Kota : Kupang  
 Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan  
 Telp./Fax. : 0380-833106/0380-826755  
 Web :

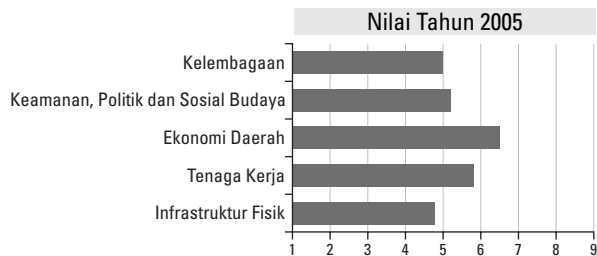


**Jumlah Penduduk 2004** : 267.636  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 180,27  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 9.011.901

KELEMBAGAAN	A	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	A	• Potensi Ekonomi	D
• Aparatur & Palayanan	A	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>A</b>
• Kepemimpinan Lokal	B	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	E	• Biaya TK	B
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	B	• Ketersediaan	C
		• Kualitas	D

## KABUPATEN FAKFAK

Ibu Kota : Fakfak  
 Alamat : Jl. Yos Sudarso  
 Telp./Fax. : 0956-22100/0956-22118  
 Web :



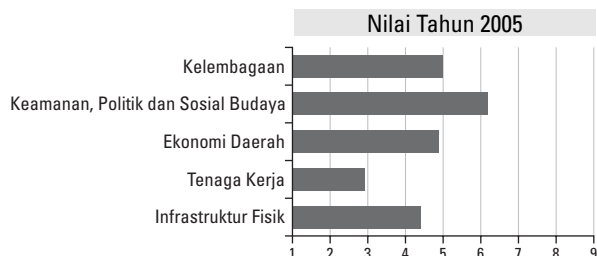
## PROPINSI PAPUA

**Jumlah Penduduk 2004** : 54.968  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 14.320,00  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 8.923.834

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	C
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	E
• Aparatur & Palayanan	D	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	E	• Biaya TK	E
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KABUPATEN JAYAWIJAYA

Ibu Kota : Wamena  
 Alamat : Jl. Yos Sudarso  
 Telp./Fax. : 0969-31001/0969-31079  
 Web :

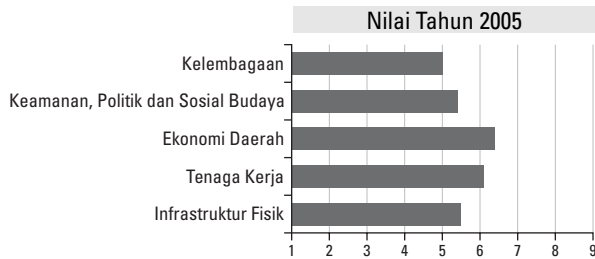


**Jumlah Penduduk 2004** : 209.881  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 6.585,00  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 3.739.415

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	E
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Palayanan	D	• Struktur Ekonomi	E
• Perda	C	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>E</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>D</b>	• Kualitas TK	E
• Keamanan	C	• Biaya TK	E
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KABUPATEN MANOKWARI

Ibu Kota : Manokwari  
 Alamat : Jl. Sudjarwo Condronegoro, SH.  
 Telp./Fax. : 0986-211667/0986-211219  
 Web : www.manokwari.go.id

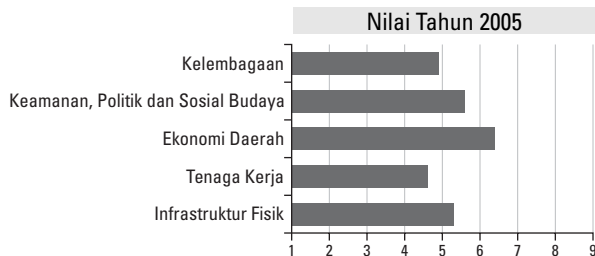


Jumlah Penduduk 2004 : 142.669  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 13.476,00  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 7.040.926

KELEMBAGAAN	D	EKONOMI DAERAH	C
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	B
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	D	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	A
• Keamanan	E	• Biaya TK	E
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>D</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	E

## KABUPATEN MIMIKA

Ibu Kota : Mimika  
 Alamat : Jl. SP. Lima  
 Telp./Fax. :  
 Web :

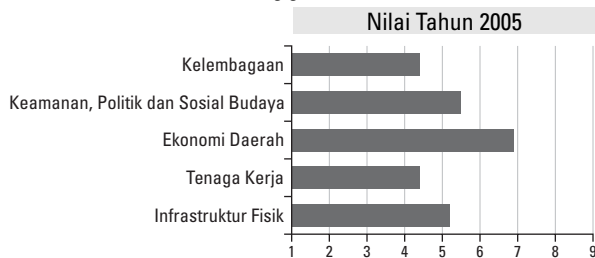


Jumlah Penduduk 2004 : 126.044  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 18.708,77  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 1.117.466.148

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	C
• Kepastian Hukum	D	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	D	• Struktur Ekonomi	D
• Perda	E	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	C
• Keamanan	D	• Biaya TK	E
• Politik	E	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KABUPATEN SORONG

Ibu Kota : Sorong  
 Alamat : Jl. Klamono Aimas II Km. 24  
 Telp./Fax. : 0951-325852, 325853/0951-327986  
 Web : www.sorong.go.id

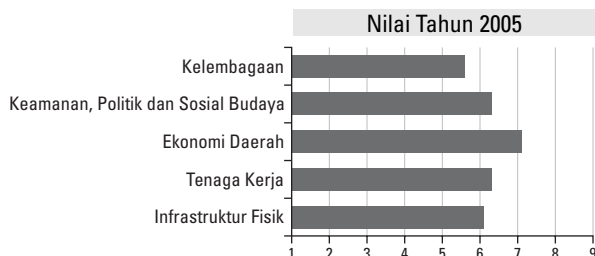


Jumlah Penduduk 2004 : 66.781  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 7.246,00  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 9.366.621

KELEMBAGAAN	E	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>D</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	E
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	E	• Biaya TK	E
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## KOTA JAYAPURA

Ibu Kota : Jayapura  
 Alamat : Jl. Balaikota No. 1 Entrop  
 Telp./Fax. : 0967-536201, 535216/0967-534109  
 Web :

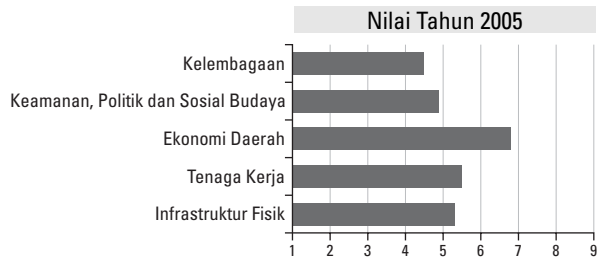


Jumlah Penduduk 2004 : 219.790  
 Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) : 738,62  
 PDRB perkapita 2004 : Rp. 10.833.579

KELEMBAGAAN	C	EKONOMI DAERAH	B
• Kepastian Hukum	C	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	B	• Struktur Ekonomi	B
• Perda	B	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>B</b>
• Kepemimpinan Lokal	C	• Ketersediaan TK	A
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>C</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	C	• Biaya TK	E
• Politik	C	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>C</b>
• Sosial Budaya	D	• Ketersediaan	D
		• Kualitas	B

## KOTA SORONG

Ibu Kota : Sorong  
 Alamat : Jl. Burung Kurana No. 3  
 Telp./Fax. : 0951-326300, 326660/0951-333087  
 Web :



**Jumlah Penduduk 2004** : 141.839  
**Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)** : 717,90  
**PDRB perkapita 2004** : Rp. 7.192.419

<b>KELEMBAGAAN</b>	<b>E</b>	<b>EKONOMI DAERAH</b>	<b>B</b>
• Kepastian Hukum	E	• Potensi Ekonomi	A
• Aparatur & Pelayanan	E	• Struktur Ekonomi	C
• Perda	D	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>C</b>
• Kepemimpinan Lokal	E	• Ketersediaan TK	B
<b>KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>E</b>	• Kualitas TK	B
• Keamanan	E	• Biaya TK	E
• Politik	D	<b>INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>E</b>
• Sosial Budaya	E	• Ketersediaan	E
		• Kualitas	E

## BOBOT PEMERINGKATAN

Lampiran 8 : Bobot Faktor - Variabel - Indikator Pemingkatan Daya Saing Investasi Daerah Tahun 2005

Faktor - Variabel - Indikator	Lokal	Global
<b>A. KELEMBAGAAN</b>	<b>0.150</b>	<b>0.150</b>
<b>1. Kepastian Hukum</b>	<b>0.396</b>	<b>0.059</b>
• Konsistensi Peraturan	0.358	0.021
• Penegakan Keputusan Peradilan	0.209	0.012
• Kecepatan Aparat Keamanan	0.137	0.008
• Pungutan Liar d Luar Birokrasi	0.296	0.018
<b>2. Aparatur &amp; Pelayanan</b>	<b>0.184</b>	<b>0.028</b>
• Respon Pemda terhadap Permasalahan Dunia Usaha	0.318	0.009
• Birokrasi Pelayanan Dunia Usaha	0.282	0.008
• Informasi Potensi Ekonomi Daerah	0.229	0.006
• Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat	0.170	0.005
<b>3. Kebijakan Daerah &amp; Perda</b>	<b>0.230</b>	<b>0.034</b>
• Kejelasan Tarif	0.267	0.009
• Kejelasan Prosedur	0.268	0.009
• Proses Perumusan Perda	0.174	0.006
• Kebijakan Ketenagakerjaan	0.291	0.01
<b>4. Kepemimpinan Lokal</b>	<b>0.190</b>	<b>0.028</b>
• Kepemimpinan Kepala Daerah	0.187	0.005
• Inisiatif Kepala Daerah	0.454	0.013
• Hubungan Kepala Daerah dgn. Pengusaha	0.359	0.01
<b>B. KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>	<b>0.274</b>	<b>0.274</b>
<b>1. Keamanan</b>	<b>0.612</b>	<b>0.168</b>
• Kemanan Usaha	0.487	0.082
• Keamanan Masyarakat	0.351	0.059
• Dampak Unjuk Rasa	0.159	0.027
<b>2. Politik</b>	<b>0.176</b>	<b>0.048</b>
• Hubungan Eksekutif – Legislatif	0.628	0.03
• Hubungan Antar Partai Politik	0.372	0.018
<b>3. Sosial Budaya</b>	<b>0.212</b>	<b>0.058</b>
• Keterbukaan Masyarakat thd. Dunia Usaha	0.277	0.016
• Keterbukaan Masyarakat thd. Tenaga Kerja dari Luar Daerah	0.173	0.01
• Etos Kerja Masyarakat	0.188	0.011
• Kemudahan Memperoleh Hak Penguasaan Tanah	0.192	0.011
• Potensi Konflik di Masyarakat	0.170	0.01

Faktor - Variabel - Indikator	Lokal	Global
<b>C. EKONOMI DAERAH</b>	<b>0.226</b>	<b>0.226</b>
<b>1. Patensi Ekonomi</b>	<b>0.775</b>	<b>0.175</b>
• PDRB Perkapita	0.479	0.084
• Pertumbuhan Ekonomi	0.340	0.06
• Indeks Kemahalan Konstruksi	0.182	0.032
<b>2. Struktur Ekonomi</b>	<b>0.225</b>	<b>0.051</b>
• Pertumbuhan Sektor Primer	0.285	0.014
• Pertumbuhan Sektor Sekunder	0.309	0.016
• Pertumbuhan Sektor Tersier	0.406	0.021
<b>D. TENAGAKERJAAN</b>	<b>0.183</b>	<b>0.183</b>
<b>1. Ketersediaan Tenaga Kerja</b>	<b>0.260</b>	<b>0.049</b>
• Tenaga Kerja Usia Produktif	0.715	0.035
• Tenaga Kerja Pencari Kerja	0.285	0.014
<b>2. Kualitas Tenaga Kerja</b>	<b>0.492</b>	<b>0.09</b>
• Produktivitas Tenaga Kerja	0.631	0.057
• Pendidikan Tenaga Kerja	0.369	0.033
<b>3. Biaya Tenaga Kerja</b>	<b>0.241</b>	<b>0.044</b>
• Biaya Tenaga Kerja Formal	0.505	0.022
• Biaya Tenaga Kerja Aktual	0.495	0.022
<b>E. INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>0.167</b>	<b>0.167</b>
<b>1. Ketersediaan Infrastruktur Fisik</b>	<b>0.573</b>	<b>0.096</b>
• Ketersediaan Jalan Darat	0.260	0.025
• Ketersediaan Pelabuhan Laut	0.119	0.011
• Ketersediaan Pelabuhan Udara	0.103	0.010
• Ketersediaan Sambungan Telepon	0.213	0.020
• Ketersediaan Pasokan Listrik	0.306	0.029
<b>2. Kualitas Infrastruktur Fisik</b>	<b>0.427</b>	<b>0.071</b>
• Kualitas Jalan Darat	0.288	0.021
• Kualitas Pelabuhan Laut	0.117	0.008
• Kualitas Pelabuhan Udara	0.114	0.008
• Kualitas Sambungan Telepon	0.187	0.013
• Kualitas Tegangan Listrik	0.293	0.021

**Lampiran 9** : Perbandingan Bobot Faktor - Variabel - Indikator Pemingkatan Tahun 2002 - 2005

Faktor - Variabel - Indikator 2002 - 2004	Lokal	Global	Faktor - Variabel - Indikator 2005	Lokal	Global
<b>I. KELEMBAGAAN</b>	<b>0.310</b>	<b>0.310</b>	<b>I. KELEMBAGAAN</b>	<b>0.150</b>	<b>0.150</b>
1. Kepastian Hukum	0.390	0.121	1. Kepastian Hukum	0.396	0.059
2. Keuangan Daerah	0.140	0.043	2. Kepemimpinan Lokal	0.190	0.028
3. Aparatur	0.220	0.068	3. Aparatur & Pelayanan	0.184	0.028
4. Peraturan Daerah	0.250	0.078	4. Kebijakan Daerah & Perda	0.230	0.034
<b>II. SOSIAL POLITIK</b>	<b>0.260</b>	<b>0.260</b>	<b>II. KEAMANAN, POLITIK SOSIAL, BUDAYA</b>	<b>0.274</b>	<b>0.274</b>
1. Sosial Politik	0.270	0.070	1. Politik	0.176	0.048
2. Keamanan	0.600	0.156	2. Keamanan	0.612	0.168
3. Budaya	0.130	0.034	3. Sosial Budaya	0.212	0.058
<b>III. EKONOMI DAERAH</b>	<b>0.170</b>	<b>0.170</b>	<b>III. EKONOMI DAERAH</b>	<b>0.226</b>	<b>0.226</b>
1. Potensi Ekonomi	0.710	0.121	1. Potensi Ekonomi	0.775	0.175
2. Struktur Ekonomi	0.290	0.049	2. Struktur Ekonomi	0.225	0.051
<b>IV. TENAGA KERJA &amp; PRODUKTIVITAS</b>	<b>0.130</b>	<b>0.130</b>	<b>IV. TENAGAKERJAAN</b>	<b>0.183</b>	<b>0.183</b>
1. Biaya Tenaga Kerja	0.240	0.031	1. Biaya Tenaga Kerja	0.241	0.044
2. Ketersediaan Tenaga Kerja	0.350	0.046	2. Ketersediaan Tenaga Kerja	0.260	0.049
3. Produktivitas Tk	0.410	0.053	3. Kualitas Tenaga Kerja	0.492	0.090
<b>V. INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>0.130</b>	<b>0.130</b>	<b>V. INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>0.167</b>	<b>0.167</b>
1. Ketersediaan Infrastruktur Fisik	0.540	0.070	1. Ketersediaan Infrastruktur Fisik	0.573	0.096
2. Kualitas Infrastruktur Fisik	0.460	0.060	2. Kualitas Infrastruktur Fisik	0.427	0.071

**Keterangan**

- Tidak mengalami perubahan
- Variabel yang dihapus / diganti
- Variabel baru
- Bobot yang menalami penurunan
- Bobot mengalami peningkatan

Lampiran 10 : Perubahan Bobot Faktor - Variabel - Indikator Pemingkatan Tahun 2002 - 2005

Faktor - Variabel - Indikator 2002 - 2004	Lokal	Global	Faktor - Variabel - Indikator 2005	Lokal	Global
<b>I. KELEMBAGAAN</b>	<b>0.310</b>	<b>0.310</b>	<b>I. KELEMBAGAAN</b>	<b>0.150</b>	<b>0.150</b>
<b>A. KEPASTIAN HUKUM</b>	<b>0.390</b>	<b>0.121</b>	<b>A. KEPASTIAN HUKUM</b>	<b>0.396</b>	<b>0.059</b>
1. Penegakan Hukum	0.170	0.053	1. Penegakan Keputusan Peradilan	0.209	0.012
2. Konsistensi Peraturan	0.110	0.006	2. Konsistensi Peraturan	0.358	0.021
3. Pungli di luar Birokrasi	0.060	0.003	3. Pungutan Liar di Luar Birokrasi	0.296	0.018
4. Hubungan Eksekutif - Legislatif	0.050	0.003	4. Kecepatan Aparat Keamanan	0.137	0.008
<b>B. KEUANGAN DAERAH</b>	<b>0.140</b>	<b>0.043</b>			
1. % Anggaran Pembangunan - APBD	0.040	0.002			
2. Rasio Retribusi - Pajak	0.100	0.004			
<b>C. APARATUR</b>	<b>0.220</b>	<b>0.068</b>	<b>B. APARATUR &amp; PELAYANAN</b>	<b>0.184</b>	<b>0.028</b>
1. Pelaksanaan Wewenang	0.150	0.010	1. Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat	0.170	0.005
2. Pelayanan Birokrasi	0.070	0.005	2. Birokrasi Pelayanan Dunia Usaha	0.282	0.008
			3. Informasi Potensi Ekonomi Daerah	0.229	0.006
			4. Respon Pemda thd Permasalahan Dunia Usaha	0.318	0.009
<b>D. PERATURAN DAERAH</b>	<b>0.250</b>	<b>0.078</b>	<b>C. KEBIJAKAN DAERAH &amp; PERDA</b>	<b>0.230</b>	<b>0.035</b>
1. Peraturan Daerah	1.000	0.078	1. Kejelasan Tarif	0.267	0.009
			2. Kejelasan Prosedur	0.268	0.009
			3. Proses Perumusan Perda	0.174	0.006
			4. Kebijakan Ketenagakerjaan	0.291	0.003
			<b>D. KEPEMIMPINAN LOKAL</b>	<b>0.190</b>	<b>0.029</b>
			1. Kepemimpinan Kepala Daerah	0.187	0.005
			2. Inisiatif Kepala Daerah	0.454	0.013
			3. Hubungan Kepala Daerah dgn Pengusaha	0.359	0.010
<b>II. SOSIAL POLITIK DAN BUDAYA</b>	<b>0.260</b>	<b>0.260</b>	<b>II. KEAMANAN, POLITIK DAN SOSIAL BUDAYA</b>	<b>0.274</b>	<b>0.274</b>
<b>A. KEAMANAN</b>	<b>0.600</b>	<b>0.156</b>	<b>A. KEAMANAN</b>	<b>0.612</b>	<b>0.168</b>
1. Gangguan Usaha	0.200	0.031	1. Keamanan Usaha	0.487	0.082
2. Gangguan Masyarakat	0.120	0.019	2. Keamanan Masyarakat	0.354	0.059
3. Kecepatan Aparat	0.280	0.044	3. Dampak Unjuk Rasa	0.159	0.027
<b>B. SOSIAL POLITIK</b>	<b>0.270</b>	<b>0.070</b>	<b>B. POLITIK</b>	<b>0.176</b>	<b>0.048</b>
1. Stabilitas Politik	0.110	0.008	1. Hubungan Eksekutif - Legislatif	0.628	0.030
2. Konflik Masyarakat	0.070	0.005	2. Hubungan Antar Partai Politik	0.372	0.018
3. Unjuk Rasa	0.040	0.003			
4. Partisipasi Masyarakat	0.050	0.004			
<b>C. BUDAYA</b>	<b>0.130</b>	<b>0.034</b>	<b>C. SOSIAL BUDAYA</b>	<b>0.212</b>	<b>0.058</b>
1. Keterbukaan	0.030	0.001	1. Keterbukaan Masyarakat thd Dunia Usaha	0.277	0.016
2. Non Diskriminasi	0.020	0.001	2. Keterbukaan Masyarakat thd Tenaga Kerja dari Luar Daerah	0.173	0.010
3. Etos Kerja	0.050	0.002	3. Etos Kerja Masyarakat	0.188	0.011
4. Adat Istiadat	0.030	0.001	4. Kemudahan Memperoleh Hak Penguasaan Tanah	0.192	0.011
			5. Potensi Konflik di Masyarakat	0.170	0.010
<b>III. EKONOMI DAERAH</b>	<b>0.170</b>	<b>0.170</b>	<b>III. EKONOMI DAERAH</b>	<b>0.226</b>	<b>0.226</b>
<b>A. POTENSI EKONOMI</b>	<b>0.710</b>	<b>0.121</b>	<b>A. POTENSI EKONOMI</b>	<b>0.775</b>	<b>0.175</b>
1. PDRB Perkapita	0.290	0.035	1. PDRB Perkapita	0.479	0.084
2. Pertumbuhan Ekonomi	0.280	0.034	2. Pertumbuhan Ekonomi	0.340	0.060
3. Indeks Pembangunan Manusia	0.140	0.017	3. Indeks Kemahalan Konstruksi	0.182	0.032
<b>B. STRUKTUR EKONOMI</b>	<b>0.290</b>	<b>0.049</b>	<b>B. STRUKTUR EKONOMI</b>	<b>0.225</b>	<b>0.051</b>
1. Nilai Tambah Primer	0.130	0.006	1. Pertumbuhan Sektor Primer	0.285	0.014
2. Nilai Tambah Sekunder	0.090	0.004	2. Pertumbuhan Sektor Sekunder	0.309	0.016
3. Nilai Tambah Tersier	0.070	0.003	3. Pertumbuhan Sektor Tersier	0.406	0.021

Faktor - Variabel - Indikator 2002 - 2004	Lokal	Global
<b>IV. TENAGA KERJA &amp; PRODUKTIVITAS</b>	<b>0.130</b>	<b>0.130</b>
<b>A. KETERSEDIAAN TENAGA KERJA</b>	<b>0.350</b>	<b>0.046</b>
1. Tenaga Kerja Usia Produktif	0.080	0.004
2. Tenaga Kerja Pencari Kerja	0.190	0.009
3. Tenaga Kerja Manufaktur SLTP Berpengalaman	0.080	0.001
<b>B. PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>0.410</b>	<b>0.053</b>
1. Produktivitas Tenaga Kerja Manufaktur	1.000	0.053
<b>C. BIAYA TENAGA KERJA</b>	<b>0.240</b>	<b>0.031</b>
1. UMP / UMK	0.110	0.003
2. Upah Aktual	0.130	0.004
<b>V. INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>0.130</b>	<b>0.130</b>
<b>A. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>0.540</b>	<b>0.070</b>
1. Ketersediaan Jalan	0.110	0.008
2. Ketersediaan Pelabuhan Laut	0.110	0.008
3. Ketersediaan Pelabuhan Udara	0.050	0.004
4. Ketersediaan Sambungan Telepon	0.130	0.009
5. Ketersediaan Pasokan Listrik	0.140	0.010
<b>B. KUALITAS INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>0.460</b>	<b>0.060</b>
1. Kualitas Jalan Darat	0.070	0.004
2. Kualitas Pelabuhan Laut	0.070	0.004
3. Kualitas Pelabuhan Udara	0.060	0.004
4. Kualitas Sambungan Telepon	0.110	0.007
5. Kualitas Tegangan Listrik	0.150	0.009

Faktor - Variabel - Indikator 2005	Lokal	Global
<b>IV. TENAGA KERJA</b>	<b>0.183</b>	<b>0.183</b>
<b>A. KETERSEDIAAN TENAGA KERJA</b>	<b>0.267</b>	<b>0.049</b>
1. Tenaga Kerja Usia Produktif	0.715	0.035
2. Tenaga Kerja Pencari Kerja	0.285	0.014
<b>B. KUALITAS TENAGA KERJA</b>	<b>0.492</b>	<b>0.090</b>
1. Produktivitas Tenaga Kerja	0.631	0.057
2. Tenaga Kerja Minimal Berpendidikan SLTA	0.369	0.033
<b>C. BIAYA TENAGA KERJA</b>	<b>0.241</b>	<b>0.044</b>
1. Biaya Tenaga Kerja Formal (UMP / UMK)	0.505	0.022
2. Biaya Tenaga Kerja Aktual	0.495	0.022
<b>V. INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>0.167</b>	<b>0.167</b>
<b>A. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>0.573</b>	<b>0.096</b>
1. Ketersediaan Jalan	0.260	0.025
2. Ketersediaan Pelabuhan Laut	0.119	0.011
3. Ketersediaan Pelabuhan Udara	0.103	0.010
4. Ketersediaan Sambungan Telepon	0.213	0.020
5. Ketersediaan Pasokan Listrik	0.306	0.029
<b>B. KUALITAS INFRASTRUKTUR FISIK</b>	<b>0.427</b>	<b>0.071</b>
1. Kualitas Jalan Darat	0.288	0.021
2. Kualitas Pelabuhan Laut	0.117	0.008
3. Kualitas Pelabuhan Udara	0.114	0.008
4. Kualitas Sambungan Telepon	0.187	0.013
5. Kualitas Tegangan Listrik	0.293	0.021

#### Keterangan



: Indikator - Variabel yang dihapuskan

*Cetak Miring* : Indikator - Variabel Baru / Penyempurnaan



: Reposisi Pengelompokan Indikator ke Variabel - Faktor Lain

## Metodologi

---

### A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Fokus penelitian ini adalah daerah tingkat kabupaten dan kota. Hal ini berdasarkan UU No.22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No.32 tahun 2004 yang meletakkan titik tekan otonomi daerah pada daerah Kabupaten dan Kota. Oleh karenanya, otonomi daerah menempatkan daerah Kabupaten/Kota sebagai ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan. Desentralisasi kewenangan di bidang pemerintahan menempatkan kabupaten/kota untuk aktif dalam upaya penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Karenanya, penelitian ini mendefinisikan kabupaten/kota sebagai obyek pemeringkatan daya tarik investasi daerah.

Penentuan daerah-daerah yang diperingkatkan, pada prinsipnya dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Keterwakilan daerah berdasarkan struktur ekonomi (daerah Kabupaten dan Kota, daerah berbasis ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier, dan subsektor perekonomian – daerah manufaktur, perdagangan dan jasa, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan sebagainya);
2. Ketersediaan data indikator yang dibutuhkan dari masing-masing daerah untuk melakukan pemeringkatan;
3. Ketersebaran atau keterwakilan daerah di masing-masing bagian wilayah di Indonesia (wilayah Indonesia Bagian Barat, Tengah, dan Indonesia Bagian Timur);
4. Keterjangkauan atau aksesibilitas untuk melakukan penelitian lapangan;
5. Penambahan daerah yang diperingkat untuk tahun-tahun berikutnya, juga mempertimbangkan prinsip-prinsip pada butir 1 – 4 di atas.

Jumlah daerah kabupaten/kota yang diperingkat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pertama kali pemeringkatan dilakukan oleh KPPOD pada tahun 2001, jumlah daerah kabupaten/kota yang diperingkat adalah sebanyak 90 daerah (68 kabupaten, 22 kota di 21 propinsi). Pada tahun 2002, jumlah ini bertambah menjadi 134 daerah (97 kabupaten, 37 kota di 26 propinsi). Kemudian bertambah lagi menjadi 200 daerah (156 kabupaten, 44 kota di 29 propinsi pada tahun 2003. Selanjutnya, tahun 2004 daerah yang diperingkat menjadi 214 daerah (163 kabupaten, 51 kota di 29 propinsi). Jumlah ini bertambah terus pada Pemeringkatan Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun 2005 menjadi sebanyak 228 Kabupaten/Kota, terdiri dari 169 Kabupaten dan 59 Kota. Seluruhnya tersebar di 29 Propinsi di Indonesia. Jumlah ini merupakan 52,4% dari seluruh jumlah kabupaten/kota yang ada di



Indonesia, yang pada tahun 2005 berjumlah 435 kabupaten/Kota. Pada tahun 2005 ini ada 4 (empat) propinsi yang tidak terwakili, yakni Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Maluku, Maluku Utara dan Propinsi Sulawesi Barat. Daerah-daerah ini tidak masuk sebagai daerah penelitian dengan pertimbangan bahwa daerah-daerah ini merupakan daerah konflik. Sementara untuk Propinsi Sulawesi Barat karena merupakan daerah baru yang administrasi pemerintahannya belum terbentuk secara stabil.

## B. PENDEKATAN PENELITIAN

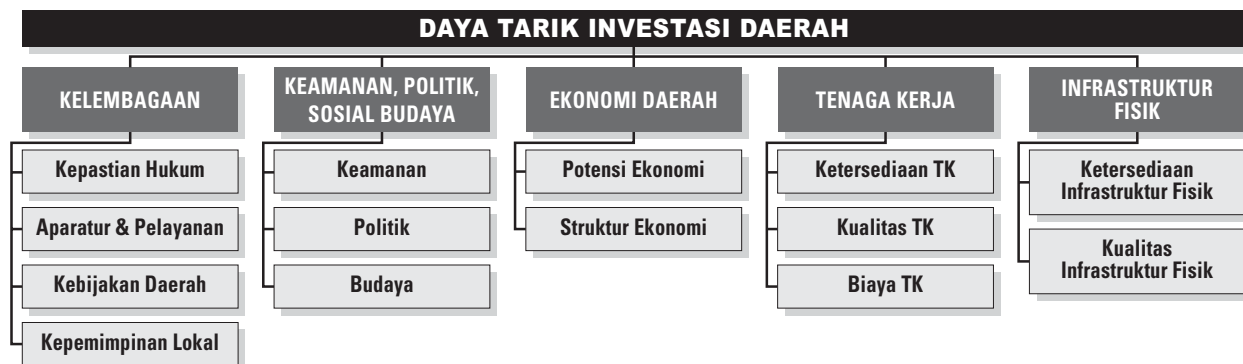
Pendekatan penelitian yang digunakan untuk pemeringkatan ini adalah *The Analytic Hierarchy Process (AHP)*. AHP merupakan salah satu model untuk pengambilan keputusan yang dapat membantu kerangka berpikir manusia. Peralatan utama dari model ini adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Pada dasarnya AHP adalah metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya; menempatkan kelompok-kelompok tersebut ke dalam suatu hirarki; menentukan dan memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif; dan akhirnya dengan suatu sintesa, ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi.

Dalam konteks pemeringkatan daya saing investasi daerah, selain untuk membangun hirarki pemeringkatan, pendekatan AHP juga digunakan untuk melakukan

pembobotan faktor, variabel, dan indikator yang mempengaruhi daya saing investasi suatu daerah. Prinsip metode AHP digunakan untuk memberikan bobot tiap faktor, variabel, dan indikator dengan perbandingan antar faktor, variabel, indikator satu dengan lainnya. Bobot yang lebih besar dari suatu indikator, menunjukkan suatu indikator tertentu mengandung nilai lebih penting dibandingkan indikator lainnya dalam menentukan daya saing investasi suatu daerah.

Berdasarkan identifikasi tingkat dan elemen-elemen untuk tujuan pemeringkatan daya saing daerah Kabupaten/Kota terhadap investasi, dari pemahaman studi literatur, opini para pelaku usaha, masukan para ahli dan hasil pemeringkatan yang dilakukan KPPOD sebelumnya; variabel-variabel yang mempengaruhi daya saing investasi daerah dapat dikelompokkan kedalam 5 (lima) faktor. Dengan menggunakan pendekatan AHP, ditentukan 5 faktor untuk menilai daya saing investasi suatu daerah yakni sebagai berikut: (1). Kelembagaan, (2). Sosial Politik, (3). Perekonomian Daerah, (4). Tenaga Kerja dan Produktivitas, dan (5). Infrastruktur Fisik.

Kelima Faktor tersebut diuraikan lagi ke dalam variabel-variabel (14 variabel) dan indikator-indikator (47 indikator). Berdasarkan pendekatan AHP, faktor, variabel, dan indikator disusun dalam sebuah hirarki fungsional. Hirarki fungsional yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan daya saing investasi daerah pada tahun 2005 adalah sebagai berikut :



Penjelasan dari setiap faktor, variabel, dan indikator secara lengkap berdasarkan hirarki tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No.	Faktor-Variabel-Indikator	Keterangan	Sumber Data
<b>A. FAKTOR KELEMBAGAAN</b>			
<b>1. Variabel Kepastian Hukum</b>			
	<p><b>1 Konsistensi Peraturan yang Mengatur Kegiatan Usaha :</b> Indikator ini digunakan mengukur apakah suatu peraturan/kebijakan daerah diterapkan secara konsisten atau tidak, dan apakah suatu perubahan kebijakan dapat diprediksi oleh para pelaku usaha.</p>	<p>1. Konsistensi Pelaksanaan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) (Tidak berubah-ubah), 2. Kesesuaian penetapan harga tanah (NJOP) dengan (berdasarkan) harga pasaran tanah.</p>	Data Primer / Persepsi Dunia Usaha
	<p><b>2 Penegakan Keputusan Peradilan:</b> Mengukur kepastian bahwa suatu keputusan peradilan dapat dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan. Indikator juga digunakan mengukur pengaruh dari pemda dan DPRD terhadap penegakan keputusan peradilan atas kasus sengketa hukum dunia usaha dengan pihak-pihak lainnya.</p>	<p>Konsistensi pemberlakuan dan pelaksanaan keputusan peradilan terkait kasus kasus bisnis: 1. Sengketa antar pengusaha dengan tenaga kerja menyangkut pengupahan, pesangon, dan sebagainya, 2. Sengketa pengusaha dengan masyarakat mengenai status kepemilikan tanah dan ganti rugi atas pembebasan tanah untuk kegiatan usaha, 3. Sengketa usaha.</p>	Data Primer / Persepsi Dunia Usaha
	<p><b>3 Pungli di luar Birokrasi terhadap Kegiatan Usaha:</b> Mengukur besarnya pungutan liar di luar birokrasi yang merupakan salah satu sumber ekonomi biaya tinggi yang membebani dunia usaha, serta untuk mengukur keseriusan pemda dalam mengatasi masalah pungutan liar yang berkembang di daerah. Dengan asumsi bahwa tingginya pungutan liar di luar birokrasi merupakan indikasi bahwa pemda tidak mampu atau kurang serius dalam mengatasi permasalahan yang membebani aktivitas usaha di daerahnya.</p>	<p>1. Rasio besarnya pungli diluar birokrasi terhadap biaya produksi, 2. Persepsi pelaku usaha terhadap upaya pemda dalam memberantas pungutan liar.</p>	Data Primer / Persepsi Dunia Usaha
	<p><b>4 Respon Pemda dan Aparat Keamanan Menanggulangi Gangguan Keamanan:</b> Mengukur jaminan keamanan yang diberikan oleh pemda kepada dunia usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. Respon pemerintah dan aparat keamanan dalam mengatasi gangguan keamanan yang dialami oleh para pelaku usaha di daerah. Melihat bagaimana pemda berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam mengatasi gangguan keamanan. Dari sisi aparat keamanan dilihat bagaimana respon aparat keamanan terhadap laporan kegiatan usaha maupun terhadap lingkungan masyarakat.</p>	<p>1. Kecepatan respon aparat keamanan terhadap laporan gangguan keamanan, 2. Koordinasi yang dilakukan antara pemda dan aparat keamanan dalam menanggulangi gangguan keamanan, 3. Upaya pemda mengurangi keberadaan gangguan keamanan yang ada di daerah.</p>	Data Primer / Persepsi Dunia Usaha
<b>2. Variabel Aparatur dan Pelayanan</b>			
	<p><b>5 Respon Pemda terhadap Persoalan Dunia Usaha:</b> Mengukur keseriusan pemda dalam merespon permasalahan yang dihadapi oleh dunia usaha, dan inisiatif pemda dalam menyelesaikan persoalan dunia usaha tanpa menunggu persoalan tersebut di keluhkan (disampaikan) kepada pemda.</p>	<p>1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemda dalam mengatasi persoalan-persoalan yang biasa dihadapi oleh dunia usaha, 2. Penyediaan lahan usaha, 3. Kemudahan perizinan, 4. Pemberantasan pungutan liar dalam birokrasi perizinan usaha, 5. Fasilitasi / Pengembangan UKM.</p>	Data Primer / Persepsi Dunia Usaha

No.	Faktor-Variabel-Indikator	Keterangan	Sumber Data
	<b>6 Birokrasi Pelayanan terhadap Dunia Usaha:</b> Mengukur kualitas birokrasi pelayanan terhadap usaha, khususnya dalam hal perizinan usaha.	1. Kejelasan informasi mengenai proses perizinan, 2. Kemudahan dan kejelasan prosedur per-izinan, 3. Biaya perizinan, 4. Ketepatan dan kecepatan waktu penyelesaian sebuah perizinan, 5. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat/ petugas pelayanan yakni dari keramahmataman, kecakapan, 6. Sistem pelayanan prima (Satu Atap) untuk perizinan usaha, 7. Pelayanan pajak /retribusi daerah, dan sebagainya.	Data Primer / Persepsi Dunia Usaha
	<b>7 Informasi Potensi Investasi Daerah:</b> Mengukur ketersediaan informasi mengenai potensi investasi di daerah yang dibutuhkan oleh investor, serta ketersediaan sarana-sarana yang digunakan untuk melakukan promosi potensi investasi daerah.	1. Ketersediaan informasi mengenai potensi investasi yang ada di daerah, 2. Sarana promosi investasi, 3. Inovasi promosi investasi.	Data Primer / Persepsi Dunia Usaha
	<b>8 Penyalahgunaan Wewenang Aparat Pemda:</b> Mengukur tingkat penyelewengan kewenangan pejabat dan aparat Pemda dalam berhubungan dengan dunia usaha.	1. Transparansi tender-tender proyek pemda, baik dari sisi informasi mengenai tender, maupun keadilan, 2. Obyektivitas dalam memutuskan pemenang tender-tender proyek pemda, 3. Juga dilihat pungutan / kutipan-kutipan untuk memenangkan sebuah tender oleh pengusaha, 4. Dilihat juga besarnya biaya-biaya ilegal dalam proses perizinan oleh petugas atau aparat pelaksana, 5. Tingkat korupsi aparat pelayanan publik.	Data Primer / Persepsi Dunia Usaha
<b>3. Variabel Kebijakan Daerah</b>			
	<b>9 Kejelasan Biaya / Tarif dalam Peraturan Daerah:</b> Mengukur kejelasan besaran biaya dan struktur tarif untuk menentukan besarnya pajak dan retribusi daerah sebagai kepastian dan kemudahan dalam menetapkan biaya-biaya resmi yang diatur dalam Perda/SK Kepala daerah, yang harus dikeluarkan oleh pengusaha dalam menjalankan aktivitasnya.	1. Dasar pengenaan tarif pungutan (pajak/retribusi), 2. Struktur tarif pungutan.	Analisis Perda bersumber dari: Data Sekunder Pemda & Depdagri
	<b>10 Kejelasan Prosedur Pelayanan dalam Peraturan Daerah:</b> Mengukur kejelasan prosedur pelayanan birokrasi terhadap dunia usaha yang tertuang dalam aturan formal berupa Perda atau SK Kepala Daerah.	1. Kejelasan prosedur dalam Perda, SK Kepala Daerah tentang Pajak; Retribusi dan Perizinan Usaha, 2. Kejelasan waktu penyelesaian perizinan, 3. Kejelasan Biaya	Analisis Perda bersumber dari: Data Sekunder / Pemda & Depdagri
	<b>11 Kebijakan Pemda tentang Mobilitas Tenaga Kerja/Penggunaan Tenaga Kerja:</b> Mengukur hambatan mobilitas tenaga kerja dan kebebasan untuk menggunakan tenaga kerja dari daerah-daerah lain di Indonesia akibat adanya kebijakan dari pemda.	1. Keberadaan ketentuan kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal (Proteksi terhadap tenaga kerja lokal), 2. Analisa Perda / SK Kepala Daerah tentang Ketenagakerjaan.	Data Primer / Persepsi Dunia Usaha
	<b>12 Kualitas proses perumusan kebijakan daerah (keterlibatan dunia usaha dalam perumusan kebijakan):</b> Mengukur keterbukaan birokrasi terhadap partisipasi masyarakat/dunia usaha dalam proses perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingannya (dunia usaha), serta peluang masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan sosialisasi kebijakan kepada kalangan pengusaha.	1. Keterlibatan dunia usaha dalam proses perumusan kebijakan daerah, 2. Kualitas dan media sosialisasi kebijakan pemerintah daerah.	Data Primer / Persepsi Dunia Usaha

No.	Faktor-Variabel-Indikator	Keterangan	Sumber Data
<b>4. Variabel Kepemimpinan Lokal</b>			
	<b>13 Kepemimpinan Kepala Daerah:</b> Mengukur pengaruh kepemimpinan kepala daerah dalam keteladanan terhadap bawahannya dalam hal kedisiplinan, serta upaya-upaya kepala daerah dalam mendisiplinkan / menindak bawahannya yang melakukan pelanggaran.	1. Kemampuan Kepala Daerah (Bupati / Walikota) menertibkan aparat pemda, 2. Sikap disiplin Kepala Daerah terhadap bawahannya, 3. Tindakan-tindakan yang diambil kepala daerah terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh bawahannya, 4. Upaya Kepala Daerah dalam memberantas praktik-praktik KKN dilingkungan Pemda.	Data Primer / Persepsi Dunia Usaha
	<b>14 Inisiatif Kepala Daerah dalam Pengembangan Iklim Investasi:</b> Mengukur inisiatif yang dilakukan oleh Kepala Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan tertuang dalam kebijakan daerah secara formal. Dilihat pula bagaimana inisiatif Kepala Daerah dalam menjalin komunikasi / dialog dengan pelaku usaha di daerah, dan peran Kepala Daerah dalam melakukan promosi peluang investasi (upaya menarik investasi) daerah.	1. Inisiatif untuk membuat kebijakan (formal/informal) dalam pengembangan iklim investasi, 2. Inisiatif dalam melakukan promosi investasi, 3. Inisiatif dalam menjalin/membuat forum komunikasi dengan kalangan pengusaha.	Data Primer / Persepsi Dunia Usaha
	<b>15 Hubungan Kepala Daerah dengan Pelaku Usaha:</b> Mengukur pengaruh hubungan antara Kepala Daerah dengan dunia usaha dalam rangka terciptanya iklim usaha yang sehat.	1. Kualitas hubungan dan dialog yang terjalin antara Kepala Daerah dengan para pelaku usaha, 2. Tingkat penyalahgunaan kewenangan dan jabatan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap dunia usaha.	Data Primer / Persepsi Dunia Usaha
<b>B. FAKTOR KEAMANAN, POLITIK &amp; SOSIAL BUDAYA</b>			
<b>1. Variabel Keamanan</b>			
	<b>16 Keamanan Kegiatan Usaha:</b> Mengukur rasa aman dan pengaruh tingkat kriminalitas terhadap terhadap aktivitas usaha mereka.	1. Intensitas gangguan keamanan terhadap aktivitas bisnis, 2. Rasa aman dari gangguan keamanan usaha.	Data Primer / Persepsi Dunia Usaha
	<b>17 Keamanan Masyarakat Lingkungan Sekitar Tempat Kegiatan Usaha:</b> Mengukur tingkat kriminalitas yang dialami masyarakat di lingkungan sekitar kegiatan usaha, yang secara tidak langsung mempengaruhi kenyamanan dalam melakukan kegiatan usaha.	1. Jenis-jenis gangguan kriminalitas di masyarakat, 2. Rata-rata kejadian / intensitas kriminalitas di lingkungan masyarakat, 3. Rasa aman masyarakat di lingkungan kegiatan usaha.	Data Primer / Persepsi Dunia Usaha
	<b>18 Dampak Kegiatan Unjuk Rasa di Daerah:</b> Mengukur pengaruh kegiatan unjuk rasa yang terjadi di daerah terhadap aktivitas usaha, baik unjuk rasa yang secara langsung ditujukan oleh kalangan dunia usaha (unjuk rasa buruh, masyarakat sekitar, dll), maupun kegiatan unjuk rasa yang tidak secara langsung ditujukan kepada kegiatan usaha, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian daerah (unjuk rasa mahasiswa, masyarakat dan lain-lain).	1. Banyaknya kegiatan unjuk rasa terhadap perusahaan yang mengganggu aktivitas usaha, 2. Banyaknya kegiatan unjuk rasa selain terhadap kegiatan usaha, yang mengganggu aktivitas usaha, 3. Pengaruh kegiatan usaha terhadap kegiatan usaha.	Data Primer / Persepsi Dunia Usaha
<b>2. Variabel Politik</b>			
	<b>19 Hubungan Eksekutif – Legislatif:</b> Mengukur intensitas konflik antara eksekutif (pemda) dan Legislatif (DPRD) dalam satu tahun terakhir, dan pengaruhnya terhadap pelayanan terhadap dunia usaha.	Pengaruh hubungan eksekutif dan legislatif di daerah terhadap pelayanan terhadap dunia usaha.	Data Primer / Persepsi Dunia Usaha
	<b>20 Hubungan antar parpol, ormas, dan lain sebagainya:</b> Mengukur pengaruh kualitas hubungan antar partai politik, organisasi sosial kemasyarakatan di daerah terhadap aktivitas usaha.	1. Intensitas konflik antar partai politik di parlemen. 2. Intensitas konflik politik antar organisasi kemasyarakatan.	Data Primer / Persepsi Dunia Usaha

No.	Faktor-Variabel-Indikator	Keterangan	Sumber Data
<b>3. Variabel Sosial Budaya</b>			
	<b>21 Sikap Keterbukaan Masyarakat terhadap Kegiatan Usaha:</b> Mengukur bagaimana sikap keterbukaan masyarakat terhadap suatu kegiatan usaha baru di daerah, dan keterbukaan masyarakat terhadap pelaku usaha yang datang dari luar daerahnya.	1. Resistensi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas usaha, 2. Pelaku usaha dari luar daerah:	Data Primer / Persepsi Dunia Usaha
	<b>22 Sikap Keterbukaan Masyarakat terhadap Tenaga Kerja dari Luar Daerah:</b> Mengukur bagaimana sikap keterbukaan masyarakat daerah terhadap penggunaan tenaga kerja dari luar daerah, serta keinginan masyarakat daerah untuk mendapat prioritas dan diproteksi dalam pasar tenaga kerja di daerah.	Resistensi masyarakat terhadap penggunaan tenaga kerja dari luar daerahnya: Keinginan masyarakat (tenaga kerja lokal) untuk diproteksi (mendapat prioritas) dalam persaingan di pasar tenaga kerja.	Data Primer / Persepsi Dunia Usaha
	<b>23 Etos Kerja Masyarakat Daerah:</b> Mengukur profesionalitas masyarakat (tenaga kerja dari daerah) yang dilihat dari kedisipinan waktu dan semangat bekerja, juga dari keterampilan dan kecakapan dalam menjalankan pekerjaan. Selain itu juga mengukur daya dukung penduduk, masyarakat, pelaku usaha, dan pekerja di daerah yang menunjukkan semangat kerja keras dan dapat bersaing secara sehat.	Semangat bekerja keras, dan bersaing secara sehat dari masyarakat daerah: Profesionalitas tenaga kerja (masyarakat) di daerah.	Data Primer / Persepsi Dunia Usaha
	<b>24 Kemudahan Memperoleh Hak atas Penguasaan Tanah di Daerah:</b> Mengukur hambatan dan kemudahan dalam memperoleh hak penggunaan/penguasaan lahan untuk kegiatan usaha, baik hambatan yang ditimbulkan oleh persoalan keberadaan tanah ulayat/adat di daerah tersebut, maupun yang ditimbulkan oleh faktor diluar keberadaan tanah ulayat serta upaya pemda dalam masalah penyediaan lahan untuk kegiatan usaha, baik yang ditimbulkan oleh keberadaan tanah ulayat, maupun karena faktor lainnya terkait dengan masyarakat.	Keberadaan tanah ulayat, yang menjadi hambatan penguasaan tanah akibat ketentuan tanah adat: Hambatan status kepemilikan / hak pengelolaan atas tanah / lahan usaha yang ditimbulkan oleh ketentuan tanah adat / tanah ulayat (nilai budaya lokal)	Data Primer / Persepsi Dunia Usaha
	<b>25 Potensi Konflik antar Anggota Masyarakat:</b> Mengukur apakah struktur sosial masyarakat di daerah dilihat dari segmentasi agama, ras, dan distribusi pendapatan yang berpotensi memicu terjadinya konflik sosial. Dilihat juga apakah konflik sosial yang terjadi di daerah berpengaruh terhadap aktivitas usaha di daerah yang bersangkutan.	Tingkat kesenjangan sosial ekonomi masyarakat: 1. Struktur sosial masyarakat, 2. Distribusi pendapatan berdasarkan latar belakang sosial masyarakat (etnis, kelas sosial, dan sebagainya).	Data Primer / Persepsi Dunia Usaha
<b>C. FAKTOR EKONOMI DAERAH</b>			
<b>1. Variabel Potensi Ekonomi (Input)</b>			
	<b>26 Daya Beli Masyarakat (PDRB Perkapita):</b> Mengukur daya beli / kemampuan berkonsumsi penduduk di daerah, yang merupakan pasar lokal dari output kegiatan usaha	PDRB Perkapita: PDRB Perkapita Kab/Kota tahun terakhir (2004), atau PDRB ADH Berlaku & Jumlah Penduduk	Data Sekunder dari: BPS Daerah/BPS Pusat (PDRB) Tahun 2004
	<b>27 Pertumbuhan Ekonomi Daerah:</b> Mengukur proyeksi perkembangan perekonomian daerah untuk prospek kegiatan usaha dalam jangka panjang.	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi tiga tahun terakhir: PDRB Kab/Kota Atas Dasar Harga Konstan selama 3 Tahun Terakhir	Data Sekunder dari: BPS Daerah/BPS Pusat (PDRB Atas dasar harga Konstan Tahun 2000-2004)

No.	Faktor-Variabel-Indikator	Keterangan	Sumber Data
	<b>28 Tingkat Kemahalan Investasi:</b> Mengukur tingkat kesulitan dan kemahalan untuk melakukan kegiatan usaha di daerah yang diukur dengan Indeks Kemahalan Harga Konstruksi.	Indeks Harga Kemahalan Konstruksi: Indeks Kemahalan Konstruksi	Data Sekunder dari BPS Daerah /BPS Pusat
<b>2. Variabel Struktur Ekonomi (Output)</b>			
	<b>29 Pertumbuhan Kontribusi Ekonomi Sektor Primer (Agrikultur):</b> Mengukur arah perkembangan perekonomian dilihat dari pertumbuhan sektor primer. Arah pergeseran peran sektoral terhadap perekonomian suatu daerah adalah dari sektor primer ke arah tersier.	Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder: Pertumbuhan PDRB Sektor Primer : PDRB Kab/ Kota Atas Dasar Harga Konstan selama 3 Tahun Terakhir	Data Sekunder dari: BPS Daerah/BPS Pusat (PDRB ADH Konstan) Tahun 2001-2004
	<b>30 Pertumbuhan Ekonomi Sektor Sekunder (Industri Pengolahan / Manufaktur):</b> Mengukur tingkat perkembangan perekonomian daerah yang bergeser dari peran sektor primer menuju yang lebih modern, dengan digantikannya sektor primer menuju sektor moderen yakni pada peningkatan peran sektor sekunder (industrialisasi).	Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier: PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan selama 3 Tahun Terakhir	Data Sekunder dari: BPS Daerah/BPS Pusat (PDRB ADH Konstan) Tahun 2001-2004
	<b>31 Pertumbuhan Ekonomi Sektor Tersier (Perdagangan, Jasa, Keuangan, dll):</b> Mengukur tingkat perkembangan perekonomian daerah yang mengarah pada sektor yang lebih modern lagi. Peningkatan yang pesat pada sektor tersier menunjukkan bahwa perkembangan daerah tersebut telah mencapai tahapan modernisasi	PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan selama 3 Tahun Terakhir	Data Sekunder dari: BPS Daerah/BPS Pusat (PDRB ADH Konstan) Tahun 2001-2004
<b>D. FAKTOR KETENAGAKERJAAN</b>			
<b>1. Variabel Ketersediaan Tenaga Kerja</b>			
	<b>32 Ketersediaan Tenaga Kerja Pencari Kerja:</b> Mengukur ketersediaan tenaga kerja yang dilihat dari jumlah tenaga kerja dari angkatan kerja yang belum tersalurkan dalam lapangan pekerjaan.	Rasio Penduduk Pencari Kerja terhadap Penduduk Angkatan Kerja: Penduduk Umur 15 Tahun Keatas menurut Kegiatan Utama	Data Sekunder dari: BPS Daerah/BPS Pusat (Sakernas)
	<b>33 Ketersediaan Tenaga Kerja Usia Produktif:</b> Mengukur ketersediaan tenaga kerja yang berasal dari penduduk yang berusia produktif.	Diukur dari rasio antara jumlah penduduk usia produktif (15-60th) terhadap jumlah penduduk di daerah secara keseluruhan	Data Sekunder dari: BPS Daerah/BPS Pusat (Kependudukan)
<b>2. Variabel Kualitas Tenaga Kerja</b>			
	<b>34 Ketersediaan Tenaga Kerja Terdidik.:</b> Mengukur kualitas tenaga kerja di daerah dilihat dari tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan berpengaruh pada tingkat keterampilan dan kemampuan dalam menyerap teknologi modern sebagai tuntutan lapangan kerja modern yang lebih efisien dan profesional.	Rasio tenaga tenaga kerja berpendidikan minimal SLTA dibandingkan dengan Total Tenaga Kerja yang ada di daerah.	Data Sekunder dari: BPS Daerah/BPS Pusat (Sakernas)
	<b>35 Produktivitas Tenaga Kerja:</b> Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja di daerah sebagai daya dukung kegiatan ekonomi yang produktif.	Rasio antara Jumlah Tenaga Kerja Sektor Manufaktur terhadap Kontribusi PDRB Sektor Manufaktur.	Data Sekunder dari: BPS Daerah/BPS Pusat (PDRB ADH Berlaku & Sakernas)
<b>3. Variabel Biaya Tenaga Kerja</b>			
	<b>36 Biaya Tenaga Kerja berdasarkan Aturan Formal:</b> Mengukur tingkat kompensasi untuk pekerja secara keseluruhan berdasarkan aturan formal sebagai biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha	Tingkat Upah Tenaga Kerja Umur 15 Tahun Keatas Berdasarkan Lapangan Kerja Utama	Data Sekunder dari: BPS Daerah/BPS Pusat (Sakernas)

No.	Faktor-Variabel-Indikator	Keterangan	Sumber Data
	<b>37 Biaya Tenaga Kerja Aktual:</b> Mengukur biaya tenaga kerja berdasarkan sektor-sektor usaha yang sesungguhnya akan dikeluarkan oleh pengusaha. Diukur dari rata-rata upah tenaga kerja berbagai sektor yang ada di daerah.	Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/kota Tahun Terakhir	Data Sekunder dari: APINDO (UMP/UMK)
<b>E. FAKTOR INFRASTRUKTUR</b>			
<b>1. Variabel Ketersediaan Infrastruktur</b>			
	<b>38 Ketersediaan Jalan (dan/atau Alternatif Jalan Darat = Sungai):</b> Mengukur ketersediaan jalan darat yang dapat menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi di daerah baik intra daerah sendiri maupun ke daerah lainnya. Selain jalan darat juga dilihat alternatif sarana transportasi sungai.	Rasio Panjang Jalan terhadap Luas Wilayah: 1. Data Panjang Jalan di Kab/Kota; 2. Data Luas Wilayah Kab/Kota	Data Sekunder dari: BPS Daerah-BPS Pusat Atau data Primer Persepsi Dunia Usaha
	<b>39 Ketersediaan Pelabuhan Laut:</b> Mengukur ketersediaan Pelabuhan laut sebagai penunjang kegiatan ekonomi yang memperlancar kegiatan perdagangan dengan daerah-daerah lain maupun ke manca negara.	Keberadaan Pelabuhan Laut dan Tipe Pelabuhan Laut: 1. Jarak dan waktu tempuh ke Pelabuhan Laut Terdekat, 2. Daftar Pelabuhan Laut dan Tipe Pelabuhan.	Data Sekunder dari: BPS Daerah-BPS Pusat, Dephub; Atau data Primer Persepsi Dunia Usaha
	<b>40 Ketersediaan Pelabuhan Udara:</b> Mengukur ketersediaan pelabuhan udara sebagai penunjang kegiatan ekonomi yang memperlancar hubungan perekonomian dan bisnis dengan daerah-daerah pusat kegiatan ekonomi lainnya dan ke manca negara.	Keberadaan Pelabuhan Udara dan Tipe Pelabuhan Udara: 1. Jarak dan waktu tempuh ke Pelabuhan Udara Terdekat, 2. Daftar Pelabuhan Udara dan Tipe Pelabuhan Udara.	Data Sekunder dari: BPS Daerah-BPS Pusat, Dephub; Atau data Primer Persepsi Dunia Usaha
	<b>41 Ketersediaan Saluran (sambungan) Telpon:</b> Mengukur ketersediaan sarana komunikasi sebagai penunjang kegiatan bisnis.	Rasio Antara Telpon Tersambung terhadap Kapasitas Terpasang: 1. Jumlah Kapasitas Terpasang, 2. Jumlah Sambungan Terpakai (Pelanggan Telpon).	Data Primer Persepsi Pelaku Usaha
	<b>42 Ketersediaan Saluran (sambungan) Listrik:</b> Mengukur ketersediaan energi listrik sebagai sumber energi untuk kegiatan usaha produktif.	Rasio Antara Listrik Terpasang terhadap Kapasitas Terpasang di Daerah: 1. Jumlah Kapasitas Terpasang, 2. Jumlah Sambungan Terpakai (Pelanggan Listrik)	Data Primer Persepsi Pelaku Usaha
<b>2. Variabel Kualitas Infrastruktur</b>			
	<b>43 Kualitas Jalan (dan/atau Alternatif Jalan Darat = Sungai):</b> Mengukur kualitas dan daya dukung jalan darat dan sungai yang tersedia di daerah yang akan memperlancar kegiatan usaha.	Rasio Panjang Jalan Berkualitas Baik dan Sedang dengan Total Panjang Jalan: 1. Data Panjang Jalan Menurut Kualitas, 2. dan Jenis Permukaan.	Data Sekunder dari: BPS Daerah-BPS Pusat Atau data Primer Persepsi Dunia Usaha
	<b>44 Akses &amp; Tipe Pelabuhan Laut:</b> Mengukur kemudahan mencapai pelabuhan laut serta kemampuan/kapasitas pelabuhan laut untuk melayani kegiatan perkonomanian yang semakin besar.	Jarak dan waktu tempuh ke Pelabuhan Laut Terdekat, atau Jumlah Pelayaran (Bongkar Muat Barang) Perbulan di Pelabuhan laut Terdekat: 1. Jarak Ibukota Kab/Kota ke Pelabuhan Laut, 2. Jumlah Pelayaran Kapal (Bongkar dan Muat Barang Perbulan/Tahun di Pelabuhan Laut).	Data Primer Persepsi Pelaku Usaha
	<b>45 Akses &amp; Tipe Pelabuhan Udara:</b> Mengukur kemudahan mencapai pelabuhan udara dan kelancaran penerbangan yang memperlancar hubungan dengan daerah-daerah yang menjadi pusat kegiatan bisnis lainnya.	Jarak dan waktu tempuh ke Pelabuhan Udara Terdekat; atau Rata-rata Penerbangan Pesawat Udara Perbulan/Pertahun: 1. Jarak Ibukota Kab/Kota ke Pelabuhan Udara, 2. Tipe Pelabuhan Udara, 3. Rata-Rata Keberangkatan dan Kedarangan Pesawat Perbulan/Tahun.	Data Primer Persepsi Pelaku Usaha

No.	Faktor-Variabel-Indikator	Keterangan	Sumber Data
	<b>46 Kualitas Sambungan Telpon:</b> Mengukur kualitas kelancaran berkomunikasi ke berbagai pusat kegiatan bisnis, kualitas sambungan komunikasi telepon yang tersedia di daerah.	Rata-rata intensitas Gangguan Telepon per bulan; Kemudahan Mengakses Telpon: 1. Intensitas gangguan telpon, 2. Kemudahan melakukan sambungan telpon.	Data Primer Persepsi Pelaku Usaha
	<b>47 Kualitas Pasokan Listrik:</b> Mengukur kualitas suplai listrik yang tersedia di daerah, yang dapat memenuhi kebutuhan sumber energi yang baik bagi kegiatan usaha.	Rata-rata Intensitas Gangguan Listrik Perbulan: 1. Rata-rata lamanya pemadaman listrik perbulan, 2. Kualitas tegangan listrik (stabil tidaknya) sambungan tenaga listrik di daerah.	Data Primer Persepsi Pelaku Usaha

## C. DATA INDIKATOR PEMERINGKATAN

### C.1. Jenis Data

Data-data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan gabungan antara data primer berupa data kualitatif yang diperoleh dengan melakukan survei lapangan kepada nara sumber pelaku usaha di daerah dan data sekunder berupa data-data statistik daerah yang ada.

#### a. Data Primer

Data primer terdiri dari dua macam, yakni:

- Data primer berupa bobot faktor, variabel, dan indikator yang mempengaruhi daya saing terhadap investasi, berdasarkan persepsi dunia usaha,
- Data primer berupa persepsi dunia usaha berkaitan dengan kondisi indikator-indikator daya saing investasi suatu daerah. Data primer persepsi dunia usaha ini untuk memperoleh nilai intensitas indikator-indikator daya saing investasi suatu daerah.

#### b. Data Sekunder

Data-data statistik daerah (*existing statistic data*) diantaranya adalah Perda, Statistik Ekonomi, Ketenagakerjaan, Infrastruktur, Demografi dan sebagainya. Data dan jenis data yang digunakan untuk pemeringkatan tahun 2005 seperti terlihat pada tabel di atas.

### C.2. Teknik Pengumpulan Data

a. *Pengumpulan data yang berupa data-data statistik daerah yang ada (data sekunder)* dilakukan dengan

mengumpulkan data-data statistik daerah yang berasal dari berbagai laporan yang diberikan oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah (seperti BPS, BI, Depdagri, Pemda, KADIN, APINDO dll), serta berbagai laporan penelitian sebelumnya.

b. *Data Bobot Faktor, Variabel, dan Indikator.* Bobot pengaruh masing-masing faktor, variabel, dan indikator terhadap daya saing investasi suatu daerah adalah bervariasi / berbeda. Pembobotan faktor, variabel, dan indikator pemeringkatan dilakukan dengan menggunakan metode *The Analytic Hierarchy Process* (AHP). Hal ini dimaksudkan untuk menentukan bobot pengaruh tiap variabel dan indikator tersebut dalam membentuk daya saing investasi daerah. Data pembobotan masing-masing faktor, variabel dan indikator dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden (*face to face interviews*) dengan menggunakan bantuan kuesioner *The Analytic Hierarchy Process* (AHP) kepada 2 sampai dengan 3 orang responden pengusaha daerah di setiap daerah penelitian dari 43 wilayah penelitian daerah penelitian.

c. *Pengumpulan data persepsi dunia usaha tentang daya saing investasi daerah.* Data persepsi dunia usaha diperoleh dengan metode survei wawancara langsung (*face to face interviews*). Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dirumuskan secara terstruktur dan sistematis. Responden untuk penelitian ini adalah para pelaku usaha di setiap



daerah penelitian yang representatif sehingga memungkinkan data yang diisi dalam kuesioner merupakan suatu data yang telah mempunyai nilai obyektivitas yang tinggi sesuai dengan pengetahuan/pengertian/kepercayaan individu tentang obyek sikap (*kognitif*) karena pengalaman, lamanya seseorang mengalami aktivitas (bekerja) atau menghadapi persoalan yang diteliti.

### C.3. Teknik Pengambilan Sampel Responden:

#### a. Sampling Responden Pembobotan (AHP)

Berdasarkan pendekatan AHP, yang menjadi narasumber untuk melakukan pembobotan adalah seorang ahli (*expert*). Yang dimaksud dengan *expert* disini tidak harus seseorang yang pakar pada satu bidang keilmuan tertentu, melainkan orang yang tahu betul akan permasalahan yang hendak diteliti. Dalam konteks pemeringkatan daya saing investasi daerah, *expert* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang-orang yang paham benar mengenai seluk beluk kegiatan investasi, dan sering terlibat atau berpengalaman dalam melakukan kegiatan investasi. Dengan demikian, mereka dapat memberikan pendapat mengenai pertimbangan-pertimbangan yang melandasi seorang investor mau menanamkan modalnya di suatu daerah. Untuk itu, pelaku usaha merupakan orang yang tepat untuk dijadikan responden dalam menentukan bobot pengaruh faktor, variabel, dan indikator yang digunakan untuk pemeringkatan daya saing investasi daerah. Jumlah responden menjadi tidak penting dalam menentukan bobot. Yang lebih penting adalah kualitas atau pengetahuan responden akan permasalahan yang dimaksud. Untuk itu, pengambilan sampel responden dilakukan secara purposif, dengan melibatkan para pelaku usaha yang berpengalaman

dalam hal melakukan kegiatan investasi. Karena kegiatan usaha mencakup beberapa sektor, maka pelaku usaha yang menjadi responden untuk pembobotan ini diwakili juga oleh para pelaku dari berbagai sektor kegiatan usaha.

#### b. Sampling Responden Intensitas Pemeringkatan

Berbeda dengan penelitian tahun-tahun sebelumnya (2001 – 2004) yang menggunakan metode *purposive sampling*, untuk penelitian tahun 2005 dilakukan dengan teknik pengambilan sampling secara *Random Sistematis* atau yang juga sering disebut dengan *Random Sistematis Sampling*. Sampling dengan menggunakan metodologi ini adalah sampel yang diperoleh dari suatu daftar semua unit dalam populasi sesuai dengan suatu pola pengambilan yang sistematis yang telah ditentukan sebelumnya. Alat bantu yang sering digunakan (dan juga digunakan untuk penelitian ini) adalah memilih sampel dengan interval atau selang yang teratur dari daftar semua unit dalam populasi. Populasi dari obyek penelitian ini adalah perusahaan/pengusaha yang ada di suatu daerah penelitian (kabupaten/kota). Untuk itu diperlukan adanya daftar seluruh perusahaan/pengusaha yang ada di daerah penelitian. Tahapan-tahapan dalam pengambilan *sampling* responden dengan cara sistematis acak adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari dan membuat daftar pengusaha/perusahaan yang ada di daerah. Daftar pengusaha/perusahaan di daerah dapat diperoleh dari instansi pemerintah, dan/atau dari lembaga-lembaga (asosiasi pengusaha yang ada di daerah : KADINDA; APINDO; dan sebagainya), dan ditambah dengan database responden KPPOD pada penelitian tahun-tahun sebelumnya (2001-2004).

- 2) Menggabungkan seluruh daftar responden yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Gabungan dari seluruh daftar perusahaan/pengusaha yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dianggap sebagai populasi pengusaha/perusahaan yang ada di daerah yang bersangkutan.
- 3) Menentukan selang/interval sebagai dasar pengambilan sampel. Selang interval diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$S = N/X$$

dimana;

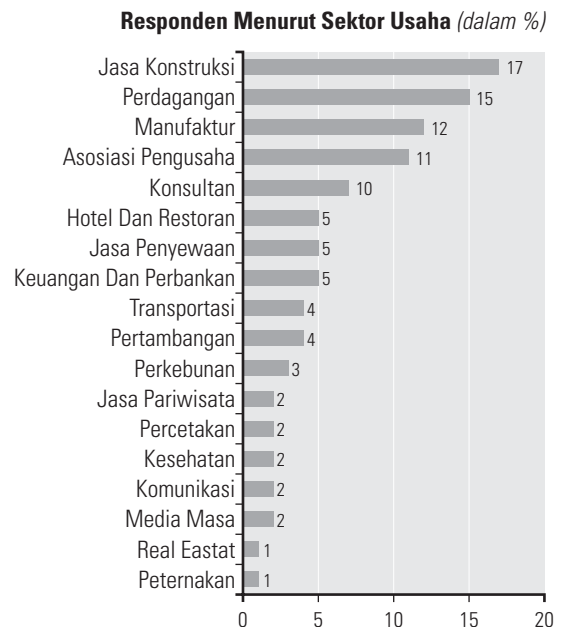
- S: Selang/Interval untuk menentukan responden yang akan dipilih/diwawancarai
- N: Jumlah populasi perusahaan/perusahaan yang ada di daerah. Adalah gabungan seluruh daftar pengusaha/perusahaan yang diperoleh dari berbagai sumber (instansi pemerintah, lembaga lainnya di daerah, KPPOD).
- X: Jumlah/Besarnya Sampel responden yang akan diwawancarai. Besarnya sampel minimal 30 dan maksimal 40.
- 4) Menentukan dan memilih pengusaha/perusahaan sebagai sampel/responden. Dilakukan dengan memilih perusahaan/pelaku usaha berjumlah 40 dari daftar perusahaan/pengusaha (point 2) yang ada di setiap daerah dengan interval/selang yang teratur dalam daftar tersebut.

#### D. PROFIL RESPONDEN

Penelitian lapangan dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan yakni dari September s/d awal Nopember 2005. Ada dua kelompok responden yang diwawancarai untuk pemeringkatan tahun 2005.

#### 1. Profile Responden AHP

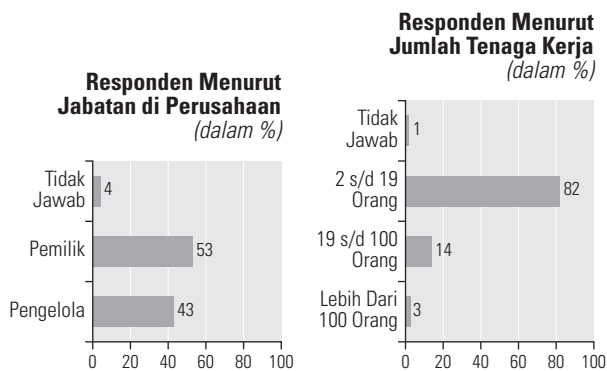
Kelompok pertama adalah responden untuk memperoleh bobot faktor, variabel dan indikator pemeringkatan, yang kemudian disebut dengan responden AHP. Jumlah responden AHP secara keseluruhan berjumlah 130 orang, yang tersebar di 43 wilayah penelitian, yang tersebar di 25 propinsi di Indonesia. Responden AHP terdiri dari para pelaku usaha yang bergerak di berbagai sektor usaha. Profil responden AHP adalah sebagai terlihat pada tabel di bawah ini.



#### 2. Responden Intensitas Indikator Rating

Kelompok responden kedua adalah responden yang dimintakan data mengenai intensitas indikator daya saing investasi daerah. Dalam pemeringkatan tahun 2005, jumlah responden yang berhasil diwawancarai adalah sejumlah 8.727 pelaku usaha (baik pemilik usaha maupun pengelola usaha level manajer) yang tersebar di 228 daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia, atau rata-rata 38 responden untuk setiap daerah. Pengumpulan data melibatkan kurang lebih 276 Pewawancara yang dikoordinir oleh 43 Koordinator Penelitian Lapangan.

Gambaran responden yang berhasil diwawancarai adalah sebagai berikut :

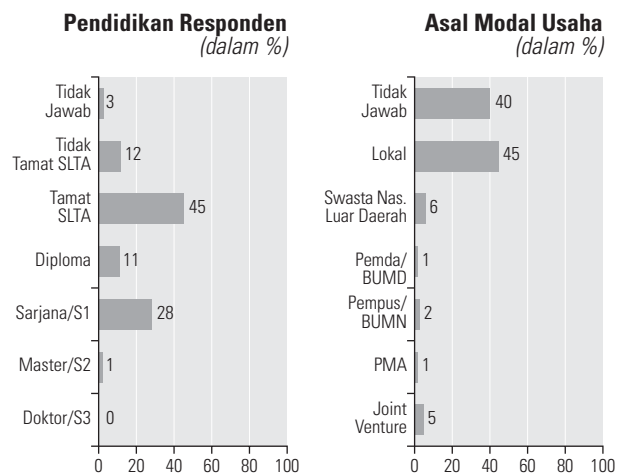


Dilihat dari komposisi antara pemilik usaha dan pengelola usaha, responden yang terwakili untuk pemeringkatan tahun 2005 cukup seimbang yaitu 52.72% pemilik usaha dan 43.44% pengelola usaha level manajerial. Lebih besarnya rasio pemilik usaha yang berhasil diwawancarai dalam penelitian ini karena sebagian besar perusahaan yang ada di daerah didominasi oleh skala usaha mikro dan UKM yang umumnya tidak memiliki hirarki manajemen yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan skala besar. Sehingga, pemilik usaha sekaligus merangkap sebagai pengelola usaha. Secara teknis, kelompok ini lebih mudah untuk diwawancarai. Banyaknya pelaku usaha dalam arti pemilik usaha yang langsung menjadi responden untuk pemeringkatan ini juga mengindikasikan bahwa mereka memiliki pengetahuan responden akan seluk beluk usaha dan situasi iklim investasi daerah yang cukup baik.

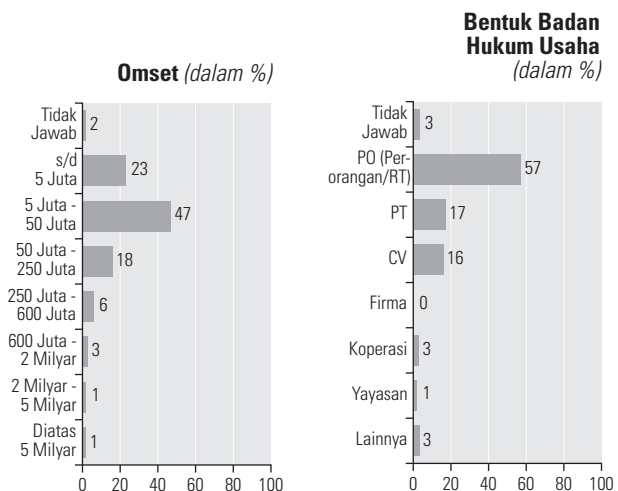
Skala usaha dilihat dari jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di perusahaan didominasi oleh skala usaha kecil dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang yaitu sebanyak 82% perusahaan (responden). Sementara untuk perusahaan skala menengah dan besar hanya berjumlah 17.32% (14.13% perusahaan dengan jumlah tenaga kerja antara 20 sampai dengan 100 orang, dan 3.19% perusahaan skala besar dengan jumlah tenaga kerja diatas 100 orang).

Dilihat dari tingkat pendidikan responden, terlihat bahwa responden untuk penelitian ini memiliki pendidikan yang cukup baik yakni

43.38% diantaranya lulus pendidikan tinggi dari jenjang diploma hingga S3 (Doktor). Komposisi yang sedikit lebih besar adalah responden dengan pendidikan lulus SLTA sederajat yakni sebesar 44.68% atau 3,899 orang pengusaha. Mereka yang tidak menamatkan pendidikan SLTA hanya sebesar 12.01% responden. Komposisi responden berdasarkan asal modal usaha didominasi oleh pelaku usaha lokal, yakni sebesar 45.36% dari total responden. Namun sayangnya cukup banyak atau sekitar 40,63% responden yang tidak bersedia menyebutkan dari mana asal modal usaha perusahaan mereka.



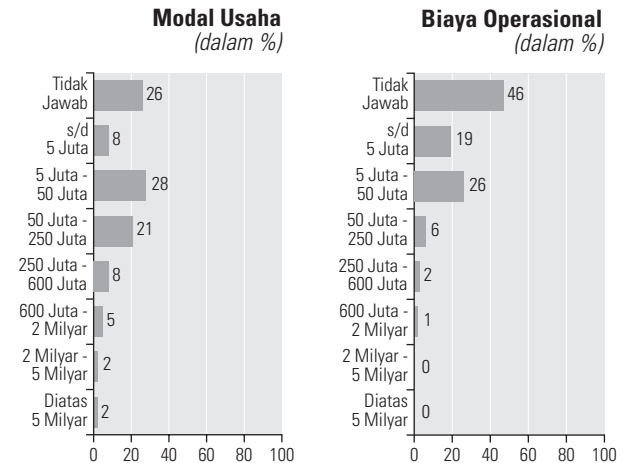
Dilihat dari bentuk badan hukum usaha, responden penelitian didominasi oleh Perusahaan Perorangan (PO) atau Usaha Rumah Tangga, yakni sebanyak 56.9% responden. Badan hukum perusahaan terbanyak ke dua adalah Perseroan Terbatas (PT), kemudian diikuti dengan CV sebanyak



16.17%, dan paling sedikit adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum Firma.

Kesulitan terbesar dalam mendapatkan informasi skala usaha responden adalah berdasarkan modal usaha dan biaya operasional perusahaan. Sebagian besar responden beranggapan bahwa modal usaha perusahaan dan biaya operasional merupakan kerahasiaan perusahaan, sehingga banyak diantara mereka yang tidak bersedia memberikan informasi mengenai hal ini. Untuk modal usaha, sebanyak 26.11% responden tidak bersedia menjawab, sementara untuk biaya operasional lebih banyak lagi responden yang tidak bersedia menjawab, yakni sebesar 45.57% diantaranya.

Dilihat dari perputaran usaha, perusahaan-perusahaan yang diperingkat juga tetap didominasi oleh perusahaan-perusahaan berskala kecil dan menengah, yakni dengan modal usaha antara Rp.5 juta hingga Rp.250



juta. Komposisi responden berdasarkan jumlah omset usaha, modal usaha, serta biaya operasional tersebut mendekati komposisi perusahaan-perusahaan di Indonesia secara nasional yang memang didominasi oleh perusahaan kecil dan menengah.

## Formula Penghitungan Bobot

---

Formulasi penghitungan skor Daya Saing Investasi Daerah oleh KPPOD dilakukan dalam kerangka kerja yang menggunakan pendekatan AHP. Kerangka kerja pendekatan AHP ini dilakukan dengan menguraikan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai ke dalam elemen-elemen pembentuknya secara sistematis dengan cara menyusun suatu hirarki fungsional. Sasaran yang hendak dicapai tersebut dipengaruhi atau dibentuk oleh beberapa faktor. Setiap faktor terdiri dari beberapa variabel, dan setiap variabel terukur dalam beberapa indikator. Dalam hal ini, indikator merupakan elemen terkecil yang berpengaruh terhadap tujuan yang hendak dicapai.

Sasaran atau tujuan dari studi ini adalah memperoleh indeks atau skor daya saing investasi suatu daerah. Dengan pendekatan AHP, elemen-elemen pembentuk daya saing investasi daerah tersebut disusun secara berurutan dari level paling atas hingga paling bawah (terkecil) dalam suatu bentuk hirarki fungsional. Level paling atas adalah tujuan yang hendak dicapai dalam studi ini, yakni Indeks Daya Saing Investasi Daerah. Level dibawahnya (level 2) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing investasi daerah (5 faktor), dan level ke-3 dibawah faktor adalah variabel (14 variabel), dan dibawah variabel pada level paling bawah (ke-4) adalah indikator-indikator (47 indikator) yang membentuk daya saing investasi daerah. Hirarki yang tersusun ini adalah yang dijadikan pedoman dalam mengukur indeks

daya saing investasi daerah. Untuk lebih jelasnya lihat *Hirarki Daya Saing Investasi Daerah*.

### A. BOBOT FAKTOR, VARIABEL DAN INDIKATOR

Setelah hirarki fungsional daya saing investasi daerah terbentuk, langkah selanjutnya adalah menentukan bobot pengaruh setiap elemen terhadap hirarki di atasnya (setiap elemen pada suatu level terhadap level hirarki yang lebih tinggi). Pertama kali yang dilakukan adalah dengan membobot pengaruh setiap faktor terhadap sasaran, setelah itu membobot pengaruh setiap variabel terhadap faktor, dan terakhir adalah membobot setiap indikator terhadap variabel.

Dalam pendekatan AHP ini dikenal dua jenis bobot setiap elemen, yakni bobot lokal dan bobot global. **Bobot lokal** adalah bobot pengaruh setiap elemen dalam satu level terhadap level di atasnya. Yaitu bobot pengaruh faktor (level ke-2) terhadap sasaran yang hendak dicapai (level ke-1), bobot variabel (level ke-3) terhadap faktornya (level ke-2), dan bobot indikator (level ke-4) terhadap variabelnya (level ke-3). **Bobot global** adalah bobot pengaruh setiap indikator, atau variabel terhadap tujuan (Indeks Daya Saing Investasi Daerah). Untuk faktor tidak dikenal bobot lokal dan bobot global, karena faktor berada pada level ke-2 sehingga bobot lokal faktor sama dengan bobot globalnya).

Bobot global variabel diperoleh dari hasil perkalian antara bobot lokal suatu variabel dengan bobot faktornya, sementara bobot lokal indikator diperoleh dari hasil perkalian setiap bobot lokal indikator dengan bobot lokal variabel dan bobot faktor. Artinya bahwa dengan diketahui bobot lokal setiap elemen hirarki akan dapat dihitung bobot global dari masing-masing elemen (*lihat hasil pembobotan faktor, variabel, indikator daya saing investasi daerah*). Pada studi Daya Saing Investasi Daerah tahun 2005 ini, pembobotan setiap elemen (faktor, variabel dan indikator daya saing investasi daerah) dilakukan oleh 130 pelaku usaha di daerah.

**Bobot Global Variabel =  
Bobot Lokal Variabel x Bobot Faktor**

**Contoh 1:**

Bobot Global Variabel Kepastian Hukum = Bobot Lokal Variabel Kepastian Hukum x Bobot Faktor Kelembagaan  
 =  $0.40 \times 0.15$   
 =  $0.059$

**Bobot Global Indikator =  
Bobot Lokal Indikator x Bobot Lokal Variabel x Bobot Faktor**

**Contoh 2:**

Bobot Global Indikator Keamanan Usaha = Bobot Lokal Indikator Konsistensi Peraturan x Bobot Lokal Variabel Kepastian Hukum x Bobot Faktor Kelembagaan  
 =  $0.36 \times 0.40 \times 0.15$   
 =  $0.021$

**B. INTENSITAS INDIKATOR DAYA SAING INVESTASI**

Dalam penelitian ini, ada dua sumber data yang digunakan sebagai indikator daya saing investasi daerah, yakni indikator yang berasal dari data primer yang merupakan persepsi dunia usaha, dan indikator data sekunder yang merupakan data-data kuantitatif statistik daerah. Dalam studi ini, setiap indikator dibuat dalam intensitas dengan skala 1 s/d 9. Intensitas indikator data primer, diperoleh dari rata-rata jawaban responden atas pertanyaan mengenai indikator-indikator pemeringkatan. Untuk intensitas indikator-indikator data sekunder, diperoleh dengan merubah/mengolah setiap data sekunder ke dalam skala 1 s/d 9 juga. Cara untuk mengelompokkan

indikator data sekunder ke dalam intensitas dengan skala 1 s/d 9 adalah sebagai berikut:

**1. Indikator data sekunder dengan distribusi data normal/cenderung normal:**

**• Intensitas Indikator Positif:**

$$\text{Intensitas Indikator Positif} = \left[ 8 \times \left\langle \frac{(\text{Nilai Daerah } X - \text{Nilai Minimal Sampel})}{(\text{Nilai Maks. Sampel} - \text{Nilai Min. Sampel})} \right\rangle + 1 \right]$$

**Contoh 3 :**

**Intensitas Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kab.X**

Dari 228 daerah yang diperingkat, nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 10% dan nilai terendah sebesar 3%, sedangkan Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kab. X sebesar 7%. Maka intensitas Indikator Pertumbuhan Ekonomi untuk Kabupaten X adalah:

$$\text{Intensitas Pertumbuhan Ekonomi } X = \left[ 8 \times \left\langle \frac{(7 - 3)}{(10 - 3)} \right\rangle + 1 \right]$$

**X = 5.6**

**• Intensitas Indikator Negatif:**

$$\text{Intensitas Indikator Positif} = 10 - \left[ 8 \times \left\langle \frac{(\text{Nilai Daerah } X - \text{Nilai Minimal Sampel})}{(\text{Nilai Maks. Sampel} - \text{Nilai Min. Sampel})} \right\rangle + 1 \right]$$

**Contoh 4:**

**Intensitas Indikator Upah Tenaga Kerja Formal**

Dari 228 daerah yang diperingkat, nilai upah tertinggi sebesar Rp.750.000,- dan nilai terendah sebesar Rp.300.000,-, sementara Indikator Upah Tenaga Kerja Formal Kabupaten Y sebesar Rp.450.00,- Maka intensitas Indikator Upah Tenaga Kerja Formal dari Kabupaten Y adalah:

$$\text{Intensitas Upah Tenaga Kerja Formal} = 10 - \left[ 8 \times \left\langle \frac{(450.000 - 300.000)}{(750.000 - 300.000)} \right\rangle + 1 \right]$$

**Y = 6.3**

**2. Indikator data sekunder dengan distribusi data tidak normal:**

(*Indikator PDRB Perkapita; Indikator Ketersediaan Tenaga Kerja Pencari Kerja; Indikator Produktivitas Tenaga Kerja; Indikator Pendidikan Tenaga Kerja*)

Pengelompokan indikator ke dalam intensitas dengan skala 1 s/d 9 dengan cara: Mengurutkan data indikator seluruh sampel (228 daerah) dari nilai terbesar hingga terkecil, kemudian membagi menjadi 9 kelompok dengan jumlah anggota himpunan setiap kelompok sama banyak. Karena jumlah

sampel daerah sebanyak 228, maka setiap kelompok berjumlah 25 s/d 26 daerah, atau masing-masing 11% dari jumlah sampel. Karena semua indikator yang memiliki distribusi data tidak normal adalah indikator positif, maka intensitas 9 adalah daerah yang berada dalam kelompok 11% nilai tertinggi, kemudian 11% daerah di bawahnya adalah untuk intensitas 8, dan seterusnya hingga 11% terbawah adalah untuk intensitas 1.

#### D. SKOR INDIKATOR, VARIABEL, FAKTOR, DAN SKOR TOTAL

Setelah diperoleh intensitas setiap indikator dengan skala 1 s/d 9, langkah selanjutnya adalah menghitung skor setiap indikator. Pada penjelasan bobot indikator, variabel dan bobot faktor, dijelaskan bahwa ada dua jenis bobot, yakni bobot lokal dan bobot global. Untuk menghitung skor indikator, variabel, faktor dan skor total juga dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yakni dengan bobot global atau dengan bobot lokal.

##### 1) Perhitungan Skor dengan Pendekatan Bobot Global

###### a. Skor Indikator:

Penghitungan skor dengan pendekatan bobot global pertama-tama dilakukan dengan menghitung skor indikator dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Intensitas Indikator} \times \text{Bobot Global Indikator}$$

atau

$$\text{Intensitas Indikator} \times (\text{Bobot Lokal Indikator} \times \text{Bobot Lokal Variabel} \times \text{Bobot Faktor})$$

###### Contoh 5:

###### Skor Indikator Keamanan Kegiatan Usaha

- Indikator Keamanan Kegiatan Usaha merupakan bagian dari Variabel Keamanan dan Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya.
- Bobot Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya = 0.27 (bobot faktor ini terhadap daya saing investasi)
- Bobot Lokal Variabel Keamanan = 0.61 (bobot indikator ini terhadap Faktor Keamanan)
- Bobot Lokal Indikator Keamanan Kegiatan Usaha = 0.49 (bobot indikator ini terhadap Variabel Keamanan)
- Jika diketahui rata-rata jawaban responden di Kabupaten Q untuk Indikator Keamanan Usaha adalah sebesar 4.5 (intensitas

Indikator Keamanan Usaha), maka skor Indikator Keamanan Usaha untuk Kabupaten Q adalah:

###### Skor Indikator Keamanan Usaha Kab. Q:

$$\begin{aligned} &= 4.5 \times (0.49 \times 0.61 \times 0.27) \\ &= 4.5 \times 0.08 \\ &= 0.36 \end{aligned}$$

###### Contoh 6:

###### Skor Indikator Pertumbuhan Ekonomi

- Bobot Global Indikator Pertumbuhan Ekonomi = 0.06 (bobot indikator ini terhadap daya saing investasi daerah)
- Jika diketahui intensitas Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten X adalah 5.6 (seperti pada contoh 3 di atas), maka skor Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten X adalah:

###### Skor Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kab. X

$$\begin{aligned} &= 5.6 \times 0.006 \\ &= 0.34 \end{aligned}$$

##### b. Skor Variabel, Skor Faktor, Skor Total:

Skor Variabel diperoleh dari penjumlahan skor seluruh indikator yang tergabung dalam variabel yang bersangkutan. Skor Faktor diperoleh dari penjumlahan skor variabel yang tergabung dalam faktor yang bersangkutan. Dan Skor Total adalah hasil penjumlahan seluruh skor lima faktor, atau jumlah dari seluruh indikator daya saing investasi (47 indikator). Skor Total memiliki skala 1 sampai dengan 9. Dengan metode ini, skala skor masing-masing Indikator, Variabel, atau Faktor berbeda-beda tergantung dari besar bobot globalnya. Artinya adalah skala Indikator Keamanan Kegiatan Usaha berbeda dengan skala skor Indikator Pertumbuhan Ekonomi, dan skala skor Variabel Keamanan berbeda dengan skala skor Variabel Potensi Ekonomi, serta skala skor Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya juga berbeda dengan skala skor Faktor Ekonomi Daerah dan seterusnya. Dengan demikian besarnya skor setiap indikator, variabel, dan faktor mencerminkan besar pengaruhnya terhadap daya saing secara keseluruhan (skor total).

## 2) Penghitungan Skor dengan Pendekatan Bobot Lokal:

Penghitungan skor dalam studi ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Bobot Lokal. Dengan pendekatan bobot lokal, akan diperoleh Skor Variabel, Faktor, dan Skor Total masing-masing dengan skala 1 sampai dengan 9. Dengan pendekatan ini, besarnya skor Indikator, Variabel, dan skor Faktor tidak mencerminkan bobot pengaruhnya terhadap daya saing investasi secara keseluruhan, karena masing-masing mempunyai skala 1 sampai dengan 9. Penghitungan skor dengan pendekatan bobot lokal adalah sebagai berikut:

### a. Skor Indikator:

$$I_i = X_i \times B_{Li} \dots\dots\dots(1)$$

dimana:

- $I_i$  : Skor Indikator  $i$  ;
- $X_i$  : Intensitas Indikator  $i$  ; dan
- $B_{Li}$  : Bobot Lokal Indikator  $i$ .

Skor yang diperoleh dengan rumus (1) tersebut di atas, merupakan skor lokal indikator dalam suatu variabel.

### Contoh 7:

#### Skor Indikator Keamanan Usaha Kabupaten Q

(seperti contoh 5)

- > Intensitas Indikator Keamanan Usaha = 4.5
- > Bobot Lokal Indikator Keamanan Usaha terhadap Variabel Keamanan = 0.49

#### Skor Indikator Keamanan Usaha Kabupaten Q

$$= 4.5 \times 0.49$$

$$= 2.21$$

### b. Skor Variabel:

Skor Variabel merupakan hasil penjumlahan seluruh skor indikator dalam variabel yang bersangkutan.

Atau:

$$V = \sum_{i=1}^n (X_i \times B_{Li}) \dots\dots\dots(2)$$

dimana

- $V$  : Skor Variabel;
- $X_i$  : Intensitas Indikator  $i$  ; dan
- $B_{Li}$  : Bobot Lokal Indikator  $i$ .

Dengan perhitungan berdasarkan rumus ini akan diperoleh skor variabel dengan skala 1 sampai dengan 9. Skor Variabel ini selanjutnya kita sebut dengan skor Lokal.

### Contoh 8:

#### Skor Variabel Keamanan Kabupaten Q

Variabel Keamanan terdiri dari 3 Indikator yakni:

- (1) Indikator Keamanan Kegiatan Usaha;
- (2) Keamanan Lingkungan Masyarakat; dan
- (3) Dampak Kegiatan Usaha.

Jika dari hasil perhitungan skor masing-masing indikator telah diketahui, masing-masing besarnya adalah sebagai berikut:

Indikator Keamanan Kegiatan Usaha			Indikator Keamanan Lingkungan Masyarakat		
$I_1$	$B_{L1}$	$I_1 = X_1 \times B_{L1}$	$I_2$	$B_{L2}$	$I_2 = X_2 \times B_{L2}$
6,03	0,49	<b>2,94</b>	6,28	0,35	<b>2,22</b>

Indikator Dampak Kegiatan Unjuk Rasa			Variabel Keamanan
$I_3$	$B_{L3}$	$I_3 = X_3 \times B_{L3}$	$V = \sum_{i=1}^n (X_i \times B_{Li})$
5,18	0,16	<b>0,82</b>	<b>5,98</b>

Dengan metode ini skor Variabel mempunyai skala 1 sampai dengan 9.

### c. Skor Faktor:

Untuk mendapatkan skor faktor dengan skala 1 sampai dengan 9, terlebih dahulu skor setiap variabel yang ada dalam faktor yang bersangkutan harus dikalikan dengan bobot lokal masing-masing variabel (bobot Variabel terhadap Faktor) dengan rumus sebagai berikut:

$$V = \left[ \sum_{i=1}^n (X_i \times B_{Li}) \right] \times B_{V_i} \dots\dots\dots(3)$$

### Contoh 9:

#### Skor Variabel Keamanan untuk Kabupaten Q.

Seperti pada contoh 8 di atas adalah 5.98. Bobot lokal Variabel Keamanan terhadap Faktor Keamanan adalah 0.61,

Dengan menggunakan rumus (3)

$$= 5.98 \times 0.61$$

$$= 3.66$$

Masing-masing skor variabel dikalikan dengan bobotnya masing-masing dengan rumus (3). Skor suatu faktor merupakan hasil penjumlahan dari



seluruh variabel dengan dalam faktor yang bersangkutan yang terlebih dahulu dihitung ulang dengan rumus (3) di atas. Atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \sum_{i=1}^n V_i \dots\dots\dots(4)$$

**Contoh 11:**

**Skor Faktor Keamanan Politik dan Sosial-Budaya untuk Kabupaten Q**

Faktor Keamanan Politik dan Sosial-Budaya terdiri dari 3 Variabel, yakni Variabel Keamanan, Variabel Politik, dan Variabel Sosial-Budaya.

- > Variabel Keamanan : 5,98
- > Variabel Politik : 4,97
- > Variabel Sosial-Budaya : 6,00

dengan rumus (4) maka diperoleh skor Faktor Keamanan Politik dan Sosial-Budaya untuk Kabupaten Q sebesar :

$$\begin{aligned}
 F &= (5.98 \times 0.61) + (4.97 \times 0.18) + (6.00 \times 0.21) \\
 &= 3.66 + 0.89 + 1.27 \\
 &= 5.82
 \end{aligned}$$

**d. Skor Total:**

Rumus (3) dan (4) digunakan juga untuk menghitung Skor Total Daya Saing Investasi Daerah (Indeks Daya Saing Investasi Daerah). Hanya saja skor Variabel diganti dengan skor Faktor. Artinya, skor total adalah hasil penjumlahan skor 5 (lima) Faktor (rumus 4) yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing faktor. Skor yang diperoleh dengan cara ini juga memiliki skala 1 sampai dengan 9. Perhitungan Skor dengan Pendekatan Bobot Lokal maupun dengan Pendekatan Global akan menghasilkan skor Total yang sama. Hasil yang berbeda hanya pada skor Indikator, Skor Variabel dan Skor Faktor, sementara Skor Total tetap memiliki hasil yang sama.

**E. KATEGORI/KLASIFIKASI PERINGKAT**

Seperti pemeringkatan tahun 2004, peringkat daya saing investasi dikategorikan dalam 5 kelompok yakni A, B, C, D dan E. Kategori A adalah peringkat teratas (sangat tinggi), berturut-turut B, C, D, dan terakhir adalah kategori E yang merupakan peringkat

terendah (terburuk). Pengelompokan dilakukan secara sederhana, yakni dengan membagi seluruh daerah menjadi 5 kelompok, atau masing-masing 20% dari jumlah daerah yang diperingkat atau kurang lebih 45 daerah.

No. Urut Daerah	Nilai Total	Peringkat
1	7,16	A
2	7,09	A
44	6,54	A
<b>45</b>	<b>6,53</b>	<b>A</b>
46	6,52	B
47	6,50	B
<b>91</b>	<b>6,18</b>	<b>B</b>
<b>92</b>	<b>6,18</b>	<b>B</b>
<b>93</b>	<b>6,18</b>	<b>B</b>
94	6,17	C
95	6,17	C
138	5,94	C
<b>139</b>	<b>5,93</b>	<b>C</b>
140	5,92	D
141	5,92	D
184	5,66	D
<b>185</b>	<b>5,63</b>	<b>D</b>
186	5,61	E
187	5,60	E
227	4,81	E
228	4,05	E

Daerah yang masuk kategori B, seharusnya adalah daerah yang berada pada urutan 46 s/d 91, yakni dengan skor 6.52 s/d 6.18. Akan tetapi, batas kelas bawah kategori B terdapat 3 daerah yang memiliki skor yang sama yakni 6.18., yaitu daerah yang berada pada urutan 91 s/d 93. Untuk kasus seperti ini, maka 2 daerah lainnya yang berada pada urutan 92 dan 93 dimasukkan dalam kategori yang B. Untuk kelompok peringkat berikutnya (C) kembali diperoleh dengan menambahkan 20% (45) daerah, yaitu dari urutan 94 s/d 139. Demikian pula dengan kategori D pada urutan 140 s/d 185 dan terakhir sisa daerah sebanyak 42 daerah (186 s/d 228) yang berada pada peringkat terendah masuk dalam kategori E.

Untuk mendapatkan 5 kelompok ini, pertama-tama adalah dengan mengurutkan skor per faktor dan skor Total seluruh daerah yang diperingkat (228 kabupaten dan kota) dari yang tertinggi hingga terendah. Selanjutnya secara proporsional dibagi menjadi 5 kelompok, atau masing-masing 20% untuk setiap kategori. 20% daerah yang berada pada peringkat tertinggi adalah masuk dalam kategori A, 20% selanjutnya masuk kategori B, dan seterusnya hingga 20% daerah yang mendapat skor terendah masuk kategori E. Dengan asumsi, setiap daerah memiliki skor yang berbeda (tidak ada daerah yang memiliki skor sama), maka daerah yang masuk kategori A adalah daerah yang skornya berada pada urutan 1 s/d 45; B (46 s/d 91); C (92 s/d 137);

D (138 s/d 183) dan E (184 s/d 228). Namun dalam kenyataan, dari hasil penelitian dijumpai ada beberapa daerah yang memiliki skor yang sama, untuk itu pembagian kelompok tidak secara tepat 20% dari total daerah yang diperingkat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada contoh di atas.

Pengelompokan atau pengkategorian peringkat dengan cara ini tidak secara langsung menggambarkan kinerja dari tiap daerah, karena sangat pengelompokannya yang sangat tergantung kepada distribusi keseluruhan data yang dihasilkan. Kategori peringkat hanya dapat digunakan untuk

melihat perbandingan relatif antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam satu waktu (tahun) yang sama. Apabila distribusi data berubah dari tahun ke tahun, maka kategori peringkat yang diperoleh daerah pada satu tahun tertentu tidak dapat dibandingkan dengan hasil yang diperoleh pada tahun yang lain. Pada studi pemeringkatan ini, kinerja daerah hanya dapat dari skor yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Semakin tinggi skor suatu daerah (semakin mendekati nilai 9), maka kinerja daya saing investasi daerah tersebut semakin baik.